



PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR
TAHUN 2023**



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2022**



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590)
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 31);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kota Denpasar adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Semesta Berencana 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Bali adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Bali untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar, RKP dan RKPD Provinsi Bali.

- (2) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

RKPD dipergunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. Pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2023; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2023.

BAB III

SISTIMATIKA PENULISAN

Pasal 4

RKPD disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juni 2022



WALIKOTA DENPASAR,
[Signature]
M. GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juni 2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

[Signature]
IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 22

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2023.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas penyusunan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, serta akan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Harapan kami, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk segera dapat diatasi.

Kami menyadari bahwa RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR TABEL.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-9
1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-28
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-41
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-49
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-68
2.2.1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Denpasar Tahun 2021	II-71
2.2.2. Keselarasan Program dan Kegiatan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021.....	II-104
2.2.3. Analisis Prestasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan APBD Tahun 2021.....	II-111
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-241
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	II-241
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-243
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan 2021	III-1

3.1.2.	Prospek Ekonomi Tahun 2022 dan 2023	III-9
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-12
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-19
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-21
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	IV-3
4.2.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-3
4.2.2.	Paradigma Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....	IV-5
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023	IV-8
4.2.4.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023	IV-9
4.3.	Sasaran Pembangunan Daerah	IV-12
4.4.	Kebijakan Pembiayaan Alternatif Daerah	IV-24
4.5.	Kebijakan Daerah dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	IV-25
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1.	Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023	V-1
5.2.	Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2023	V-13
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
6.2.	Indikator Kinerja Daerah	VI-2
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD	I-4
Gambar 1.2 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-10
Gambar 2.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar	II-4
Gambar 2.2 Peta Risiko Bencana Banjir Kota Denpasar	II-14
Gambar 2.3 Peta Risiko Kawasan Rawan Gempa Kota Denpasar	II-15
Gambar 2.3 Peta Risiko Bencana Tsunami Kota Denpasar	II-17
Gambar 2.4 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Denpasar...	II-18
Gambar 2.7 Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2010 – 2021 (jiwa/km ²) .	II-21
Gambar 2.8 Peta Sebaran Jumlah Penduduk Kota Denpasar per Desa/Kelurahan Tahun 2021 (jiwa/km ²)	II-22
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-23
Gambar 2.10 Piramida Penduduk Kota Denpasar Tahun 2022.....	II-24
Gambar 2.11 Persentase Penduduk Usian Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan, 2021.....	II-26
Gambar 2.12 Pekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha di Kota Denpasar Tahun 2018- 2021	II-27
Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-29
Gambar 2.14 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga konstan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-30
Gambar 2.15 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-30
Gambar 2.16 Perkembangan Tingkat Inflasi di month-to-month Kota Denpasar	II-31
Gambar 2.17 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kota Denpasar Tahun 2021 ..	II-32
Gambar 2.18 <i>Gini Ratio</i> Kota Denpasar Tahun 2016-2021	II-33
Gambar 2.19 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.....	II-34
Gambar 2.20 Perkembangan IPM Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional	II-35
Gambar 2.21 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Denpasar tahun 2016-2021.	II-36
Gambar 2.22 Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota se Provinsi Bali Tahun 2021	II-36
Gambar 2.23 Angka Partisipasi Sekolah Kota Denpasar menurut Kelompok Umur Tahun 2016 – 2021.....	II-37
Gambar 2.24 Indeks Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2026	II-38

Gambar 2.25	Angka Harapan Hidup Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-38
Gambar 2.26	Perkembangan TPT dan TPAK Kota Denpasar Tahun 2017 – 2021 ...	II-39
Gambar 2.27	Persebaran SMP Negeri di Kota Denpasar	II-45
Gambar 2.28	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016 – 2021	II-50
Gambar 2.29	Perbandingan Persentase Pengeluaran Pangan Per Kapita dengan Pengeluaran Non Pangan Per Kapita Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-53
Gambar 2.30	Perkembangan Persentase Desa Berstatus Swasembada di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-54
Gambar 2.31	Perkembangan Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB Kota Denpasar, PDRB Provinsi Bali dan PDB Tahun 2016–2021.....	II-56
Gambar 2.32	Perkembangan Angka Kriminalitas Kota Denpasar Tahun 2016–2020	II-57
Gambar 2.33	Kontribusi Persentase Angka Kriminalitas Kota Denpasar terhadap Angka Kriminalitas Total Provinsi Bali Tahun 2016-2021.....	II-58
Gambar 2.34	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015-2021.....	II-67
Gambar 2.35	Depedency Ratio Kota Denpasar Tahun 2010 - 2021	II-68
Gambar 2.36	Grafik Capaian Kinerja	II-71
Gambar 2.37	Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2021 dengan Program RPJMD	II-106
Gambar 2.38	Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2021 dengan Program APBD Tahun 2021	II-107
Gambar 2.39	Katagori Realisasi Keuangan atas program APBD 2021	II-111
Gambar 2.40	Katagori Realisasi Capaian program APBD 2021	II-113
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2014 – 2021.....	III-2
Gambar 3.2	Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2016-2021.....	III-5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan.....	II-2
Tabel 2.2	Letak Geografis Kota Denpasar Per Kecamatan	II-5
Tabel 2.3	Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian Dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya.....	II-5
Tabel 2.4	Potensi Sumber Daya Air di Kota Denpasar	II-8
Tabel 2.5	Perbandingan Jumlah Curah Hujan dengan Angka Normal setiap bulan di Kota Denpasar selama tahun 2019.....	II-9
Tabel 2.6	Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Penggunaan Tanah (hektar)	II-9
Tabel 2.7	Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 (jiwa/km ²).	II-21
Tabel 2.8	Penduduk Kota Denpasar per Kecamatan Tahun 2016 – 2021	II-23
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin	II-24
Tabel 2.10	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2017 – 2021.....	II-25
Tabel 2.11	Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.....	II-34
Tabel 2.12	Jumlah Lembaga Adat Kota Denpasar Tahun 2021	II-40
Tabel 2.13	Jumlah Sanggar Seni per Kecamatan Tahun 2016 – 2021	II-40
Tabel 2.14	Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak – Kanak di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-42
Tabel 2.15	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-kanak Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2021	II-42
Tabel 2.16	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-43
Tabel 2.17	Persentase Jumlah Siswa Sekolah Dasar Terhadap Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.....	II-43
Tabel 2.18	Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru SD Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.....	II-44
Tabel 2.19	Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru SMP di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-45
Tabel 2.20	Rasio Siswa-Guru Tingkat SD and SMP di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-46
Tabel 2.21	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Tenaga Paramedisdi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-47

Tabel 2.22 Jumlah Tempat Tidur, Kapasitas, dan BOR Rumah Sakit di Kota Denpasar	II-47
Tabel 2.23 Distribusi Puskesmas Berdasarkan Desa yang diwilayahi.....	II-48
Tabel 2.24 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Denpasar	II-49
Tabel 2.25 Presentase Pengeluaran Konsumsi Non – Pangan per Kapita Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-52
Tabel 2.26 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2019	II-54
Tabel 2.27 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-55
Tabel 2.28 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-57
Tabel 2.29 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-59
Tabel 2.30 Panjang dan Kondisi Jalan Kota Denpasar Tahun 2021.....	II-60
Tabel 2.31 Perkembangan Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021.....	II-60
Tabel 2.32 Jumlah Angkutan Umum dan Penumpang Yang Masuk dan Keluar Terminal Ubung Tahun 2016 – 2021	II-61
Tabel 2.33 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 ..	II-62
Tabel 2.34 Jumlah barang keluar masuk terminal barang Tahun 2016 – 2021	II-62
Tabel 2.35 Luas Wilayah Produktif Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-63
Tabel 2.36 Luas Lahan Sawah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 Menurut Kecamatan	II-63
Tabel 2.37 Jumlah Hotel Bintang, Hotel Non Bintang dan Pondok Wisata di Kota Denpasar Tahun 2021 menurut Kecamatan.....	II-64
Tabel 2.38 Jumlah Usaha Jasa Makanan dan Minuman di Kota Denpasar Tahun 2021	II-64
Tabel 2.39 Jumlah Langganan, Produksi, Penggunaan Air Minum pada PDAM Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-65
Tabel 2.40 Jumlah Pengguna Air Minum (m3) pada PDAM Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021	II-65
Tabel 2.41 Laporan Pelayanan Perijinan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.....	II-66
Tabel 2.42 Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Denpasar	II-66
Tabel 2.43 Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2021	II-68

Tabel 2.44	Katagori Capaian Kinerja Indikator Sasaran.....	II-70
Tabel 2.45	Indikator dan target SPM Kota Denpasar	II-73
Tabel 2.46	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kota Denpasar tahun 2021 adalah sebagai berikut	II-75
Tabel 2.47	Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar	II-83
Tabel 2.48	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar tahun 2021.....	II-84
Tabel 2.49	Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	II-88
Tabel 2.50	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tahun 2021	II-89
Tabel 2.51	Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota.....	II-93
Tabel 2.52	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Denpasar tahun 2021	II-94
Tabel 2.53	Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	II-96
Tabel 2.54	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar tahun 2021	II-98
Tabel 2.55	Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.....	II-101
Tabel 2.56	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Sosial Kota Denpasar tahun 2021.....	II-102
Tabel 2.57	Rekap Capaian Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV	II-108
Tabel 2.58	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	II-111
Tabel 2.59	Program dengan capaian realisasi Sangat Rendah	II-112
Tabel 2.60	Kendala, Catatan dan Solusi Pelaksanaan APBD 2021 oleh Perangkat Daerah.....	II-114
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010	III-2
Tabel 3.2	Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021.....	III-6
Tabel 3.3	Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021 ...	III-7

Tabel 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021	III-8
Tabel 3.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021	III-8
Tabel 3.6	Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021.....	III-9
Tabel 3.7	Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2023	III-11
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2019 – 2023	III-17
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2023	III-21
Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2019 – 2023	III-23
Tabel 4.1	Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .	IV-2
Tabel 4.2	Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023.....	IV-9
Tabel 4.3	Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2023.....	IV-10
Tabel 4.4	Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023.....	IV-11
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target Capaian Tahun 2023	IV-12
Tabel 4.6	Program Prioritas Kota Denpasar Tahun 2023	IV-14
Tabel 5.1	Rekapitulasi Program Usulan Tahun 2023	V-1
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023	V-14
Tabel 6.1	Target Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar Tahun 2023	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar Tahun 2023	VI-3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Prinsip- prinsip Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi :

1. merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pemerintah Kota Denpasar telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 sudah mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan RKPD melalui 6 (enam) tahapan penyusunan yaitu:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahapan Persiapan penyusunan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD.
- b. Orientasi mengenai RKPD.
- c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RKPD.
- d. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

3. Penyusunan Rancangan RKPD;

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan

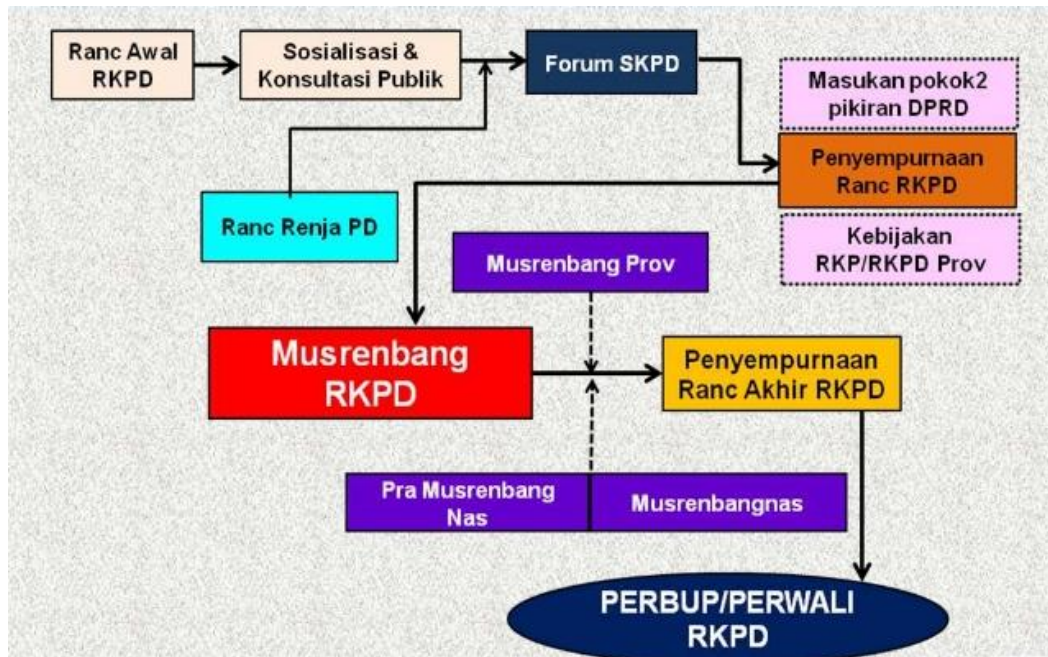
6. Penetapan RKPD.

Sesuai amanat Pasal 12 ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017, RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD berpedoman pada RPJMD dengan maksud untuk menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan penjabaran periode kedua

pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan atau proses perumusan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 31);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12).

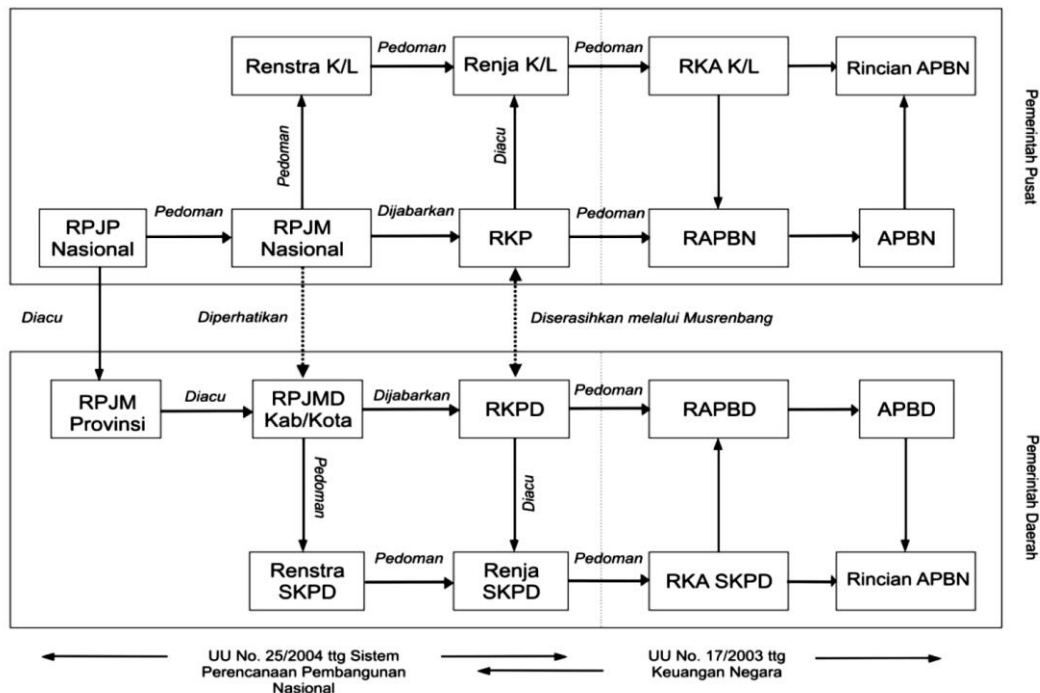
26. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima (5) tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ketahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu (1) tahun dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait.

Sinkronisasi Kebijakan dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar daerah. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dilakukan oleh daerah kabupaten/kota dengan menelaah kebijakan daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah kabupaten/kota. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Penelaahan mengandung makna mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan daerah dan mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan Daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Adapun hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.2
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Akhir Renja PD;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

3. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.3. Sasaran Pembangunan Daerah

4.4. Kebijakan Daerah Dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

6. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun Perencanaan.

7. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar merupakan proses yang melibatkan para pemangku kepentingan dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat maupun akademisi. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan di Kota Denpasar secara proposional. Dengan demikian maka diharapkan pembangunan yang dilakukan di Kota Denpasar benar-benar memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien, efektif serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.

Tujuan Pembangunan di Kota Denpasar adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Denpasar secara adil dan merata. Untuk mewujudkan hal ini maka pembangunan direncanakan dengan memperhatikan segala aspek pendukung antara lain : aspek geografis dan potensi demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah melalui Gambaran Umum Kota Denpasar.

Pembangunan juga tidak terlepas dari kebijakan yang dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dimana telah tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ditentukan oleh kinerja seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Pusat, swasta, Lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi serta partisipasi aktif masyarakat Kota Denpasar.

Di samping itu, pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai tahun berjalan dan realisasi Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026. Identifikasi permasalahan Pembangunan Daerah baik yang menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah serta permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 12.598,10 Ha atau sebesar 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi, Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, berdasarkan luas wilayah Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 4.989,00 Ha (39,60%), Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 2.669,31 Ha (21,19%), Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 2.593,38 Ha (20,59%) dan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 2.346,39 Ha (18,62%). Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

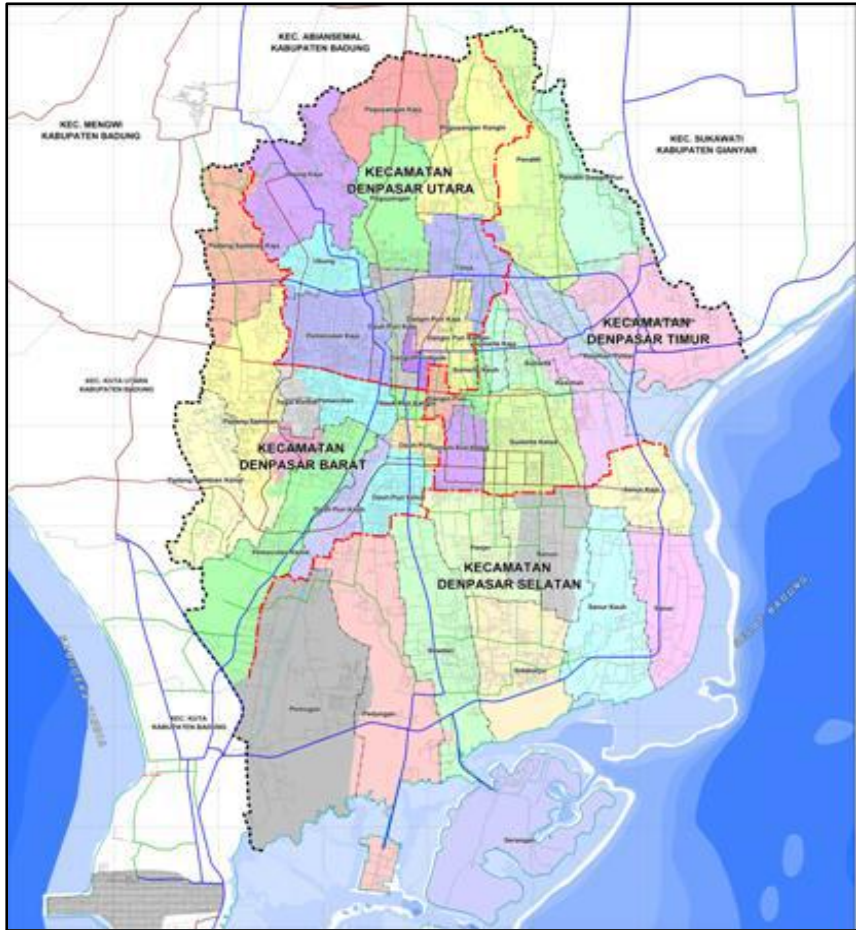
Tabel 2.1

Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kangin	36,55
		Desa Dauh Puri Kauh	151,26
		Desa Dauh Puri Kelod	158,76
		Desa Padang Sambian Kaja	319,87
		Desa Padang Sambian Kelod	399,72
		Desa Pemecutan Kelod	525,86
		Desa Tegal Harum	72
		Desa Tegal Kertha	79,67
		Kelurahan Dauh Puri	76,36
		Kelurahan Padang Sambian	367,34
		Kelurahan Pemecutan	159
2	Kecamatan Denpasar Selatan	Desa Pemogan	1.010,87
		Desa Sanur Kaja	256,02
		Desa Sanur Kauh	457,2
		Desa Sidakarya	454,71
		Kelurahan Panjer	312,96
		Kelurahan Pedungan	775,65
		Kelurahan Renon	289,12
		Kelurahan Sanur	328,33
		Kelurahan Serangan	585,2

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
		Kelurahan Sesetan	518,94
3	Kecamatan Denpasar Timur	Desa Dangin Puri Kelod	123,43
		Desa Kesiman Kertalangu	540,51
		Desa Kesiman Petilan	308,69
		Desa Penatih Dangin Puri	332,44
		Desa Sumerta Kaja	90,07
		Desa Sumerta Kauh	49,56
		Desa Sumerta Kelod	350,57
		Kelurahan Dangin Puri	51,97
		Kelurahan Kesiman	287,71
		Kelurahan Penatih	382,83
		Kelurahan Sumerta	75,6
4	Kecamatan Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja	98,82
		Desa Dangin Puri Kangin	110,62
		Desa Dangin Puri Kauh	34,85
		Desa Dauh Puri Kaja	119,78
		Desa Peguyangan Kaja	326,43
		Desa Peguyangan Kangin	484,44
		Desa Pemecutan Kaja	321,23
		Desa Ubung Kaja	439,67
		Kelurahan Peguyangan	337,64
		Kelurahan Tonja	235,19
		Kelurahan Ubung	160,64
Total Luas Wilayah			12.598,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



Gambar 2.1
Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar

Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung sebelah utara, barat dan selatan sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar antara lain:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung)
2. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa
4. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Denpasar terletak di tengah-tengah dari Pulau Bali, merupakan Ibukota Provinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian. Letak yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan, baik dari segi ekonomis maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. Menurut letak Geografis Kota Denpasar berada di antara 08°35' 31" – 08° 44' 49" Lintang Selatan dan 115° 10' 23" – 115° 6' 27" Bujur Timur seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Letak Geografis Kota Denpasar Per Kecamatan

No	Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Denpasar Selatan	08040'00"-08044'49"	115011'23"-115015'54"
2	Denpasar Timur	08035'31"-08040'36"	115012'29"-115016'27"
3	Denpasar Barat	08036'24"-08041'59"	115010'23"-115014'14"
4	Denpasar Utara	08035'31"-08044'49"	115012'09"-115014'39"

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

3. Kondisi Topografi

Ditinjau dari Topografi keadaan wilayah Kota Denpasar 59,1 % berada pada ketinggian antara 0 – 25m dpl, dan sisanya sampai 75m dpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng secara umum berkisar 0 – 2 % ke arah selatan, sebagian lagi kemiringan lerengnya antara 2 – 8 %. Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2 – 15 %.

Tabel 2.3
Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian Dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Klasifikasi Ketinggian dari Permukaan Laut (m)	Persentase Luas terhadap Kota Denpasar (%)
Denpasar Selatan	49,989	00-12	39,58
Denpasar Timur	2,593	00-75	20,61
Denpasar Barat	2.346	00-75	18,63
Denpasar Utara	2.669	00-75	21,18
Jumlah	12.598		100

Sumber : Hasil Analisis, 2021 Materi Teknis RTRW

4. Kondisi Geologi

Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kuartar, kuartar bawah, tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali skala 1 : 25.000 (Direktorat Geologi, 1971) wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan. Susunan formasi batumannya adalah sebagai berikut : Batuan vulkanik kuartar menutupi sekitar 70% wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan – Bratan dan gunung api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan vulkanik Buyan – Bratan merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu vulkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian utara agak tebal (>200 m) dan menipis ke arah selatan.

Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahan, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar. Jenis tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 : 250.000 (Yunus Dai, 1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di wilayah Kota Denpasar.

5. Kondisi Hidrologi

Kenampakan hidrologi di wilayah Kota Denpasar berupa sungai, waduk dan laut. Salah satu Kondisi Hidrologi adalah Pemanfaatan Air. Berdasarkan kondisi hidrologi, terdapat beberapa sumber daya air yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Kota Denpasar yaitu : Air Hujan, Air Permukaan, Air Tanah maupun air laut.

Air Hujan bisa dimanfaatkan karena Kota Denpasar beriklim tropis dengan dua musim (hujan dan kemarau). Menurut Schmidt dan Fergusson (1959) Kota

Denpasar termasuk iklim Tipe A. Sedangkan menurut Peta Agroklimat Bali skala 1 : 250.000 (Oldeman, Irsal dan Muladi, 1980) daerah ini termasuk ke dalam Zone Agroklimat D3. Jumlah curah hujan tahun 2005 : 1819mm dengan bulan basah (curah hujan > 100 mm/bulan) selama 7 bulan (Januari – April, Oktober-Desember) dan sisanya bulan kering.

Air tanah di Kota Denpasar mengikuti pola Bali Selatan secara umum, yaitu terdiri dari dua kelompok yaitu akifer dangkal yang mengandung air tanah bebas dan akifer dalam yang mengandung air tanah tertekan atau semi tertekan. Akifer dangkal ditemukan pada kedalaman 30 – 50m dengan formasi kemiringan ke arah selatan. Sedangkan Akifer tertekan atau air tanah dalam ditemukan pada kedalaman 50-150m. Kandungan air tanah di Kota Denpasar yang terpengaruh oleh air laut/air payau (wilayah Sanur, Sidakarya dan Suwung Kangin) serta daerah dengan kandungan air besar 10 lt/det yang terdapat hampir pada seluruh wilayah Kota Denpasar. Kondisi kualitas air tanah berdasarkan pengujian terhadap beberapa sumur dangkal dan sumur dalam di Kota Denpasar menunjukkan bahwa secara umum air tanah masih memiliki kualitas golongan A.

Air Laut yang berada di darat atau pantai merupakan zona peralihan wilayah daratan dan lautan. Zona pantai atau pesisir ini mempunyai arti penting sebagai lokasi media dan atau obyek berbagai aktivitas kehidupan seperti usaha perikanan, pertanian, perhubungan maupun pariwisata. Kota Denpasar memiliki garis pantai di bagian Selatan dan Timur mulai dari Serangan hingga Padanggalak sepanjang 66,86 km dengan luas sekitar 169 ha.

Pemanfaatan air permukaan, dimana air yang mengalir dari sumbernya tidak terbuang begitu saja ke laut, yaitu : 1) aliran Sungai Tukad Ayung, 2) Tukad Badung, 3) Tukad Teba, 4) Tukad Mati, 5) Tukad Abian Base, 6) Tukad Loloan (DI.Oongan), 7) Tukad Ngenjung 8) Penggawa (DI.Oongan), 9) Tukad Rangda/Buaji (DI.Oongan), 10) Tukad Pekaseh dan sumber aliran lainnya. Berikut ini potensi sumber daya air di Kota Denpasar.

Tabel 2.4
Potensi Sumber Daya Air di Kota Denpasar

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Nama Bendungan/Dam	Total Bendungan/Dam (km)	Luas yang Dialiri (ha)
1.	Tukad Ayung	6,50	1 Kedewatan	1	740
			2 Mambal	1	645
			3 Peraupan	1	10
			4 Oongan	1	536
2.	Tukad Badung	17,15	5 Mertagangga	1	5
			6 Batan Nyuh	1	215
			7 Mergaya	1	100
			8 Gerak Tk. Badung	1	21
			9 Penyaring Sampah	1	0
			10 Waduk Muara	1	0
3.	Tukad Teba	8,75	11 Semila II	1	15
			12 Tegallinjung	1	0
4.	Tukad Mati	5,65	13 Free I. Tegallinjung	1	0
			14 Srogsogan	1	0
			15 Lange	1	25
			16 Dadas	1	15
			17 Umeduwi	1	25
5.	Tukad Abian Base	4,15	-	-	-
6.	Tukad Loloan (DI. Oongan)	3,75	18 Emp. Bantang	1	15
			19 Emp. Bantang	1	8
			20 Emp. Pengabeian	1	21
			21 Emp. Agel	1	36
			22 Emp. Pengayasan	1	23
			23 Penyaring Sampah	1	-
7.	Tukad Ngenjung	2,15	-	-	-
8.	Tukad Penggawa (DI. Oongan)	6,55	25 Emp. Sidakarya	1	97
9.	Tukad Rangda/Buaji (DI. Oongan)	4,25		-	-
10.	Tukad Pekaseh (DI. Oongan)	5,50	26 Emp. S. Sesetan	1	10
			28 Emp. S. Sesetan	1	15
Jumlah				25	2.557

Sumber: Proyek Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Bali

6. Kondisi Klimatologi

Wilayah Kota Denpasar secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi angin musim, yaitu musim kemarau dengan angin timur antara bulan Juni sampai September, dan musim hujan dengan angin barat antara bulan September sampai Maret dan diselingi musim pancaroba, dengan jumlah hari hujan sebanyak 79 hari dengan jumlah penyinaran matahari sebesar 60%. Suhu rata-rata Kota Denpasar tahun 2019 berkisar antara 23,4°C - 35,5°C. Amplitudo suhu selama tahun 2019 relatif rendah dibanding tahun sebelumnya, dimana suhu

rata-rata Kota Denpasar pada tahun 2015 berkisar antara 22,8°C - 32,8°C. Kelembaban udara pada tahun 2019 berada pada kisaran 78,8%. Kondisi tersebut tidak berubah dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Berikut merupakan data perbandingan jumlah curah hujan dengan angka normal serta perbandingan tekanan dan kelembaban udara rata-rata pada tahun 2019.

Tabel 2.5

Perbandingan Jumlah Curah Hujan dengan Angka Normal setiap bulan di Kota Denpasar selama tahun 2019

Kota Denpasar	Curah Hujan			
	Realisasi	Rata-rata	Perbedaan	Persentase (%)
Januari	113,9	405,1	291,2	28,1
Pebruari	548,3	292,8	255,5	187,3
Maret	72,1	232,1	160	31,1
April	35,8	153,6	117,8	23,3
Mei	36,1	91,0	54,9	39,7
Juni	125,0	40,2	84,8	310,9
Juli	75,3	28,8	46,5	261,5
Agustus	37,3	11,7	25,6	318,8
September	236,4	31,0	205,4	762,6
Oktober	128,4	91,8	36,6	139,9
November	394,9	202,8	192,1	194,7
Desember	377,2	339,0	38,2	111,3

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka, 2021 dan Stasiun Geofisika Sanglah

7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaannya, lahan di Kota Denpasar terbagi atas Area Terbuka, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Olahraga, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Peribadatan, Fasilitas Sosial, Fasilitas Transportasi, Hankam, Hutan, Industri, Pariwisata, Perairan, Perkantoran dan Perekonomian, Permukiman, Persampahan, Pertanian dan Peternakan serta Transportasi. Secara rinci penggunaan lahan di Kota Denpasar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6

Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Penggunaan Tanah (hektar)

No	Tema Penggunaan Lahan	Kecamatan				Kota Denpasar	% Terhadap Luas Kota Denpasar
		Denpasar Barat	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Utara		
1	Area Parkir	-	0,34	1,29	0,80	2,43	0,02
2	Hamparan pasir	-	29,11	-	-	39,11	0,23
3	Hutan Kota, Jalur Hijau dan Taman Kota	0,06	0,03	-	-	0,09	0,00
4	Hutan Mangrove	-	657,76			657,76	5,22

No	Tema Penggunaan Lahan	Kecamatan				Kota Denpasar	% Terhadap Luas Kota Denpasar
		Denpasar Barat	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Utara		
5	Jalan	18,63	36,32	13,66	13,99	82,60	0,66
6	Kolam	-	0,38	-	-	0,38	0,00
7	Kolam air Tawar Lainnya	-	156,88	-	-	156,88	1,25
8	Lahan Terbuka Lainnya	11,02	7,76	3,31	3,28	25,39	0,20
9	Pelabuhan	-	137,97	-	-	137,97	1,10
10	Pengelolaan Limbah	-	13,83	-	-	13,83	0,11
11	Permukiman dan Tempat Kegiatan	1.718,60	2.425,60	1.155,24	1.663,40	7.358,85	58,41
12	Sawah	264,84	597,44	817,79	579,88	2.259,96	17,94
13	Stadion dan Sarana Olah Raga	4,82	31,19	4,62	8,84	49,47	0,39
14	Sungai	25,86	37,02	18,75	20,41	102,03	0,81
15	Tambak Ikan	5,82	13,32	19,50	2,50	41,14	0,33
16	Tegalan/ Ladang	-	33,43	-	-	33,43	0,27
17	Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	294,37	758,83	163,20	374,16	1.590,55	12,63
18	Terminal	0,04	34,76	-	-	34,79	0,28
19	Waduk	2,33	-	-	2,06	4,39	0,03
	Jumlah	2.346,40	4.989,02	2.593,38	2.669,31	12.598,10	100,00

Luas penggunaan lahan belum termasuk reklamasi pelabuhan benoa

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Denpasar

8. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Denpasar terdiri dari kebijakan dan strategi pembangunan struktur ruang, pengembangan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya dan pengembangan kawasan strategis, revisi perubahan RTRW Kota Denpasar juga mengacu atas penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 dan Revisi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Strategi dalam mewujudkan kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kota Denpasar untuk mendukung tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah sebagai berikut:

1. Strategi pemantapan fungsi dan peran Kota sebagai ibukota Provinsi Bali dan Kawasan perkotaan inti dari Kawasan Perkotaan Sarbagita
2. Strategi pengembangan system transportasi dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas Wilayah
3. Strategi pengembangan system pusat pelayanan kota secara merata dan berhierarki
4. Strategi peningkatan aksesibilitas yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan system transportasi Kota
5. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman Kota
6. Strategi pengembangan Kota Kreatif berbasis pariwisata berjiwa budaya Bali.

B. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Denpasar, maka perlu dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi penataan ruang. Adapun kebijakan kawasan lindung yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
3. Strategi pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
4. Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana
5. Strategi perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual dalam mendukung Kota
6. Strategi pengembangan RTH Publik minimal 20%

C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Denpasar, maka perlu dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi penataan ruang. Adapun kebijakan kawasan budidaya yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan
2. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya
3. Pengembangan Kawasan budidaya kreatif dan unggulan
4. Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

D. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota

1. Pengembangan keterpaduan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kota
2. Pengembangan Kawasan Strategis Kota Berdasarkan nilai kepentingan pertumbuhan ekonomi Kota dan Wilayah
3. Pengembangan Kawasan Strategis Kota Berdasarkan nilai kepentingan sosial budaya Kota
4. Pengembangan Kawasan Strategis Kota berdasarkan nilai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

9. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana sebagaimana diatur dalam Perda No. 8 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2021-2041 terdiri dari:

a. Kawasan Rawan Banjir

Berdasarkan metode perhitungan BNPB untuk mengestimasi daerah rawan banjir, salah satu input yang digunakan adalah kemiringan lereng, dimana area yang rawan banjir memiliki kemiringan lereng <15%. Kondisi relief kota Denpasar cenderung datar, dimana lebih dari 80% wilayahnya memiliki kemiringan lereng 0-8%. Kondisi tersebut

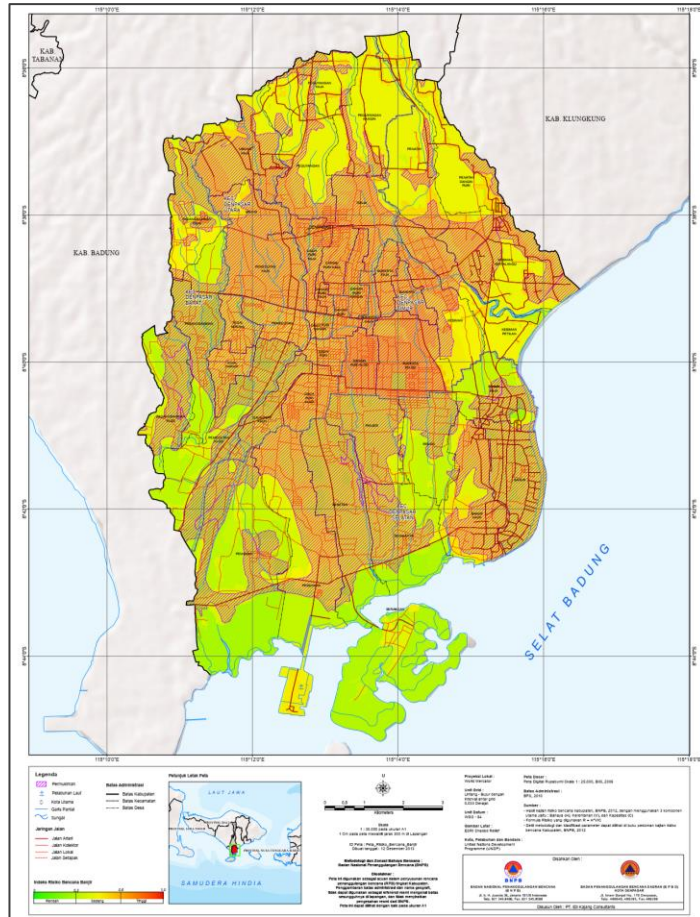
menyebabkan Kota Denpasar sangat rawan terjadinya bencana banjir.

Adapun sebaran wilayah rawan bencana banjir sebagai berikut :

1. Sistem jaringan drainasi I meliputi Jalan Teuku Umar, Jalan Ratna, Jalan Suli, Jalan Kamboja dan Jalan Kaliasem;
2. Sistem jaringan drainasi II meliputi Jalan Siulan;
3. Sistem jaringan drainase III meliputi Jalan Cargo, Jalan Buluh Indah, Jalan Pidada, Jalan Gunung Agung, Jalan Gunung Batur, Jalan Gunung Payung, Jalan Gunung Rinjani, Jalan Gunung Merapi, Jalan Tangkuban Perahu, Jalan Gunung Atena, Lingkungan Perum Asri, Lingkungan Perum Purnawira, Lingkungan Perumnas, Lingkungan Pura Demak, Lingkungan Uma, Lingkungan Lebak Moding, Lingkungan Padang Asri dan Abian Timbul;
4. Sistem jaringan drainase IV meliputi Jalan Waturenggong, Jalan Tukad Yeh Penet, Jalan Bedugul, Jalan Dewata, Jalan Tukad Batanghari, Jalan Buton, Jalan Flores, Jalan Serangan, Jalan Tukad Yeh Aya, Jalan Tukad Pakerisan, Jalan Sekuta, Jalan Tukad Bilok, Jalan Danau Tempe, dan Jalan Pulau Serangan; dan
5. Sistem jaringan drainase V meliputi Jalan Griya Anyar dan Pemogan.

Sistem pengendalian banjir yang direncanakan dalam RTRW Kota Denpasar terdiri atas:

1. Embung Sanur di Desa Sanur Kauh
2. Bangunan pengendalian banjir di Tukad Singapadu dan Tukad Badung Hulu;

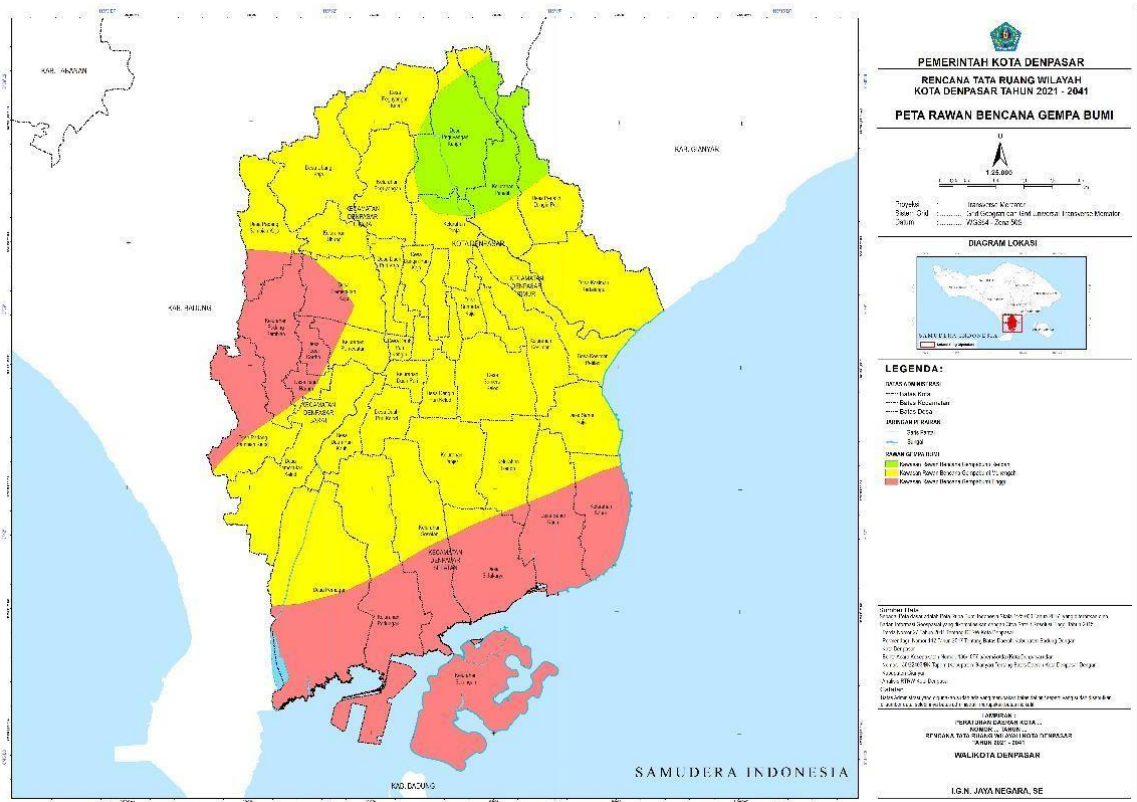


Sumber: BPBD Kota Denpasar

Gambar 2.2
Peta Risiko Bencana Banjir Kota Denpasar

b. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Sebagai bagian dari wilayah yang berada di daerah cincin api pasifik (*ring of fire*) wilayah Kota Denpasar tidak lepas dari ancaman gempa bumi untuk wilayah kota Denpasar terklasifikasi ke dalam beberapa tipologi yaitu KRB gempa bumi tingkat rendah seluas 853,12 Ha, dimana KRB gempa bumi tingkat rendah paling banyak terdampak di Kecamatan Denpasar Utara dengan luas 490,09 Ha. KRB gempa bumi tingkat menengah paling banyak terdampak berada di Kecamatan Denpasar Timur dengan luas 2.233,91 Ha. Serta KRB gempa bumi tingkat tinggi seluas 3.752,19 Ha, dimana KRB gempa bumi tingkat tinggi paling banyak terdampak berada di Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas 2.761,45 Ha. Berikut peta wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi.



Gambar 2.3
Peta Risiko Kawasan Rawan Gempa Kota Denpasar

c. Kawasan Rawan Tsunami

Kawasan rawan bencana tsunami pada wilayah Kota Denpasar terdiri atas beberapa jenis kawasan yaitu rawan bencana tsunami rendah, rawan bencana tsunami menengah dan rawan bencana tsunami tinggi. Adapun kawasan rawan bencana tsunami rendah dengan potensi dilanda tsunami dengan ketinggian genangan kurang dari 1 (satu) meter dengan skala intensitas tsunami kurang dari V, untuk kawasan rawan bencana tsunami menengah dengan potensi dilanda tsunami dengan ketinggian genangan 1 (satu) – 3 (tiga) meter dengan skala intensitas tsunami V – VI sedangkan kawasan rawan bencana tsunami tinggi dengan potensi dilanda tsunami dengan ketinggian genangan lebih dari 3 (tiga) meter dengan skala intensitas tsunami VII atau lebih.

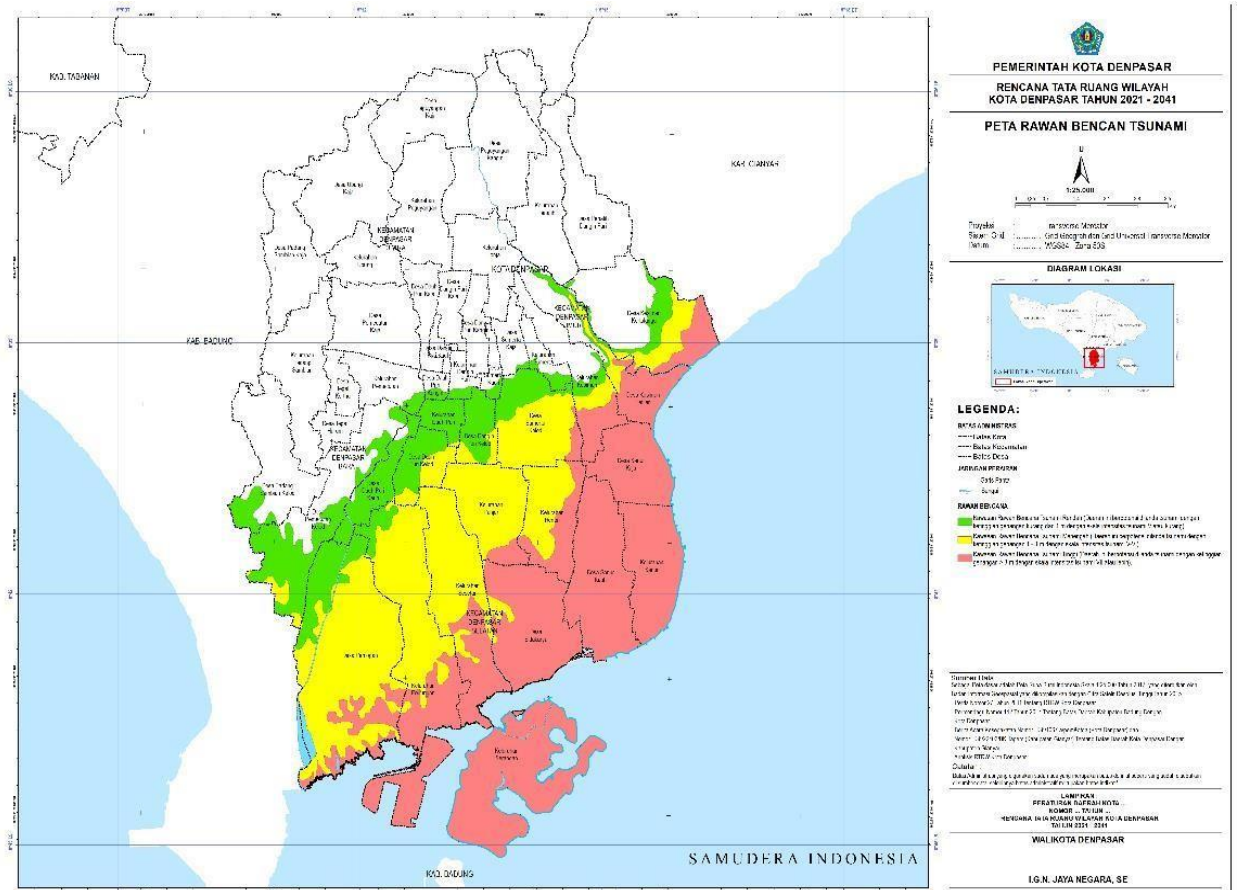
Adapun sebaran kawasan rawan tsunami pada Kota Denpasar tersebar pada :

1. Kelurahan Serangan dan Desa Sidakarya, meliputi seluruh dusun/banjar;
2. Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur meliputi sepanjang pantai pada jarak 100-200 meter dari pasang tertinggi;
3. Desa Sanur Kauh meliputi seluruh dusun/banjar kecuali Puseh Kauh, Puseh Kangin, Panti, Pekandelan dan Medura;
4. Kelurahan Sesetan meliputi Banjar/Dusun Bugis, Suwung Batan Kendal dan Pegok;
5. Kelurahan Pedungan meliputi Banjar/Dusun Pesanggaran, Ambengan dan Batan Kendal;
6. Desa Pemogan meliputi Banjar/Dusun Gelogor Carik, Kajeng, Rangkansari, Templasjuwet, Sakah, Teruna Bhineka dan Tangkas.
7. Desa Pemecutan Kelod meliputi Banjar/Dusun Margaya.
8. Kelurahan Panjer meliputi Banjar/Dusun Bekul.
9. Kelurahan Renon meliputi Banjar/Dusun Kelod.
10. Desa Kesiman Petilan meliputi Pantai Padanggalak.
11. Desa Kesiman Kertalangu meliputi daerah Pantai Tangtu pada jarak 100 hingga 200 meter.

KRB tsunami untuk wilayah Kota Denpasar terklasifikasi ke dalam beberapa tipologi yaitu KRB tsunami tingkat rendah seluas 1.232,83 Ha, dimana KRB tsunami tingkat rendah paling banyak terdampak berada di Kecamatan Denpasar Barat dengan luas 660,34 Ha. KRB tsunami tingkat menengah seluas 2.435,92 Ha, dimana KRB tsunami tingkat menengah paling banyak terdampak berada di Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas 1.918,72 Ha. Serta KRB tsunami tingkat tinggi seluas 3.210,41 Ha, dimana KRB tsunami tingkat tinggi paling banyak terdampak berada di Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas 2.872,83 Ha. Tipologi tingkat kerawanan dipengaruhi oleh morfologi wilayah Kota dimana untuk kawasan yang tergolong dalam klasifikasi rendah umumnya jauh dari kawasan pesisir serta berada di dataran yang lebih tinggi dari kawasan

pesisir, sedangkan untuk klasifikasi menengah dan klasifikasi tinggi merupakan kawasan yang berada dekat dengan kawasan pesisir.

Berikut ini peta risiko bencana tsunami di Kota Denpasar yang meliputi Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Timur.



Sumber: BPBD Kota Denpasar

Gambar 2.4
Peta Risiko Bencana Tsunami Kota Denpasar

d. Kawasan Rawan Abrasi Pantai

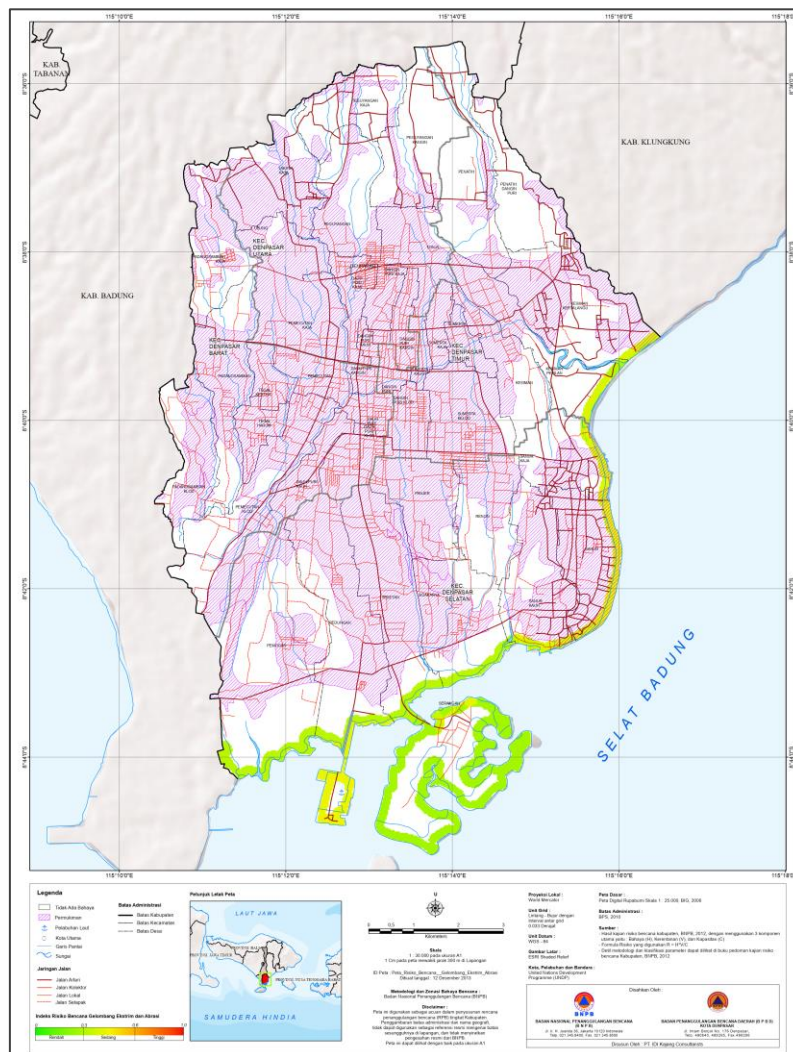
Abrasi pantai merupakan proses terjadinya pengikisan daratan oleh gelombang yang menyebabkan hanyutnya substrat dan berkurangnya luas daratan. Selain itu, abrasi pantai mempengaruhi kerentanan kawasan tidak hanya dari faktor lingkungan dan fisik namun juga dari faktor sosial dan faktor ekonomi.

Kawasan rawan abrasi pada wilayah Kota Denpasar sebarannya meliputi seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar di luar pesisir yang

berhutan bakau (Tahura). Abrasi pantai ini mempengaruhi perubahan garis pantai akibat proses-proses yang terjadi pada daerah sekitar pantai, dimana pantai selalui beradaptasi dengan berbagai kondisi yang terjadi.

e. Kawasan Rawan intrusi air laut

Kawasan rawan gelombang dan abrasi pantai meliputi seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar di luar pantai yang berbentuk hutan bakau. Sementara itu, bahaya gelombang ekstrim merupakan bahaya yang ditimbulkan oleh rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan ketinggian dan kecepatan melebihi rata-rata gelombang biasa.



Sumber: BPBD Kota Denpasar

Gambar 2.5
Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Denpasar

Wilayah yang rawan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah wilayah yang berada di pesisir pantai. Terdapat sepuluh desa yang rawan gelombang ekstrim dan abrasi yaitu: Desa Pemogan, Desa Pedungan, Kelurahan Sesetan, Desa Sidakarya, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan. Untuk Kecamatan Denpasar Timur meliputi Desa Kesiman Petilan dan Desa Kesiman Kertalangu. Indeks bahaya untuk sepuluh desa tersebut berada pada kelas sedang dengan luas bahaya 788,49 hektare atau 6,13 persen dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 hektare.

f. Kawasan Rentan Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan perubahan pada iklim yang dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang merubah komposisi atmosfer yang akan memperbesar keragaman iklim yang teramati pada periode yang cukup panjang. Perubahan Iklim ditandai dengan perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Gas Rumah Kaca (GRK) dalam hal ini terdiri atas karbon dioksida, metana, nitrogen dan sebagainya. Pada dasarnya, Gas Rumah Kaca dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi tetap stabil. Akan tetapi, konsentrasi Gas Rumah Kaca yang semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi, yang disebut dengan pemanasan global.

Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali yang mengalami kerentanan terhadap perubahan iklim terutama akibat peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas atau kegiatan masyarakat Kota Denpasar seperti

emisi bahan bakar fosil, perubahan fungsi lahan, limbah dan kegiatan-kegiatan industri termasuk pariwisata. Hal ini juga dipengaruhi oleh fungsi dan peran yang dimiliki oleh Kota Denpasar dalam konstelasi pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas, dimana Kota Denpasar selain sebagai Ibu Kota Provinsi Bali juga sebagai kota inti dari Metropolitan SARBAGITA sehingga di dalamnya fokus pada pelayanan dan jasa skala besar. Hal ini berimbas pada tingginya potensi aktivitas dan pergerakan yang terjadi di dalam wilayah Kota dan memicu pelepasan emisi GRK.

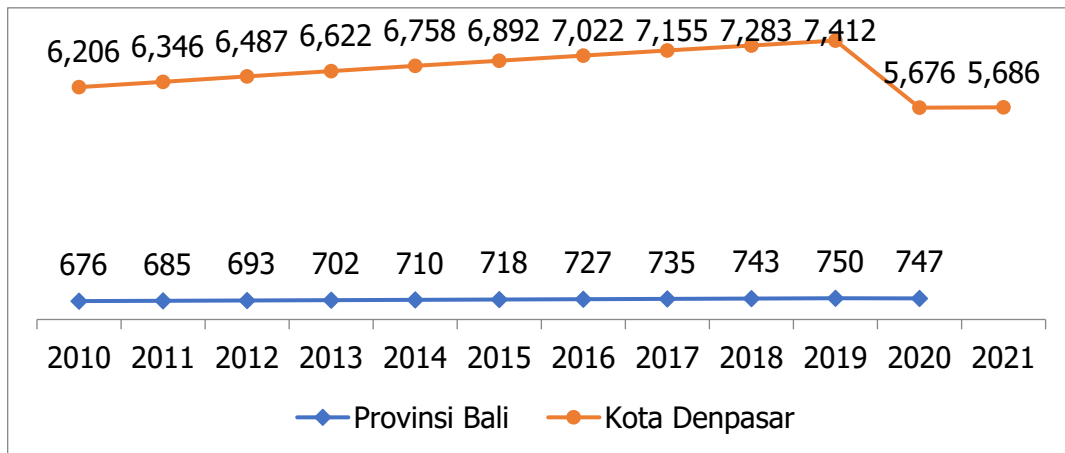
Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa ancaman dampak negatif perubahan iklim di wilayah Kota Denpasar adalah gagal panen, cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, kenaikan curah hujan, kenaikan temperatur wilayah kota hingga meningkatnya wabah penyakit yang akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penurunan Kualitas dan Kuantitas air
- 2) Perubahan Habitat dan Kepunahan Spesies
- 3) Peningkatan Permukaan Air Laut dan Tenggelamnya Daerah Pesisir

2.1.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan Penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Kepadatan penduduk Kota Denpasar bergerak dinamis di tahun 2019 sebesar 7.412 jiwa/km², meningkat sebesar 129 jiwa/km². Di Tahun 2020 Kepadatan penduduk Kota Denpasar sebesar 5.676 jiwa/km², menurun sebanyak 1.736 orang. Sedangkan di tahun 2021 sebesar 5.686 jiwa/km², meningkat dari tahun 2020 sebesar 10 orang. Grafik dinamika kepadatan penduduk di Kota Denpasar dari tahun 2010 – 2021 disajikan dalam gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar 2.6
Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2010 – 2021 (jiwa/km²)

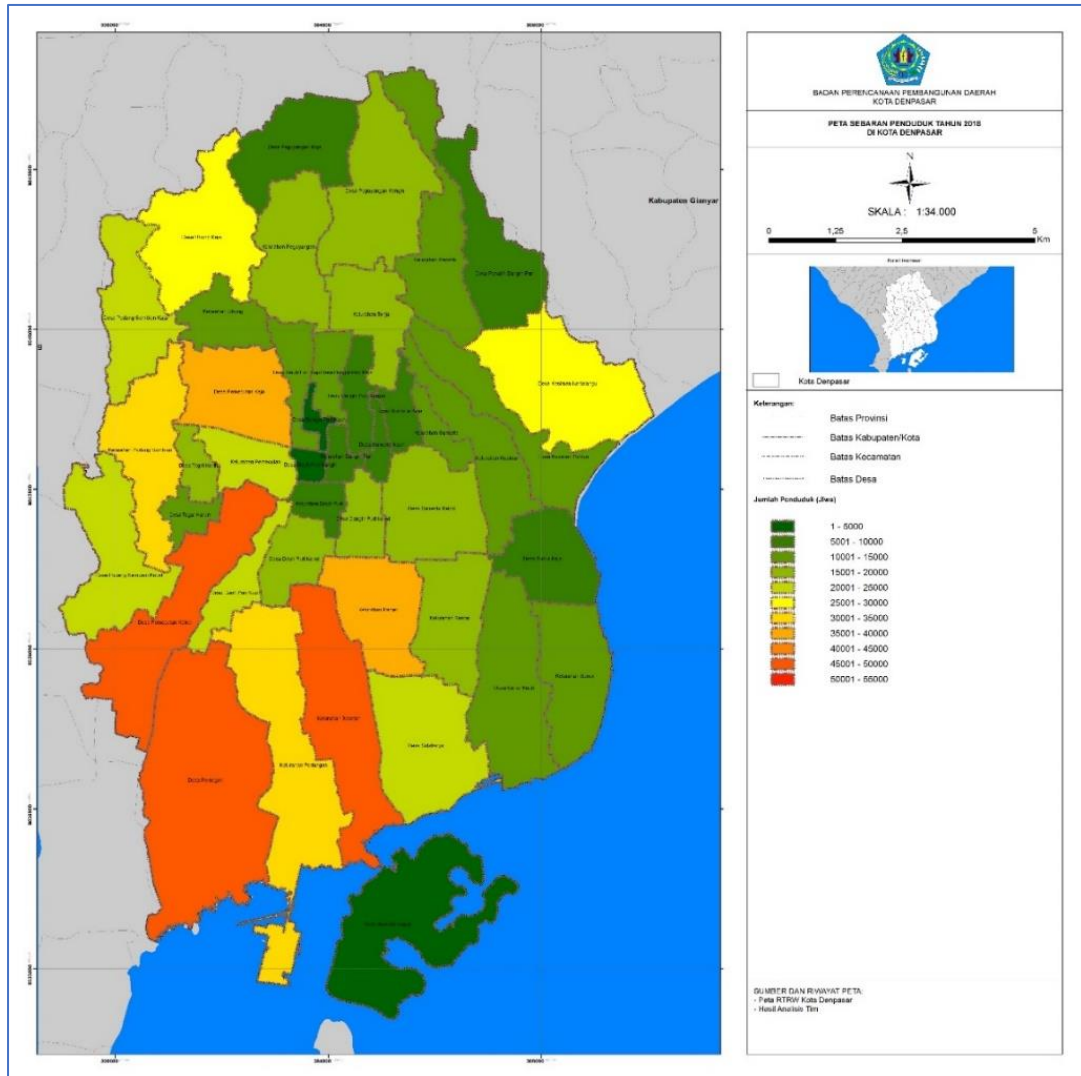
Sebaran penduduk Kota Denpasar tidak merata di semua kecamatan. Kecamatan Denpasar Barat adalah wilayah terpadat di Kota Denpasar dengan kepadatan penduduk sebesar 8.617 jiwa/km² pada tahun 2021. Kepadatan penduduk per kecamatan disajikan selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 (jiwa/km²)

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Denpasar Selatan	5.722	5.855	5.982	6.109	4.342	4.351
Denpasar Timur	6.879	6.982	7.077	6.562	5.749	5.760
Denpasar Barat	10.798	10.993	11.181	12.265	8.601	8.617
Denpasar Utara	6.301	6.409	6.512	6.618	5.505	5.515

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Berdasarkan Desa/Kelurahan, jumlah penduduk Kota Denpasar paling banyak terdapat di Kelurahan Sesetan, Desa Pemogan dan Desa Pemecutan Kelod. Sebaran jumlah penduduk berdasarkan Desa Kelurahan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.7
Peta Sebaran Jumlah Penduduk Kota Denpasar per Desa/Kelurahan Tahun 2021 (jiwa/km²)

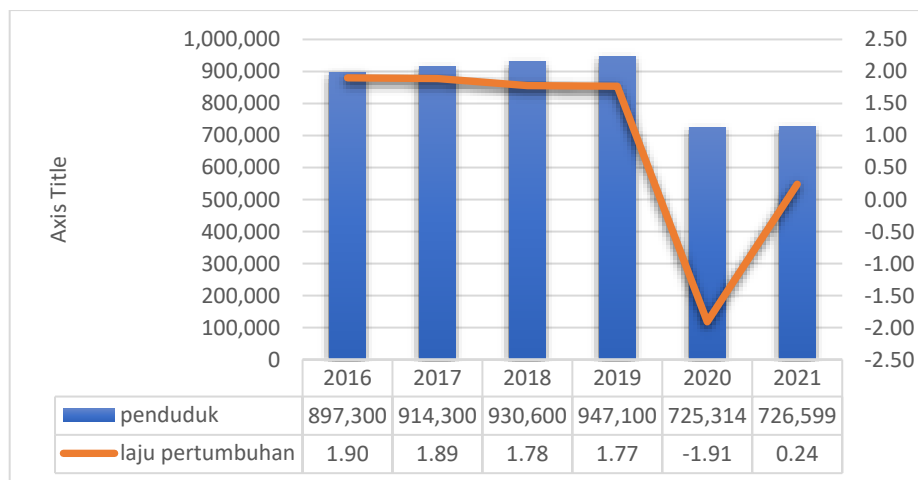
Jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2021 sebesar 726.599 jiwa meningkat sebesar 1.285 jiwa dari tahun 2020 sebesar 725,314 jiwa dimana jumlah penduduk perempuan sebesar 359,691 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebesar 366,908 orang. Sebaran Penduduk Kota Denpasar Perkecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.8
Penduduk Kota Denpasar per Kecamatan Tahun 2016 – 2021

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)						Pertumbuhan Penduduk 2016-2021 (persen)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Denpasar Selatan	286.060	292.670	299.050	305.400	217.100	217.485	-1,88
Denpasar Timur	153.480	155.760	157.890	160.200	128.276	128.503	-1,92
Denpasar Barat	259.790	264.490	269.030	273.600	206.958	207.325	-1,89
Denpasar Utara	197.970	201.380	204.630	207.900	172.980	173.286	-1,98
Kota Denpasar	897.300	914.300	930.600	947.100	725.314	726.599	-1,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk di Kota Denpasar selalu meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, laju pertumbuhan setiap tahunnya mengalami penurunan. Data tahun 2016 sampai dengan 2021, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan yang semakin menurun, penurunan drastis ditahun 2020 hingga -1,91 dan meningkat menjadi 0,24 di tahun 2021. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar berikut.



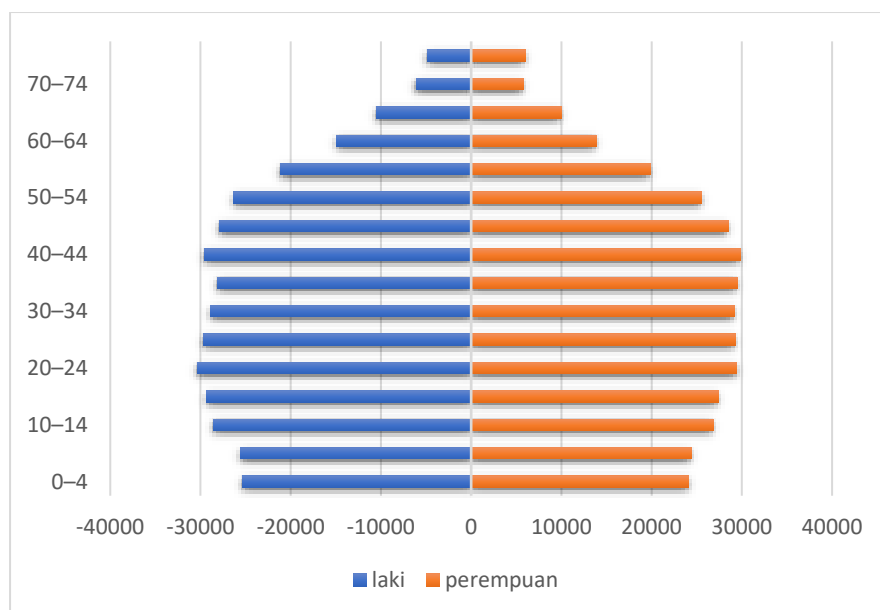
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

1. Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin

Struktur penduduk suatu wilayah dapat diketahui melalui pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Penyajian datanya digambarkan melalui piramida penduduk yang dapat menunjukkan rasio jenis kelamin per kelompok umur. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah banyaknya

penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan atau dengan kata lain perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.



Sumber : Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.9
Piramida Penduduk Kota Denpasar Tahun 2021

Piramida penduduk Kota Denpasar tahun 2021 memiliki bentuk ekspansif atau muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida penduduk muda, jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Kondisi tersebut dapat menjadi potensi dan dapat pula menjadi masalah Kota Denpasar. Banyaknya penduduk usia muda berpotensi dalam penyediaan tenaga kerja, namun dapat menjadi masalah seperti pengangguran, jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin
di Kota Denpasar Tahun 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Laki-Laki	458.300	466.700	475.100	483.700	366.301	366.908
Penduduk Perempuan	439.000	447.600	455.500	463.400	359.013	359.691
Jumlah	897.300	914.300	930.600	947.100	725.314	726.599
Rasio Jenis Kelamin	104	104	104	104	102	102

Sumber: BPS Kota Denpasar; Hasil Olahan, 2021

Struktur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dari angka rasio jenis kelamin atau *sex ratio*. Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* adalah

perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada waktu tertentu. Rasio jenis kelamin di Kota Denpasar pada enam tahun terakhir berada pada angka rata-rata sebesar 102. Artinya pada setiap 102 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

2. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pengelompokan penduduk menurut umur dapat digunakan untuk menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan bagi setiap kelompok umur. Pengelompokan penduduk menurut kelompok umur dapat juga digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk dengan usia produktif, non produktif, maupun yang belum produktif.

Berdasarkan data tahun 2021, jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 198.826 jiwa (27,41 persen), sedangkan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 526.488 jiwa (72,59 persen) dari total penduduk Kota Denpasar. Dari data tersebut, dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebagai salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* suatu wilayah menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai/menanggung hidup penduduk yang belum produktif atau tidak produktif lagi, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan tabel berikut ini, diketahui bahwa pada tahun 2021 Kota Denpasar memiliki rasio ketergantungan di bawah 37,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa beban usia produktif di Kota Denpasar masih rendah, yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif), mempunyai tanggungan sebanyak 38 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.10
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2017 – 2021

Kelompok Umur	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
0-4	39.200	37.800	39.500	38.100	19.599	18.257	25.338	24.123	25.322	24.116
5-9	37.200	35.200	36.800	35.100	26.014	24.313	26.009	24.792	25.541	24.398
10-14	35.000	33.900	35.800	34.100	28.667	26.878	29.274	27.422	28.567	26.874
15-19	36.400	38.300	37.700	39.600	30.477	28.475	29.390	27.519	29.280	27.387
20-24	48.500	48.700	49.000	49.000	27.334	26.196	30.108	29.393	30.287	29.456
25-29	50.200	47.500	50.700	48.300	22.690	22.476	29.500	29.203	29.618	29.317
30-34	44.400	40.900	45.600	41.400	20.114	21.275	28.812	29.177	28.905	29.188

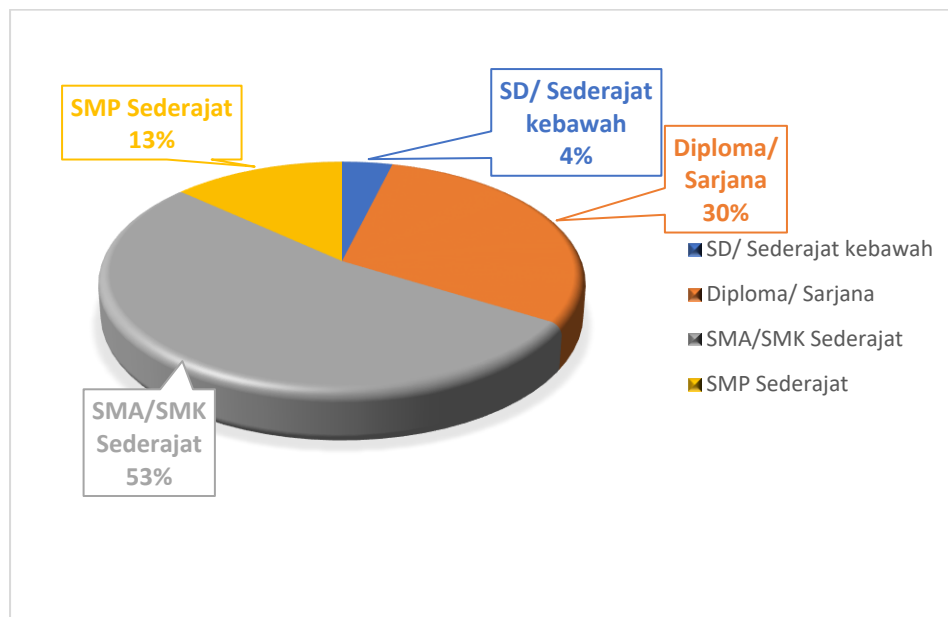
Kelompok Umur	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
35-39	39.700	38.500	39.900	38.700	22.988	26.079	28.245	29.642	28.121	29.486
40-44	39.300	36.200	39.600	36.500	25.701	28.178	29.170	30.115	29.534	29.849
45-49	32.400	29.200	33.100	30.000	28.465	29.544	27.782	28.400	27.899	28.533
50-54	24.500	21.800	25.900	23.100	25.117	24.550	26.189	25.317	26.376	25.562
55-59	16.700	15.500	17.400	16.200	17.272	16.726	20.723	19.359	21.119	19.824
60-64	10.300	9.500	10.800	10.100	12.269	12.024	14.484	13.420	14.916	13.864
65+	12.900	14.600	13.300	15.300	18.472	19.103	20.737	21.131	21.423	21.837
Jumlah	466.700	447.600	475.100	455.500	325.179	324.074	366.301	359.013	366.908	359.691

Sumber : BPS Kota Denpasar Tahun 2022; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2022

*) data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2022

3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut status pendidikan terakhir yang ditamatkan. Penduduk Kota Denpasar sebagian besar berpendidikan SMU sederajat. Berikut ini tabel jumlah penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan di Kota Denpasar:



Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Kota Denpasar, 2021

Gambar 2.10

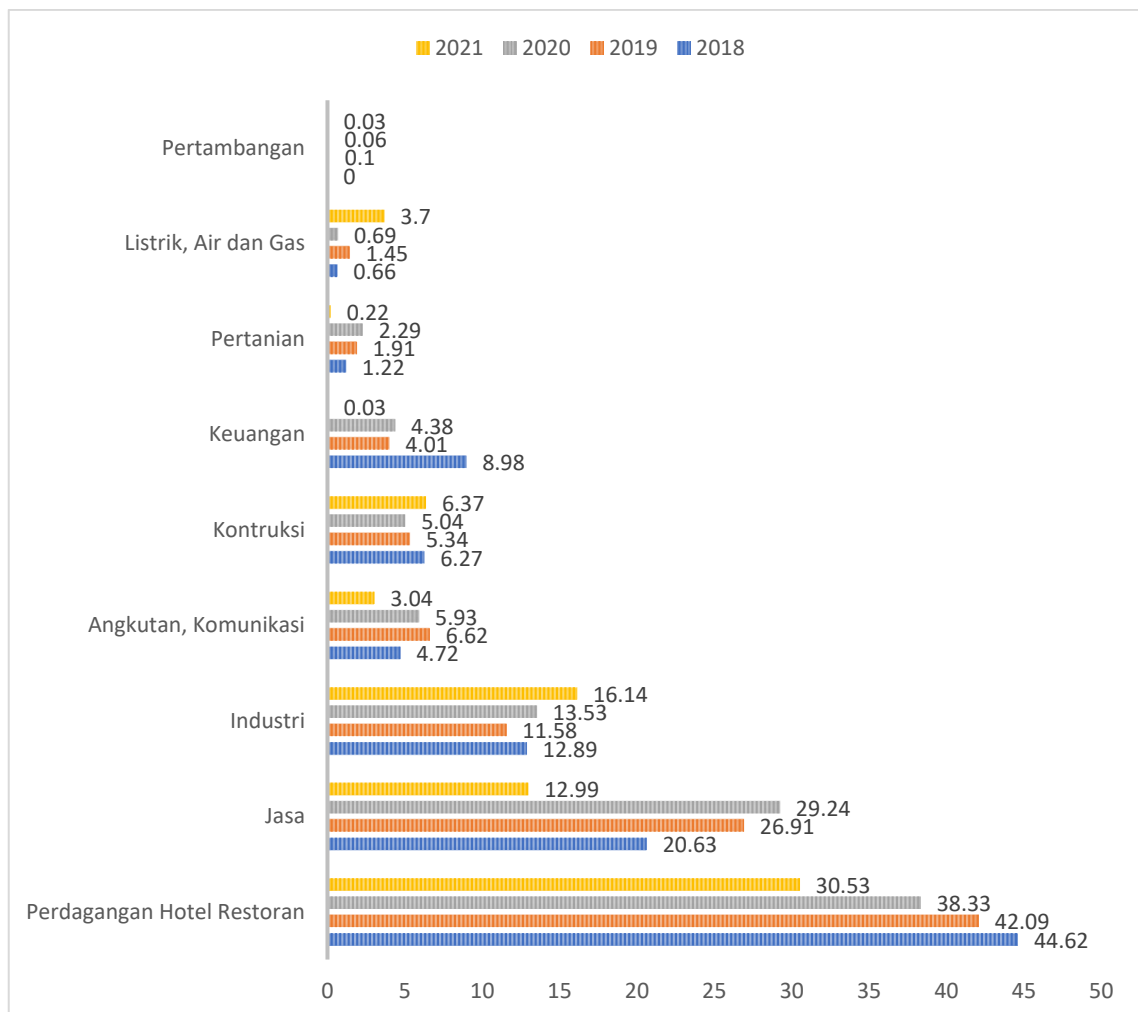
Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan, 2021

Pada diagram di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Denpasar adalah lulusan SMU sederajat dengan persentase sebesar 53,84 persen. Terbanyak kedua yaitu lulusan Diploma/Sarjana sebesar 24,74 persen,

diikuti dengan SMP sederajat sebesar 10,98 persen dan sisanya SD sederajat sebesar 3,19 persen.

4. Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang bergerak di suatu wilayah. Berikut adalah tabel mengenai penduduk Kota Denpasar yang bekerja menurut lapangan usaha:



Sumber : Kota Denpasar dalam Angka 2018-2020

Gambar 2.11

Pekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha di Kota Denpasar Tahun 2018-2021

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pekerja Kota Denpasar periode tahun 2018 sampai dengan 2021 bekerja pada sektor perdagangan besar, eceran, hotel, dan rumah. Terbanyak kedua yaitu pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan, dan yang lainnya dari sektor

industri pengolahan. Kondisi ini sesuai dengan potensi Kota Denpasar, khususnya pariwisata yang menjadi unggulan wilayah ini. Sebagian besar masyarakat bergerak di bidang pariwisata yang didukung oleh kegiatan perdagangan, hotel, maupun rumah makan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam melihat kemajuan suatu wilayah. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial dan Seni Budaya serta Olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

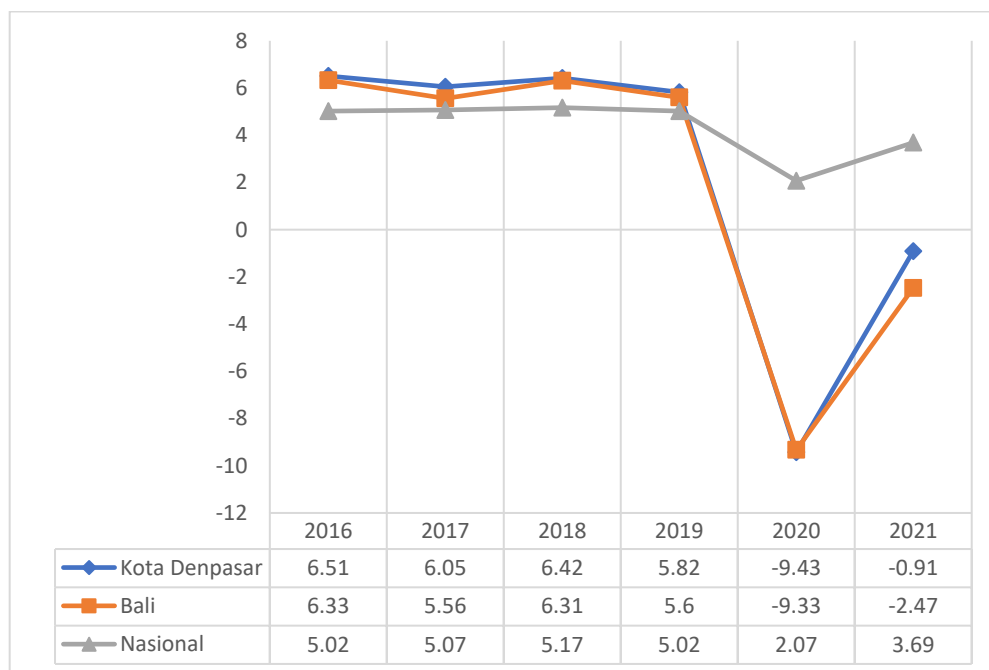
Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dari perkembangan beberapa indikator yang membentuknya, antara lain; Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, laju inflasi, *gini ratio*, kondisi kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan perekonomian yang tercipta di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan mampu membawa dampak yang semakin baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup signifikan sebesar 15,25 poin, lebih besar jika dibandingkan dengan penurunan laju pertumbuhan Provinsi Bali sebesar 14,93 poin di tahun 2020. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Bali sejalan dengan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020. Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi kota Denpasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai

-0,91 seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69 dan lebih tinggi dari laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Bali yang berada pada -2,47.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

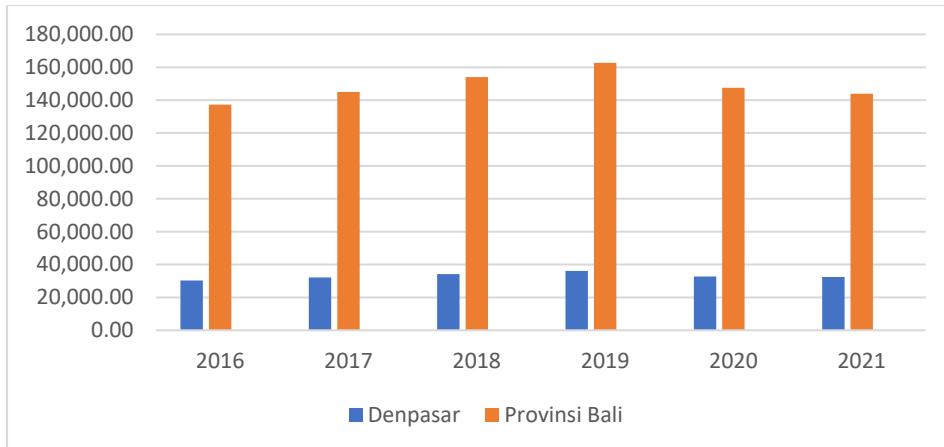
Gambar 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. PDRB per Kapita dibagi menjadi PDRB per kapita atas dasar harga konstan dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan serta perubahan tingkat harganya.

Penghitungan atas dasar harga konstan ini, hasilnya dapat untuk perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. PDRB per kapita atas dasar harga konstan meningkat dari tahun 2016 sebesar 30.273,39 Milyar hingga tahun 2019 sebesar 36.154,42 Milyar. Namun menurun di tahun 2020 menjadi 32.745,22 Milyar hingga 2021 menurun hingga menjadi 32.447,06 Milyar. PDRB perkapita atas

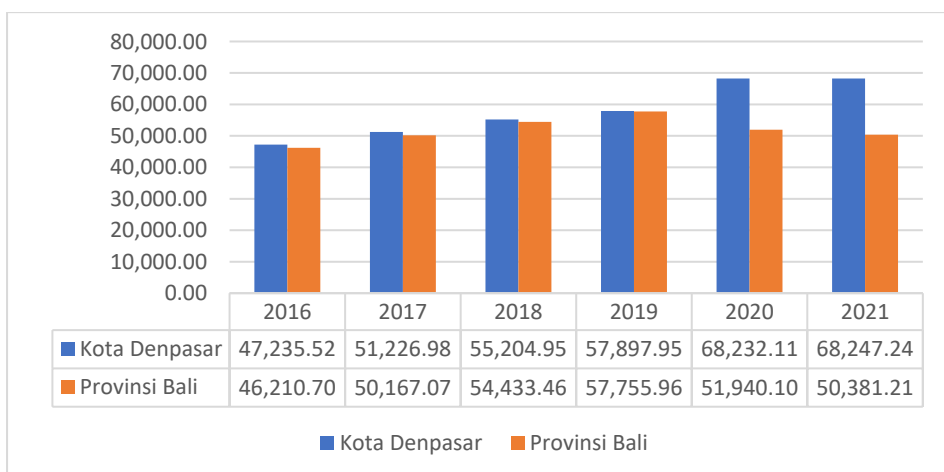
dasar harga konstan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.13
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga konstan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Perkapita atas Dasar harga Berlaku Kota Denpasar meningkat signifikan setiap tahunnya. Dari tahun 2016 sebesar 47.235.52 meningkat menjadi 51.226,98 di tahun 2017. PDRB Perkapita Kota Denpasar berada di atas Provinsi Bali. Peningkatan terjadi hingga 2021 sebesar 68.247,24. Gambaran PDRB Kota Denpasar dapat dilihat dari gambar dibawah.

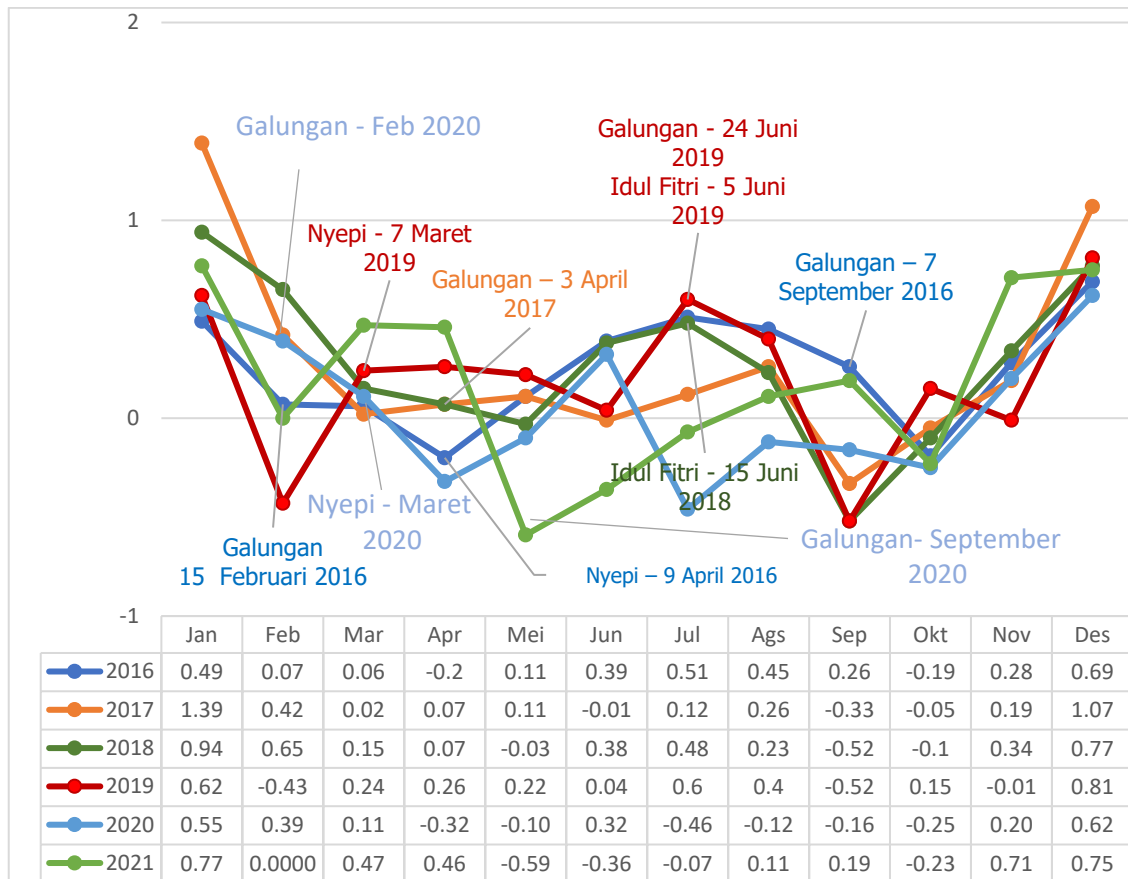


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.14
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

3. Laju Inflasi

Pada bulan Desember 2021 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 0,75. Jika dibandingkan dengan bulan Desember Tahun 2020 terdapat peningkatan sebesar 0,13 dari 0,62. Perkembangan inflasi month-to-month sepanjang tahun 2016 – 2021 disajikan pada gambar berikut.



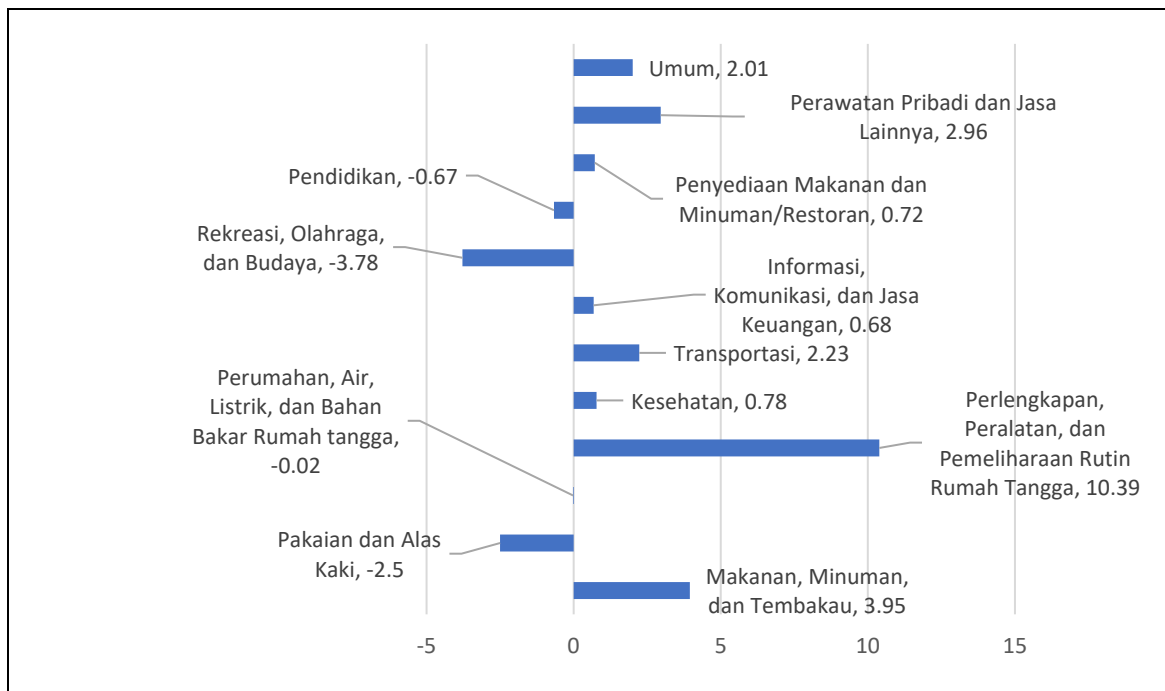
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.15

Perkembangan Tingkat Inflasi di month-to-month Kota Denpasar

Dari sebelas kelompok pengeluaran, tujuh kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 3,64 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,81 persen; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 0,64 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) setinggi 0,14 persen; kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) setinggi 0,08 persen; kelompok VI (transportasi) setinggi 0,07 persen; dan kelompok V (kesehatan) setinggi 0,07 persen. Sementara itu, tiga kelompok

pengeluaran tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok IX (pendidikan) sedalam 0,23 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam 0,07 persen; dan kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) sedalam 0,06 persen. Satu kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan).



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.16
Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kota Denpasar Tahun 2021

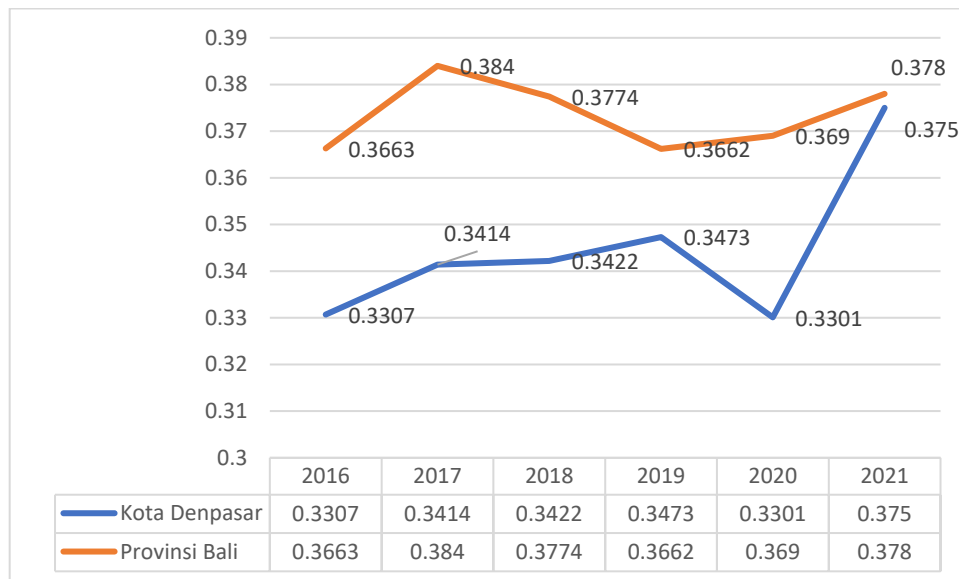
4. *Gini Ratio*

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu:

- (i) tinggi : koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih
- (ii) sedang : koefisien *gini ratio* 0,30 - 0,49
- (iii) rendah : koefisien *gini ratio* kurang dari 0,30

Tahun 2017, *gini ratio* Kota Denpasar sebesar 0,34 dan masuk kategori sedang, sebagaimana karakteristik kota dengan penduduknya yang memiliki

profesi beragam yang menyebabkan ketimpangan dapat terjadi. Namun demikian, *gini ratio* Kota Denpasar masih berada dibawah *gini ratio* Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 0,38. Gini Rasio Kota Denpasar masih di bawah Gini Rasio Provinsi Bali, hingga di Tahun 2021 Gini rasio Kota Denpasar hampir menyamai Gini Rasio Provinsi Bali yaitu 0,37. Selisih 0.0030 di bawah Provinsi Bali. Perkembangan Gini Rasio Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar di bawah :

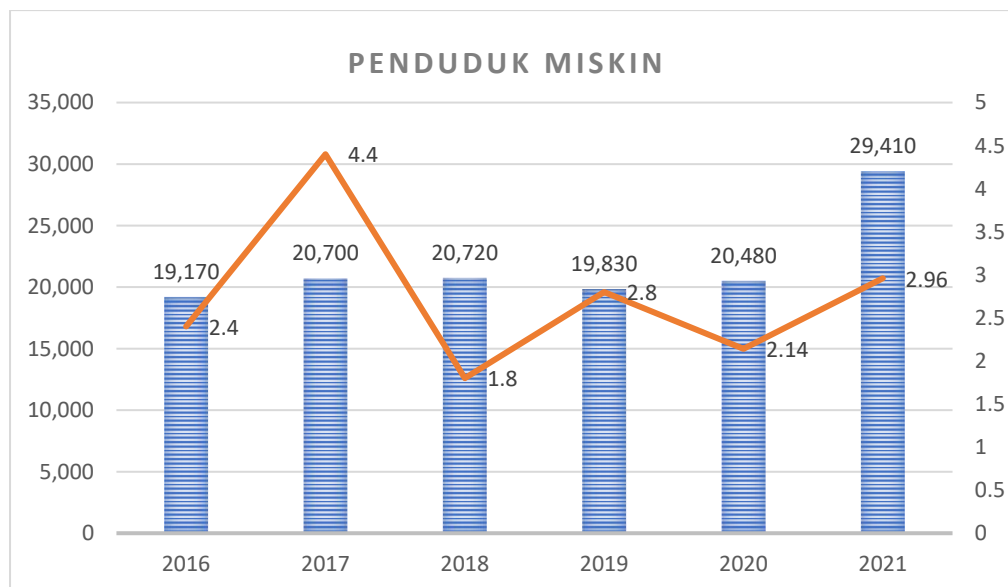


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.17
Gini Ratio Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

5. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar 2.18
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

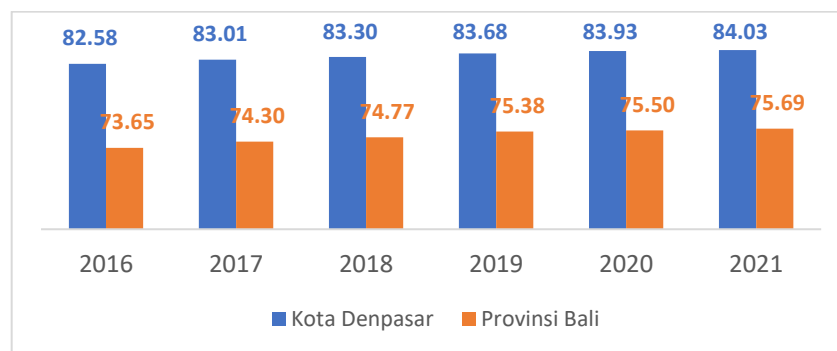
Jumlah penduduk miskin Kota Denpasar di tahun 2016 sebanyak 19.170 jiwa dengan angka kemiskinan 2,15%. Meningkat di tahun 2017 sebesar 0,12% menjadi 2,27% dengan jumlah 20.700 jiwa. Tahun 2018 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 20.720 jiwa dengan angka kemiskinan 2.24%. Di tahun 2019 Angka Kemiskinan menurun lagi 0,14 menjadi 2,10% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 19.830 jiwa. Namun di tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 20.480 jiwa dengan angka kemiskinan 2,14% meningkat 0,04% dari tahun 2019. Dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 2,96% dengan jumlah penduduk miskin 29.410 jiwa.

Tabel 2.11
Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp.)	483.821	512.947	545.357	571.246	618.064	662.499
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	19.170	20.700	20.720	19.830	20.480	29.410
Persentase Penduduk Miskin (%)	2,15	2,27	2,24	2,10	2,14	2,96

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. IPM Kota Denpasar Tahun 2020 pada kategori sangat tinggi sebesar 83,93 melampaui IPM Provinsi Bali dan Nasional. Di tahun 2021 IPM Kota Denpasar meningkat 0,1 menjadi 84,03 masih di atas IPM Provinsi Bali 75,69.



Gambar 2.19
Perkembangan IPM Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2016 – 2021

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

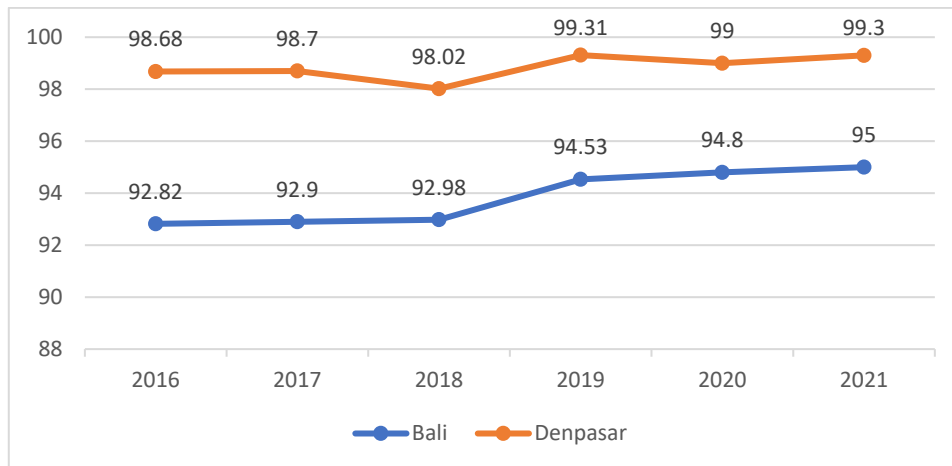
1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah

a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat

sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf Kota Denpasar dari 2016 tertinggi ke dua se-Provinsi Bali. Dan mulai tahun 2020 menjadi peringkat pertama se-Provinsi Bali dimana Angka Melek Huruf Kota Denpasar sebesar 99,00. Angka Melek Huruf di tahun 2021 sebesar 99,30 seperti disajikan pada garafik berikut :

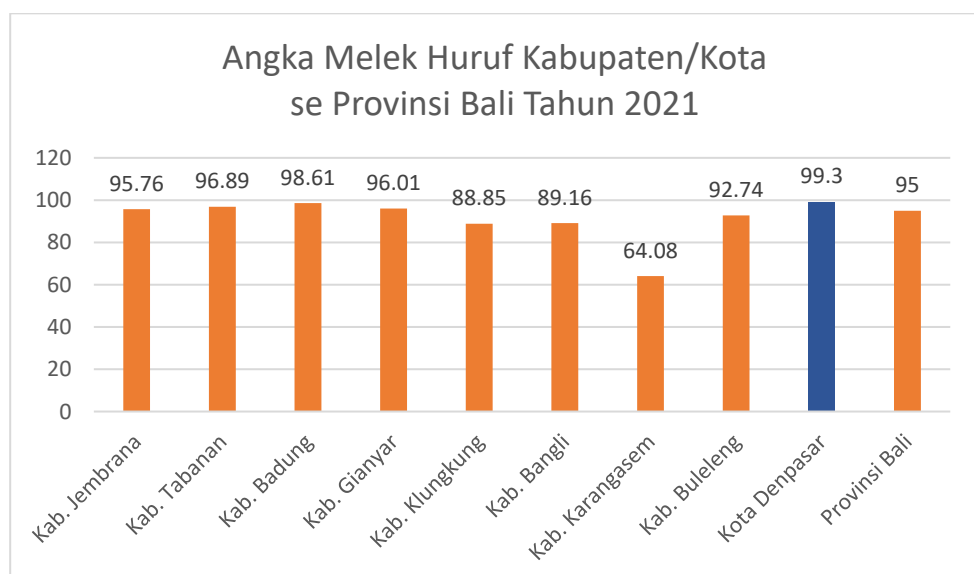


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.20

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Denpasar tahun 2016 – 2021

Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Denpasar tahun 2021 dengan kabupaten lainnya se-Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar di bawah:

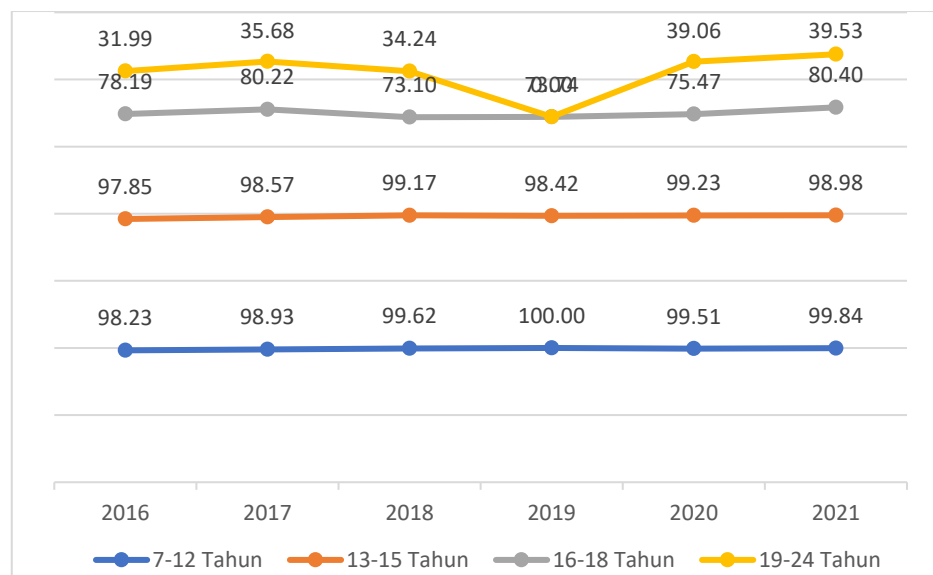


Gambar 2.21

Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2021

b. Angka Partisipasi Sekolah

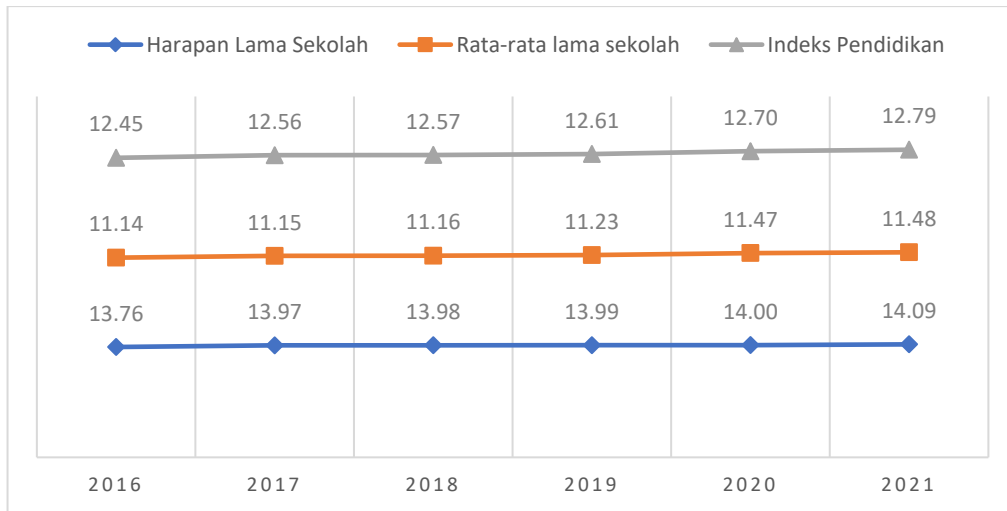
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Secara lengkap perkembangan APS Kota Denpasar untuk masing – masing kelompok umur dari tahun 2016– 2021 disajikan pada grafik berikut:



Gambar 2.22
Angka Partisipasi Sekolah Kota Denpasar menurut Kelompok Umur Tahun 2016 – 2021

c. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah rerata dari Angka Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Indeks Pendidikan Kota Denpasar mengalami tren meningkat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.



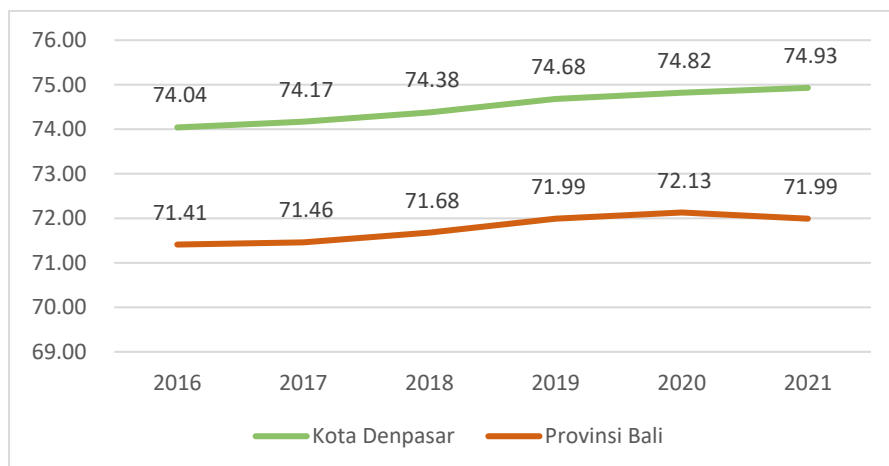
Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.23

Indeks Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

2. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan usia harapan hidup (UHH). Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Denpasar mengalami tren meningkat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sejalan dengan peningkatan UHH Provinsi Bali. UHH Kota Denpasar tahun 2021 sebesar 74,93 berada di atas UHH Provinsi Bali Tahun 2021 sebesar 71,99. Ini berarti bayi yang lahir di Kota Denpasar pada tahun 2021 memiliki harapan hidup hingga usia 74,93 tahun.



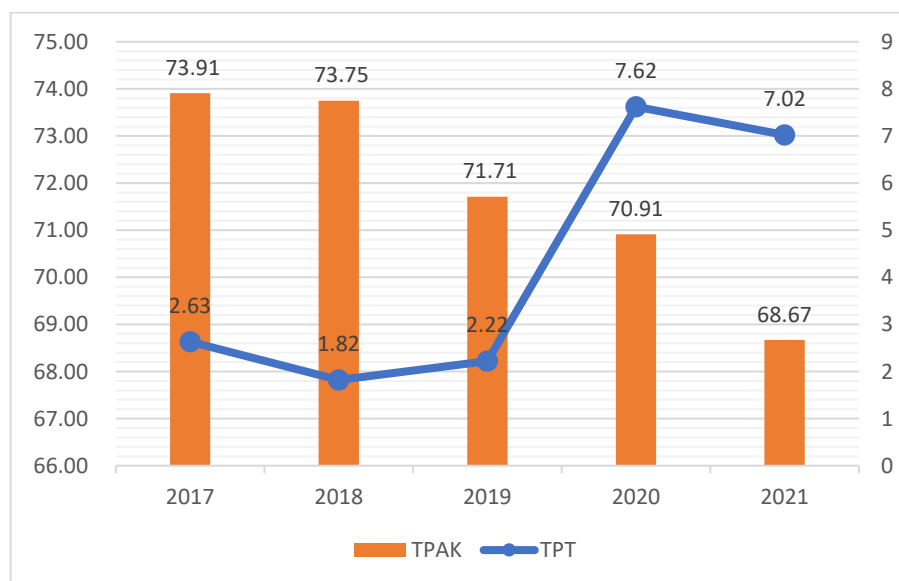
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar 2.24

Angka Harapan Hidup Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

3. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase penduduk angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan terhadap angkatan kerja itu sendiri. Penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 adalah indikasi meningkatnya kesempatan kerja yang dapat dioptimalkan oleh para pencari kerja. TPAK merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. TPAK biasanya dipengaruhi oleh keadaan sosial-ekonomi, budaya, demografi serta keadaan daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Denpasar mengalami tren penurunan dari tahun 2017 – 2018. Pada tahun 2019, TPT Kota Denpasar sebesar 2,22 meningkat sebesar 0,4% dari 1,82 pada tahun 2018. Tahun 2020 TPT Kota Denpasar menjadi 7,62% dan menurun kembali menjadi 7,02% di tahun 2021. Penurunan TPT berarti berkurangnya jumlah pengangguran, sebaliknya peningkatan TPT berarti meningkat pula jumlah pengangguran.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar 2.25

Perkembangan TPT dan TPAK Kota Denpasar Tahun 2017 – 2021

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Seni dan Budaya

Pengembangan seni dan budaya merupakan satu aspek yang sangat penting demi mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar yaitu **“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”**. Upaya pembangunan seni dan budaya dilaksanakan melalui pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Berikut kami sampaikan jumlah lembaga budaya dan organisasi kesenian yang ada di Kota Denpasar.

Tabel 2.12
Jumlah Lembaga Adat Kota Denpasar Tahun 2021

	Denpasar Timur	Denpasar Selatan	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Kota Denpasar
Desa Adat	12	11	2	10	35
Banjar Adat	89	93	119	59	360
Subak	14	10	8	10	42
Sekaa Teruna	99	100	110	108	417

Tabel 2.13
Jumlah Sanggar Seni per Kecamatan Tahun 2016 – 2021

KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Denpasar Timur	50	52	76	93	104	119
Denpasar Selatan	46	48	63	70	80	83
Denpasar Barat	36	39	53	60	62	65
Denpasar Utara	39	44	60	62	70	78
Total	171	183	252	285	316	345

2. Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga secara konsisten telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan membangun sumber daya manusia di bidang olahraga dengan melaksanakan pembinaan-pembinaan dan penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan 4 urusan: Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan.

2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kota Denpasar telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang didukung dengan pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran baik pada jenjang TK, SD, dan SMP. Demikian juga pelaksanaan pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas dilaksanakan secara bertahap dan secara berkesinambungan untuk gedung yang rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat setiap tahun. Keadaan ruang kelas sekolah yang ada di Kota Denpasar tiap tahunnya sudah mengalami peningkatan.

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Perkembangan jumlah sekolah TK di Kota Denpasar terus bertambah. Tahun 2016 terdapat 292 TK dan tahun 2021 bertambah menjadi 445 buah selama kurun waktu 2016 – 2021. Perkembangan jumlah murid TK selama kurun waktu 2016 hingga 2021 mengalami fluktuatif, tahun 2016 terdapat 19.702 orang dan tahun 2017 meningkat menjadi 20.009 orang. Tahun 2018 terdapat 20.053 orang murid TK dan tahun 2019 menurun menjadi 19.732 orang. Tahun 2020 terdapat 15.425 orang dan tahun 2021 turun menjadi 13.307 orang. Jumlah guru TK di Kota Denpasar tahun 2020 sebanyak 1.484 orang dan tahun 2021 menjadi 1.208 orang. Adapun selengkapnya perkembangan jumlah sekolah TK

jumlah murid dan jumlah guru TK tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak –
Kanak di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

Tahun	Sekolah			Murid		Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Baru	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
2021	4	445	449	314	13.307	26	1.182	1.208
2020	3	283	286	15.425	15.425	28	1.456	1.484
2019	2	303	305	19.732	19.732	26	1.399	1.425
2018	2	301	303	20.053	20.053	21	1.241	1.262
2017	2	294	296	20.009	20.009	112	1.421	1.533
2016	2	292	294	19.702	19.702	105	1.210	1.315

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar 2021

Sebaran sekolah TK per kecamatan di Kota Denpasar diketahui bahwa di Denpasar Barat paling banyak terdapat sekolah TK yaitu mencapai 84 buah, sedangkan di Kecamatan Denpasar Timur hanya 64 buah. Adapun sebaran jumlah sekolah TK jumlah murid TK dan jumlah guru per kecamatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-kanak Menurut
Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2021

Kecamatan	Sekolah			Murid		Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Baru	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
Denpasar Selatan	-	127	127	3.348	3.348	-	300	300
Denpasar Timur	2	88	90	3.104	3.104	11	245	256
Denpasar Barat	1	113	114	3.661	3.661	5	333	338
Denpasar Utara	1	117	118	3.507	3.507	10	304	314
Jumlah	4	449	296	13.620	13.620	26	1.182	1.208

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar 2021.

Sarana pendidikan di tingkat sekolah dasar di Kota Denpasar selama kurun waktu 2016-2021 juga mengalami pertumbuhan, dimana tahun 2016 terdapat 224 buah sekolah dan bertambah menjadi 252 buah tahun 2021. Jumlah siswa tahun 2016 sebanyak 83.454 orang dan tahun 2021 sebanyak 85.606 orang. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

SD	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah SD	224	232	240	247	233	252
Jumlah siswa SD	83.454	87.368	88.507	88.660	80.259	85.606
Jumlah Guru SD	4.026	4.234	3.958	4.218	4.224	4.310

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

Jika dilihat persentase siswa SD terhadap jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 9,30% dan mengalami fluktuasi hingga tahun 2021 sebesar 11,78%, dan jika dilihat dari sisi jumlah muridnya juga berfluktuasi. Adapun selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Persentase Jumlah Siswa Sekolah Dasar Terhadap Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jumlah Penduduk	Siswa Sekolah Dasar	
		Jumlah	Persentase terhadap jumlah penduduk (%)
2016	897.300	83.454	9,30
2017	914.300	87.368	9,56
2018	930.600	88.507	9,51
2019	947.100	88.660	9,36
2020	725.314	80.259	11,06
2021	726.599	85.606	11,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar 2021

Perkembangan sarana pendidikan dasar, khususnya jumlah sekolah dasar di Kota Denpasar dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan. Tahun 2019 rata-rata 1 orang guru mengasuh anak didik sebanyak antara 21-22 orang. Selama kurun waktu lima tahun (201-2017) rata-rata rasio murid-guru sebanyak 21,36 atau dibulatkan 21 orang, sehingga secara umum di Kota Denpasar rata-rata 1 orang guru SD mengasuh anak didik sebanyak 21 orang. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru SD Menurut Kecamatan di Kota
Denpasar Tahun 2016 – 2021

Kecamatan		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Denpasar Selatan							
1.	Jumlah SD	64	67	75	68	68	79
2.	Jumlah Siswa SD	20857	22.540	24.992	24.834	21.376	24.251
3.	Jumlah Guru SD	1.057	1.138	1.155	1.194	1.164	1.211
4.	Rasio Siswa-Guru	19,73	19,81	21,64	20,80	18,36	20,03
Denpasar Timur							
1.	Jumlah SD	52	53	52	52	52	59
2.	Jumlah Siswa SD	17.613	18.064	17.478	15.983	17.253	19.912
3.	Jumlah Guru SD	917	955	824	898	905	844
4.	Rasio Siswa-Guru	19,21	18,92	21,21	17,80	19,06	23,59
Denpasar Barat							
1.	Jumlah SD	54	55	56	58	58	74
2.	Jumlah Siswa SD	24.059	24.510	23.996	26.165	22.034	27.659
3.	Jumlah Guru SD	1088	1.116	1.025	1.151	1.158	1.367
4.	Rasio Siswa-Guru	22,11	21,96	23,41	22,73	19,03	21,16
Denpasar Utara							
1.	Jumlah SD	54	57	57	55	55	40
2.	Jumlah Siswa SD	20.925	22.254	22.041	21.678	19.596	13.784
3.	Jumlah Guru SD	964	1.025	954	975	997	948
4.	Rasio Siswa-Guru	21,71	21,71	23,10	22,23	19,65	14,54
Kota Denpasar							
1.	Jumlah SD	224	232	240	247	247	252
2.	Jumlah Siswa SD	83.454	87.368	88.507	88.660	80.259	85.606
3.	Jumlah Guru SD	4.026	4.234	3.958	4.218	4.224	4.310
4.	Rasio Siswa-Guru	20,73	20,63	22,34	20,89	19	19,86

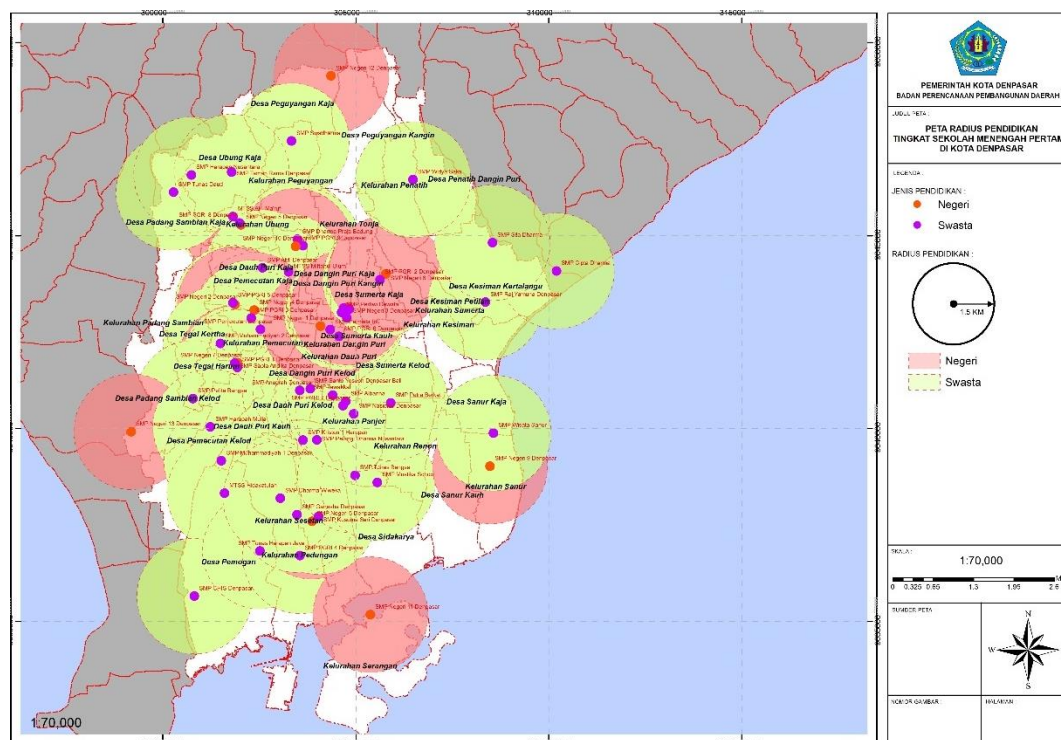
Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar: BPS Kota Denpasar 2016.

Sarana pendidikan tingkat SMP di Kota Denpasar, tahun 2021 terdapat 81 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 39.346 orang dan jumlah guru sebanyak 1.831 orang. Jumlah sekolah tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 12 buah dimana tahun 2018 berjumlah 69 buah dan jumlah murid 39.060 orang. Adapun perkembangan jumlah sekolah, siswa dan guru SLTP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru SMP di Kota Denpasar Tahun
2016 – 2021

Tahun	Sekolah			Siswa		Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Jumlah
2016	12	54	66	13.250	22.699	723	1.573	2.296
2017	12	54	66	12.324	27.416	658	1.475	2.133
2018	12	57	69	12.597	26.463	664	1.157	1.821
2019	12	62	74	12.188	26.673	617	1.235	1.852
2020	13	62	75	13.336	26.195	656	1.199	1.855
2021	14	67	81	14.753	24.593	643	1.188	1.831

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar



Gambar 2.26
Persebaran SMP Negeri di Kota Denpasar

Perkembangan rasio siswa-guru untuk tingkat pendidikan dasar yaitu SD meningkat dari tahun 2020 sebesar 19,00 pada tahun 2021 menjadi 19,86. Rata-rata seorang guru mengasuh anak didik mencapai 21-22 orang, sedangkan di tingkat SLTP rasio ini lebih rendah yaitu rata-rata

seorang guru mengasuh anak didik sebanyak 18-19 orang. Adapun rasio siswa guru tahun 2016 -2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Rasio Siswa-Guru Tingkat SD and SMP di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

Tahun	SD			SMP		
	Siswa	Guru	Rasio Siswa-Guru	Siswa	Guru	Rasio Siswa-Guru
2016	88.422	4.170	21,20	35.949	2.296	15,66
2017	87.368	4.234	20,63	39.740	2.133	18,63
2018	88.507	3.958	22,36	39.060	1.821	21,45
2019	88.660	4.218	21,02	38.861	1.852	20,98
2020	80.259	4.224	19,00	37.918	1.790	21,18
2021	85.606	4.310	19,86	36.546	1.819	20,09

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

2. Urusan Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya AHH dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum (RSU) baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, dan klinik merupakan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pada tahun 2019, jumlah sarana kesehatan di Kota Denpasar sebanyak 57. Disamping RSU, pelayanan kesehatan juga dilaksanakan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Pada tahun 2019, jumlah puskesmas 11 buah dan puskesmas pembantu 25 buah. Tenaga paramedis yang bekerja di Puskesmas sebanyak 364 orang dan puskesmas pembantu 54 orang. Sampai tahun 2021 jumlah rumah sakit maupun paramedis masih tetap. Selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.21
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Tenaga Paramedis Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

Tahun	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Tenaga Paramedis	
				Puskesmas	Puskesmas Pembantu
2021	21	11	25	364	54
2020	21	11	25	364	54
2019	21	11	25	364	54
2018	20	11	25	340	54
2017	20	11	25	341	54
2016	16	11	25	180	54

Sumber: Dinas kesehatan Kota Denpasar

Tabel 2.22
Jumlah Tempat Tidur, Kapasitas, dan BOR Rumah Sakit di Kota Denpasar

No.	Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur	Kapasitas (TT x 365)	BOR (%)
1	RSUD Wangaya	200	73.000	76,76
2	RSUP Sanglah	765	279.225	93
3	RS Trijata/ Bhayangkara	54	19.710	13,6
4	RS Udayana	132	48.180	72,5
5	RS Puri Raharja	110	40.150	58,8
6	RS Harapan Bunda	25	9.129	44,7
7	RS Puri Bunda	86	31.390	42,1
8	RS Dharma Yadnya	56	20.440	23,9
9	RS Surya Husadha	115	41.975	67,8
10	RS Prima Medika	94	34.310	52,6
11	RS Manuaba	54	19.710	28,84
12	RS Kasih Ibu	83	30.295	53,3
13	RS Mata RSBM	10	3.650	23,5
14	RS Balimed	132	48.180	54,3
15	RS Bali Royal	100	36.500	72,8
16	RS Surya Husada Ubung	41	14.965	54,3
17	RS Bakti Rahayu	63	22.995	75,3
18	RSIA Pucuk Permata Hati	30	10.950	28,5
19	RSU Daerah Bali Mandara	103	37.595	1,7
20	RSGM Fak Kedokteran Gigi Mahasaraswati	0	0	0

Sumber: Dinas kesehatan Kota Denpasar 2018

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit puskesmas keliling. Distribusi Puskesmas berdasarkan desa yang diwilayahi disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.23
Distribusi Puskesmas Berdasarkan Desa yang diwilayahi

No.	Kecamatan	PUSKESMAS	Desa/ Kelurahan
1.	Denpasar Utara	Puskesmas I Denpasar Utara	1. Desa Dangin Puri Kaja 2. Desa Dangin Puri Kangin 3. Kel. Tonja 4. Desa dangin Puri Kauh
		Puskesmas II Denpasar Utara	1. Desa Pemecutan Kaja 2. Kel Ubung 3. Desa. Ubung Kaja
		Puskesmas III Denpasar Utara	1. Desa Dauh Puri Kaja 2. Kel Peguyangan 3. Desa Peguyangan Kaja 4. Desa Peguyangan Kangin
2.	Denpasar Timur	Puskesmas I Denpasar Timur	1. Kel. Dangin Puri 2. Ds. Dangin Puri Kelod 3. Kel. Sumerta 4. Desa Sumerta kelod 5. Desa Sumerta Kauh 6. Desa Sumerta Kaja
		Puskesmas II Denpasar Timur	1. Kel. Penatih 2. Desa Kesiman Kertalangu 3. Desa penatih Dangin Puri 4. Desa Kesiman Petilan 5. Kel Kesiman
3.	Denpasar Selatan	Puskesmas I Denpasar Selatan	1. Kel Ssetan 2. Desa Sidakarya 3. Kel Panjer
		Puskesmas II Denpasar Selatan	1. Kel Sanur 2. Kel Renon 3. Desa Sanur Kauh 4. Desa Sanur Kaja
		Puskesmas III Denpasar Selatan	1. Desa Pemogan 2. Kel. Serangan
		Puskesmas IV Denpasar Selatan	1. Kelurahan Pedungan

No.	Kecamatan	PUSKESMAS	Desa/ Kelurahan
4.	Denpasar Barat	Puskesmas Denpasar Barat I	1. Desa Padang sambian kelod 2. Desa Dauh Puri Kauh 3. Desa Dauh Puri Kangin 4. Desa Dauh Puri Kelod 5. Desa Dauh Puri 6. Desa Pemecutan Kelod
		Puskesmas II Denpasar Barat	1. Desa Padang sambian kaja 2. Desa Tegal Kertha 3. Desa Tegal Harum 4. Kel Padang sambian 5. Kel Pemecutan

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan ekonomi daerah

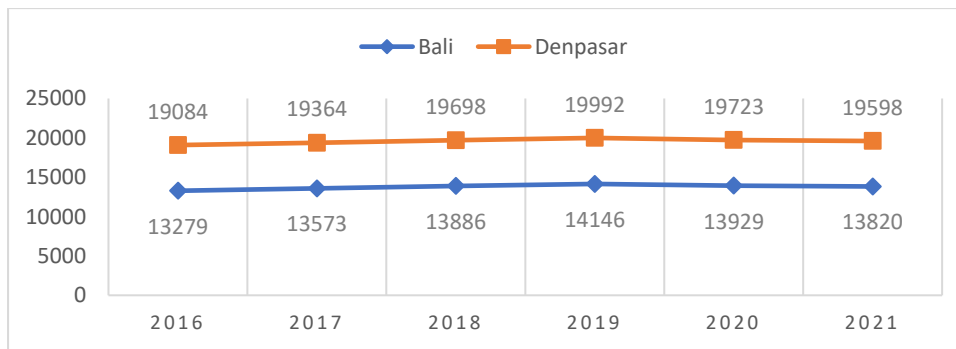
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita

Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian. Persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan selain indikator PDRB per kapita, gini ratio maupun ketimpangan pendapatan. Analisis pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi. Analisis ini dihitung dengan membagi total pengeluaran rumah tangga dalam setahun dengan jumlah rumah tangga tahun tersebut.

Tabel 2.24
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Denpasar
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	(Ribu Rp/ Bulan)	19.084,00	19.353,67	19.698	19.992	19.723	19.598

Sumber : denpasarkota.bps.go.id



Sumber: denpasarkota.bps.go.id

Gambar 2.27
Perkembangan Pengeluaran per Kapita
Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016 – 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2021 pengeluaran rumah tangga per kapita di Kota Denpasar terus mengalami kenaikan dengan data tahun 2019 menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan di Kota Denpasar senilai Rp. 19.992.000,00. Kondisi tersebut sudah lebih baik dari nilai pengeluaran rumah tangga perkapita Provinsi Bali yang pada tahun 2019 berada pada Rp. 14.416.000,00. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terlihat adanya penurunan, hal ini seiring dengan situasi pandemi yang terjadi di Bali.

2. Produktivitas daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor tertentu. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan membandingkan antara produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor tersebut dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Penghitungan produktivitas total daerah tersebut juga dilakukan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaganya.

Dalam perhitungan ini, lapangan usaha dibagi ke dalam tiga sektor besar yaitu agriculture, manufacture, dan service. Sektor agriculture terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor manufacture terdiri dari sektor pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas;

pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sementara itu sektor service terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa-jasa lainnya.

Dilihat dari besaran nilai PDRB-nya, sektor service memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua sektor lainnya di Kota Denpasar, dimana pada tahun 2016 besarnya sebesar 29.287.945,99 juta rupiah dan meningkat menjadi 42.426.544,22 juta rupiah pada tahun 2019, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,71 persen per tahun. Sementara sektor manufacture meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,19 persen per tahun atau lebih cepat dibandingkan dengan sektor service maupun agriculture., dengan besaran nilai PDRB sebesar 9.513.961,26 juta rupiah di tahun 2019. Meskipun besarnya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan sektor service dan manufacture, sektor agriculture juga menunjukkan peningkatan yang semakin membaik dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 7,62 persen per tahun, selama kurun waktu 2016 sampai 2019. Sementara itu, seluruh sektor pada tahun 2020 mengalami penurunan karena dampak pandemi covid-19.

Selanjutnya, dilihat dari segi tenaga kerjanya, ketiga lapangan usaha tersebut juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2017-2019. Berdasarkan data Statistik Ketenagakerjaan Kota Denpasar Tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja di Kota Denpasar pada tahun 2017 sebanyak 501.909 orang, bertambah menjadi 526.642 orang pada tahun 2018. Sementara itu pada tahun 2019 turun menjadi 511.072. Kondisi ini kembali menurun setelah adanya pandemi yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja, utamanya yang bergerak di sektor pariwisata. Dari data yang dirilis BPS, mengenai lapangan usaha pekerja tahun 2018, sebesar 28,01 persen lapangan usaha pekerja bergerak di sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Sementara itu 16,62 persen terkait penyediaan akomodasi makan minum dan 12,89 persen adalah industri pengolahan.

3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan per Kapita

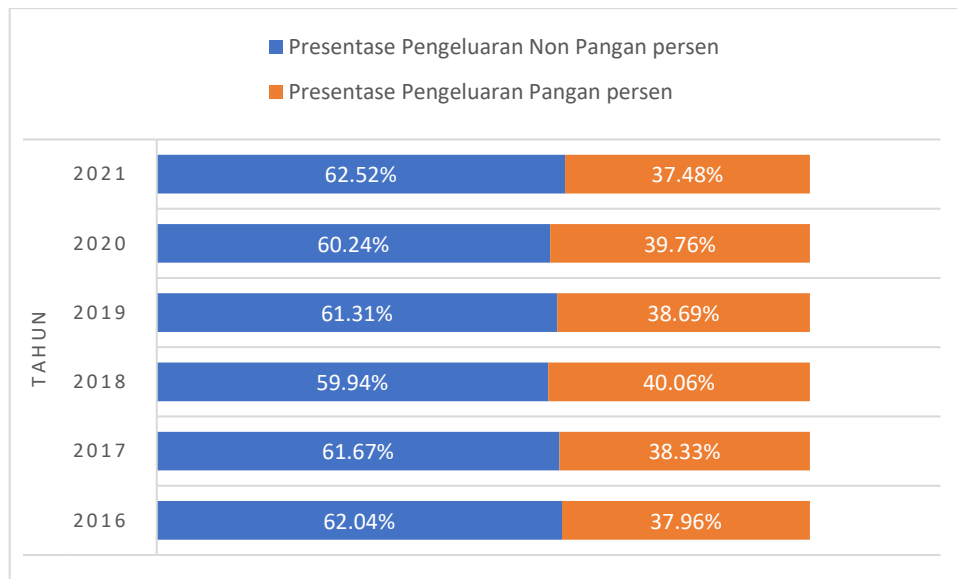
Persentase pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk dari segi akses ekonomi rumah tangga. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk non-pangan terhadap total pengeluaran maka tingkat kesejahteraan semakin membaik. Analisis ini dihitung dengan membagi total pengeluaran rumah tangga dalam setahun dengan jumlah total pengeluaran rumah tangga non-pangan pada tahun tersebut.

Tabel 2.25
Presentase Pengeluaran Konsumsi Non – Pangan per Kapita Kota Denpasar
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran Non Pangan Perkapita	(JutaRp/Bulan)	968.462	1.212.895	1.171.759	1.226.376	1.354.068	1.328.648
2.	Pengeluaran Pangan Perkapita	(JutaRp/Bulan)	592.459	753.894	782.980	773.883	893.654	796.413
3.	Pengeluaran Perkapita Total	(JutaRp/Bulan)	1.560.921	1.966.789	1.954.739	2.000.258	2.247.722	2.125.061
4.	Presentase Pengeluaran Non Pangan	persen	62,04%	61,67%	59,94%	61,31%	60,24%	62,52%
5.	Presentase Pengeluaran Pangan	persen	37,96%	38,33%	40,06%	38,69%	39,76%	37,48%

Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2022; 2021; 2020; 2019; 2018; Kota Denpasar Dalam Angka 2022; 2021; 2020; 2019; 2018

Pengeluaran konsumsi rumah tangga non-pangan per kapita Kota Denpasar memiliki tren yang cenderung fluktuatif, namun berkisar pada angka 60-an persen dari tahun 2016 hingga 2017. Pada tahun awal (2016), berada di angka 62,04 persen dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya.



Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2016; 2017; 2018

Gambar 2.28
Perbandingan Persentase Pengeluaran Pangan Per Kapita dengan Pengeluaran Non Pangan Per Kapita Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

Grafik di atas menggambarkan perbandingan antara persentase pengeluaran pangan perkapita dan pengeluaran non-pangan perkapita Kota Denpasar. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pengeluaran non-pangan masyarakat Kota Denpasar sempat mengalami penurunan tahun 2018 tetapi terus mengalami peningkatan setelahnya. Pengeluaran non-pangan perkapita memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pangan perkapita, hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran masyarakat untuk non-pangan lebih besar dari pengeluaran untuk pangan. Tingginya pengeluaran non-pangan bahkan melebihi 50 persen menandakan bahwa penduduk Kota Denpasar cukup sejahtera. Masyarakat tidak hanya memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan primer, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan sekunder bahkan tersier. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Kota Denpasar memiliki kemampuan daya beli dan kondisi ini dapat dimanfaatkan sebagai sebuah peluang untuk menarik investor.

4. Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa

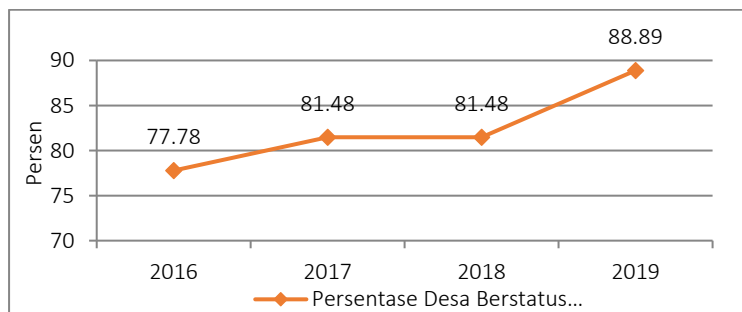
Desa swasembada ialah desa yang masyarakatnya mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya alam, sejalan dengan pembangunan regionalnya. Desa

swasembada sebagian besar berada di ibukota kecamatan dengan penduduk yang padat, fasilitas yang memadai, tidak terikat dengan adat istiadat, serta telah memiliki partisipasi masyarakat yang efektif. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan.

Tabel 2.26
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa
di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2019

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa atau kelurahan berswasembada	Desa/kel	21	22	22	24
2	Jumlah Desa atau kelurahan	Desa/kel	27	27	27	27
3	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	persen	77,78	81,48	81,48	88,89

Sumber: Website BPS Provinsi Bali (diolah)



Sumber: Website BPS Kota Denpasar

Gambar 2.29
Perkembangan Persentase Desa Berstatus Swasembada
di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2019

5. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Keterbukaan ekonomi merupakan ukuran sejauh mana perekonomian suatu daerah berhubungan dengan daerah lain dilihat dari sisi perdagangan, baik dalam cakupan nasional maupun internasional. Keterbukaan ekonomi terdiri dari dua

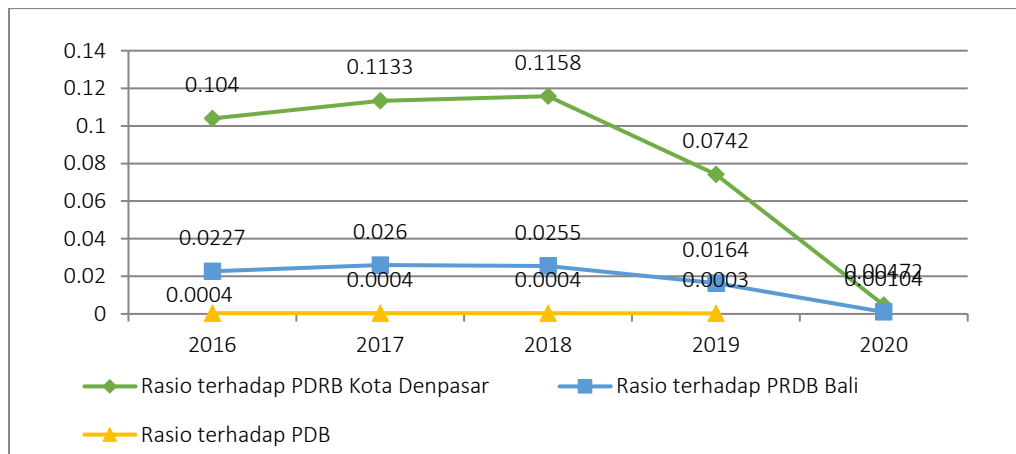
komponen yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan aktivitas perdagangan barang-barang yang diproduksi oleh daerah dan dijual ke luar daerah. Sementara itu, impor merupakan aktivitas perdagangan berupa masuknya barang yang diproduksi oleh daerah lain ke daerah. Keterbukaan ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan peluang untuk melakukan ekspor barang dengan nilai input berlimpah dan mengimpor barang dengan nilai input yang langka. Rasio keterbukaan ekonomi merupakan total perdagangan (ekspor dan impor) terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tabel 2.27
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ekspor (Juta Rp)	4.326.832,46	4.758.421,44	4.873.755,34	3.740.772,51	2.291.036,83
Jumlah Impor (Juta Rp)	84.286,81	772.680,19	1.080.287,87	392.194,39	50.482,73
Jumlah Ekspor dan Impor (Juta Rp)	4.411.119,27	5.531.101,63	5.954.043,21	4.132.966,9	2.341.519,56
PDRB Kota Denpasar (M Rp)	42.384,43	46.835,75	51.374,78	55.456,04	49.558,96
PDRB Provinsi Bali (M)	194.098,58	213.035,86	233.636,77	251.934,10	223.900,89
PDB (M)	12.401.728,5	13.589.825,7	14.838.756,0	15.832.657,2	15.438.017,5
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB Kota Denpasar	0,1040	0,1181	0,1158	0,0745	0,00472
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB Provinsi Bali	0,0227	0,0260	0,0255	0,0164	0,01046
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, 2020; Kota Denpasar dalam Angka 2022 dan 2021; Provinsi Bali dalam Angka 2022 dan 2021; Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2016-2020 dan 2017-2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah ekspor dan impor Kota Denpasar cenderung mengalami fluktuasi pada tahun 2016 hingga 2020. Jumlah ekspor dan impor Kota Denpasar paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan nilai mencapai 5,95 triliun dan paling rendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 2,34 triliun. Penurunan tajam yang terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19, sehingga kegiatan ekspor impor terhenti.



Sumber: Website BPS Provinsi Bali (diolah)

Gambar 2.30
Perkembangan Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB Kota Denpasar, PDRB Provinsi Bali dan PDB Tahun 2016–2020

Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kota Denpasar masih berada pada angka 0,07-0,13. Saat dibandingkan dengan PDRB Provinsi Bali, rasio ekspor impor Kota Denpasar berada disekitar 0,01-0,03. Selanjutnya ketika dibandingkan dengan level nasional, rasionya berada pada kisaran 0,0003-0,0004. Dari nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan perdagangan yang ada di Kota Denpasar didominasi oleh kegiatan perdagangan dalam wilayah, sedangkan perdagangan dengan wilayah lain baik dalam cakupan nasional maupun internasional sudah ada meskipun belum banyak berkontribusi. Hal ini dapat dijadikan sebagai sebuah peluang mengingat Kota Denpasar memiliki potensi komoditas ekspor yang masih bisa dioptimalkan.

6. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas adalah indikator yang penting untuk diperhatikan. Tingginya angka kriminalitas menjadi salah satu masalah & tantangan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Semakin tinggi angka kriminalitas hal tersebut mengindikasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Denpasar. Angka tersebut harus ditekan dengan berbagai upaya yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan social di masyarakat. Angka kriminalitas merupakan perbandingan tindak kriminalitas

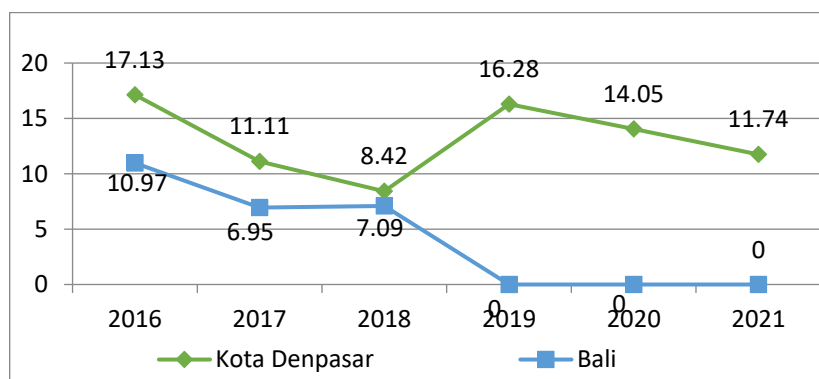
yang tertangani dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu kota/kabupaten dikalikan 10.000.

Tabel 2.28
Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tindak kriminal yang tertangani	Kasus	1.537	1.016	784	1542	1019	853
2	Jumlah penduduk	Jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	725.314	726.599
3	Angka kriminalitas yang tertangani		17,13	11,11	8,42	16,28	14,05	11,74

Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Bali

Berdasarkan data terlihat bahwa tindakan kriminal yang tertangani mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Diharapkan seluruh tindakan kriminal yang dilaporkan mampu diselesaikan oleh pihak terkait. Penanganan angka kriminalitas dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu tindak kriminalitas yang terjadi itu sendiri, tindak penanganan kriminal yang terjadi, dan jumlah penduduk. Sebagai upaya tindak lanjut ke depan, angka kriminalitas yang tertangani perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan preventif atau pencegahan kriminalitas.

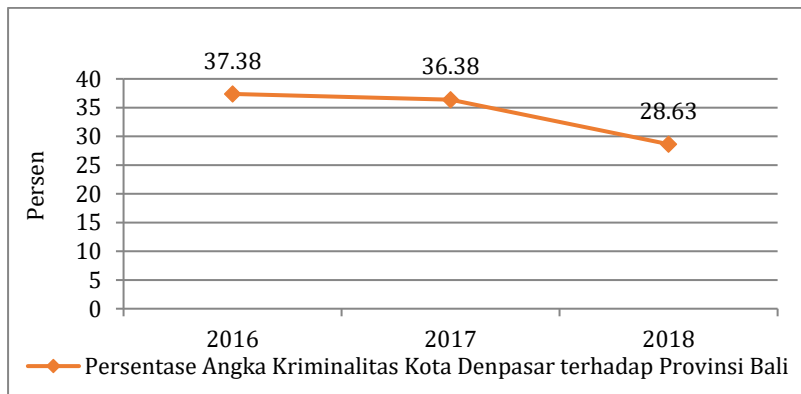


Gambar 2.31
Perkembangan Angka Kriminalitas Kota Denpasar Tahun 2016–2020

Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Bali 2018

Dilihat dari grafik di atas, pada tahun 2016 17,13. Pada tahun 2017 dan 2018 angka kriminalitas tertangani kembali menurun masing masing menjadi 11,11 dan 8,42. Meskipun melalui perhitungan ini masih mengabaikan rasio terhadap jumlah tindak kriminal yang terjadi, tetapi penurunan angka penanganan kriminalitas tersebut tetap menjadi hal yang patut dicermati karena

dapat mengindikasikan tingginya tindak kriminal yang terjadi di masyarakat. Terlebih lagi bagi Kota Denpasar yang bergerak dalam kegiatan pariwisata, tingginya angka kriminalitas akan mempengaruhi kenyamanan berkunjung bagi wisatawan sehingga aspek ini perlu diperhatikan lebih lanjut.



Gambar 2.32
Kontribusi Persentase Angka Kriminalitas Kota Denpasar
terhadap Angka Kriminalitas Total Provinsi Bali Tahun 2016-2018
Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Bali 2018 (diolah)

Meskipun dalam kurun waktu 2016-2018 angka kriminalitas tertangani di Kota Denpasar sudah lebih baik dari Bali, tetapi dalam kurun waktu itu pula angka kriminalitas tertangani Kota Denpasar terus mengalami penurunan, bahkan angka kriminalitas tertangani tahun 2018 jauh lebih rendah dari tahun 2016. Di sisi lain, penanganan kriminalitas di Kota Denpasar memiliki tingkat kepentingan tersendiri terutama dalam mendukung kegiatan pariwisata sehingga capaian pada indikator ini dapat dikatakan menggambarkan masih adanya permasalahan keamanan di Kota Denpasar. Kedepannya angka penanganan kriminalitas masih perlu untuk ditingkatkan guna lebih menciptakan keamanan baik untuk masyarakat lokal maupun wisatawan, termasuk untuk menekan jumlah kejadian tindak kriminal yang ada di Kota Denpasar.

Masih rendahnya angka kriminalitas tertangani di Kota Denpasar semakin penting ketika didukung dengan data masih tingginya kejadian kriminalitas. Berdasarkan dokumen Statistik Kriminal Provinsi Bali yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2018, kejadian kriminalitas di Kota Denpasar dalam kurun waktu 2015-2018 masih berperan besar dalam total kejadian kriminalitas di Provinsi Bali

dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan 49,68 persen dan terendah pada tahun 2018 dengan 28,63 persen. Meskipun demikian, dengan persentase kejadian kriminal 28,63 persen pada tahun 2018 masih menempatkan Kota Denpasar sebagai wilayah di Provinsi Bali dengan angka kriminalitas tertinggi. Oleh karena itu, aspek kriminalitas di Kota Denpasar menjadi permasalahan penting yang harus segera ditangani.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas wilayah/infrastruktur

1. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dapat menggambarkan sejauh mana jalan dapat mengakomodasi aktivitas penduduknya. Rasio ini memiliki arti, 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk didapatkan dari hasil perhitungan jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah panjang jalan di wilayah tersebut. Data panjang jalan yang tertera adalah data jalan kota yang memiliki surat keputusan (SK).

Tabel 2.29
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk	jiwa	897.300	914.300	930.600	947.100	725.314	726.599
Jumlah Panjang jalan	km	576,394	577,284	579,314	580,614	580,614	579.214
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Jiwa/km	1.557	1.584	1.606	1.631	1.249	1.255

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2021

Berdasarkan data, panjang jalan di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 panjang jalan tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 2021, rasio panjang jalannya yaitu 1.255 jiwa per km, artinya dalam setiap kilometer panjang jalan berbanding dengan akses untuk melayani 1.255 penduduk.

Jika dilihat dari trend-nya, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Artinya penggunaan jalan di Kota Denpasar semakin meningkat

setiap tahunnya. Jika tidak ada strategi untuk menghambat peningkatan maka dapat terjadi kemacetan pada jaringan jalan. Namun, pada tahun 2020 dan tahun 2021, terjadi penurunan yang disebabkan oleh adanya pandemic covid-19. Adanya pandemi tersebut berdampak pada munculnya kebijakan PSBB, dimana penduduk diharapkan untuk tetap di rumah dan tidak bepergian.

Bila dilihat dari kondisi jalannya, panjang jalan di Kota Denpasar pada tahun 2021 mencapai 579,314 km yang terdiri dari 486,084 km Jalan Kota, 43,23 km Jalan Provinsi dan 49,88 km Jalan Nasional. Kondisi jalan rusak sebesar 17,84% dengan kondisi rusak ringan sepanjang 70.11 km dan rusak berat sepanjang 34.18 km. Secara terinci kondisi jalan di Kota Denpasar disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Panjang dan Kondisi Jalan Kota Denpasar Tahun 2021

No. Urut	Nama Ruas Jalan	Panjang Jalan(km)	Lebar Badan Jalan (m)	Jenis Perkerasan (km)				Kondisi			
				Aspal Beton	Lapen	Limestone / Tanah	Paving Blok	Baik (km)	Sedang (km)	Rusak (km)	
										Ringan	Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Jalan Nasional	49,88	9,00 - 25,00	49,900	-	-	-	25,740	24,160	0,100	0,000
II	Jalan Propinsi	43,230	10,00 - 25,00	43,190	-	-	-	35,520	7,710	0,000	5,450
III	Jalan Kota	486,084	2,50 - 24,00	350,663	68,390	34,177	32,853	298,055	83,742	70,111	34,177
	Total	579,214		443,753	68,390	34,177	32,893	359,315	115,612	70,111	34,177

Sumber: DPUPR Kota Denpasar

Sedang banyaknya kendaraan bermotor menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Perkembangan Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Menurut Wilayah (Unit)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	183.416	191.778	200.932	214.574	217.766	222.532
Kab. Tabanan	370.487	386.821	404.804	427.386	436.248	443.154
Kab. Badung	755.706	796.657	844.680	897.286	919.698	934.120
Kab. Gianyar	388.365	408.582	432.012	457.482	470.076	477.128
Kab. Klungkung	113.242	120.692	128.680	142.064	141.161	143.598
Kab. Bangli	101.056	107.472	114.413	126.624	125.940	128.690
Kab. Karangasem	164.724	176.829	190.108	212.474	211.821	216.568

Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Menurut Wilayah (Unit)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Buleleng	382.901	403.590	426.958	453.709	465.076	474.431
Kota Denpasar	1.243.145	1.292.618	1.353.577	1.420.997	1.450.730	1.470.570
Provinsi Bali	3.725.392	3.907.094	4.117.949	4.352.596	4.438.695	4.510.791

Sumber: BPS Provinsi Bali

2. Pelayanan Angkutan

Kota Denpasar memiliki 4 terminal yang berlokasi di Ubung, Tegal, Wangaya dan Kreneng yang merupakan Terminal Tipe C dengan 3 terminal yang masih aktif sampai saat ini dikarenakan terminal wangaya beralih fungsi menjadi pasar dan terminal ubung menjadi terminal yang paling aktif. Jumlah kendaraan AKAP (Angkutan Kota Antar Provinsi) yang masuk terminal ubung ditahun 2017 mencapai 7.191 kendaraan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yakni sejumlah 11.663 kendaraan, Penurunan juga terjadi pada jumlah penumpang AKAP yang masuk Terminal Ubung dimana pada tahun 2016 jumlah penumpangnya 182.527 orang sedangkan pada tahun 2017 jumlah penumpang menurun dengan signifikan yakni menjadi 96.720 orang. Untuk AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi) yang masuk ke terminal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, berbanding lurus dengan jumlah AKDP jumlah penumpang yang masuk pun mengalami penurunan yang signifikan dari 75.354 menjadi 60.721. Penurunan jumlah penumpang ini karena dipengaruhi oleh turunnya kelas dari terminal tipe B menjadi terminal tipe C.

Tabel 2.32
Jumlah Angkutan Umum dan Penumpang Yang Masuk dan Keluar Terminal Ubung Tahun 2016 – 2021

Tahun	Masuk				Keluar			
	Kendaraan		Penumpang		Kendaraan		Penumpang	
	AKAP	AKDP	AKAP	AKDP	AKAP	AKDP	AKAP	AKDP
2016	11.663	9.797	182.527	75.354	18.097	9.797	370.134	70.657
2017	7.191	7.850	96.720	60.163	12.602	7.834	250.511	58.305
2018*	-	69.407	-	92.599	-	72.556	-	215.881
2019*	-	68.548	-	142.191	-	68.548	-	297.562
2020	-	74.388	-	77.623	-	74.388	-	145.397
2021	-	92.819	-	257.180	-	92.168	-	218.015

*dari tahun 2018 AKAP tidak masuk terminal ubung

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Untuk mengawasi kelayakan operasional kendaraan angkutan umum dan barang, Dinas Perhubungan Kota Denpasar memiliki gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor khusus untuk menangani bidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang ditangani UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jenis Kendaraan			
	Mobil Penumpang Umum	Mobil Bus	Mobil Barang	Kereta Tempelan
2016	13.404	2.705	4.132	1
2017	13.599	2.702	4.125	1
2018	4.312	2.766	1.239	22
2019	5.210	2.922	1.407	21
2020	1.723	972	3.501	6
2021	674	990	2.464	4

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk mobil penumpang umum meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yang cukup signifikan, Dimana pada tahun 2017 jumlah kendaraan penumpang umum yang melaksanakan uji kir berjumlah 13.599 tetapi tahun 2018 terjadi penurunan hingga mencapai angka 4.312 dan tahun 2019 menjadi 5.210. Berbeda dengan kendaraan mobil bus dan mobil barang yang sudah diuji mengalami sedikit peningkatan. Di Kota Denpasar juga beroperasi Terminal Barang yang berlokasi di Kantor Induk Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Potensi yang ada pada terminal ini sangatlah besar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tingginya volume kendaraan angkutan barang yang masuk terminal untuk melintas, bongkar muat, maupun sebagai tempat untuk beristirahat. Jumlah barang keluar masuk terminal barang dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Jumlah barang keluar masuk terminal barang Tahun 2016 – 2021

Tahun	Barang (ton)	
	Masuk	Keluar
2016	1.779.194	1.779.194

Tahun	Barang (ton)	
	Masuk	Keluar
2017	1.210.610	1.210.610
2018	609.440	609.440
2019	779.831	779.831
2020	244.948	244.948
2021	345.434	345.434

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar

3. Luas wilayah produktif

Untuk luas wilayah produktif di Kota Denpasar dari tahun ketahun mengalami penyusutan. Hal itu disebabkan oleh alih fungsi lahan yang semakin meningkat. Kecamatan Denpasar Selatan paling banyak mengalami penyusutan lahan produktif. Untuk Kecamatan Denpasar Selatan mengalami penyusutan lahan produktif seluas 284 ha yaitu dari tahun 2016 luas wilayah produktif 820 ha menjadi 536 ha pada tahun 2019. Alih fungsi Lahan Sawah Kota Denpasar periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 seluas 521 ha. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Luas Wilayah Produktif Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

Wilayah Produktif	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lahan Sawah	2.444	2.409	2.170	1.958	1.958	1.915
Lahan Pertanian Bukan Sawah	513	510	510	510	510	510
Lahan Bukan Sawah	9.821	9.859	9.856	10.310	10.310	10.353

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar

Tabel 2.36
Luas Lahan Sawah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Lahan Sawah (ha)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Denpasar Utara	688	677	651	589	589	587
Denpasar Selatan	816	800	631	536	536	536
Denpasar Timur	695	690	648	616	616	584
Denpasar Barat	245	242	240	217	217	208
Jumlah	2.444	2.409	2.170	1.958	1958	1915

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar

4. Hotel dan Restoran

Sesuai dengan karakteristik umum daerah perkotaan, perekonomian Kota Denpasar sebagian besar ditopang oleh sektor-sektor tersier dengan kontribusi mencapai 88,24 % pada tahun 2018. Kontribusi terbesar berasal dari sektor hotel dan restoran yang mencapai 28,61%. Hal ini berkaitan dengan peran Denpasar sebagai pintu gerbang pariwisata di Bali. Maju atau mundurnya sektor pariwisata di Bali akan memberikan dampak langsung bagi perekonomian Kota Denpasar.

Untuk menunjang kepariwisataan, Kota Denpasar pada tahun 2021 memiliki 49 unit Hotel Bintang dengan 6.061 jumlah kamar, untuk hotel non bintang memiliki 305 unit dengan 5.442 jumlah kamar. Pondok wisata memiliki 88 unit dengan 848 jumlah kamar.

Tabel 2.37
Jumlah Hotel Bintang, Hotel Non Bintang dan Pondok Wisata di Kota Denpasar Tahun 2021 menurut Kecamatan

Kecamatan	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang		Pondok Wisata		Villa	
	Jumlah Unit	Jumlah Kamar	Jumlah Unit	Jumlah Kamar	Jumlah Unit	Jumlah Kamar	Jumlah Unit	Jumlah Kamar
Denpasar Utara	3	278	73	1.320	15	292	0	0
Denpasar Selatan	31	4.188	132	1.765	50	272	81	507
Denpasar Timur	3	222	33	705	5	14	6	18
Denpasar Barat	12	1.373	67	1.652	18	270	6	12
Jumlah	49	6.061	305	5.442	88	848	93	537

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar 2021

Dalam menunjang pariwisata, di Kota Denpasar terdapat 1.109 usaha jasa makanan dan minuman yang disampaikan secara terinci pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Jumlah Usaha Jasa Makanan dan Minuman di Kota Denpasar Tahun 2021

No	Jenis Usaha	Kecamatan				Jumlah
		Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	
1	Restoran	187	46	91	35	359
2	Rumah Makan	251	123	130	141	645
3	Bar	-	-	-	-	-
4	Kafe	32	24	30	13	99
5	Pusat Penjualan Makanan	5	-	1	-	6
6	Jasa Boga	-	-	-	-	-
	Total	475	193	252	189	1.109

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar

5. Air Minum, Listrik dan Telepon

Pada tahun 2018 jumlah pelanggan PDAM berjumlah 85.136. tahun 2019 jumlah pelanggan PDAM Kota Denpasar meningkat sebesar 2,65% menjadi 87.396 pada tahun 2019. Selengkapnya seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Jumlah Langgan, Produksi, Penggunaan Air Minum pada PDAM Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jumlah Langgan (orang)	Produksi Air Minum (m ³)	Penggunaan Air (m ³)	Persentase
2016	82.353	39.616.845	24.738.454	62,44
2017	83.470	38.431.628	23.162.592	60,27
2018	85.136	42.281.938	22.684.497	54.05
2019	87.396	42.610.522	23.569.298	55.31
2020	88.820	41.237.125	23.655.607	57.36
2021	89.129	40.397.890	21.360.886	52.88

Sumber: PDAM Kota Denpasar

Tabel 2.40
Jumlah Pengguna Air Minum (m³) pada PDAM Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

Tahun	Golongan Pemakaian		
	Rumah Tangga dan Instansi	Niaga dan Industri	Badan Sosial dan Mobil Tangki
2016	21.064.825	3.444.158	229.471
2017	19.913.722	3.037.042	211.400
2018	20.144.256	2.859.112	210.943
2019	20.362.100	2.773.998	281.488
2020	20.850.595	2.499.177	305.835
2021	19.024.179	2.072.424	264.283

Sumber PDAM Kota Denpasar

2.1.4.3. Fokus iklim berinvestasi

1. Pelayanan perijinan

Pelayanan perijinan di Kota Denpasar tahun 2016 dari 14.402 permohonan ijin masuk diterbitkan sebanyak 12.600 buah, ditolak 1.802 buah dan tidak ada r menurut Dari tahun 2020 dengan adanya aplikasi OSS dari BKPSDM, SIMBG dari PUPR beberapa jenis ijin telah terlayani di aplikasi tersebut sehingga data jumlah

ijin terbit di Kota Denpasar terlihat menurun. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.41
Laporan Pelayanan Perijinan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Permohonan ijin masuk	14.402	11.656	8.882	6.193	6.526	4.040
2	Ditangguhkan	-	-	-	-	0	0
3	Ditolak	1.802	1.256	963	764	224	56
4	Ijin diterbitkan	12.600	10.400	7.919	5.429	4.331	2.515
5	Sedang dalam proses	-	-	-	-	561	1.469
6	Jumlah terbit melalui penangguhan	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah terbit langsung	12.600	10.400	7.919	5.429	4.331	2.515
8	Jumlah terbit Sesuai Janji Layanan	3.414	3.577	6.133	5.332	3.719	2.226

Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kota Denpasar

2. Pelanggaran Peraturan Daerah

Dalam melaksanakan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan di atasnya, Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota dalam melaksanakan pembangunan daerah serta mengatur keamanan dan ketertiban umum. Jumlah pelanggaran peraturan daerah (perda) pada tahun 2019 paling banyak terjadi pada ijin mendirikan bangunan (IMB) demikian juga sampe tahun 2021. Selengkapnya disajikan pada table berikut.

Tabel 2.42
Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Denpasar

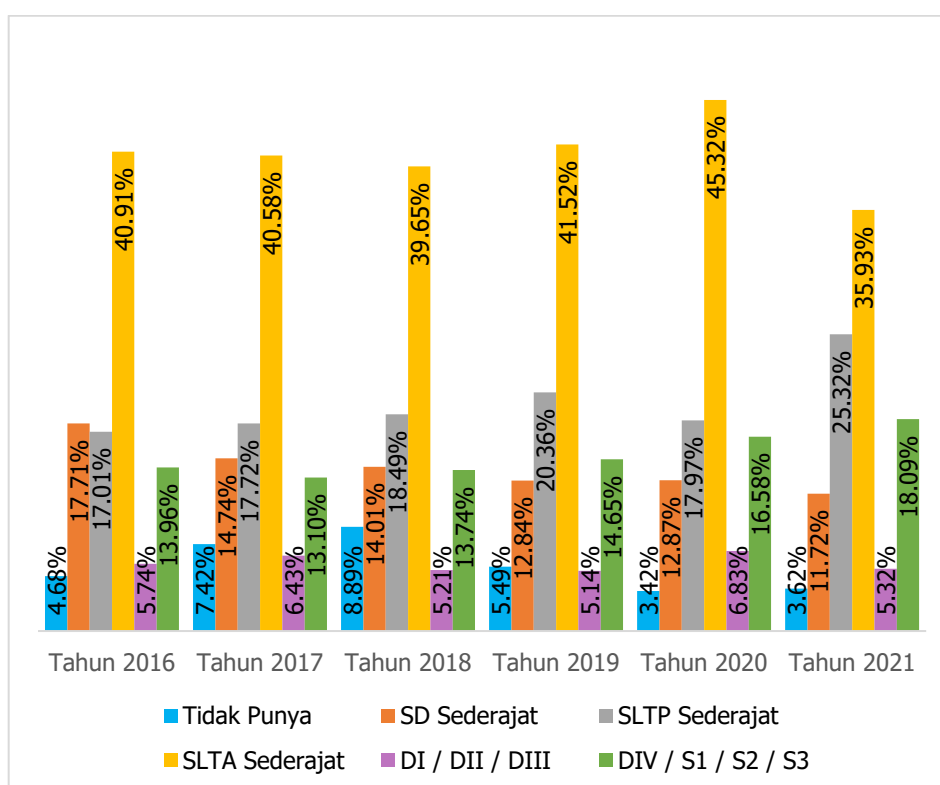
No	Pelanggaran	Jumlah 2019	Jumlah 2020	Jumlah 2021
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	473	289	357
2	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	62	3	0
3	Garis Sempadan Sungai (GSS)	5	1	0
4	Emper (EMP) / Auning	2	0	4
5	Jalur Hijau (JH)	42	28	18
6	Style Bali (SB)	13	0	2
7	Tinggi Bangunan (TB)	0	0	0
8	Tower	0	1	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Tahun 2016 sampai dengan 2021, penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SMA masih dominan dibandingkan ijazah jenjang sarjana. Data Rasio Lulusan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

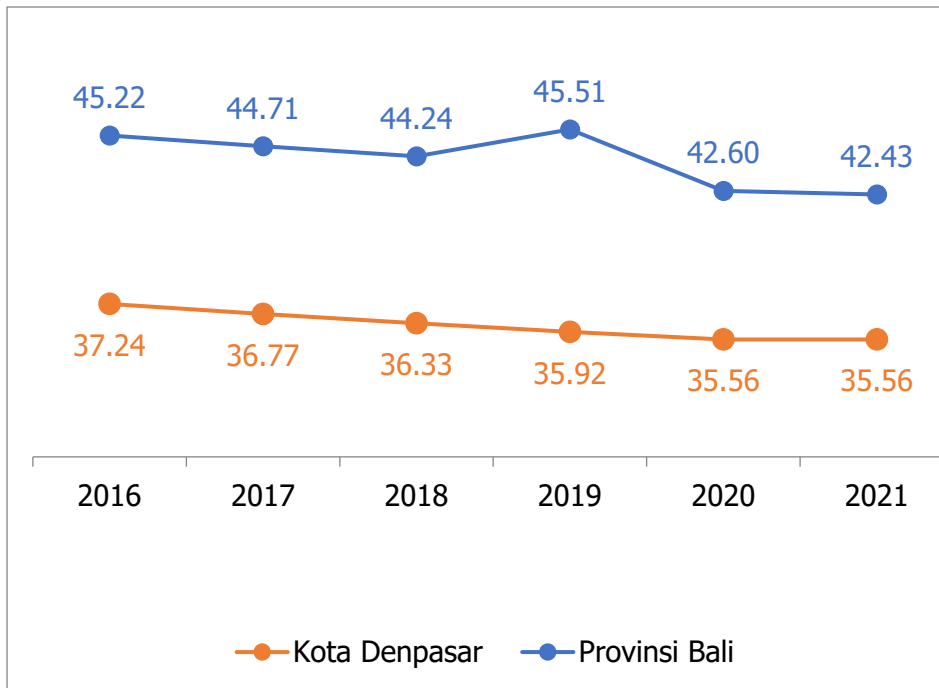


Gambar 2.33
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016-2021

2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin rendahnya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin rendahnya beban yang

harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tingkat ketergantungan penduduk Denpasar lebih rendah dibandingkan penduduk kabupaten lain di Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar 2.34

Dependency Ratio Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 (Paragraf 2 Pasal 280 s.d Pasal 295). Evaluasi capaian Pembangunan Kota Denpasar secara menyeluruh dapat dilihat dari capaian terhadap target indikator kinerja utama tahun 2021 seperti yang terlihat pada tabel 2.45 dibawah ini :

Tabel 2.43
Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2021 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 1 : Menguatnya Keberadaan Lembaga-Lembaga Tradisional								
1	Luas Areal Subak yang Dapat Dipertahankan	Hektar	1,958	1,94	1,915	98.71	2,289	83.66
2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	80.11	80.21	80.21	100.00	80.21	100.00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :						99.36		
SASARAN 2 : Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Budaya								

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2021 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :						N/A		
SASARAN 3 : MENGENTASKAN KEMISKINAN								
4	Angka Kemiskinan	Persen	2.14	2.00	2.96	99.52	2.00	99.52
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :						99.52		
SASARAN 4 : MENGURANGI PEGANGGURAN								
5	Angka Pengangguran	Persen	7.62	5.00	7.02	99.60	3.25	99.60
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :						99.60		
SASARAN 5 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT								
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.82	74.63	74.93	100.40	74.63	100.40
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5 :						100.40		
SASARAN 6 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT								
7	Indeks Pendidikan	Indeks	12.70	12.88	12.78	99.22	12.96	98.61
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6 :						99.22		
SASARAN 7 : MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK								
8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks	96.92	80.00	96.77	120.96	80.00	120.96
9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks	62.16	60.00	67.26	112.10	60.00	112.10
10	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Utama	Utama	Utama	100	Nindya	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7 :						111.02		
SASARAN 8 : MENGURANGI PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN								
11	Luas permukiman kumuh	Persen	31.00	20.00	17.42	66.98	33.84	66.98
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :						66.98		
SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR								
12	Jalan Kondisi Baik	Meter	385,188.90	334,878.68	299,704.70	89.50	334,878.68	89.50
		Persen	79.52	66.84	61.66	92.25		
13	Titik Genangan	Titik	4	4	4	100.00	4	100.00
14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	SR	75,672	80,663	76,738	95	81,044	94.69
15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	378,360.00	479,199.00	388,690.00	81.11	48.04	168.84
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9 :						92.12		
SASARAN 10 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL								
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87.16	84.00	86.28	102.71	84.00	102.71
17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB		BB	73		AA	
		Kategori	72.02	80.01	72.02	91.65	90.01	81.47
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :						98.12		
SASARAN 11 : BERKEMBANGNYA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PERDAGANGAN								
19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	8.34	4.00	1.64	41.00	4.00	41.00
20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	7.90	6.80	4.62	67.94	6.80	67.94
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :						54.47		
SASARAN 12 : MENINGATNYA KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA								
21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	62.86	35.00	17.00	48.57	100.00	48.57
		Jml LPD	30	35	22		35	
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :						48.57		
SASARAN 13 : MENINGKATNYA PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL								
22		Persen	0.50	0.50	0.00	0.00	2.50	0.00

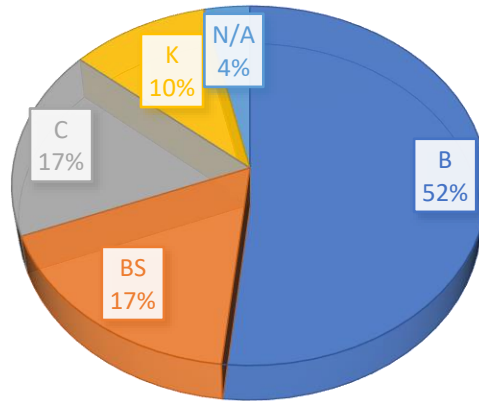
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2021 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	
				TARGET	REALISASI	% REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Jml UM	450	600	600	100.00	750	80.00	
23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	66.00	75.00	66.00	88.00	75.00	88.00	
		Koperasi	692	734	692		787		
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :						94.00			
SASARAN 14 : MENINGKATNYA NILAI INVESTASI									
24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	63.49	2.5	(22.57)	#FIELD!	12.5	#FIELD!	
		Rupiah (Dalam Milyar)	5,653,450,420,135	5,435,443,725,345	4,377,268,130,075	80.53	5,435	80,538,512,053	
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :						80.53			
SASARAN 15 : MENINGKATKAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA									
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	56,302	61,932	42,259	68.23	667,086	6.33	
26	Lama Tinggal Wisatawan								
		- Asing	Hari	3.15	3.16	2.15	68.04	3.16	68.04
		- Domestik	Hari	3.12	3.13	2.28	72.84	3.13	72.84
27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Rupiah (Dalam Jutaan)	157,274	162,530,500,000	104,723,689,370	64.43	305,329	34,298,594.50	
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :						68.39			
SASARAN 16 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP									
28	Sampah tereduksi	Persen	27.00	30.00	20.00	66.67	30.00	66.67	
29	Indeks LH	Indeks	55.720	57.300	59.470	103.787	55.240	107.657	
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :						85.23			

Skala penilaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 menggunakan skala seperti Tabel 2.46.

Tabel 2.44
Katagori Capaian Kinerja Indikator Sasaran

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd 100%	Baik (B)
3	55% sd 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal seperti diatas.



Gambar 2.35
Grafik Capaian Kinerja

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, diketahui bahwa 5 indikator atau 17% kategori Baik Sekali dan melampaui target, 15 indikator atau 52% kategori Baik, 5 indikator atau 17% kategori Cukup, 3 indikator atau 10% kategori Kurang dan 1 indikator atau 4% kategori Data Belum Tersedia. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 86,50% atau bermakna Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 termasuk dalam Kategori "Baik". Terdapat 1 (satu) IKU yang masih menggunakan data capaian Tahun 2020, yaitu penilaian SAKIP. Dimana sampai dengan pelaporan LAKIP Tahun 2021 ini disusun, hasil penilaian SAKIP Tahun 2021 belum dirilis oleh Kementerian PAN dan RB.

2.2.1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Denpasar Tahun 2021

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 (3) dan Pasal 18 (2) terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memprioritaskan 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Adapun 6 Pelayanan Dasar dimaksud yaitu:

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

- 2. Bidang Sosial**
 - a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:
 - Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota.
 - Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial:
 - Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota.
 - c. Penanggulangan korban bencana:
 - Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota.
 - Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/Kota.
 - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial:
 - Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota.
- 3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
 - a. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - b. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia
- 4. Bidang Kesehatan**
 - a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil
 - b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin
 - c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita
 - e. Pelayanan Kesehatan Pada Pendidikan dasar
 - f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
 - g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
 - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
 - j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
 - l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

5. Bidang Pendidikan
 - Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota
 - a. Pendidikan Dasar
 - b. Pendidikan Kesetaraan
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini
6. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

2.2.1.1. Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan tertuang dalam 12 indikator. Data Indikator dan target SPM Kota Denpasar tertuang dalam tabel dibawah.

Tabel 2.45
Indikator dan target SPM Kota Denpasar

NO	SPM KESEHATAN			
	INDIKATOR	TARGET	TAHUN	PERANGKAT DAERAH
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	100	2021	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100	2021	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	100	2021	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	2021	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Pada Pendidikan dasar	100	2021	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100	2021	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	2021	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	2021	Dinas Kesehatan

NO	SPM KESEHATAN			
	INDIKATOR	TARGET	TAHUN	PERANGKAT DAERAH
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100	2021	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	2021	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100	2021	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	2021	Dinas Kesehatan

Tabel 2.46

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kota Denpasar tahun 2021 adalah sebagai berikut

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN			DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	KETERANGAN
					APBD (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,65%	0	Rp. 97.990.046 (pajak rokok, BOK)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)		1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98,25%	0	Rp. 1.353.890.792 (DAK-Jampersal, BOK)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)		1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	0	Rp. 78.310.528 (pajak rokok)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)		1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Baru Lahir
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	63,78%	0	Rp. 2.918.766.786		14 (Dinas Kesehatan Kota	Situasi pandemi COVID-19 membuat pelayanan terhadap	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN			DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	KETERANGAN
					APBD (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
						(DID, pajak rokok)		Denpasar dan Puskesmas)	balita di Posyandu tidak dapat berjalan dengan penuh.	Pelayanan Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96,15%	0	Rp. 599.223.082 (pajak rokok)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)		1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	88,86%	0	Rp. 489.125.220 (pajak rokok)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Pandemi COVID-19 tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak sasaran untuk di screening.	1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87,26%	0	Rp. 49.030.280 (BOK, pajak rokok)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Pelaksanaan Posyandu Paripurna tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan masih terkendala Covid-19	1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
8	Pelayanan kesehatan	Jumlah Warga Negara penderita	100%	52,75%	0	0		13 Personil (Dinas	Screening PTM tidak dapat dilaksanakan	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN			DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	KETERANGAN
					APBD (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
	penderita hipertensi	hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan						Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19.	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	0	Rp. 116.710.000 (pajak rokok)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)		1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	38,16%	0	Rp. 457.080.750 (pajak rokok)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar memiliki keterbatasan untuk menemukan penderita gangguan jiwa akibat adanya Pandemi COVID-19.	1.01.02.1.01.02.01.16.009 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	0	Rp. 716.006.540 (pajak rokok, DBH)		20 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)		1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (PPTI)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	100%	86,99%	0	Rp.753.303.376 (pajak rokok, DBH)		20 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar	Sasaran 8 kunci pemeriksaan orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke	1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN			DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	KETERANGAN
					APBD (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
	daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan						dan Puskesmas)	Pos Pelayanan sangat minim.	Dengan Resiko Terinfeksi HIV (KPA)

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang realisasinya di bawah seratus persen (100%) antara lain :

1. Pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang dimana data diminta adalah Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas kesehatan dengan sebanyak 17.051 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 95,65%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini jumlah kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan masih kurang akibat situasi pandemi COVID-19, banyak yang menunda datang ke pelayanan kesehatan dan banyak masyarakat yang kembali ke daerah asal.
2. Pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang dimana data diminta adalah Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan adalah sebanyak 16.638 orang, dengan demikian target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 98,25%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih kurang akibat situasi pandemi COVID-19, banyak yang menunda datang ke pelayanan kesehatan dan banyak masyarakat atau ibu bersalin yang kembali ke daerah asal.
3. Pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang dimana data diminta adalah Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah 16.205 bayi, dengan demikian target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 100%.
4. Pada Pelayanan Kesehatan Balita yang dimana data diminta adalah Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 39.457 balita, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 63,78%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini dimana situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 membuat pelayanan terhadap balita di beberapa Posyandu di Kota Denpasar menjadi tertunda.
5. Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dimana data diminta adalah Jumlah semua anak usia pendidikan dasar 7 sampai dengan 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak

116.500 orang, dengan demikian target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 96,15%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini dimana situasi Pandemi COVID-19 pada tahun 2021 mengakibatkan ada beberapa siswa di Kota Denpasar belum melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) saat screening.

6. Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dimana data diminta adalah Jumlah pengunjung berusia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 395.845 orang, dengan demikian target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 88,86%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini dimana situasi Pandemi COVID-19 pada tahun 2021 tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak sasaran dalam pelaksanaan screening.
7. Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dimana data diminta adalah Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 53.830 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 87,26%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, adanya Pelaksanaan Posyandu Paripurna tertunda akibat COVID-19 di Tahun 2021.
8. Pada Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi yang dimana data diminta adalah Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 66.902 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 52,75%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, dimana Screening Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tidak mampu dilaksanakan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021.
9. Pada Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus yang dimana data diminta adalah Jumlah penyandang diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 10.353 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 100%.

10. Pada Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang dimana data diminta adalah Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 746 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 38,16%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, keterbatasan untuk menemukan penderita gangguan jiwa akibat Pandemi COVID-19 yang masih terjadi di tahun 2021.
11. Pada Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dimana data diminta adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 2.754 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 100%.
12. Pada Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang dimana data diminta adalah Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 20.404 orang, dengan realisasi capaian 86,99%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, terkait sasaran 8 kunci pemeriksaan pada orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke Pos Pelayanan Kesehatan sangat minim, dikarenakan pandemi Covid-19.

Solusi yang diambil terhadap permasalahan diatas:

Terjadinya Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Kota Denpasar hingga tahun 2021 memang membatasi ruang gerak masyarakat di Kota Denpasar. Banyaknya dari program pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar yang tidak bisa mencapai target di tahun 2021 ini, untuk meningkatkan capaian SPM Bidang Kesehatan maka Dinas Kesehatan Kota Denpasar melalui Puskesmas membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan capaian program diantaranya:

1. Peningkatan pencapaian Pelayanan Ibu Hamil
 - a. Pelaksanaan kelas ibu online
 - b. Inovasi KOI ELOK (Kohort Ibu hamil elektronik)

- c. PEDULI BUMII (Pelayanan dahulukan ibu hamil) : (Pelayanan diberikan kepada ibu hamil dengan tidak mengantri di loket umum dan di ruang rujukan terpadu)
2. Peningkatan Pencapaian Pelayanan Ibu Bersalin di masa Pandemi COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Denpasar melalui Puskesmas melaksanakan beberapa inovasi yang dikomunikasikan melalui grup whatsapp :
 - a. Perencanaan persalinan aman
 - b. Rujukan dini berencana dengan stiker resiko tinggi ibu hamil (JUDICA SIRESTI)
 - c. SEHATI (setetes darah untuk ibu hamil dengan tulus dan ikhlas)
3. Peningkatan pencapaian pelayanan kesehatan balita dibuat inovasi yang dikomunikasikan melalui grup whatsapp:
 - a. NGOBRAS SENI (ngobrol asik seputar imunisasi)
 - b. SURAT CINTAKU (surat catatan imunisasi dasar dan lanjutan untuk kunjungan ulang)
 - c. Janji timbang yang dilakukan dari rumah ke rumah oleh kader dengan penerapan protocol kesehatan pada masa Pandemi COVID-19
 - d. Kelas online ibu balita terintergrasi melalui grup whatsapp

2.2.1.2. Bidang Urusan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait tersebut tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan Dasar

3. Pendidikan Kesetaraan

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.47
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pendidikan dan Kepemudaan
Olahraga Kota Denpasar

No	SPM Pendidikan				
	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Tahun	Perangkat Daerah
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	2021	Disdikpora
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2021	Disdikpora
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2021	Disdikpora

Tabel 2.48

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	realisasi	Alokasi Anggaran			Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi	Keterangan
					APBD	APBN	Lainnya			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	99,40%	0	0	0	Personil terdiri dari 8 tim survey ke lapangan dan 4 verifikator	Terkendala APBD tahun 2021, solusi akan dianggarkan tahun 2022 dan Situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 mengakibatkan siswa tidak dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	99,66%	0	0	0	Personil terdiri dari 8 tim survey ke lapangan dan 4 verifikator	Terkendala APBD tahun 2021, solusi akan dianggarkan tahun 2022 dan Situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 mengakibatkan siswa tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka si Sekolah.	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	62,19%	0	0	0	Personil terdiri dari 8 tim survey ke lapangan dan 4 verifikator	Terkendala APBD Tahun 2021 Solusi : akan dianggarkan pada tahun berikutnya. Realisasi dari Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebanyak	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	realisasi	Alokasi Anggaran			Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi	Keterangan
					APBD	APBN	Lainnya			
									62.19% dikarenakan pada anak usia 6 tahun sudah terdaftar di SD/MI.	

Permasalahan Dan Solusi

Berdasarkan tabel diatas adapun beberapa kegiatan yang target dan realisasinya sesuai seratus persen (100%) antara lain :

1. Pada Pelayanan Pendidikan Dasar yang dimana data diminta adalah Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan demikian target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 99,94%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, terkendala APBD tahun 2021. Solusinya akan dianggarkan tahun 2022 dan Situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 mengakibatkan siswa tidak dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.
2. Pada Pelayanan Pendidikan Kesetaraan yang dimana data diminta adalah Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan demikian target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 98,66%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, terkendala APBD tahun 2021. Solusinya akan dianggarkan tahun 2022 dan Situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 mengakibatkan siswa tidak dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.
3. Pada Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang dimana data diminta adalah Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dengan target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 62,19%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, terkendala APBD tahun 2021. Solusinya akan dianggarkan tahun 2022 dan Situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021, realisasi dari Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebanyak 62.19% dikarenakan pada anak usia 6 tahun sudah terdaftar di SD/MI.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar adalah terkendalanya terkait APBD tahun 2021 dan situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 yang mengakibatkan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Setelah pendidik, tenaga kependidikan dan murid di satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan menyediakan layanan untuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada semester genap tahun pelajaran 2021/2022. Ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yakni Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK. 01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, sehubungan dengan turunnya status level PPKM Provinsi Bali dan Kota Denpasar ke level 3, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021, maka mulai 1 Oktober 2021 dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Dimana, pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 dilakukan secara bertahap di Satuan Pendidikan yang sudah siap dan memenuhi persyaratan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa darurat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta untuk mengantisipasi hilangnya kesempatan belajar bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di Kota Denpasar.

Solusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Kota Denpasar adalah melihat belum pastinya kondisi Pandemi COVID-19 ini, maka upaya yang dilakukan adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% Tatap Muka dan 50% Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal ini kecuali untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMALB dan MALB yang maksimal 62% sampai

100% dengan menjaga jarak minimal 1,5m dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas, dan PAUD maksimal 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5m dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.

Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar untuk melaksanakan PTM Terbatas di Kota Denpasar tetap mengedepankan prinsip kebijakan pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. Yakni kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama. Selain itu, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan.

2.2.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yaitu:

Tabel 2.49
Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

NO	SPM Bidang Pekerjaan Umum				
	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Tahun	Perangkat Daerah
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	2021	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	2021	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.50

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	realisasi	Alokasi Anggaran			Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi	Keterangan
					APBD	APBN	Lainnya			
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	52,90% (76.738 SR) (388.690 Orang)	Rp. 222.113.724,00	Rp. 3.873.334.800,00		1. Dinas PUPR Kota Denpasar 2. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali 3. Perumda Air Minum Tirta Sewaka Darma	Permasalahan : 1. Keterbatasan sumber air baku yang potensial, karena Kota Denpasar memanfaatkan air baku hanya dari Sungai Ayung 2. Dana APBD yang terbatas dalam pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Budaya Masyarakat Kota Denpasar yang masih nyaman menggunakan sumur bor dan sumur dangkal tidak terlindungi untuk penyediaan air bersih di rumah tangga Solusi : 1) Berkoodinasi dengan pihak perumda Air Minum Tirta Sewakadarma untuk pembangunan Reservoir di beberapa titik rawan air bersih di Kota Denpasar	Sulit mencapai Target 100 % Air Minum Aman melalui jaringan pipa air minum terlindungi

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	realisasi	Alokasi Anggaran			Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi	Keterangan
					APBD	APBN	Lainnya			
									<p>sebagai tampungan cadangan air.</p> <p>2) Mengoptimalkan pasokan air baku melalui Kerjasama Regional SARBAGITA untuk Denpasar Barat melalui suplai dari IPA Penet di Kabupaten Badung dan Denpasar Timur melalui suplai air minum dari IPA Petanu di Kabupaten Gianyar.</p> <p>3) Mengoptimalkan Dana DAK dari Kementrian dalam program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.</p>	
2	Penyediaan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	8,61% (12.495 SR) (62.475 orang)	Rp. 84.312.250,00	Rp. 1.693.939.897,00		<p>1. Dinas PUPR Kota Denpasar</p> <p>2. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali</p> <p>3. Dinas PUPR Kim Provinsi Bali</p>	<p>Permasalahan :</p> <p>1) Pipa induk DSDP yang belum terpasang pada seluruh kawasan di Kota Denpasar, sehingga tidak bisa dipasangkan pipa sambungan rumah.</p> <p>2) Dana APBD yang terbatas dalam pelaksanaan Program</p>	Sulit mencapai Target 100 % Air Limbah Layak melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat.

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	realisasi	Alokasi Anggaran			Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi	Keterangan
					APBD	APBN	Lainnya			
									<p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah di Kota Denpasar.</p> <p>3) Masyarakat Kota Denpasar yang masih nyaman membuang limbah domestik rumah tangga melalui Septic Tank dan Sungai.</p> <p>4) Lahan yang terbatas dalam pembangunan IPAL Terpusat Skala Permukiman (Komunal).</p> <p>Solusi :</p> <p>1) Berkoordinasi dengan pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali untuk Pembangunan Instalasi Pipa Induk DSDP di wilayah-wilayah yang belum terpasang di Kota Denpasar</p> <p>2) Koordinasi dengan Bappeda Kota Denpasar untuk menganggarkan pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kota Denpasar</p>	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	realisasi	Alokasi Anggaran			Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi	Keterangan
					APBD	APBN	Lainnya			
									<p>3) Sosialisasi Kepada Masyarakat terhadap pentingnya pengolahan limbah domestik rumah tangga elalui IPAL Domestik Terpusat Skala Kota (DSDP) dan IPAL Domestik Terpusat Skala Permukiman (Komunal) untuk kesehatan dan kelestarian lingkungan.</p> <p>4) Mengupayakan lahan lahan yang tidak lazim untuk pembangunan IPAL Domestik Skala Permukiman (Komunal) seperti di bantaran sungai</p>	

2.2.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Perumahan Rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri

Tabel 2.51
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota

No	SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat				
	Layanan Dasar	Indikator	Target	Tahun	Perangkat Daerah
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	2021	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Fasilitasi penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%	2021	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.52

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Denpasar tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	realisasi	Alokasi Anggaran			Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi	Keterangan
					APBD	APBN	Lainnya			
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%	Rp. 31.750.000			17 personil		Anggaran APBD Provinsi Bali
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Fasilitasi penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%	100%						Kota Denpasar belum menganggarkan Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dikarenakan pada tahun 2021 Kota Denpasar tidak terjadi Bencana Alam

Permasalahan Dan Solusi

Pada tahun 2021, kegiatan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 100%. Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100% oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar karena tidak terjadinya Bencana Alam di Kota Denpasar.

Dalam memenuhi mutu pelayanan dasar pada setiap jenis layanan dasar untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diberikan kepada masyarakat pada tahun 2021, Pemerintah Kota Denpasar masih mengalami kendala. Untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota dikarenakan minimnya ketersediaan lahan baru di Kota Denpasar. Sedangkan pada kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbatasnya lahan untuk relokasi juga menjadi kendala dalam pencapaian jenis pada layanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Solusi yang diberikan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar pada tahun berikutnya untuk kegiatan tersebut akan tetap merancang anggaran untuk setiap tahun.

2.2.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 12 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut juga merupakan landasan hukum yang menjiwai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dalam Pasal 255 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda

dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk itu, masing-masing Daerah membuat landasan hukum baik berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan hukum pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yaitu:

Tabel 2.53
Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	2021	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	100%	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

No	Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korbankebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Tabel 2.54

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN			DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	KETERANGAN
					APBD (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	Rp. 1.130.001.600	0	0	119 Personil	Tidak adanya Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	Rp. 44.147.875	0	0	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Permasalahan : Kota Denpasar belum ada tersedianya data Daerah Rawan Bencana yang terbaru. Solusi : Meningkatkan Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiap Siagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	100%	100%	Rp. 2.822.636.844	0	0	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Permasalahan : Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang bermukim di Daerah Rawan Bencana. Solusi : Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100%	100%	Rp. 4.733.015.600	0	0	253 Personil	Permasalahan : Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan bencana belum secara optimal Sarana dan prasarana yang belum memadai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN			DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	KETERANGAN
					APBD (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
		korban bencana							Solusi : Meningkatkan pendidikan dan pelatihan/bimtek terkait penanggulangan bencana bagi aparatur. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	0	0	0	-	Permasalahan : Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan bencana belum secara optimal. Sarana dan prasarana yang belum memadai Solusi : Meningkatkan pendidikan dan pelatihan/bimtek terkait penanggulangan bencana bagi aparatur. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulan n bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut :

1. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Capaian pelayanan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan bersama-sama kelompok masyarakat menyusun kesepakatan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui **Sinergitas Gerakan Disiplin**.
2. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Menjalin kerjasama dengan stakeholder/komunitas yang peduli dengan kota Denpasar untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban.
3. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana.
4. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan bencana belum optimal.
5. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana Sarana dan prasarana yang belum memadai.

Solusi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut :

1. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, melalui fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Perda dan Perkada melalui kegiatan : monitoring dan pembinaan di wilayah kecamatan, penugasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO), melakukan fasilitasi terhadap kegiatan perlindungan masyarakat (pembekalan, kesamaptaan).
2. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan cara meningkatkan layanan informasi daerah rawan bencana, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi di Kota Denpasar.

2.2.1.6. Bidang Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar Bidang Sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal.

Pemenuhan taraf kesejahteraan masyarakat perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar masyarakat belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan. Pembangunan kesejahteraan sosial sasarannya adalah :

1. Perorangan, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena masalah kesejahteraan sosial mencakup kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, perilaku menyimpang dan cacat akibat bencana.
2. Potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan untuk mengembangkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Nilai dasar kesejahteraan sosial dan kepranataan sosial.

Tantangan kedepan bagi Pembangunan kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, yaitu:

Tabel 2.55
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

NO	SPM Bidang Urusan Sosial				
	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Tahun	Perangkat Daerah
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	2021	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	2021	Dinas Sosial

Tabel 2.56

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Sosial Kota Denpasar tahun 2021

	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	realisasi	Alokasi Anggaran			Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi	Keterangan
					APBD	APBN	Lainnya			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Rp. 57.055.350			23 personil		
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%					Tidak adanya laporan terkait anak terlantar di Kota Denpasar yang dilaporkan ke Dinas Sosial Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar tidak mendapatkan laporan terkait anak terlantar yang terdapat di Kota Denpasar
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Rp. 168.000.000			23 personil		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh	100%	100%	Rp. 5.070.000			23 personil		

	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	realisasi	Alokasi Anggaran			Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi	Keterangan
					APBD	APBN	Lainnya			
	dan pengemis di luar panti	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti								
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%				Dinas Sosial Kota Denpasar tidak memiliki anggaran APBD dan APBN untuk penanganan perlindungan & jaminan sosial tanggap bencana	Dinas Sosial Kota Denpasar tidak memiliki anggaran APBD dan APBN untuk penanganan perlindungan & jaminan sosial tanggap bencana	

Permasalahan Dan Solusi

Meskipun capaian target SPM telah mencapai 100%, tetapi guna optimalisasi penanganan rehabilitasi sosial terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Selama adanya pandemi Covid-19 Tahun 2021 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Pada kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota bahwa Dinas Sosial Kota Denpasar tidak memiliki terkait anggaran APBD dan APBN untuk penanganan perlindungan & jaminan sosial tanggap bencana.
3. Pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Luar Panti bahwa Dinas Sosial Kota Denpasar tidak mendapatkan laporan terkait anak terlantar yang terdapat di Kota Denpasar.

Solusi yang dihadapi dalam Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Sosial karena adanya wabah pandemi COVID-19 di Kota Denpasar yang dimana Kota Denpasar memprioritaskan program kegiatan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap kegiatan yang akan terus dilaksanakan setiap tahun.

2.2.2. Keselarasan Program dan Kegiatan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021.

Pelaksanaan APBD Tahun 2021 melaksanakan amanat PP Nomor 12 tahun 2019. Dalam aturan tersebut Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 menggunakan Bagan Akun Standar (BAS) yang memuat kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur yang selaras dengan pusat. BAS yang digunakan merujuk pada Permendagri 90 Tahun 2019. Dilain sisi, RKPD 2021 yang disusun tahun 2019 belum menerapkan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur seperti tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019. RKPD 2021 masih memuat

klasifikasi dan kodefikasi seperti termuat dalam Permendagri 13 tahun 2016. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur Program Kegiatan yang tertuang Pada dokumen RKPD 2021 dengan yang dilaksanakan pada APBD 2021.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 70 tahun 2019, Tahun 2021 merupakan tahun awal pelaksanaan perencanaan dan penganggaran terintegrasi melalui aplikasi SIPD yang disediakan oleh Pusat. Melalui aplikasi ini terfasilitasi proses mapping antara kodefikasi dan klasifikasi program-kegiatan RKPD 2021 kedalam kodefikasi dan klasifikasi program-kegiatan-subkegiatan untuk dituangkan dalam APBD 2021. Sebelum tertuang kedalam APBD, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan subkegiatan yang tertuang dalam permendagri 90 tahun 2019 mengalami beberapa pemutakhiran sesuai amanat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga setelah melalui proses pemetaan diperlukan juga proses pemutakhiran untuk mendapatkan program-kegiatan-subkegiatan yang tertuang pada APBD 2021. Selanjutnya dalam pelaksanaan evaluasi akan mengacu pada pelaksanaan program-kegiatan yang termuat dalam APBD 2021.

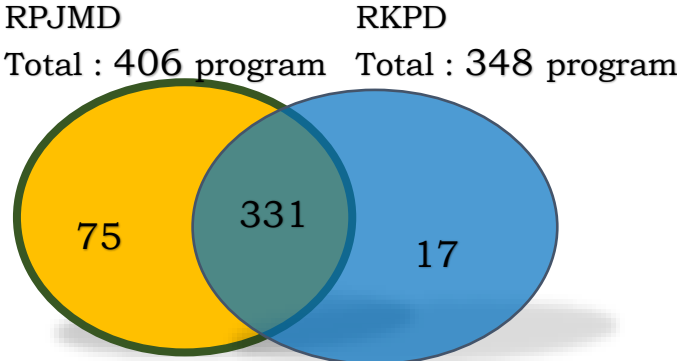
Dengan adanya pemetaan, berimbans pada realisasi kegiatan, mengingat perangkat daerah harus menyesuaikan nomenklatur kegiatannya terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 telah terjadi tiga kali pergeseran pada APBD induk dan dua kali Pergeseran setelah APBD Perubahan. Hal ini untuk mengakomodir pemetaan program-kegiatan-subkegiatan yang bersumber dari dana pusat. Dengan adanya pemetaan ini diharapkan arah dan kebijakan dana pusat dapat tertuang dan dilaksanakan sesuai dengan nomenklatur program-kegiatan-sub kegiatan yang sesuai.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 2021 merupakan tahun akhir periode RPJMD 2016-2021. Pada tahun 2021 terdapat perbedaan nomenklatur program-kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD 2021) dengan dokumen penganggaran (APBD

2021). Hal ini tentu akan menjadi kendala dalam pengukuran keselarasan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran. Selanjutnya dalam pelaksanaan evaluasi untuk memonitor keselarasan dokumen perencanaan dengan penganggaran maka digunakan data nomenklatur program-kegiatan-subkegiatan perencanaan yang telah dipetakan dan dimutakhirkan dalam aplikasi SIPD.

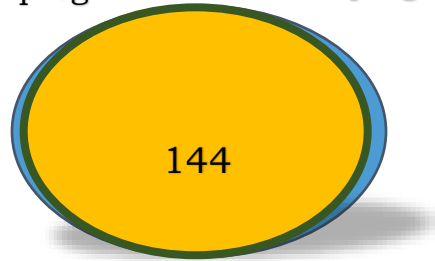
Dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Perda Nomor 3 Tahun 2017) terdapat 406 program yang seharusnya dilaksanakan tahun 2021 yang terbagi dalam urusan dan perangkat daerah pengampu. Dari 406 program yang ada didalam RPJMD tersebut, sebanyak 331 tertuang kedalam RKPd Tahun Anggaran 2021, 75 program yang ada di RPJMD tetapi tidak diambil pada RKPd 2021, dan terdapat 17 program yang tertuang dalam RKPd untuk perangkat daerah berbeda nomenklatur dengan yang tertuang dalam RPJMD. Keselarasan Program antara RPJMD dengan RKPd tertuang seperti pada tabel berikut:



Gambar 2.36
Kesesuaian Jumlah Program RKPd Tahun 2021 dengan Program RPJMD

Pada RKPd tahun 2021 hasil mapping kedalam nomenklatur 050-3708 terdapat total sebanyak 144 program yang tersebar ke sejumlah 36 perangkat daerah. Pada APBD hasil pemutahiran pergeseran kedua juga terdapat total sebanyak 144 program yang tersebar ke sejumlah 36 perangkat daerah. Keselarasan antara program yang tertuang dalam RKPd dan APBD 2021 terlihat pada gambar dibawah ini.

RKPD APBD
Total : 144 program Total : 144 program



Gambar 2.37
Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2021 dengan Program APBD Tahun 2021

Daftar program beserta Perangkat daerah pengampunya dapat dilihat seperti pada tabel 2.5

Tabel 2.57
Rekap Capaian Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					ANGGARAN				
							R	S	SR	ST	T	R	S	SR	ST	T
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16,677,592,228	15,445,400,000	3	8	16		1		2		1				2
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9,754,329,275	9,286,714,060	5	9	18				5					5	
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	30,275,097,296	23,304,247,926	2	9	24				2				1		1
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	30,224,845,633	27,527,089,749	1	5	16				1					1	
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9,084,236,686	7,565,977,644	2	7	15				2					1	1
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	255,368,224,880	215,463,908,038	3	11	47				3					2	1
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11,783,368,428	10,029,331,445	3	9	14				3						3
8	BLUD RSUD WANGAYA	247,790,546,272	229,278,657,503	2	2	2				1	1				1	1
9	DINAS KEBUDAYAAN	41,575,384,271	36,226,718,234	3	9	17			1	1	1			1		2
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14,745,716,048	13,840,183,195	3	11	19		1		1	1			1	1	1
11	DINAS KESEHATAN	216,202,079,503	172,613,708,551	5	16	51				3	2	1	2	1	1	
12	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	13,503,795,253	12,842,472,406	4	7	18				1	3				1	3
13	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	9,722,905,982	7,034,485,877	3	7	16				3					1	2
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	97,137,836,626	78,036,870,025	4	8	14	1	2		1		1			1	2
15	DINAS PARIWISATA	29,172,864,091	27,257,546,543	4	9	18				4					3	1

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					ANGGARAN				
							R	S	SR	ST	T	R	S	SR	ST	T
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	110,097,404,614	94,018,506,831	12	21	38				11	1		4		5	3
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10,229,226,417	9,137,094,801	4	8	18				4					4	
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12,832,838,881	10,721,260,128	5	12	22				5					5	
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22,544,958,323	20,517,365,137	5	8	17			1	4				1	4	
20	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	518,124,956,594	452,587,830,426	6	15	55				6				4		2
21	DINAS PERHUBUNGAN	69,449,193,607	59,529,782,090	3	13	28				3					1	2
22	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	12,073,165,392	11,226,432,029	5	9	18		1	2	1	1			1	3	1
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13,429,226,120	12,377,450,796	5	9	19	1			4		1		1	3	
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11,297,663,113	8,898,680,915	2	5	16					2					2
25	DINAS PERTANIAN	17,192,465,154	16,022,233,200	6	12	23				6					6	
26	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	85,669,818,803	79,898,468,248	8	12	21		1		4	3		1	1	3	3
27	DINAS SOSIAL	14,787,320,630	13,625,758,752	5	9	20				4	1				4	1
28	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	8,669,444,286	7,557,853,620	4	8	8				4					4	
29	INSPEKTORAT	16,686,156,750	13,781,928,285	3	9	22				3					3	
30	KECAMATAN DENPASAR BARAT	16,519,773,201	15,336,793,446	5	10	25				3	2				3	2

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					ANGGARAN				
							R	S	SR	ST	T	R	S	SR	ST	T
31	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	25,474,779,875	23,848,110,794	4	10	24				1	3				4	
32	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	20,615,453,731	18,356,869,173	3	7	22				2	1				2	1
33	KECAMATAN DENPASAR UTARA	16,725,592,940	7,914,931,446	5	9	19	1			3	1				5	
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24,010,167,461	22,016,682,324	2	5	14				2					2	
35	SEKRETARIAT DAERAH	77,433,498,483	74,626,400,857	3	13	26				3					2	1
36	SEKRETARIAT DPRD	67,542,526,640	58,968,690,155	2	15	42				2				1	1	
		2,204,424,453,487	1,916,722,434,649	144	346	802	3	6	3	109	23	4	7	13	82	38

2.2.3. Analisis Prestasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan APBD Tahun 2021

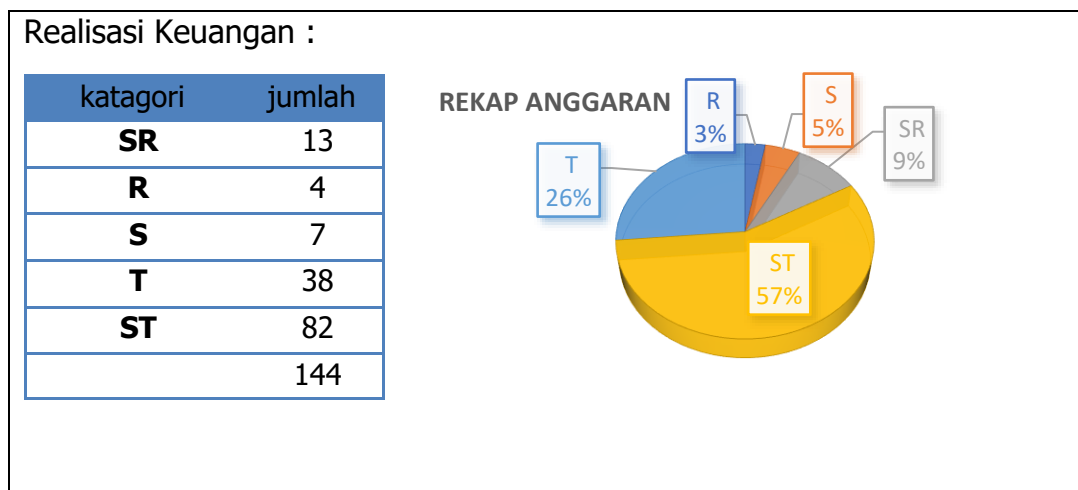
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Tabel T.E.1) bahwa dalam melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja digunakan kriteria tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.58
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi (ST)
2	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat 144 Program yang tersebar untuk dilaksanakan oleh 36 Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing Perangkat Daerah. Dari tabel diatas, program dalam APBD Kota Denpasar tahun 2021 bila ditampilkan katagori capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.38
Katagori Realisasi Keuangan atas program APBD 2021

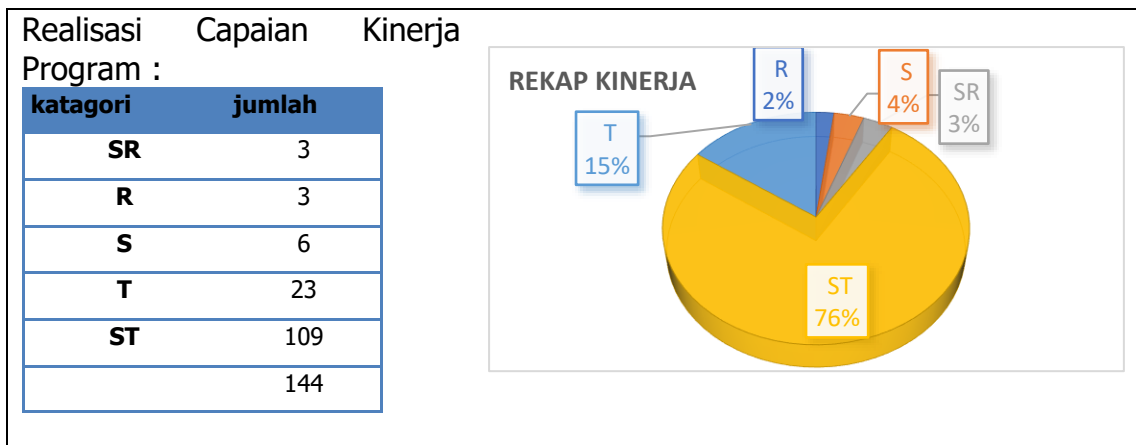
Terdapat 13 PROGRAM yang realisasi keuangan berada dalam katagori Sant Rendah tersebar dalam 10 Perangkat Daerah seperti terlihat pada tabel 2.49

Tabel 2.59

Program dengan capaian realisasi Sangat Rendah

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
DINAS KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Realisasi keuangan dari program ini sangat rendah mayoritas dikarenakan akibat adanya pandemic COVID-19 sehingga beberapa kegiatan dalam masing-masing program tidak dapat dilaksanakan, seperti Program Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terserap anggaran secara optimal dikarenakan Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) tidak dapat dijalankan optimal akibat adanya pandemic. Begitu juga dengan Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit. Hal yang sama juga terdapat pada pelaksanaan Program yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terkait kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya tatap muka dan adanya prioritas penanganan COVID-19



Gambar 2.39
 Katagori Realisasi Capaian program APBD 2021

Berdasarkan data Realisasi capaian program, terdapat 3 Program yang capaiannya program berada pada katagori sangat rendah meliputi program pengelolaan permuseuman di dinas Kebudayaan dimana kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena museum yang ada di Denpasar merupakan wewenang Provinsi. Program Pengelolaan Perikanan tangkap di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dimana Program ini mendapat dana DAK, tetapi sesuai kewenangan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian ada juga Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana ini salah satu kegiatannya berupa pengembangan system tidak dapat dilaksanakan mengingat keterkaitan dengan system pusat (OSS) yang akan mengalami perbaikan. Kendala dan Solusi dalam pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah dapat dijabarkan sebagaimana dalam tabel dibawah.

Tabel 2.60

Kendala, Catatan dan Solusi Pelaksanaan APBD 2021 oleh Perangkat Daerah

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1. Adanya efisiensi, karena harga barang lebih murah dari pagu dana yang dianggarkan.	-	1. Untuk tahun berikutnya dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar akan dilakukan lebih cermat lagi.
	2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar merasionalisasi anggaran pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi pada Belanja Jasa Event Organizer Lomba Inovasi tidak terealisasi karena pelaksanaannya dilaksanakan secara daring.		2. Anggaran untuk Belanja Jasa Event Organizer dikembalikan pada anggaran perubahan karena sudah dikerjasamakan dengan Innopa untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi tanpa biaya.
	3. Adanya salah kode rekening, yaitu Belanja Tropy Lomba Inovasi dipasang di Belanja Uang/Hibah yang seharusnya di rekening Belanja Barang. 4. Belanja Bahan Bakar Minyak Roda		3. Dengan kesalahan memasang kode rekening, Belanja Tropy Lomba Inovasi dilaksanakan pergeseran di anggaran perubahan dari Belanja Hibah ke Belanja Barang.
	4 tidak terealisasi karena salah satu mobil mengalami penghapusan.		4. Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dikembalikan anggarannya di anggaran perubahan.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 74%, dikarenakan adanya efisiensi belanja	-	Menyusun perencanaan anggaran dengan lebih cermat dan detail sehingga untuk ke depannya alokasi anggaran dapat mewujudkan anggaran tepat guna dan tepat sasaran
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 53%, dikarenakan adanya efisiensi belanja	-	

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 55%, dikarenakan adanya efisiensi belanja	-	Mengevaluasi serapan anggaran tahun yang telah berjalan/sebelumnya sehingga bisa menjadi acuan dalam merancang anggaran belanja pada tahun berikutnya, sehingga daya serap anggaran belanja APBD bisa terserap maksimal
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 54%, dikarenakan adanya efisiensi belanja	-	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 55%, dikarenakan adanya efisiensi belanja	-	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 73%, dikarenakan adanya efisiensi belanja	-	
	Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 83%, dikarenakan Pihak rekanan (Unud) tidak sanggup melaksanakan karena waktunya sangat singkat, sehingga akan dilaksanakan tahun 2022.	-	Lebih mengintensifkan koordinasi dan sinergi yang baik dengan pihak-pihak / instansi terkait

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
	Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 45%, dikarenakan sub kegiatan ini merupakan dana darurat yang sewaktu-waktu digunakan untuk menangani keadaan darurat	-	Mengevaluasi serapan anggaran tahun yang telah berjalan/sebelumnya sehingga bisa menjadi acuan dalam merancang anggaran belanja pada tahun berikutnya, sehingga daya serap anggaran belanja APBD bisa terserap maksimal
	Sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 58%, dikarenakan sub kegiatan ini menyesuaikan usulan dari OPD	-	Lebih mengintensifkan koordinasi dan sinergi yang baik dengan pihak-pihak / instansi terkait
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 64%, dikarenakan adanya efisiensi belanja	-	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 71%, dikarenakan adanya efisiensi belanja	-	Mengevaluasi serapan anggaran tahun yang telah berjalan/sebelumnya sehingga bisa menjadi acuan dalam merancang anggaran belanja pada tahun berikutnya, sehingga daya serap anggaran belanja APBD bisa terserap maksimal
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 58%, dikarenakan adanya efisiensi belanja	-	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 9%, dikarenakan proses koordinasi dan konsultasi dilakukan secara online	-	Lebih mengintensifkan koordinasi dan sinergi yang baik dengan pihak-pihak / instansi terkait

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar 67%, dikarenakan adanya efisiensi belanja	-	Menyusun perencanaan anggaran dengan lebih cermat dan detail sehingga untuk ke depannya alokasi anggaran dapat mewujudkan anggaran tepat guna dan tepat sasaran
SEKREATARIAT DAERAH	Kegiatan tahun 2021 tidak dapat berjalan sesuai dengan target, terkait Covid-19 dan tidak adanya surat undangan rapat koordinasi Tingkat Provinsi, sehingga membuat perjalanan Dinas Dalam Kota tidak dapat terealisasi.	Diupayakan ke depannya agar perencanaan dalam penganggaran Perjalanan Dinas lebih teliti.	Diupayakan ke depannya agar perencanaan dalam penganggaran Perjalanan Dinas lebih teliti.
	Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum untuk belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Honor Tim Kuasa Hukum) tidak teralisasi sebesar Rp. 17.500.000 karena Tim Permasalahan Hukum yang dari Kejaksaan yaitu Kasubsi Perdata pada Kejaksaan Negeri Denpasar masih Kosong (belum ada Pelantikan)	Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Honor Tim Kejaksaan) tetap dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 karena per bulan Januari 2022 Kasubsi Perdata pada Kejaksaan Negeri Denpasar sudah dilantik.	Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Honor Tim Kejaksaan) tetap dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 karena per bulan Januari 2022 Kasubsi Perdata pada Kejaksaan Negeri Denpasar sudah dilantik.
	Pada Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, pada rekening narasumber / pembahas moderator, kegiatan ditunda, karena adanya pemilihan walikota baru dan adanya perubahan sikon COVID-19, dimana beberapa mengalami perubahan , adanya silpa transaksi sesuai nilai tukar rupiah yang berlaku saat itu.	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi kerjasama Daerah secara keseluruhan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah direncanakan.	Berkoordinasi dengan pihak terkait dan dalam perencanaan kedepannya dengan lebih cermat.
	Permasalahan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar 1) Rapat Kerja Pembangunan Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan tidak bisa dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid – 19	Semua paket kegiatan/sub kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar T.A. 2021 dapat dilaksanakan dengan tuntas.	Solusi pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar 1) Rapat Kerja Pembangunan Daerah terkait Pandemi Covid -19 digantikan dengan kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD)

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
	2) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana awal (tatap muka langsung) karena adanya Pandemi Covid -19		2) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan terkait Pandemi Covid -19 dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting serta beberapa dilakukan secara tatap muka langsung dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan
	<p>Permasalahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada :</p> <p>1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual mempunyai realisasi fisik 91,20% dan Keuangan 90,23%. Kegiatan fisik tidak mencapai 100% karena ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan seperti Kegiatan Upakara Nangluk Merana / Pemahayu jagat dilaksanakan oleh Desa Adat Intaran, Kegiatan Kemasyarakatan (ngaturang punia, aci - aci Penunjang Upakara) tidak semua terlaksana karena disesuaikan dengan surat undangan yang ada dan kebijakan pimpinan dan adanya refocusing anggaran akibat dari dampak pandemi Covid - 19.</p> <p>2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial sudah terlaksana dengan realisasi fisik sebesar 85,00% dengan realisasi keuangan mencapai 80,04%. Kegiatan fisik tidak mencapai 100% dimana terdapat kegiatan apel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Peringatan Hari Puputan Margarana tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran akibat dari dampak pandemi Covid - 19.</p>	<p>Untuk tahun selanjutnya perencanaan akan dilaksanakan lebih awal dikordinasikan dengan cermat dan dievaluasi setiap Triwulan sehingga dapat diambil langkah – langkah yang diperlukan dengan melaksanakan pergeseran atau melalui perubahan anggaran baik kegiatan maupun penganggarnya.</p>	<p>Untuk tahun selanjutnya perencanaan akan dilaksanakan lebih awal dikordinasikan dengan cermat dan dievaluasi setiap Triwulan sehingga dapat diambil langkah – langkah yang diperlukan dengan melaksanakan pergeseran atau melalui perubahan anggaran baik kegiatan maupun penganggarnya.</p>

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
	<p>3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, mempunyai realisasi fisik 99,32% dan Keuangan 97,82%. Kegiatan fisik tidak mencapai 100% dimana terdapat rekening anggaran belanja pemeliharaan dan pengembangan software / aplikasi sistem hibah E - Monalisa tidak terlaksana sesuai perencanaan karna sistem masih dalam keadaan baik dan bagus serta pada rekening anggaran belanja hibah kepada badan atau lembaga nirlaba, sosial kemasyarakatan tidak semua dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan karena ada beberapa penerima hibah membatalkan pencairannya karena masih dalam situasi pandemi Covid - 19.</p>		
	<p>Permasalahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar :</p> <p>1). Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain untuk iuran Apeksi pada sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada permintaan pembayaran iuran dari penyelenggara Apeksi.</p>	<p>Untuk tahun selanjutnya perencanaan anggaran akan dilaksanakan dengan cermat, dan dievaluasi setiap triwulan sehingga dapat diabil langkah-langkah untuk pergeseran anggaran di perubahan.</p>	<p>Untuk tahun selanjutnya perencanaan anggaran akan dilaksanakan dengan cermat, dan dievaluasi setiap triwulan sehingga dapat diabil langkah-langkah untuk pergeseran anggaran di perubahan.</p>

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
	2) Untuk di Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah , Belanja pakaian untuk pelantikan masih ada sisa anggaran ada selisih harga dari yang dianggarkan, Adanya sisa anggaran rapat Forkopimda dikarenakan pandemi covid tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut setiap bulan, untuk belanja perjalanan dinas Forkopimda tidak bisa dilaksanakan karena situasi covid yang tidak memungkinkan terlaksananya kegiatan tersebut, dan masih ada sisa untuk belanja aplikasi LPPD dikarenakan harga yang ditargetkan lebih besar dari realisasinya.		
DINAS KEBUDAYAAN	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota secara fisik maupun keuangan telah mencapai 54.94%, Hal ini disebabkan belanja Pengadaan Aci-aci dan Sesajen untuk Banjar Adat, Desa Adat dan Subak (BKK) serta Pengadaan Pakaian Baju Kaos untuk Sekaa Teruna yang tidak direalisasikan karena adanya kendala mekanisme pengadaan dan produk hukum yang belum lengkap. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota berupa pengadaan buku secara fisik maupun keuangan tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya MoU dengan Pihak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai penyelenggara Acara Anugerah Kebudayaan PWI Pusat.	-	Adanya kendala terkait realisasi BKK belanja Pengadaan Aci-aci dan Sesajen untuk Banjar Adat, Desa Adat, dan Subak serta Pengadaan Pakaian Baju Kaos untuk Sekaa Teruna dimana telah terbit Perwali No. 57 Tahun 2021 terkait BKK sehingga diharapkan dengan adanya perwali tersebut kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana Sebelum merancang kegiatan perlu adanya kajian mengenai syarat yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga tidak terjadi kendala yang sama di kemudian hari.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman data KTP-EL yang sudah memasuki usia wajib KTP-EL 2. Keterbatasan sarana dan prasarana IT untuk pelayanan kurang memadai	-	1. Mengadakan sosialisasi melalui camat, desa/kelurahan se-Kota Denpasar 2. Jemput bola untuk Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Menganggarkan Belanja Modal baik melalui APBD dan DAK
DINAS KESEHATAN	Progres fisik dibawah 85 % antara lain :	-	

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
	<p>1. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan persentase keuangan 53,16% karena terjadi kesalahan dalam posting anggaran sehingga tidak diamprahkan.</p> <p>2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin persentase keuangan 48% karena ibu hamil dan bayi baru lahir sedikit yang memanfaatkan fasyankes yang bekerjasama dengan dinkes dalam pelaksanaan pelayanan dengan dana jampersal.</p> <p>3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar persentase keuangan 64,35% karena dana pajak rokok baru turun bulan Juni dan anak sekolah tidak PTM sehingga kegiatan tidak berjalan.</p> <p>4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga persentase keuangan 30,90% karena Anak Sekolah tidak PTM sehingga kegiatan tidak berjalan.</p> <p>5. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan persentase keuangan 61,59% karena dana pajak rokok baru turun bulan juni dan anak sekolah tidak PTM sehingga kegiatan tidak berjalan.</p> <p>6. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat persentase keuangan 17,45% karena tidak mengikuti verifikasi kota sehat.</p> <p>7. Operasional Pelayanan Puskesmas I Dentim persentase keuangan 69,87% karena dana kapitasi 2020 yang tidak dapat digunakan kompensasi pembayaran kapitasi Nov-Des 2021 dan Januari 2022.</p>		<p>Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka solusi atau pemecahannya yang dapat dilakukan adalah kedepannya dalam menyusun perencanaan akan dilaksanakan secara lebih cermat dan teliti serta berkoordinasi dengan unsur yang terkait (Dikes Propinsi dan Kementerian Kesehatan)</p>

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
	<p>8. Operasional Pelayanan Puskesmas I Densel persentase keuangan 72,03% karena kegiatan tidak bisa berjalan karena pandemi sehingga tidak bisa mengumpulkan banyak orang (masyarakat).</p> <p>9. Operasional Pelayanan Puskesmas I Denut persentase keuangan 61,43% karena ada kesalahan awal saat perancangan awal RKA sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan koefisien untuk BOK, dana kapitasi yang diterima lebih kecil dari DPA untuk JKN.</p> <p>10. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya persentase keuangan 57,46% karena tidak semua fasyankes mengamprahkan honor karena sudah mendapat honor dari sumber dana lainnya.</p> <p>11. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota persentase keuangan 0 karena kegiatan akreditasi puskesmas tidak bisa berjalan karena adanya pandemi covid-19 karena surveyor dari luar kota.</p>		
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	<p>1. Adanya Beberapa Kali Rasionalisasi / Pergeseran Anggaran dalam rangka Penanganan Covid-19</p> <p>2. Penerapan sistem PPKM yang harus mengevaluasi semua jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Adanya jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang dipelaksanaannya mundur dari pada jadwal yang telah di tetapkan</p>	-	<p>1. Menyusun ulang Anggaran kegiatan dari hasil Rasionalisasi</p> <p>2. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan</p>
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	Ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target karena gagal lelang	Untuk kedepannya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui tender, agar dianggarkan di anggaran induk karena di perubahan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender	Diusukan kembali di anggaran 2022

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
DINAS PARIWISATA	Kendala pada Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Pada sub kegiatan ini penyerapan realisasi anggarannya sebesar 69,18%. Hal ini disebabkan oleh efisiensi dan hasil negosiasi lewat survey terkait harga barang.	Akan dipertimbangkan melalui solusi yang telah diambil.	Dinas Pariwisata Kota Denpasar berupaya agar hasil efisiensi dan negosiasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran di tahun berikutnya.
	Pada sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pada sub kegiatan ini penyerapan realisasi anggarannya sebesar 65,73%. Hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan tidak sebanyak di tahun sebelumnya, sehingga terdapat kelebihan target anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar berkaitan pembayaran listrik, air, dan telepon.	Akan dipertimbangkan melalui solusi yang telah diambil.	Dinas Pariwisata Kota Denpasar berupaya agar realisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 berkaitan dengan sub kegiatan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran di Tahun berikutnya dikarenakan kondisi pandemi covid-19 masih berlangsung sampai saat ini dan Pemerintah masih menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan (dalam hal ini kegiatan yang berlangsung di Gedung DNA).
	Pada sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pada sub kegiatan ini penyerapan realisasi anggarannya sebesar 70,92%. Pada tahun 2021 realisasi anggaran pada belanja suku cadang kurang dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan oleh tidak banyak dari kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar yang diganti suku cadangnya pada tahun tersebut.	Akan dipertimbangkan melalui solusi yang telah diambil.	Dinas Pariwisata Kota Denpasar senantiasa dalam melaksanakan pembiayaan jasa pemeliharaan agar terjadinya efisiensi dalam penggunaan anggaran serta realisasi penyerapan Tahun 2021 akan menjadi pertimbangan pada penyusunan anggaran di tahun berikutnya.

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<p>1. Progres Fisik: Rencana : 100% Realisasi : 99,50% Deviasi :-0,50% Terjadinya Deviasi fisik sebesar -0,50% (99,50%) tersebut disebabkan karena Pembangunan TPA/T/ SPA/ TPS-3R/ dengan progress fisik 81,01%, yang disebabkan karena: - Keterlambatan turunnya dana dari KPPN ke kas daerah (dana turun per tanggal 14 Desember 2021), - Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) selesai terlaksana pada bulan November 2021, - Keterlambatan penentuan lokasi pekerjaan, lahan yang belum jelas dan penolakan dari warga penyanding.</p>		<p>1. - Berkoordinasi dengan BPKAD (terkait pencairan anggaran) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar (terkait aset untuk lokasi TPS-3R, - Berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Satker Bidang Sanitasi (terkait penyelesaian pekerjaan TPS-3R)</p>
	<p>2. Progres Keuangan: Rencana : 100% Realisasi : 85,40% Deviasi :-14,60% Deviasi Keuangan sebesar -14,60% (85,40%) karena adanya efisiensi melalui pengadaan Barang dan Jasa di bawah pagu/ HPS, dimana rata-rata penawaran penyedia adalah sebesar 82,03%, yaitu: - Untuk Sub. Kegiatan Rekonstruksi Jalan penawaran penyedia: 68,24% - Pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan berupa belanja bahan bangunan dan konstruksi aspal penetrasi 60/70 dan paving 20x20 (pengadaan untuk jalan swadaya masyarakat) dimana penawaran penyedia sebesar 70,15%. - Pekerjaan Konstruksi Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Kesiman Kertalangu dan di Desa Padangsambian Klod sebesar 70,00%.</p>		<p>4. Diselenggarakan tahun 2022 setelah revisi Perda IUJK.</p>

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
	<p>3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra DPUPR) yang dianggarkan selama 6 bulan telah dapat dilaksanakan dalam waktu 4 bulan, sehingga realisasi keuangan adalah 54,86%.</p>		<p>5. Dilakukan evaluasi dan rasionalisasi anggaran T. A. 2022. - Mengarahkan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk dapat mempercepat progress pekerjaan serta membuat perjanjian dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk dapat menyelesaikan pekerjaan hingga 100%.</p>
	<p>4. Sosialisasi Perda dan Perwali IUJK tidak dapat dilaksanakan karena Perda IUJK harus direvisi, terkait adanya UU Cipta Kerja.</p>		
	<p>5. Terdapat beberapa serapan anggaran yang rendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yaitu: - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terdapat selisih harga pada perencanaan dan realisasi. - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Belanja makanan dan minuman rapat bersifat tentatif (dilaksanakan ketika dibutuhkan) dan pelaksanaan rapat secara online pada masa pandemi. - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab DPUPR Kota Denpasar tidak dioperasikan secara normal untuk mengurangi/ antisipasi kerumunan masyarakat selama pandemi sehingga realisasi anggaran biaya listrik tidak maksimal.</p>		

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	<p>Realisasi keuangan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga =59.88% karena pengamprahan sesuai kebutuhan. Realisasi keuangan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan= 73.76% karena pengamprahan sesuai kebutuhan. Realisasi keuangan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatansub = 52.30% karena pengamprahan sesuai kebutuhan. Realisasi keuangan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan = 77.60% karena pada tahun 2021,kendaraan operasional tidak mengalami kerusakan yang signifikan oleh karena itu serapan anggaran juga mengalami penurunan. Realisasi keuangan sub kegiatan penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan = 35.07% karena realisasi aci-aci,foto copy,makmin,jasa penyusun soal,jasa instruktur tidak sesuai dengan perencanaan dan belanja modal produk yg akan dibeli diskontinyu. Realisasi keuangan sub kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan NonFormal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat = 36.68% karena Silva fotocopy,visitasi,turun kelapangan tidak sesuai dengan yang direncanakan, Belanja internet dan sewa aplikasi tidak bisa direalisasikan.</p>	-	Membuat perencanaan lebih tepat dan teliti sesuai kebutuhan.
DINAS PERHUBUNGAN	Kesalahan Pada Penetapan Target Pemeliharaan Pada Setiap Bidang dan UPT	-	Dalam penentuan target pemeliharaan disesuaikan dengan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang akan dipelihara

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	tidak ada kendala	Untuk Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan diwilayah Lainnya yang dapat Diusahakan dalam satu daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap (Pagu Rp. 330.000.000;) dan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Pagu Rp. 90.000.000) Hasil konsultasi dengan Tim Anggaran dan Kementerian, kegiatan tersebut tidak dapat kami lakukan karena kegiatan DAK yang dimaksud tidak ada di pemetaan Kemendagri.	-
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pada Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan terdapat belanja hibah uang kepada Kelian Banjar Adat Tohpati Desa Kesiman Kertalangu sebesar Rp. 250.000.000,00 (APBD Perubahan Tahun 2021) untuk rehab/penambahan sarana pasar tidak dapat direalisasikan karna waktu sangat sedikit untuk menyelesaikan pekerjaan serta belum disusunnya rencana kegiatan sebagai hasil dari musyawarah anggota banjar.	-	Melakukan koordinasi dengan pihak Banjar Adat Tohpati beserta jajarannya

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
	Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/kota belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan karena pendampingan/mentoring sedianya dilaksanakan mulai bulan Juli 2021 sebanyak 4 kali namun karena terjadinya perubahan sumberdana maka kegiatan bergeser kebulan Oktober sehingga target pendampingan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya hanya bisa dilakukan 1 kali saja yaitu tanggal 1 Desember 2021 sedangkan SPJ LS harus sudah selesai sebelum tanggal 10 Desember 2021	-	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk perubahan sumber dana
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dari 5 kegiatan untuk tahun 2021 capaian fisik seluruh kegiatan mencapai 100% kecuali kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian fisik sebesar 91,61% ini disebabkan karena belanja perjalanan dinas paket meeting luar daerah tidak jalan/tidak realisasi disebabkan tidak ada undangan dari instansi luar daerah. Dilain sisi secara umum capaian kinerja keuangan mencapai diatas 80% kecuali kegiatan administrasi keuangan daerah sebesar 76.11%, ini disebabkan karena untuk tahun 2021 jumlah jabatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan banyak yang kosong.	Apabila memungkinkan agar jabatan yang kosong diisi, supaya tidak ada realisasi keuangan lebih kecil.	Pada pelaksanaan kegiatan tahun mendatang koordinasi para PPTK akan lebih diintensifkandan diefektifkan sehingga pelaksanaan kegiatan semakin berdaya guna dan berhasil guna. lebih mematangkan proses perencanaan untuk mengantisipasi pelaksanaan kegiatan supaya berjalan secara maksimal baik fisik maupun keuangan.
DINAS PERTANIAN	1. Tidak tercapainya target dalam pencapaian indikator kinerja utama dinas pertanian yaitu :	-	1. Melakukan inovasi pemasaran produk hasil pertanian berbasis teknologi informasi dan pelaksanaan pasar tani menysasar / menggandeng kegiatan bank sampah di Tahun 2022.

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian yang difasilitasi 5% hanya tercapai 4% Jumlah kasus penyakit ternak / hewan 0 kasus tercapai 1 kasus <p>2. Cuaca dan iklim (intensitas hujan yang cukup tinggi) terutama menjelang akhir Tahun 2021 sehingga menurunkan produktifitas komoditi pertanian.</p> <p>3. Harga bibit babi yang sangat fluktuatif meningkat tajam sehingga kegiatan pengadaan bibit babi sempat tertunda.</p>		<p>2. Akan diupayakan cakupan vaksinasi rabies 70% dari populasi Hewan Penular Rabies (HPR) untuk meminimalisir atau meniadakan kasus positif.</p> <p>3. Penyesuaian penanaman komoditas pertanian sesuai musim dan pembuatan guludan-guludan untuk mengurangi serapan air yang tinggi.</p> <p>4. Refokusing harga pada perubahan anggaran Tahun 2021.</p>
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	<p>Pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh realisasi capaian keuangannya hanya 63,38 % disebabkan karena penawaran dari pihak rekanan yang rendah, akan tetapi pekerjaan ini tetap selesai sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan dalam dokumen kontrak. Pada sub kegiatan pelaksanaan inventarisasi tanah kosong, realisasi keuangannya rendah yaitu 6,29% dikarenakan adanya perbedaan sistem pembayaran yang dipakai oleh instansi BPN sehingga pembayaran tidak dapat dilaksanakan.</p>	-	<p>Untuk sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh, sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah. Untuk sub kegiatan pelaksanaan inventarisasi tanah kosong, telah dilakukan pertemuan dengan pihak BPN untuk mencari solusi atas masalah diatas, dan telah didapatkan solusi terkait cara pembayarannya, yang akan dilaksanakan mulai tahun 2022. sedangkan sisa anggaran dikembalikan ke Kas Daerah.</p>
INSPEKTORAT	<p>Karena ada efisiensi nilai belanja yaitu dibelanja alat tulis kantor (perbedaan harga kertas per rim) efisiensi di belanja cetak dan belanja makanan dan minuman rapat sebagai akibat pandemi covid 19 masih berlangsung di tahun 2021 yang dimana kegiatan rapat dominan di laksanakan secara daring/ online</p>	-	-

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
	Karena pandemi covid 19, pelaksanaan diklat secara daring	-	-
	sisa anggaran karena : 1. Inspektur definitif bulan desember 2021 2. Dua orang ASN pensiun 3. Irban definitif 2 dan kasubag masih plt/ belum definitif	-	-
KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Masih rendahnya kompetensi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan Kewajibanya.	-	Dengan membuat analisis Kompetensi masing-masing Pegawai Kecamatan dan Kelurahan pada tahun berikutnya sehingga dapat dicarikan solusi pemecahan masalahnya dan diupayakan untuk memberikan pelatihan kepada setiap Pegawai di Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan kompetensinya.
	Masih rendahnya pemahaman ASN Kelurahan dan Kecamatan dalam bidang Pengadaan Barang dan jasa .	-	Agar di ikutsertakan ASN Kelurahan dan Kecamatan dalam Bimtek Pengadan Barang dan Jasa
	Program dan Kegiatan sudah dapat terlaksana sebagaimana mestinya namun msh adanya realisasi yg dibawah 70%.	-	Anggaran Program dan Kegiatan realisasi dibawah 70% dikarenakan pembayaran jasa listrik, telpon dan air bulan desember dibayarkan pada tahun berikutnya atau awal tahun bulan januari akan dipertimbangkan pd Tahun berikutnya.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor serapan hanya 70.50 % karena harga pasar / penyedia lebih rendah dari DPA 2. Pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan serapan hanya 45.30 % karena biaya fotocopy tidak optimal penyerapannya karena tidak banyak dokumen yang digandakan	-	1. Pada penganggaran kedepannya akan merasionalisasi biaya fotocopy 2. sudah mengajukan kebutuhan biaya bulanan listrik pada sistem SIPD agar sesuai dengan kebutuhan

Perangkat Daerah	Kendala	Catatan	Solusi
	3. Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serapan hanya 31.34 % karena pagu biaya listrik pada sistem SIPD lebih tinggi daripada kebutuhan biaya bulanan listrik pada satpol pp		3. akan menyesuaikan kebutuhan belanja pelumas untuk efisiensi anggaran
	4. Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan serapan 77.23 % karena efisiensi penggunaan pelumas kendaraan roda 2 dan roda 4		
SEKRETARIAT DPRD	1. Adanya PPKM akibat Pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung menjadi penghambat serapan anggaran	Dalam hal penyusunan Renja Tahun 2023 yang sedang berproses , harap memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :	1. Mengupayakan kegiatan berlangsung sesuai jadwal dan anggaran namun tetap menerapkan protokol kesehatan dan aturan PPKM yang berlaku
	2. Belum maksimalnya perekrutan kelompok ahli/ pakar untuk membantu tugas-tugas alat kelengkapan DPRD	1. Membuat proyeksi jumlah kebutuhan anggaran berdasarkan realisasi anggaran tahun 2021	2. Mengupayakan segera perekrutan kelompok ahli atau kelompok pakar, untuk mengoptimalkan tugas-tugas alat kelengkapan DPRD
	3. Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal	2. Menyempurnakan indikator kinerja (outcome / output) sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 dan peraturan lainnya	3. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan seluruh pegawai dengan ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan seperti webinar, pelatihan dan bimbingan teknis atau kursus-kursus
	4. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD 5. Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD		4. Meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana yang tersedia serta didukung dengan upaya pemeliharaan dan perawatan serta perilaku kerja
			5. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi/evaluasi secara berkala dengan seluruh pemangku kepentingan

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai kondisi ideal, yaitu kondisi yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Kehidupan masyarakat Kota Denpasar yang dinamis serta pembangunan fisik kota yang terus meningkat seringkali menimbulkan gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin meningkat. Namun demikian, Kota Denpasar sampai saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, baik eksternal maupun internal. Permasalahan pembangunan Kota Denpasar saat ini tidak terlepas dari adanya kejadian luar biasa pandemi covid-19 yang masih terasa dampaknya sampai saat ini. Kejadian ini menimbulkan gejolak yang cukup signifikan bagi dinamika kehidupan masyarakat dan berdampak bagi seluruh sektor pembangunan Kota Denpasar. Oleh karena itu, ada beberapa prioritas permasalahan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar dalam rangka pemulihan kondisi pasca pandemi covid-19.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berdasarkan gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2022, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang harus dihadapi dan ditangani oleh Pemerintah Kota Denpasar.

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kota Denpasar yang masih belum optimal yang disebabkan oleh:
 - a. Masih belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat

- b. Kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal
- 2. Masih adanya ketimpangan baik secara wilayah maupun individu yang disebabkan oleh
 - a. Masih belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar baik secara kuantitas maupun kualitas
 - b. Belum optimalnya penggunaan teknologi dan informasi dalam mendukung kegiatan – kegiatan perekonomian
- 3. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal karena Kota Denpasar sebagai kota yang memiliki potensi sumber daya manusia yang besar terutama yg berada dalam usia produktif masih belum optimal membangun ekosistem ekonomi kreatif sebagai penggerak roda perekonomian karena keterbatasan atas sumber daya lainnya serta dampak dari kejadian luar biasa Covid 19 yang sudah melanda beberapa tahun belakangan ini sehingga memperlambat kegiatan ekonomi di Kota Denpasar.
- 4. Pertumbuhan sektor pariwisata yang masih belum optimal disebabkan oleh:
 - a. Potensi budaya yang dimiliki oleh Kota Denpasar masih perlu dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata berbasis budaya.
 - b. Masih belum optimalnya pemberdayaan lembaga – lembaga tradisional sebagai salah satu penggerak pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Denpasar
 - c. Pandemi covid 19 yang berdampak terhadap kedatangan wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang menurun drastis sehingga berimbas kepada hunian hotel, kunjungan ke obyek wisata serta sector sector lain baik yang bersentuhan langsung ataupun tidak langsung terhadap pariwisata di Kota Denpasar
- 5. Layanan publik yang masih perlu ditingkatkan lagi dengan meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar.
- 6. Pencegahan dan pengentasan kawasan kumuh yang ada di SK hamper sebagian merupakan lahan privat sehingga perlu perhatian serius untuk mencari jalan keluar

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam Pendidikan guna meningkatnya Indeks Pendidikan di Kota Denpasar.
- b. Peningkatan sarana prasarana Pendidikan yang belum terpenuhi dan belum sesuai standar.
- c. Pemerataan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar kompetensinya.

2. Urusan Kesehatan

- a. Cakupan pelayanan bayi, balita dan anak yang belum maksimal
- b. Telah dilakukan juga penanganan terhadap penderita penyakit menular termasuk juga penderita HIV/AIDS dan NAPZA, namun pencegahan secara aktif belum optimal, di antaranya promosi kesehatan dan surveilans.
- c. Kapasitas fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang belum optimal terutama disaat menghadapi wabah penyakit seperti pandemi COVID 19 yang terjadi di awal hingga pertengahan tahun 2020.
- d. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kesehatan.
- e. Masih tingginya kejadian penyakit menular dan tidak menular.
- f. Belum optimalnya kesehatan keluarga.
- g. Belum optimalnya kualitas pelayanan Kesehatan.
- h. Beberapa indikator Kinerja SPM Bidang kesehatan belum tercapai.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Rendahnya peningkatan kondisi jalan menuju kondisi baik.

- b. Belum Memadainya Kondisi Dan Fungsi Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Yang Dapat Memberikan Pelayanan Untuk Mendukung Terwujudnya Kemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan.
- c. Belum Memadainya cakupan pelayanan dan pemenuhan standar Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas air minum (K4).
- d. Belum Memadainya Pelayanan Prasarana Dan Sarana Sanitasi Yang Terpadu Dan Menggunakan Metode Yang Ramah Lingkungan Serta Sesuai Standar Teknis.
- e. Belum Memadainya Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Pengendalian Banjir Secara Terpadu.
- f. Belum Optimalnya Kesiapan Pelaku Jasa Konstruksi Yang Berdaya Saing Dan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi.
- g. Rendahnya Pembangunan Bangunan Gedung Yang Memenuhi Standar Teknis.
- h. Belum terpernuhinya RTH publik kawasan perkotaan sebesar 20%.
- i. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana pola ruang.
- j. Belum tertatanya reklame dan infrastrukturnya yang berdampak pada estetika dan keindahan wajah kota

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Keterbatasan lahan dan tingginya harga lahan di Kota Denpasar
- b. Minimnya dana bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kota Denpasar;
- c. Minimnya data rumah sehat dan layak huni yang terupdate ;
- d. Data terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum terpenuhi.
- e. Masih terdapatnya kawasan kumuh di Kota Denpasar ;
- f. Kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Denpasar sebagian besar lahan yang ditempati merupakan lahan sewa yang dibangun oleh pihak penyewa.
- g. Belum optimalnya pengelolaan PSU di Perumahan dikarenakan kurangnya data kuantitas dan kualitas PSU di Kota Denpasar ;

- h. Belum optimalnya pengelolaan taman-taman dan sarana sosial budaya guna menunjang keindahan wajah kota;
- i. Belum ada koordinasi mekanisme untuk penyerahan fasos dan fasum

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun permasalahan menjaga ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Denpasar meliputi:

- a. Perlunya Peningkatan Kualitas Penegakan Perda dan Perwali serta penanganan gangguan Tramtibum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Denpasar, yang disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat Satpol PP, dengan meningkatkan sinergitas antar Lembaga dan partisipasi masyarakat.
- b. Secara umum walaupun cakupan pelayanan kebakaran sudah semua terlayani, namun masih terdapat permasalahan yaitu belim optimalnya kapasitas SDM, sarana dan prasarana belum memadai.
- c. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana.
- d. Masih belum optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, para relawan bencana dan dunia usaha.
- e. Masih kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencegahan mengurangi resiko bencana.
- f. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga peranan pemerintah lebih dominan dalam penanganan kebencanaan.
- g. Aspek sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas masih kurang memadai.

6. Sosial

Adapun permasalahan sosial di Kota Denpasar meliputi

- a. Secara umum Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- b. Pemahaman keluarga dan masyarakat serta jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cenderung meningkat setiap tahunnya.
- c. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di seluruh wilayah.
- d. Belum optimalnya kerja sama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok PMKS.

2.3.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Adapun permasalahan Tenaga Kerja di Kota Denpasar antara lain:

- a. Terjadinya pandemic menyebabkan banyak perusahaan ditutup dan mengakibatkan PHK serta karyawan yang dirumahkan.
- b. Pertumbuhan ekonomi melambat, dan pertumbuhan usaha baru relatif sedikit, sehingga penyerapan tenaga kerja kecil.
- c. Banyaknya PMI yang dipulangkan.
- d. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan kurangnya penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri yang mengakibatkan naiknya angka pengangguran.
- e. Banyaknya pencari kerja yang belum menyadari manfaat daripada pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/1) sebagai syarat untuk melamar pekerjaan dan kurangnya kesadaran untuk melapor kembali ke Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi.
- f. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompentensi dan bersertifikasi Kompetensi Kota Denpasar setelah diterima bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah.
- g. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja serta hubungan industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Adapun permasalahan pemberdayaan perempuan di Kota Denpasar antara lain:

- a. Rendahnya presentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak.
- b. Masih kurangnya data permasalahan perempuan dan anak.
- c. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spectrum yang semakin.
- d. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan.
- e. Masih adanya kejadian kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pangan

Adapun permasalahan ketahanan pangan di Kota Denpasar adalah:

- a. Masih kurangnya kajian penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
- b. Masih kurangnya pemetaan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk ketahanan pangan.
- c. Perlindungan terhadap sawah, sumberdaya air, kesuburan tanah, akses terhadap sarana produksi dan bantuan kepada petani dalam rangka peningkatan ketahanan pangan belum optimal.
- d. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang.
- e. Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat.
- f. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.
- g. Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi potensi atau komoditi utama dan unggulan belum optimal.
- h. Masih kurangnya pengembangan tanaman pangan organik dan hidroponik.

4. Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Belum optimalnya pendataan pertanahan aset daerah.
- b. Pemanfaatan dan penggunaan tanah kosong aset daerah belum optimal.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang di hadapi antara lain :

- a. Penurunan Kualitas Air
- b. Peningkatan Jumlah Timbulan Sampah dan Limbah B3

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Adapun permasalahan kependudukan di Kota Denpasar antara lain:

- a. Migrasi Penduduk.
- b. Penduduk rentan administrasi kependudukan.
- c. Masih rendahnya penduduk Kota Denpasar untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan.
- d. Masih rendahnya pemahaman penduduk Kota Denpasar terhadap manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
- e. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari segi kompetensi maupun kuantitas merupakan kendala dalam upaya menuju pelayanan prima kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Permasalahan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa di Kota Denpasar adalah:

- a. Perlunya usaha yang lebih besar untuk menstimulasi masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan.
- b. masih kurangnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan masih menghadapi kurangnya kapasitas aparatur desa.
- c. Belum focus dan tidak sinerginya Gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, PemProv, Pemkab/Pemkot dan Desa.

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi Kota Denpasar dalam pemberdayaan perempuan dan KB adalah:

- a. Belum adanya kajian pengendalian penduduk
- b. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern
- c. Kebutuhan ber - KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani
- d. Partisipasi KB Pria yang masih rendah
- e. Jumlah penduduk usia produktif dua kali lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia Non produktif akan memacu pertumbuhan ekonomi di suart wilayah (Bonus Demografi)

9. Perhubungan

Adapun permasalahan di bidang perhubungan Kota Denpasar antara lain:

- a. Perkembangan Tata Guna Lahan
- b. Pengembangan Pusat-pusat Perbelanjaan dan Perdagangan
- c. Pembangunan Hotel dan Condote
- d. Perkembangan Permukiman
- e. Perkembangan Sekolah
- f. Perkembangan Prasarana Transportasi

10. Komunikasi Dan Informasi

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan komunikasi dan informasi di Kota Denpasar adalah:

- a. Pembangunan Jaringan Internet yang belum menjangkau seluruh Perangkat Daerah Kota Denpasar guna mendukung Smart City
- b. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Inormasi dan Komunikasi oleh Birokrasi terutama peningkatan pelayanan public guna mendukung Smart City
- c. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang teknologi Komunikasi dan Informatika
- d. Belum Optimalnya Data Statistik Sektoral di Kota Denpasar
- e. Belum Optimalnya pelaksanaan Keamanan Inormasi di Kota Denpasar

11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Adapun permasalahan koperasi dan UKM secara umum di Kota Denpasar antara lain:

- a. Adanya koperasi yang tidak aktif.
- b. Belum berkembangnya koperasi berbasis pertanian, pariwisata dan UMKM di Kota Denpasar.
- c. UMKM belum mampu untuk mengakses pasar secara luas.
- d. Aspek permodalan, pengolahan, pemasaran dan daya saing UMKM masih lemah.
- e. rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan.
- f. rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar.
- g. Kemampuan Koperasi dan UMKM yang berkembang saat
- h. ini belum cukup merata kepada seluruh Koperasi dan UMKM, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga pengembangan bisnis.
- i. keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar Koperasi dan UMKM terutama kredit investasi.

12. Penanaman Modal

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kota Denpasar antara lain:

- a. Regulasi yang terkait dengan pelayanan perijinan perlu dilengkapi dan dievaluasi.
- b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait perijinan (mendirikan bangunan dan atau berusaha sebelum memiliki ijin).
- c. Kualitas dan kuantitas SDM terbatas dibandingkan volume layanan perijinan sehingga janji layanan belum terpenuhi secara maksimal.
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar.
- e. Belum optimalnya pelayanan publik.

13. Kepemudaan Dan Olah Raga

Pembangunan dengan fokus pada aspek pemuda dan olahraga menjadi hal yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Permasalahan terkait pemuda dan olahraga meliputi:

- a. Peningkatan pembinaan atlet dan pelatih yang berprestasi guna peningkatan prestasi olahraga di Kota Denpasar.
- b. Sarana dan prasarana olahraga perlu ditingkatkan untuk mendukung pembinaan olah raga.
- c. Potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan.

14. Statistik

Adapun permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Denpasar antara lain:

- a. Masih belum optimalnya ketersediaan data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan.
- b. Masih belum optimalnya sistem informasi data dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

15. Kebudayaan

Adanya permasalahan pembangunan ketahanan dan keberadaan kebudayaan Bali antara lain:

- a. Belum didokumentasikannya warisan budaya dengan baik maka informasi mengenai warisan budaya itu sendiri menjadi sangat minim.
- b. Rendahnya wawasan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya lambat laun akan menyebabkan pudarnya identitas kebudayaan itu sendiri.
- c. Naskah kuno dan bahan-bahan Pustaka kuno jika tidak dilestarikan akan mengalami kepunahan.
- d. Kurangnya promosi budaya lokal ke daerah lain maka mengakibatkan kurang meluasnya informasi tentang budaya itu sendiri.

16. Perpustakaan

Adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi perpustakaan antara lain:

- a. Masih rendahnya minat baca dan budaya baca masyarakat.
- b. Masih kurangnya pemahaman aparatur tentang pentingnya pengelolaan perpustakaan arsip dan dokumentasi yang baik.
- c. Kurangnya minat aparatur untuk menjadi tenaga fungsional Pustakawan dan Arsiparis.
- d. Sarana dan Prasarana Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi belum memadai.
- e. Kesadaran masyarakat masih rendah tentang strategisnya nilai sebuah dokumen kearsipan dan fungsi perpustakaan.

17. Kearsipan

Permasalahan kearsipan yang yang dihadapi, adalah :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan.
- b. Masih rendahnya minat baca dan budaya baca masyarakat.
- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur tentang pentingnya pengelolaan perpustakaan arsip dan dokumentasi yang baik.
- d. Kurangnya minat aparatur untuk menjadi tenaga fungsional Putakawan dan Arsiparis
- e. Kesadaran masyarakat tentang dokumen kearsipan masih rendah.
- f. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan.
- g. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.

- h. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

2.3.2.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

Permasalahan kelautan dan perikanan di Kota Denpasar adalah :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana produksi kelompok nelayan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian hutan bakau dimana hutan bakau sebagai tempat pemijahan ikan.
- c. Rendahnya pemahaman tentang kesrawan.
- d. Pemanfaatan potensi daerah pesisir belum optimal.
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kelompok-kelompok pengolah.
- f. Rendahnya kemampuan teknologi yang dimiliki kelompok-kelompok pengolah.
- g. Upaya mengoptimalkan potensi perikanan budidaya (budidaya di lahan sempit).
- h. Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan, penguatan modal, pemasaran dan peningkatan mutu perikanan serta penyediaan benih/induk unggul serta modernisasi sarana dan prasarana perikanan budidaya maupun tangkap.
- i. Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengelolaan hasil perikanan dan masyarakat pesisir lainnya.

2. Pariwisata

Adapun permasalahan peningkatan pariwisata di Kota Denpasar adalah:

- a. Permasalahan Destinasi Pariwisata meliputi:
 - i. Kemacetan dan lahan parkir yang masih terbatas
 - ii. Berkembangnya isu terorisme dan premanisme
 - iii. Populasi penduduk pendatang

- iv. Sistem keamanan terpadu yang belum maksimal
 - v. Prasarana dan fasilitas pada destinasi yang belum maksimal
 - vi. Kebersihan dan kesehatan lingkungan destinasi
 - vii. Event pariwisata yang harus dikemas lebih baik
 - viii. Tata kelola daya tarik wisata yang belum maksimal
 - ix. Belum adanya forum-forum atas komunitas pariwisata pada beberapa daya tarik wisata.
 - x. Belum adanya destinasi baru seperti wisata minat, wisata spriritual, dan wisata buatan.
 - xi. Belum optimalnya pengembangan green tourism (natural dan ramah lingkungan).
- b. Permasalahan Pemasaran Pariwisata meliputi:
- i. Analisa pasar yang belum maksimal
 - ii. Perlu adanya re branding dan pemberian citra pariwisata Kota Denpasar
 - iii. Belum optimalnya pemasaran yang terintegrasi
 - iv. Promosi pariwisata yang belum terukur
 - v. Pemasaran yang berbasis IT
 - vi. Variasi produk bahan promosi
- c. Permasalahan Industri Sarana Pariwisata meliputi:
- i. Persaingan usaha akomodasi yang tidak sehat
 - ii. Jumlah travel agent illegal yang cukup banyak
 - iii. Persaingan biro perjalanan wisata offline dan online yang tidak sehat
 - iv. Jumlah pusat informasi masih terbatas
 - v. Kemitraan antara pengelola usaha yang belum optimal
 - vi. Standarisasi dan sertifikasi SDM dan usaha pariwisata yang belum maksimal
- d. Permasalahan Kelembagaan Pariwisata meliputi:
- i. Berlakunya MEA menjadi persaingan semakin ketat sehingga meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM dan dunia usaha bekerja sama dengan LSP dan LSU.

- ii. Kualitas SDM bidang pariwisata yang belum maksimal.
- iii. Belum optimalnya kerjasama dengan pelaku pariwisata.
- iv. Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam promosi pariwisata.

3. Pertanian

Permasalahan pertanian di Kota Denpasar adalah:

- a. Alih fungsi lahan yang sulit dibendung dan belum optimalnya pemanfaatan tanah/pekarangan kosong untuk budi daya pertanian.
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna oleh petani yang masih kurang.
- c. Masih kurangnya bantuan, pendampingan dan pelatihan bagi petani/peternak.
- d. Masih kurangnya perhatian terhadap petani yang berprestasi.
- e. Masih rendahnya akses petani terhadap sarana produksi seperti benih, bibit, dan pestisida bermutu.
- f. Belum adanya perda atau peraturan lainnya yang menjamin kepastian harga hasil produksi pertanian dalam arti luas.
- g. Belum adanya sinergitas antara produsen, distributor dan konsumen serta pemangku kepentingan lainnya.
- h. Masih kurangnya pengembangan Taman Bumi Banten unggulan.
- i. Masih kurangnya perlindungan harga terhadap hasil produksi pertanian.
- j. Masih kurangnya jalan usaha tani.
- k. Belum optimalnya kelembagaan petani.
- l. Belum optimalnya kualitas SDM petani dan petugas.
- m. Belum optimalnya kelembagaan penyuluh.

Peternakan yang dikembangkan lebih banyak kepada ternak yang sedikit memerlukan lahan dan tidak mencemari lingkungan. Adapun permasalahan peternakan antara lain:

- a. Belum optimalnya pengembangan ternak unggulan lokal (sapi, babi, ayam dan itik untuk yadnya).
- b. Masih kurangnya bantuan kepada petani/peternak dalam pengembangan pertanian/peternakan secara terpadu (biogas).

- c. Masih merebaknya kasus penyakit zoonosis.
- d. Pola produksi belum tertata baik.
- e. Adanya kendala dalam dinamika kelompok.
- f. Masih belum optimalnya pemanfaatan potensi peternakan.

4. Perdagangan

Permasalahan pembangunan perdagangan di Kota Denpasar antara lain:

- a. Perlunya stabilisasi harga dalam rangka pengendalian inflasi menjelang hari-hari besar keagamaan, bencana alam dan anomali cuaca melalui kelancaran pasokan, distribusi, dan informasi harga komoditas bahan pokok masyarakat dan barang penting lainnya.
- b. Masih perlunya peningkatan koordinasi, kemampuan manajemen, dan pemahaman prosedur ekspor bagi pengusaha untuk dapat mendukung terwujudnya peningkatan produk unggulan berpotensi dan ekspor Kota Denpasar.
- c. Masih terbatasnya akses pasar dalam dan luar negeri untuk meningkatkan perdagangan dan produk unggulan ekspor
- d. Perlunya revitalisasi pasar-pasar tradisional dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan
- e. Perlunya peningkatan pasar hasil pertanian dan kerajinan rakyat
- f. Perlunya pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
- g. Masih rendahnya pemanfaatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana perdagangan Kota Denpasar.
- h. Perlunya peningkatan tertib hukum dalam transaksi perdagangan melalui kemetrolgian legal dengan pengawasan BDKT (barang dalam keadaan terbungkus), dan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya).
- i. Belum terpenuhinya standarisasi sarana distribusi perdagangan dan peningkatan nilai ekspor.
- j. Jejaring pemasaran belum optimal karena lemahnya daya saing IKM/UKM Kota Denpasar dalam menguasai teknik masaran.

- k. Kemampuan untuk mengakses permodalan terbatas karena pelaku IKM/UKM belum mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemberi pinjaman.
- l. Rendahnya SDM dalam pengelolaan manajemen keuangan dan bisnis.
- m. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap tertib niaga dan perlindungan konsumen.
- n. Belum optimalnya koordinasi dalam hal pengendalian harga bahan pokok.
- o. Belum optimalnya pengawasan terhadap regulasi perdagangan.

5. Perindustrian

Permasalahan pembangunan perindustrian di Kota Denpasar antara lain:

- a. Masih kurangnya industri di bidang pengolahan hasil pertanian.
- b. Masih rendahnya ketersediaan bahan baku bagi industri kecil dan menengah seperti industri tenun dan lainnya.
- c. Belum terjalin hubungan yang optimal antara Petani-Industri Kecil dan Menengah dengan dunia usaha khususnya yang bergerak di bidang kepariwisataan terhadap pemanfaatan hasil-hasil produksi pertanian lokal untuk konsumsi wisatawan.
- d. Persaingan yang semakin ketat dihadapi oleh industri kecil dan menengah Kota Denpasar dengan hasil kerajinan sejenis yang dipasarkan di Kota Denpasar oleh daerah lainnya.
- e. Belum optimalnya inovasi produk baru dalam industri kecil dan menengah di Kota Denpasar.
- f. Belum optimalnya pengawasan proses produksi industri kecil dan menengah dalam rangka terciptanya hasil produksi yang berkualitas.
- g. Masih rendahnya inovasi dan kreasi para perajin dalam menciptakan kemasan yang aman dan menarik.
- h. Koordinasi antar instansi terkait belum optimal dalam pembinaan IKM yang meliputi : pembinaan untuk mutu produk, fasilitasi kerjasama dan kemitraan serta promosi produk unggulan.

- i. Belum optimalnya pelaksanaan system informasi industri nasional serta pemenuhan komitmen dalam rangka fasilitasi pelayanan perijinan usaha

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan dasar pembangunan Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global. Sesuai dengan kebijakan dasar pembangunan, arah kebijakan pembangunan ekonomi menitik beratkan pada sektor pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri kerajinan rakyat sesuai dengan potensi wilayah di Kota Denpasar.

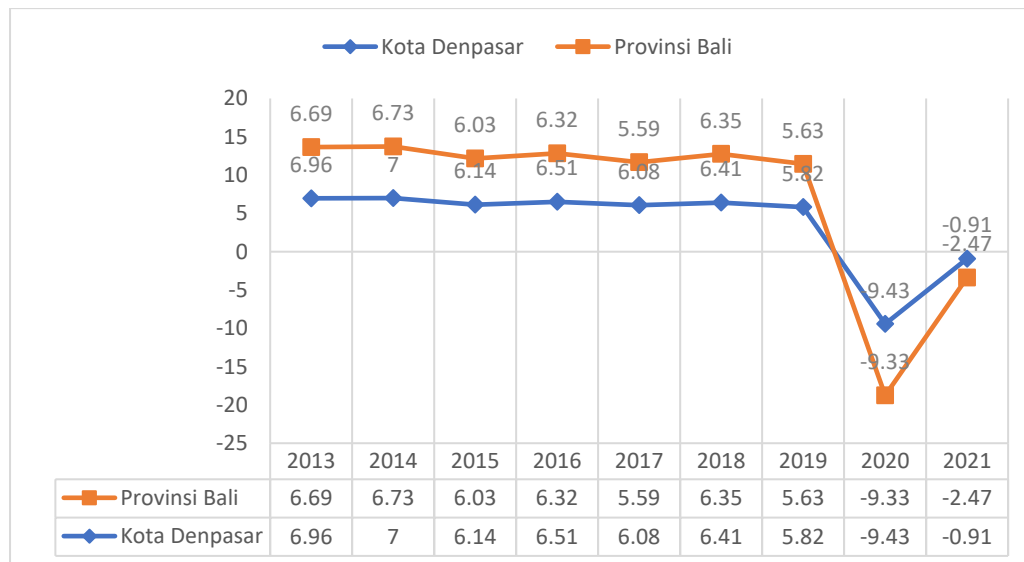
Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka kebijakan ekonomi Kota Denpasar diarahkan agar sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2023 dan kebijakan ekonomi nasional Tahun 2023.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan 2021

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Ditengah upaya penguatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar di tahun 2020, diawal tahun 2020 dunia dihantam oleh pandemi virus SARS-CoV2 yang melumpuhkan perekonomian di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar mengalami kontraksi sebesar -9,42% pada tahun 2020. Hal ini membawa pengaruh yang besar bagi perekonomian Kota Denpasar dengan pariwisata sebagai sektor utama perekonomian. Bali mengalami penurunan tingkat kunjungan wisata dan okupansi hotel yang cukup drastis akibat ditutupnya jalur penerbangan dari beberapa negara.

Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kota Denpasar menunjukkan perbaikan walaupun masih mengalami kontraksi sebesar -0.91%. Konstraksi tersebut disebabkan oleh tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif, meskipun terdapat delapan lapangan usaha yang mampu tumbuh positif.



Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2014 – 2021
sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terkontraksi sebesar -10,45 dari -29,84 di tahun 2020. Katagori Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi -9,16 dari -19,57 di tahun 2020. Begitu pula Jasa Keuangan dan Asuransi terkontraksi -3,69 dari -4,19 dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan sebagai hasil penanganan pandemic. Salah satunya dengan percepatan pemberian vaksin sehingga beberapa aktivitas perekonomian perlahan mulai dibuka

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terlihat seperti tabel dibawah :

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010

Nama Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.74	-3.57	3.15
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
C. Industri Pengolahan	5.82	-7.09	0.72
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3.72	-10.29	-6.47
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.91	-1.68	1.21
F. Konstruksi	9.15	-3.63	5.77

Nama Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2019	2020	2021
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.87	-7.26	-1.41
H. Transportasi dan Pergudangan	6.44	-19.57	-9.16
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.57	-29.84	-10.45
J. Informasi dan Komunikasi	9.08	6.30	3.46
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.89	-4.19	-3.69
L. Real Estate	4.41	0.13	0.99
M,N. Jasa Perusahaan	4.18	-4.76	-3.16
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.36	0.01	1.92
P. Jasa Pendidikan	5.27	-0.77	1.80
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.65	3.78	6.38
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7.22	-6.10	-1.51
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5.82	-9.43	-0.91

sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Jika dibandingkan dengan kabupaten se Provinsi Bali, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar berada di peringkat ke-5 dibawah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana yang menduduki peringkat 1 sampai 4. Denpasar berada diatas Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung yang menduduki peringkat 6 sampai dengan 9. Laju pertumbuhan ekonomi semua kabupaten dan Kota seBali di tahun 2021 mengalami kontraksi sehingga secara akumulasi Laju Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali berkisar di nilai -2,47, paling rendah secara Nasional. Tercatat di tahun 2021 hanya dua provinsi yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi minus yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Papua Barat dengan nilai -0,51.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	5,95	5,31	5,59	5,56	-4,98	-0,65
Kab. Tabanan	6,12	5,38	5,72	5,58	-6,17	-1,97
Kab. Badung	6,79	6,11	6,75	5,81	-16,55	-6,74
Kab. Gianyar	6,30	5,50	6,01	5,62	-8,40	-1,07
Kab. Klungkung	6,26	5,34	5,50	5,42	-6,38	-0,23
Kab. Bangli	6,23	5,35	5,50	5,45	-4,10	-0,33
Kab. Karangasem	5,92	5,08	5,48	5,50	-4,49	-0,56
Kab. Buleleng	6,01	5,40	5,62	5,51	-5,80	-1,22
Kota Denpasar	6,50	6,08	6,41	5,82	-9,43	-0,91
Provinsi Bali	6,04	5,59	6,35	5,60	-9,33	-2,47

3.1.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang berperan penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

PDRB Kota Denpasar atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020 sebesar 49.558,96 Milyar Rupiah lebih tinggi jika dibandingkan Kabupaten Bandung di Tahun 2020 yang sebesar 49.014,03 Milyar Rupiah. Tahun 2021 PDRB Kota Denpasar mengalami sedikit peningkatan menjadi 49.588,38 Milyar. Hal ini menunjukkan mulai ada perbaikan perekonomian semenjak adanya pandemic di tahun 2020 khususnya di Kota Denpasar walaupun secara keseluruhan di Provinsi Bali mengalami penurunan dari total 223.900,89 Milyar Rupiah di Tahun 2020 menjadi 219.800,03 Milyar Rupiah. Perkembangan PDRB Kota Denpasar disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	11.167,67	12.116,48	13.136,61	14.136,70	13.439,11	13.510,13
Kab. Tabanan	18.630,25	20.376,58	22.127,88	23.795,93	22.257,58	22.010,14
Kab. Badung	47.208,17	52.343,65	57.791,25	62.836,11	49.014,03	44.803,89
Kab. Gianyar	22.113,25	24.224,22	26.460,40	28.520,28	25.865,37	25.836,19
Kab. Klungkung	7.112,02	7.784,62	8.459,34	9.099,50	8.450,67	8.529,43
Kab. Bangli	5.457,23	5.976,57	6.490,23	6.993,64	6.716,21	6.799,14

Kabupaten/Kota	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Karangasem	13.410,89	14.598,38	15.886,26	17.086,88	16.407,77	16.487,62
Kab. Buleleng	27.690,11	30.318,76	32.926,63	35.362,32	33.306,17	33.337,29
Kota Denpasar	42.384,43	46.835,75	51.374,78	55.456,04	49.558,96	49.588,38
Provinsi Bali	194.089,58	213.035,86	233.636,77	251.934,10	223.900,89	219.800,03

Sumber : BPS Provinsi Bali

Tabel 3.4

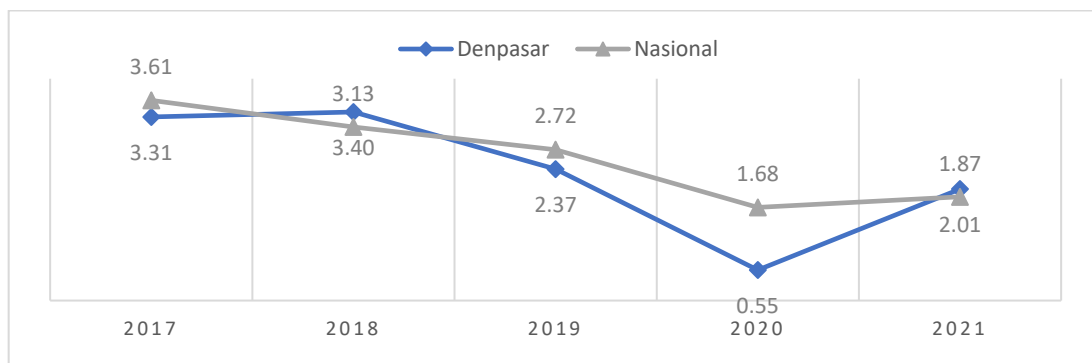
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	8.027,93	8.452,03	8.924,38	9.420,44	8.951,35	8.892,80
Kab. Tabanan	13.420,55	14.141,72	14.949,32	15.783,04	14.808,65	14.516,58
Kab. Badung	31.157,37	33.052,05	35.275,42	37.326,47	31.147,82	29.049,52
Kab. Gianyar	16.125,28	17.005,12	18.027,09	19.040,90	17.441,75	17.254,61
Kab. Klungkung	5.115,61	5.387,61	5.682,94	5.990,94	5.608,69	5.595,88
Kab. Bangli	3.916,10	4.124,22	4.350,14	4.587,22	4.399,24	4.384,70
Kab. Karangasem	9.524,23	10.006,13	10.550,25	11.130,34	10.630,37	10.570,60
Kab. Buleleng	19.950,72	21.023,60	22.201,45	23.425,32	22.066,16	21.797,73
Kota Denpasar	30.273,39	32.105,35	34.166,04	36.154,42	32.745,22	32.447,06
Provinsi Bali	137.296,45	144.933,31	154.072,66	162.693,36	147.521,41	143.870,40

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.3. Laju Inflasi

Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,03 % dari tahun 2018 menjadi 2,37%. Sedangkan pada Tahun 2020 Inflasi Kota Denpasar tercatat negatif sebesar 0,55% dampak terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 3.2

Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2016-2021

Inflasi pada tahun 2020 tertinggi terjadi pada kelompok Makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,72%, sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada

kelompok Transportasi sebesar 1,43%. Kondisi ini diakibatkan oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemi covid-19 seperti PKM, penutupan destinasi pariwisata.

Pada tahun 2021 penyumbang Inflasi tertinggi berasal dari kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 10,39% diikuti oleh Makanan, Minuman dan tembakau. Deflasi tertinggi disumbang oleh kelompok rekreasi, komunikasi dan jasa.

Tabel 3.2
Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021

Kelompok Inflasi	2021
Makanan, minuman, dan tembakau	3.95
Pakaian dan alas kaki	-2.50
Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya	-0.02
Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga	10.39
Kesehatan	0.78
Transportasi	2.23
Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	0.68
Rekreasi, olahraga, dan budaya	-3.78
Pendidikan	-0.67
Penyediaan makanan dan minuman/restoran	0.72
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	2.96
Umum	2.01

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.4. Gini Rasio

Gini Rasio / Indek Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu daerah. Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Gini Rasio mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Gini Rasio makin mendekati satu. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Gini Rasio adalah sebagai berikut :

1. Gini Rasio < 0.3 : ketimpangan rendah.
2. $0.3 \leq \text{Gini Rasio} \leq 0.5$: ketimpangan sedang.
3. Gini Rasio > 0.5 : ketimpangan tinggi.

Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2021 sebesar 0,375 sedikit lebih rendah dibandingkan Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2021 sebesar 0,378. Artinya distribusi pendapatan di Provinsi Bali lebih timpang jika dibandingkan Gini Rasio di Kota Denpasar yang merupakan ibukota provinsi Bali. Berikut disajikan Gini Rasio Kabupaten/Kota se Provinsi Bali dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Tabel 3.3
Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	Gini Rasio					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	0,36	0,32	0,33	0,290	0,353	0,317
Kab. Tabanan	0,34	0,31	0,32	0,308	0,324	0,311
Kab. Badung	0,32	0,32	0,34	0,324	0,317	0,332
Kab. Gianyar	0,3	0,27	0,31	0,287	0,317	0,333
Kab. Klungkung	0,36	0,37	0,39	0,385	0,358	0,346
Kab. Bangli	0,35	0,3	0,31	0,274	0,283	0,285
Kab. Karangasem	0,29	0,32	0,34	0,313	0,327	0,318
Kab. Buleleng	0,34	0,31	0,34	0,285	0,285	0,282
Kota Denpasar	0,33	0,34	0,34	0,347	0,330	0,375
Provinsi Bali	0,37	0,38	0,38	0,366	0,369	0,378

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.5. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar sebesar 7,62%, lebih tinggi jika dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sebesar 5,63%. Ini menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kota Denpasar belum dapat diatasi secara tuntas apalagi dalam situasi pandemic Covid-19 ini, yang menyebabkan perusahaan mem PHK pegawainya, akan tetapi Kota Denpasar dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran adalah :

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
2. Meningkatkan penempatan dan perluasan tenaga kerja
3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan
4. Pengembangan hubungan industrial

Langkah-langkah tersebut diatas disertai dengan penanganan pandemi berupa vaksinasi masal di tahun 2021 sedikit tidak memberi angin segar bagi

dalam mengatasi pengangguran di Kota Denpasar. Secara perlahan dengan dibukanya Kembali pusat-pusat perdagangan dan tempat wisata secara perlahan menggerakkan kembali kegiatan usaha masyarakat. Kembali beroperasinya beberapa tempat wisata dengan menerapkan prokes ketat diharapkan dapat mengurangi pengangguran. Tahun 2021 tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar sedikit terkoreksi dari tahun sebelumnya menjadi 7,02%. Secara detail disampaikan TPT Kabupaten/Kota se Provinsi Bali pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota(Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	-	0,67	1,38	1,42	4,52	4.11
Kab. Tabanan	-	1,79	1,43	1,28	4,21	3.94
Kab. Badung	-	0,48	0,44	0,38	6,92	6.93
Kab. Gianyar	-	1,02	1,60	1,42	7,53	6.90
Kab. Klungkung	-	0,94	1,41	1,54	5,42	5.35
Kab. Bangli	-	0,48	0,80	0,72	1,86	1.80
Kab. Karangasem	-	0,72	0,99	0,6	2,42	2.32
Kab. Buleleng	-	2,41	1,84	3,02	5,19	5.38
Kota Denpasar	-	2,63	1,82	2,22	7,62	7.02
Provinsi Bali	1,89	1,48	1,37	1,52	5,63	5.37

Sumber : BPS Provinsi Bali

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Tahun 2020, TPAK Kota Denpasar sudah mencapai 70,91% walaupun masih dibawah TPAK Provinsi Bali sebesar 74,32%. Tahun 2021, TPAK Kota Denpasar mencapai 73,08%, terendah kedua di provinsi Bali dari TPAK Kabupaten Gianyar yang sebesar 69,88%

Tabel 3.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota (Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	-	78,62	77,45	67,52	75,92	81.26
Kab. Tabanan	-	71,33	77,46	75,56	75,47	74.98
Kab. Badung	-	70,43	71,44	72,67	72,69	72.52
Kab. Gianyar	-	78,17	79,10	76,21	71,27	69.88
Kab. Klungkung	-	77,07	78,11	76,21	75,27	72.83
Kab. Bangli	-	84,14	85,85	83,20	82,20	82.09
Kab. Karangasem	-	78,37	82,50	80,68	80,75	81.15
Kab. Buleleng	-	75,44	76,87	69,67	75,07	73.08

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota (Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Denpasar	-	73,91	73,75	71,71	70,91	68,67
Provinsi Bali	77,24	75,24	76,78	73,87	74,32	73,54

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.6. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Denpasar mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sebesar 0,04% menjadi sebesar 2,14% di Tahun 2020. Tingkat Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2019 masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2020.

Di Tahun 2021 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 2,19%. Tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Penyebab kemiskinan lebih didorong pada fasilitas infrastruktur yang dimiliki Kota Denpasar. Jumlah kaum migran yang cukup tinggi, sering menimbulkan masalah karena tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai, sementara persaingan ekonomi cukup tinggi. Akibatnya pendatang justru membawa masalah pengangguran yang berdampak pada kemiskinan penduduk. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021 disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	5,38	5,38	5,20	4,88	4,51	5,06
Kab. Tabanan	4,92	4,92	4,46	4,21	4,27	5,12
Kab. Badung	2,06	2,06	1,98	1,78	2,02	2,62
Kab. Gianyar	4,46	4,46	4,19	3,88	4,08	4,85
Kab. Klungkung	6,29	6,29	5,86	5,40	4,87	5,64
Kab. Bangli	5,23	5,23	4,89	4,44	4,19	5,09
Kab. Karangasem	6,55	6,55	6,28	6,25	5,91	6,78
Kab. Buleleng	5,74	5,74	5,36	5,19	5,32	6,12
Kota Denpasar	2,27	2,27	2,24	2,10	2,14	2,96
Provinsi Bali	4,25	4,25	4,01	3,79	3,78	4,53

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2022 dan 2023

Tantangan dan prospek perekonomian Denpasar akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran lokal, nasional dan global. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali memproyeksikan ekonomi di Pulau Dewata pada 2022 bisa tumbuh di atas 6 persen, berkaca dari peningkatan konsumsi swasta dan masyarakat serta membaiknya mobilitas

masyarakat. Mobilitas masyarakat hingga Desember 2021 telah menunjukkan perbaikan seiring dengan membaiknya level PPKM. Indikator sektor pariwisata pada triwulan IV 2021 juga menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan Nusantara. Kinerja konsumsi swasta pada periode yang sama juga mengalami pertumbuhan positif yang tercermin dari peningkatan hasil survei konsumen, survei perdagangan eceran, kredit konsumsi, dan konsumsi listrik rumah tangga.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, ada sejumlah tantangan jangka pendek dan jangka panjang. Tantangan jangka pendek karena kasus COVID-19 dunia dan kunjungan wisatawan Nusantara yang masih terbatas. Dalam jangka panjang, terdapat tantangan berupa ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata dan pariwisata Bali yang belum sepenuhnya pariwisata yang berkualitas.

Oleh karenanya, rekomendasi jangka pendek diberikan untuk fokus pada wisatawan Nusantara, program Bekerja dari Bali, implementasi CHSE, serta digitalisasi dan on boarding UMKM. Dalam jangka panjang, Bali dinilai perlu melakukan diversifikasi ekonomi dan pariwisata yang berkualitas. Bali juga perlu meningkatkan daya tahan terhadap penyakit, daya tahan terhadap tekanan ekonomi, serta meningkatkan daya saing.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", terdapat tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023. Pertama, adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dihaapkan pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem) bisa mencapai 0-1 persen, artinya tahun 2023 harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5-3 juta penduduk secara nasional. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan. Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Keenam, ekonomi hijau. Mengingat Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Sasaran pembangunan nasional pada tahun 2023 meliputi: pertama pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35, serta tingkat kemiskinan 7-8 persen. Indikator pembangunan adalah nilai tukar petani (NTP) antara 103-105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 105-107.

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah; nasional; dan internasional, secara makro pada tahun 2021 – 2022 prospek pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar diprediksi secara perlahan mulai mengalami perbaikan.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kota Denpasar diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 3.7
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2023

No	Indikator Makro Ekonomi	Target 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,16%
2	Inflasi (%)	2,25%
3	Angka Kemiskinan (%)	2,01%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,18%
5	Indeks Pembangunan Manusia	84,35%
6	Gini Rasio / Indeks Gini	0,29

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu

kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari : (1) Pendapatan; (2) Belanja dan (3) Pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah satu instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disesuaikan dan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah yang dilakukan melalui mekanisme dan tahapan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, APBD harus mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan dinamika kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat serta perlunya sinkronisasi kebijakan, isu-isu strategis, dan prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah sehingga APBD diharapkan menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Denpasar, oleh karena itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran

pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Pendapatan Daerah Kota Denpasar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data Realisasi Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun 2021, Pendapatan Daerah Kota Denpasar terbesar bersumber dari Pendapatan Transfer yaitu sebesar Rp. 1.115.074.616.004,87 atau sebesar 55,75% dari keseluruhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Denpasar di tahun 2021. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan di Kota Denpasar.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar terbagi atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Akibat Pandemi COVID-19, Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2020 berkontraksi sampai sebesar -9,42% di tahun 2020 dan PAD Kota Denpasar mengalami penurunan yang signifikan sebesar 27,65% dari tahun 2019 sebesar Rp. 1.010.669.179.532,63 menjadi sebesar Rp. 731.261.280.905,53 di tahun 2020.

Kontribusi PAD Kota Denpasar tahun 2021 sebesar 39,80% terhadap Pendapatan Daerah dan ditargetkan di tahun 2022 dapat meningkat menjadi 39,92%. Tahun 2023, PAD Kota Denpasar diproyeksikan dapat berkontribusi sebesar 43,87% terhadap Pendapatan Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah masih menjadi penyumbang terbesar bagi PAD Kota Denpasar, walaupun mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 berkurang sebesar Rp. 310.662.442.236,09 (38,82%) dari Realisasi Pajak Daerah tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 489.693.285.412,46 dengan penurunan yang hampir merata di seluruh jenis pajak.

Pajak Hotel mengalami penurunan yang paling besar akibat Pandemi COVID-19. Realisasi Pajak Hotel di tahun 2020 hanya sebesar Rp. 54.219.474.986,56 menurun sebesar 72,83% dari Pajak Hotel di tahun 2019

yang terealisasi sebesar Rp. 199.524.196.145,96. Hal ini merubah komposisi kontribusi dari masing-masing jenis pajak pada Pajak Daerah. Pada tahun 2019, sebelum terjadi Pandemi COVID-19, realisasi Pajak Hotel memberikan kontribusi terbesar bagi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 24,93% dengan nilai sebesar Rp. 199.524.196.145,96. Sedangkan di tahun 2020, Pajak Hotel yang paling terdampak oleh Pandemi COVID-19, mengalami penurunan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Pajak Daerah hanya menjadi sebesar 11,07%.

Pada tahun 2020, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberi kontribusi terbesar bagi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 26,11% relatif stabil jika dibandingkan kontribusinya pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, realisasi BPHTB memberi kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 40,77% dengan realisasi BPHTB sebesar Rp. 212.806.048.983. Hal ini karena terjadi transaksi yang cukup besar saat pengalihan hak atas tanah pada saat pengembangan Pelabuhan Bena.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran adalah jenis pajak dengan kontribusi yang cukup besar dan relatif stabil bagi Pendapatan Pajak Daerah.

Pada tahun 2021, PBBP2 memberi kontribusi sebesar 20,26% dengan realisasi sebesar Rp. 105.786.350.331 meningkat sebesar Rp. 11.970.995.922 jika dibandingkan dengan PBBP2 tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 93.815.354.409,00

Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 87.445.313.141 dengan kontribusi sebesar 19,79% terhadap Pajak Daerah, namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 96.917.837.846,00. Hal ini tentu dapat menjadi potensi untuk dilakukan intensifikasi dan ekstentifikasi untuk optimalisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Restoran, walaupun mengalami penurunan yang cukup tinggi di tahun 2020, dari realisasi sebesar Rp. 158.752.914.495,08 di tahun 2019 menjadi terealisasi sebesar Rp. 93.202.955.815,85 di tahun 2020, namun kontribusinya masih stabil terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Di tahun 2021, Pajak Restoran

terrealisasi sebesar Rp. 83.187.199.367 menurun sebesar 12% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Pajak Daerah pada tahun 2023 diproyeksikan meningkat sebesar 24,27% dibandingkan target Pajak Daerah tahun 2022, menjadi Rp. 698.675.200.000, dengan proyeksi peningkatan terbesar bersumber dari pajak hotel dan pajak restoran. Tahun 2023, diproyeksikan kondisi pariwisata di Kota Denpasar sudah semakin membaik sehingga penerimaan pajak hotel di tahun 2023 diproyeksikan dapat optimal. Serta, tumbuhnya industri kuliner di Kota Denpasar dalam beberapa waktu terakhir, diproyeksikan dapat berkontribusi besar pada penerimaan pajak restoran di tahun 2023. Pajak Daerah di tahun 2023 diproyeksikan akan berkontribusi sebesar 76,85% terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 909.176.282.901,50, bertambah sebesar Rp. 113.229.189.066,58 jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2021.

Melihat tren perkembangan kasus Pandemi COVID-19 yang sudah mulai melandai di tahun 2022 ini, PAD Kota Denpasar diharapkan dapat dioptimalkan sejalan dengan pemulihan perekonomian Kota Denpasar. Untuk mengoptimalkan potensi PAD, serta meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, arah kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
2. Peningkatan kualitas data wajib pajak
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber potensi PAD

Pemanfaatan teknologi merupakan prioritas utama yang akan dilakukan dalam upaya mengoptimalkan potensi PAD Kota Denpasar. Diharapkan dengan penggunaan kanal-kanal digital dalam pembayaran Pajak dan Retribusi dapat mempermudah masyarakat melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD Kota Denpasar.

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer masih diproyeksikan sebagai sumber terbesar Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Tahun 2023, Pendapatan Transfer

diproyeksikan sebesar Rp. 1.163.107.116.600 dengan proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.009.170.171.957 serta Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 153.936.944.643.

Proyeksi Pendapatan Transfer mencapai 56,13% dari keseluruhan proyeksi Pendapatan Daerah, dengan kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 48,70% terhadap Pendapatan Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum diproyeksikan sama dengan target tahun 2022 sebesar Rp. 609.734.565.000 serta Dana Alokasi Khusus diproyeksikan sebesar Rp. 243.004.122.117. Besarnya kontribusi proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Pendapatan Daerah menggambarkan bahwa untuk melaksanakan pembangunan di Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar masih membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar dari Pemerintah Pusat terutama untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional di Kota Denpasar.

Secara terinci, realisasi, target dan proyeksi pendapatan Kota Denpasar disampaikan pada tabel berikut

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Realisasi, Target, dan Proyeksi Pendapatan Daerah				
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
4.	PENDAPATAN	2.132.305.141.255,30	1.959.498.320.391,60	2.000.025.821.341,59	1.965.239.754.836,00	2.072.283.399.501,50
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.010.669.179.532,63	731.261.280.905,53	795.947.093.834,92	784.495.670.001,00	909.176.282.901,50
4.1.01.	Pajak Daerah	800.356.095.356,92	489.692.369.902,61	522.021.146.102,64	562.207.740.000,00	698.675.200.000,00
4.1.01.	Retribusi Daerah	33.161.961.523,00	29.183.790.708,00	23.552.907.074,00	29.154.972.000,00	21.565.884.196,00
4.1.01.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.521.727.968,30	56.572.597.030,60	53.948.291.794,20	52.140.471.872,00	53.256.529.835,50
4.1.01.	Lain-lain PAD yang Sah	131.629.394.684,41	155.812.523.264,32	196.424.748.864,08	140.992.486.129,00	135.678.668.870,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.121.635.961.722,67	1.228.237.039.486,07	1.115.074.616.004,87	1.180.744.084.835,00	1.163.107.116.600,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	923.588.099.558,00	1.058.120.320.170,91	968.260.617.789,00	1.037.618.425.192,00	1.009.170.171.957,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	869.958.857.558,00	823.799.215.617,00	862.482.430.789,00	958.221.157.192,00	930.145.118.309,00
	<i>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</i>	<i>61.629.340.379,00</i>	<i>86.500.415.123,00</i>	<i>108.061.458.971,00</i>	<i>77.406.431.192,00</i>	<i>77.406.431.192,00</i>
	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>677.033.111.000,00</i>	<i>619.582.547.000,00</i>	<i>609.734.565.000,00</i>	<i>609.734.565.000,00</i>	<i>609.734.565.000,00</i>
	<i>Dana Alokasi Khusus (Fisik)</i>	<i>25.251.621.082,00</i>	<i>11.870.536.132,00</i>	<i>47.173.565.137,00</i>	<i>40.913.582.000,00</i>	
	<i>Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)</i>	<i>106.044.785.097,00</i>	<i>105.845.717.362,00</i>	<i>97.512.841.681,00</i>	<i>230.166.579.000,00</i>	<i>243.004.122.117,00</i>
	<i>DAK Penugasan</i>		<i>4.555.772.836,00</i>			
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	18.878.781.000,00	85.367.717.000,00	65.629.720.000,00	50.471.771.000,00	50.099.556.648,00
	<i>DID</i>	<i>18.878.781.000,00</i>	<i>85.367.717.000,00</i>	<i>65.629.720.000,00</i>	<i>50.471.771.000,00</i>	<i>50.099.556.648,00</i>
4.2.01.05	Dana Desa	34.750.461.000,00	148.953.387.553,91	40.148.467.000,00	28.925.497.000,00	28.925.497.000,00
	<i>Dana Desa</i>	<i>34.750.461.000,00</i>	<i>36.621.601.000,00</i>	<i>40.148.467.000,00</i>	<i>28.925.497.000,00</i>	<i>28.925.497.000,00</i>
	<i>Pendapatan Hibah</i>		<i>112.331.786.553,91</i>			
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	198.047.862.164,67	170.116.719.315,16	146.813.998.215,87	143.125.659.643,00	153.936.944.643,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	191.850.862.164,67	155.780.657.698,16	125.692.795.971,50	140.948.959.643,00	140.948.959.643,00
	<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</i>	<i>191.850.862.164,67</i>	<i>155.780.657.698,16</i>	<i>125.692.795.971,50</i>	<i>140.948.959.643,00</i>	<i>140.948.959.643,00</i>

No.	Uraian	Realisasi, Target, dan Proyeksi Pendapatan Daerah				
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	6.197.000.000,00	14.336.061.617,00	21.121.202.244,37	2.176.700.000,00	12.987.985.000,00
	<i>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi</i>	<i>6.197.000.000,00</i>	<i>14.336.061.617,00</i>	<i>21.121.202.244,37</i>	<i>2.176.700.000,00</i>	<i>12.987.985.000,00</i>
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	89.004.111.501,80	0,00	0,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	89.004.111.501,80	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan	0		89.004.111.501,80		0,00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Berpedoman kepada Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 yaitu "**Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Denpasar Maju**", Kebijakan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Diarahkan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Denpasar
2. Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
5. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kota Denpasar.

6. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah.

Realisasi Belanja Operasi pada tahun 2021 sebesar 84,72% dari keseluruhan Belanja Daerah, ditargetkan menurun menjadi sebesar 81,24% pada tahun 2022. Untuk pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien, proporsi belanja-belanja pada kategori Belanja Operasi diupayakan mengalami penurunan secara bertahap. Proporsi Belanja Operasi pada tahun 2023 diproyeksikan menurun menjadi 80,74% yaitu sebesar Rp. 1.862.979.625.950. Pada tahun 2023, Belanja Pegawai dan Belanja Hibah diproyeksikan mengalami penurunan proporsi untuk efektif dan efisien nya Belanja Daerah. Proporsi realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2021 sebesar 47,43% dan ditargetkan menurun pada tahun 2022 sebesar 43,75%. Tahun 2023, Belanja Pegawai diproyeksikan menurun menjadi sebesar 40,07%. Proporsi Belanja Pegawai dirancang menurun secara bertahap agar menjadi lebih efektif dan efisien. Proporsi Belanja Hibah pada tahun 2023 diproyeksikan menurun menjadi 2,77%, menurun secara bertahap dari realisasi tahun 2021 sebesar 6,68% dan ditargetkan sebesar 3,22% pada tahun 2022.

Belanja Modal pada tahun 2023 diproyeksikan meningkat menjadi sebesar 11,58% yaitu sebesar Rp. 267.099.612.228 yang dialokasikan sebagian besar untuk pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas pada Sekolah Dasar, pembangunan unit Sekolah Menengah Pertama serta perbaikan infrastruktur jalan, yang merupakan prioritas pembangunan tahun 2023.

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 diproyeksikan menurun sebesar Rp. 16.947.493.305 dari alokasi pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 12.482.862.712 mengingat kondisi pandemi COVID 19 yang sudah berangsur membaik di tahun 2022 dan diharapkan akan semakin membaik di tahun 2023.

Secara terinci, proyeksi belanja daerah tahun 2023 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Denpasar
Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	Jumlah		
		Realisasi	Target	Proyeksi
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
5	BELANJA	1.925.696.608.874	2.255.949.990.776	2.307.271.740.290
5.1	Belanja Operasi	1.631.507.971.834	1.832.674.477.654	1.862.979.625.950
5.1.01	Belanja Pegawai	821.977.270.550	986.911.339.301	924.466.836.709
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.568.797.899	769.796.574.883	871.329.708.308
5.1.05	Belanja Hibah	200.570.748.386	72.553.813.470	64.017.867.507
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.391.155.000	3.412.750.000	3.165.213.426
5.2	Belanja Modal	102.364.487.144	231.124.177.605	267.099.612.228
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.466.985.400	241.500.000	384.324.120
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.791.930.099	31.838.343.377	24.771.059.408
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.228.842.673	109.398.082.667	134.366.161.700
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	21.029.773.472	69.873.015.994	83.135.642.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	846.955.500	19.773.235.567	24.442.425.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	30.712.586.396	29.430.356.017	12.482.862.712
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.712.586.396	29.430.356.017	12.482.862.712
5.4	Belanja Transfer	161.111.563.500	162.720.979.500	164.709.639.400
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	47.902.596.500	59.220.774.000	62.722.970.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	113.208.967.000	103.500.205.500	101.986.669.400

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad

pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 3.10

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
6.	PEMBIAYAAN	347.529.158.243,87	241.546.506.013,01	312.802.054.510,00	280.324.869.867,00	234.988.340.788,50
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	323.367.373.097,87	237.423.789.571,01	312.802.054.510,00	280.324.869.867,00	234.988.340.788,50
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	321.230.139.097,87	237.423.789.571,01	312.802.054.510	280.324.869.867	234.988.340.788,50
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	2.137.234.000,00				
6						
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.161.785.146,00	4.122.716.442,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	24.161.785.146,00	4.122.716.442,00			
6.2.7.	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-			
	Jumlah Pembiayaan Netto	347.529.158.243,87	241.546.506.013,01	312.802.054.510,00	280.324.869.867,00	234.988.340.788,50

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target/capaian kinerja atas janji dan visi misi Pemerintah Kota Denpasar, berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah "**KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU**" dengan misi pembangunan Kota Denpasar sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ke**MAKMUR**an Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan;
2. Menjaga Stabilitas Ke**AMAN**an dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana;
3. Ke**JUJUR**an dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance);
4. **UNGGUL** dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana;
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Ke**BUDAYA**an Bali.

Adapun tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan masing – masing misi dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kota Denpasar disertai target capaian di tahun 2023 secara terinci disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,776
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	75,46
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan	2.422.121
		Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan	2,01%
Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan PERDA	89,34%
		Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	105,63
		Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	93,7
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana	98,72
Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	88,16
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	BB (76,45)
			Opini BPK	WTP

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
yang Baik (Good Governance)				
Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18%
		Optimalnya pemanfaatan teknologi	Indeks SPBE	3,6
		Meningkatnya inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis tri hita karana	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	60,47%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,95
Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	68,54

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPd dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha; Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Adapun Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional sebagaimana disebutkan pada RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhumkam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2. Paradigma Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/ menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

1. Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala Niskala

Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.

2. Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3. Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/ Kota se-Bali secara parsial dengan

tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan. Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarnya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4. Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5. Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6. Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7. Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

Pembangunan Provinsi Bali tahun 2023 dalam mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana” mengambil tema “Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Bali: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera” dengan agenda prioritas pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Pangan, Sandang dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata
6. Penguatan Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023

Dalam pencapaian target-target kinerja pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah, ditetapkan prioritas pembangunan yang disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya yang disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2023.

Sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan, ditetapkan Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 adalah “**Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Denpasar Maju**” dengan 5 Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Sosial dan Ketenagakerjaan
3. Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan
4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
5. Reformasi Birokrasi

4.2.4. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023

Dalam pelaksanaan pembangunan keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sinergi pusat-daerah dan antar daerah terus dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah.

Transformasi ekonomi yang menjadi kata kunci Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali di tahun 2023, diwujudkan dengan diversifikasi sektor perekonomian di Kota Denpasar dengan melihat potensi UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar disamping sektor pariwisata. Dengan upaya meningkatkan potensi UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lain untuk mewujudkan Denpasar Maju.

Tabel 4.2
Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023

TEMA PEMBANGUNAN		
NASIONAL	PROVINSI BALI	KOTA DENPASAR
Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Bali : Hijau, Tangguh, Dan Sejahtera	Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Denpasar Maju

Berikut disampaikan secara terinci keselarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 dikaitkan dengan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 4.3
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota Denpasar
Tahun 2023

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatkan ketahanan pangan
PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan Mengurangi pengangguran
	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya inovasi daerah
PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pembangunan kebudayaan
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
PN 5: Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
		Optimalnya pemanfaatan teknologi
PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda
		Menurunnya kasus kriminalitas
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Keselarasn Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 dikaitkan dengan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.4
Keselarasn Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
Pangan, Sandang dan Papan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatkan ketahanan pangan
	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan
	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat
Kesehatan dan Pendidikan	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi pengangguran
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pembangunan kebudayaan
Pariwisata	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Menurunnya kasus kriminalitas
Penguatan Infrastruktur	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
		Optimalnya pemanfaatan teknologi
		Meningkatnya inovasi daerah
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

4.3. Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berikut merupakan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah beserta target capaiannya di tahun 2023

Tabel 4.5

Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target Capaian Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2023
1.	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,776
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	75,46
2.	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan	2,01%
		Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18%
3.	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan	2.422.121
		Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	68,54
4.	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	60,47%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,95
		Optimalnya pemanfaatan teknologi	Indeks SPBE	3,6
		Meningkatnya inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
		Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan PERDA	0,8934
		Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	105,63
		Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	93,7

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2023
5.	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	88,16
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	BB (76,45)
			Opini BPK	WTP

Dalam mendukung pencapaian sasaran daerah yang menjadi prioritas pembangunan Kota Denpasar, dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.6
Program Prioritas Kota Denpasar Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Usulan
1	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	281.347.239.550
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	1.054.142.682
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	99.837.685.949
				Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	
				Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	
				Persentase Balita stunting	
			Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	5.056.660.172			
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase TPM Memenuhi syarat	284.462.841			
2	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	880.557.350

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Usulan	
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.087.340.400	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	367.572.800	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	853.866.000	
			Mengurangi pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	1.536.030.000
					Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	4.071.555.240	
3	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	273.420.536	
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	91.801.048	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	741.981.232	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	110.775.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Usulan
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	326.278.000
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	413.129.640
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	1.286.081.660
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	760.350.000
			Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	844.727.344
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	1.289.658.904
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	54.429.880
		Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	33.418.314.066
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	618.604.000

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Usulan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	66.592.600
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Pertahun	812.236.480
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	683.290.000
4	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	89.101.369.125
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	19.005.995.088
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	6.083.664.210
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	48.734.017.711
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	474.369.000
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	2.179.500.000
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang	4.182.500.000

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Usulan	
				Mendapatkan Akses Air Minum		
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	72.450.663	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Persentase peningkatan kualitas air	376.094.681
					Persentase peningkatan kualitas udara	
					Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Persentase pemeliharaan pohon perindang	16.791.729.623
					Persentase taman yang terpelihara	
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	294.839.260	
		Program Pengelolaan Persampahan		Persentase volume sampah yang dikelola	74.300.817.000	
		Optimalnya pemanfaatan teknologi	Program Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi	4.017.733.540	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Usulan
				layanan publik yang terintegrasi	
		Meningkatnya inovasi daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah Persentase Penetapan Inovasi Daerah	531.000.000
		Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	198.187.318
			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.093.675.870
		Menurunnya kasus kriminalitas	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	400.413.750
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	1.421.315.800
		Meningkatkan ketahanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari) Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	738.111.650

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Usulan
				Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)	
				Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	
			Program Penanganan Kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan	357.042.250
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	69.132.500
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	1.730.270.250
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	818.843.400
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	103.747.200
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	350.902.750
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	130.683.000
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	1.984.810.432
				Persentase pelayanan penanggulangan bencana	
				Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Usulan
			Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan penanganan bencana	151.707.800
5	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	1.241.946.517
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	198.415.200
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	5.718.041.080
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	45.195.000
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APIP Maturitas SPIP	301.060.700	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Usulan
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	307.022.200
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	1.891.774.300
				Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	894.862.544
				Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	1.293.254.000

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Usulan
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	3.719.583.248
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	178.277.277.694
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	1.371.152.330
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	1.101.875.000

4.4. Kebijakan Pembiayaan Alternatif Daerah

Pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar perlu dilakukan dengan langkah-langkah inovatif dengan melibatkan pihak-pihak swasta maupun masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai merupakan salah satu layanan publik yang menjadi prioritas pembangunan Kota Denpasar, dengan salah satu fokusnya adalah ketersediaan Alat Penerangan Jalan yang sangat vital untuk mengatasi masalah keamanan dan keselamatan lalu lintas. Alat Penerangan Jalan yang saat ini sudah dimiliki oleh Kota Denpasar masih belum cukup memadai, terutama masih belum mencakup seluruh titik lokasi dan kawasan strategis di Kota Denpasar

Penyediaan air bersih juga merupakan salah satu isu strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Denpasar. Saat ini, cakupan ketersediaan jaringan air bersih belum dapat mengimbangi pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman yang meningkat pesat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar. Peningkatan cakupan ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Denpasar direncanakan dilakukan dengan strategi revitalisasi serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Denpasar.

Karena keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah Kota Denpasar untuk dapat menyediakan infrastruktur yang memadai dalam pemenuhan Alat Penerangan Jalan serta Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Denpasar yang membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar, pada tahun 2023 Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan skema Pembayaran Berdasarkan Ketersediaan Layanan atau yang biasa dikenal dengan Availability Payment lewat proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

4.5. Kebijakan Daerah dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020, membawa dampak pada semua dimensi kehidupan, baik sektor kesehatan, sosial dan perekonomian. Cakupan vaksinasi COVID-19 di Kota Denpasar sampai dengan Maret 2022 adalah sebagai berikut :

Perekonomian Kota Denpasar mengalami guncangan yang sangat kuat akibat Pandemi COVID-19. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang sangat dalam hingga -9,42% pada tahun 2020 karena pariwisata sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kota Denpasar mengalami guncangan yang sangat hebat akibat Pandemi COVID-19.

Pemulihan ekonomi masih menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kota Denpasar di Tahun 2023 dan diharapkan Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dapat tumbuh hingga 5,16%. Strategi pemulihan ekonomi di sektor pariwisata sebagai sektor utama perekonomian Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan event-event tahunan Kota Denpasar yang pelaksanaannya tahun sebelumnya tidak optimal akibat Pandemi COVID-19, seperti misalnya pelaksanaan D'Youth Festival dan Denpasar Festival.
2. Melaksanakan event-event budaya sebagai daya tarik wisata Kota Denpasar. Event-event budaya direncanakan akan digelar secara rutin sepanjang tahun 2023 dengan tema yang beragam.
3. Melakukan penataan wajah kota dan perbaikan infrastruktur-infrastruktur yang mendukung pariwisata.
4. Melakukan promosi pariwisata terutama mengenai kesiapan Kota Denpasar dalam menyambut wisatawan pasca pandemi COVID-19.

Karena kerentanan sektor pariwisata, Kota Denpasar juga mengembangkan potensi perekonomian lainnya dalam upaya memulihkan perekonomian Kota Denpasar pasca Pandemi COVID-19. UMKM dan ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi sektor alternatif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, melihat potensi pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Denpasar.

2. Penguatan UMKM Kota Denpasar untuk dapat bersaing memasuki pasar digital dalam perluasan pasar produk-produk UMKM Kota Denpasar
3. Peningkatan investasi dengan mempermudah berbagai proses perijinan usaha.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah Denpasar. Rencana program prioritas sesuai Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 beserta tolok ukur, target serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Program Usulan Tahun 2023

Program	Indikator Program	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Usulan	
Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan Lama Sekolah • Rata-Rata Lama Sekolah; 	<ul style="list-style-type: none"> • 14,03 Tahun; • 11,60 Tahun 	281,347,239,550	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga;
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) 	<ul style="list-style-type: none"> • 80,00 % 	1,054,142,682	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; • Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; • Indeks Kepuasan Masyarakat; • Persentase Balita stunting; • Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,4 Orang; • 56 Orang; • 84.5 %; • 10 %; • 100 %; 	99,837,685,949	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan;
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % 	5,056,660,172	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase TPM Memenuhi syarat 	<ul style="list-style-type: none"> • 55 % 	284,462,841	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % 	880,557,350	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % 	1,087,340,400	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial

Program	Indikator Program	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Usulan	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	• Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	• 100 %	367,572,800	• Dinas Sosial
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	• Persentase Rumah Layak Huni	• 94,50 %	853,866,000	• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	• Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi; • Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan; • Jumlah Tenaga Kerja yang Terkompetensi	• 88 %; • 91 %; • >10.100 orang	1,536,030,000	• Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi;
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	• Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	• 100 Orang	4,071,555,240	• Dinas Pariwisata
Program Pengembangan UMKM	• Persentase Peningkatan Usaha Mikro	• 10 %	273,420,536	• Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	• Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	• 7 %	91,801,048	• Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	• Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat; • Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat Meningkatkan jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten;	• 49,02 %; • 26,74% %	741,981,232	• Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	• Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan		-	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	• Presentase peningkatan jumlah produk ekraf yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI		-	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	• Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	• 20 %	110,775,000	• Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	• Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	• 2,00 %	326,278,000	• Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan	• 20 %	413,129,640	• Dinas Penanaman Modal Dan

Program	Indikator Program	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Usulan	
Pelaksanaan Penanaman Modal	LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	• Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	• 4 destinasi	1,286,081,660	• Dinas Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	• Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	• 5 %	760,350,000	• Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Ekspor	• Ekspor Bersih Perdagangan	• 2337086671324 Rupiah	844,727,344	• Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	• Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	• 75.61 %	1,289,658,904	• Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	• Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	• 0.94 %	54,429,880	• Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	• Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif; Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	• 68,00 %	400,413,750	• Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	• Persentase Penurunan Konflik Sosial; Persentase Penurunan Konflik Sosial	• 70 %	1,421,315,800	• Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pengembangan Kebudayaan	• Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	• 100 %	33,418,314,066	• Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	• Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional		-	
Program Pembinaan Sejarah	• Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	• 100 %	618,604,000	• Dinas Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	• Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	• 100,00 %	66,592,600	• Dinas Kebudayaan
Program Pembinaan Perpustakaan	• Persentase Pemustaka Petahan	• 3 %	812,236,480	• Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	• Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	• 10 %	683,290,000	• Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Penyelenggaraan Jalan	• Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	• 79,99 %	89,101,369,125	• Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program	Indikator Program	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Usulan	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	• Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	• 33 %	19,005,995,088	• Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	• Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	• 70,22% (1.145.350)	6,083,664,210	• Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	• Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	• 100 %	48,734,017,711	• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Program Kawasan Permukiman	• Persentase kawasan kumuh	• 0,159 %	474,369,000	• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	• Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	• 7,65% (11.103 SR) %	2,179,500,000	• Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	• Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	• 57,68 % (83.672 SR) %	4,182,500,000	• Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	• Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	• 40 %	72,450,663	• Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	• Persentase peningkatan kualitas air; • Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan; • Persentase peningkatan kualitas udara;	• 2 %; • 1 %; • 2 %	376,094,681	• Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan; • Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan; • Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	• Persentase taman yang terpelihara • Persentase pemeliharaan pohon perindang;	• 100 %; • 35 %	16,791,729,623	• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan; • Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	• Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat		-	
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	• Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	• 80 %	294,839,260	• Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

Program	Indikator Program	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Usulan	
Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup 		-	
Program Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase volume sampah yang dikelola 	• 95 %	74,300,817,000	• Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana persampahan yang memadai 		-	
Program Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi 	• 100 %	4,017,733,540	• Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah; Persentase Penetapan Inovasi Daerah 	• 70 %	531,000,000	• Badan Penelitian Dan Pengembangan
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan) 	• 88,11 %	198,187,318	• Satuan Polisi Pamong Praja
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum 	• 100 %;	2,093,675,870	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Denpasar Barat; Kecamatan Denpasar Timur; Kecamatan Denpasar Selatan; Kecamatan Denpasar Utara
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari); Ketersediaan protein (gram/kapita/hari); Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari); Konsumsi protein (gram/kapita/hari) 	<ul style="list-style-type: none"> 3.958 Kkal/kapita/hari; 173.3 gram/kapita/hari; 2392 Kkal/kapita/hari; 75 gram/kapita/hari; 	738,111,650	• Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan;
Program Penanganan Kerawanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase cadangan pangan 	• 35 %	357,042,250	• Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pangan yang aman dikonsumsi 	• 87 %	69,132,500	• Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Prasarana Pertanian yang kondisi baik 	• 39,26 %	1,730,270,250	• Dinas Pertanian

Program	Indikator Program	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Usulan	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak; • Produktivitas Tanaman Hortikultura (Bayam); • Produktivitas Tanaman Hortikultura (Kangkung); • Produktivitas Tanaman Hortikultura (Sayur Hijau); • Produktivitas Tanaman Hortikultura (Semangka); • Produktivitas Tanaman Padi; 	<ul style="list-style-type: none"> • 1600 ekor; • 55,62 Kw/Ha; • 157,06 Kw/Ha; • 175,20 Kw/Ha; • 282,8 Kw/Ha; • 69,20 Kw/Ha 	818,843,400	• Dinas Pertanian;
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	• Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	• 1460 ton	103,747,200	• Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	• Peningkatan Produksi perikanan budidaya	• 620 ton	350,902,750	• Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	• Persentase cakupan sumberdaya perikanan yang dipantau		-	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	• Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	• 37,5 Kg/Kapita/Tahun	130,683,000	• Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Program Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Waktu tanggap; • Persentase korban bencana yang tertangani 	<ul style="list-style-type: none"> • 37,21 %; • 100 %; • 100 % 	1,984,810,432	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana Daerah; • Badan Penanggulangan Bencana Daerah; • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanganan Bencana	• Persentase pemenuhan penanganan bencana	• 100 %	151,707,800	• Dinas Sosial
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; • Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; • Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; • Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • 83 %; • 100 %; • 83 %; • 83 % 	1,241,946,517	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Denpasar Barat; • Kecamatan Denpasar Timur; • Kecamatan Denpasar Selatan; • Kecamatan Denpasar Utara
Program Pendaftaran Penduduk	• Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	• 100 %	198,415,200	• Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	• Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	• 92 %	5,718,041,080	• Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program	Indikator Program	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Usulan	
Program Pelayanan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai survey kepuasan masyarakat 	• 87,89 Nilai	45,195,000	• Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penyelenggaraan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kapabilitas APiP; • Maturitas SPIP 	• 100 %	301,060,700	• Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan 	• 1 Kegiatan	307,022,200	• Inspektorat
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat; • Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %; • 100 % 	1,891,774,300	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar; • Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %; • 100 % 	894,862,544	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Program Kepegawaian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit 	• 79 %	1,293,254,000	• Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit 	• 57 %	3,719,583,248	• Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik) 	• 88.47 %	178,277,277,694	• Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik) 	• 96.15 %	1,371,152,330	• Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 	• 40,12 %	1,101,875,000	• Badan Pendapatan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan; 	• 100 %;	1,265,195,065,250	• Seluruh Perangkat Daerah Kota Denpasar
Program Pengembangan Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sekolah yang telah merevisi Kurikulum K13 	• 100 %	84,923,100	• Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

Program	Indikator Program	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Usulan	
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	• Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan	• 84 %	82,021,000	• Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	• Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional	• 81 %	25,244,400	• Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	• Persentase partisipasi atlet di tingkat nasional	• 92 %	24,596,196,000	• Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	• Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan	• 80 %	1,062,173,500	• Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	• Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal; • Persentase panjang sungai berfungsi normal	• 25,50% (14.013) %; • 3,5% (2.500 M) %	846,838,835	• Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
Program Penataan Bangunan Gedung	• Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	• 0,36% (1080 IMB) %	12,113,454,054	• Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	• Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis	• 16,67 %	15,724,250,000	• Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	• Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	• 15 %	74,522,500	• Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	• Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	• 95,2 %	839,674,900	• Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Perumahan	• Presentase pemenuhan SPM perumahan	• 100 %	160,000,000	• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	• Persentase konflik pertanahan yang terselesaian	• 100 %	6,419,880	• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Program Pengelolaan Tanah Kosong	• Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	• 12 sertifikat	117,830,200	• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	• Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; • Tingkat waktu tanggap (response time rate)	• 100 %; • 15 menit	1,406,191,350	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Program Penempatan Tenaga Kerja	• Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	• 20 %	721,566,960	• Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
Program Hubungan Industrial	• Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB); • Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta	• 61 %; • 59 %; • 74 %	432,261,110	• Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi;

Program	Indikator Program	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Usulan	
	perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan; • Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Dapat Diselesaikan			
Program Perlindungan Perempuan	• Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	• 40 %	312,021,064	• Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	• Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbetuk PUSPAGA Desa/ Lurah)	• 6,9 %	174,562,500	• Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	• Persentase Data terpilah Gender dan Anak pada OPD	• 30 %	64,155,000	• Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	• Cakupan Indikator KLA	• Utama .	919,800,000	• Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Khusus Anak	• Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	• 100 %	289,778,936	• Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk	• Persentase kelompok kerja Bangga Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif; • Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.	• 9,3 %; • 2,3 %	306,315,000	• Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	• Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)	• 7,60 %	2,710,572,000	• Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program	Indikator Program	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Usulan	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	• Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	• 15 %	3,818,740,000	• Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	• Persentase Validitas Data Kependudukan	• 100 %	123,424,800	• Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Kerjasama Desa	• Presentase Fasilitasi Kerjasama Desa	• 100 %	8,930,000	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	• Persentase Desa yang Tertib Administrasi	• 100 %	390,411,650	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	• Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif; • Presentase Pasar Desa dengan fasilitasi yang baik	• 100 %; • 100 %	1,861,814,600	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
Program Pengelolaan Pelayaran	• Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	• 70 %	394,620,700	• Dinas Perhubungan
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	• Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	• 85 %	2,236,238,698	• Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	• persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kota denpasar	• 80 %	43,993,300	• Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	• Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di lingkup pemerintah kota denpasar	• 60 %	465,209,032	• Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	• Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	• 21,94 %	323,483,200	• Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	• Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	• 100 %	273,825,000	• Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Arsip	• Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	• 73.11 %	64,626,696	• Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	• Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	• 3712 box	92,091,710	• Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Program	Indikator Program	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Usulan	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis 	• 0 kasus	279,471,033	• Dinas Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional; • Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • "- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%" %; • 2.5 Persen 	141,712,424	• Dinas Pertanian;
Program Penyuluhan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Peningkatan / Penguakuan Kelas Kelompok Tani 	• 10 %	111,434,800	• Dinas Pertanian
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 	• 40 %	4,422,000	• Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/ Kota, agen, distributor dan pasar rakyat 	• 77.33 %	133,870,640	• Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 	• 100 %	160,841,512	• Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan bina kelompok pengrajin 	• 36 %	985,094,557	• Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait. 	• 90 %	21,706,000	• Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Data informasi industri yang lengkap dan terkini 	• 90 %	27,437,795	• Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai LPPD; • Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah; • Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; • Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Tinggi ; • 100 %; • 100 %; • 100 %; 	18,354,478,696	• Sekretariat Daerah;

Program	Indikator Program	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Usulan	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti; • Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran; • Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti; 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %; • 100 %; • 100 %; 	1,464,499,000	• Sekretariat Daerah;
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD; • Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • 86 %; • 100 % 	21,859,556,000	• Sekretariat Dprd; • Sekretariat Dprd
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan; • Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum; 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %; • 100 %; 	401,652,000	• Kecamatan Denpasar Barat; • Kecamatan Denpasar Timur; • Kecamatan Denpasar Selatan; • Kecamatan Denpasar Utara
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan; 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %; 	125,043,500	• Kecamatan Denpasar Barat; • Kecamatan Denpasar Timur; • Kecamatan Denpasar Selatan; • Kecamatan Denpasar Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah; • Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %; • 100 %; 	9,819,755,162	• Kecamatan Denpasar Barat; • Kecamatan Denpasar Timur; • Kecamatan Denpasar Selatan; • Kecamatan Denpasar Utara;
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemanjapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % 	2,136,862,440	• Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik 	<ul style="list-style-type: none"> • 75 % 	1,614,669,333	• Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % 	40,819,415	• Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2023

Rencana Program Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 beserta tolokukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel 5.2 tentang Program dan Kegiatan.

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			642,098,597,785							734,684,939,729	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	360,584,414,135						100 %	416,657,601,019	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	347,018,620,083						100 %	398,027,478,695	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1991 Orang/bulan	347,018,620,083	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik,		Rutin	ASN Dinas Pendidikan Kota Denpasar	1991 Orang/bulan	398,027,478,695	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	832,908,872						100 %	4,654,907,098	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	49,459,464	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	9 Paket	54,405,410	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	375,121,648	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	5 Paket	4,126,338,128	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	58,079,760	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	17 Paket	58,079,760	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	260,210,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	7 Paket	328,031,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	56,388,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	4 Dokumen	62,026,800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	33,650,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	26,026,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	125,000,000						100 %	140,800,000	
1	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit	105,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,		Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	7 Unit	118,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	1 Unit	22,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11,885,397,356						100 %	13,038,477,188	
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Pendidikan, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	16,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,380,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pendidikan, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	1,420,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	65,032,600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pendidikan, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	71,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10,425,364,756	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pendidikan, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	11,530,477,188	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	722,487,824								100 %	795,938,038	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecatan, SKB	1 Unit	33,550,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	329,437,824	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecatan, SKB	68 Unit	363,683,038	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	311,550,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecatan, SKB	0 Unit	342,705,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	293 Unit							293 Unit				
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	51,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecatan, SKB	6 Unit	56,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Harapan Lama Sekolah	14,03 Tahun	281,347,239,550								14,03 Tahun	317,844,808,030	
						Rata-Rata Lama Sekolah	11,60 Tahun									11,60 Tahun		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI	104 %	179,978,750,874								104 %	206,573,109,812	
						APM SD/MI	97 %									97 %		
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	165 Ruang	77,140,014,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	165 Ruang	93,786,932,288	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	1,494,605,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	7 Unit	1,809,065,610	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	1,486,218,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	7 Ruang	1,520,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	103,856,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	1 Unit	114,242,040	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	512,031,248	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	2 Paket	572,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	161,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	1 Paket	161,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	215 Peserta Didik	402,464,726	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	215 Peserta Didik	1,018,879,186	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	354,481,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	3 Paket	395,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	167 Satuan Pendidikan	190,914,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	167 Satuan Pendidikan	374,846,340	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	492,758,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	400 Peserta Didik	554,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1145 Orang	11,075,626,320	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	1145 Orang	11,075,626,320	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	33,377,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	300 Orang	7,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	167 Satuan Pendidikan	86,530,903,680	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	167 Satuan Pendidikan	95,184,018,028	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	93 %	80,480,588,244						93 %	90,287,859,560	
						APM SMP/MTs	80 %							80 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	20,145,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	1 Unit	22,159,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	436,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	2 Ruang	479,600,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	2,346,763,160	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	15 Paket	2,581,439,476	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	750,998,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	1 Paket	826,098,460	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	321 Peserta Didik	988,204,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	321 Peserta Didik	1,087,025,720	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	654,944,080	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	4 Paket	500,438,510	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	15000 Peserta Didik	425,346,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	15000 Peserta Didik	467,883,350	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	870 Peserta Didik	340,879,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	870 Peserta Didik	374,967,340	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	266 Orang	3,797,382,304	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	266 Orang	6,159,655,884	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naisikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	5,988,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	100 Orang	3,260,840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	85 Satuan Pendidikan	66,321,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	85 Satuan Pendidikan	72,953,870	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	15 Satuan Pendidikan	50,522,760,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	15 Satuan Pendidikan	55,575,036,110	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	62.5 %	17,422,012,532						62.5 %	17,523,723,968	
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	201,276,900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	1 Paket	221,404,700	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	254,650,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	3 Paket	280,115,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	328 Peserta Didik	300,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	328 Peserta Didik	330,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	848 Orang	4,290,039,232	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	848 Orang	4,313,084,268	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	2,996,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	60 Orang	1,670,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	258 Satuan Pendidikan	12,373,050,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	258 Satuan Pendidikan	12,377,450,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK SD/MI	103.5 %	3,465,887,900						103.5 %	3,460,114,690	
						APK SMP/MTs	99 %							99 %		
1	01	02	2.04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	8 Paket	157,410,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal Kota Denpasar	8 Paket	95,876,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	344 Peserta Didik	52,707,900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal Kota Denpasar	344 Peserta Didik	57,978,690	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan	3,255,770,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal Kota Denpasar	11 Satuan Pendidikan	3,306,260,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang telah mereviu Kurikulum K13	100 %	84,923,100						100 %	92,307,580			
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Satuan Pendidikan Dasar	17 %	32,825,300						17 %	35,000,000			
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	80 Orang	32,825,300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pendidik di Satuan Pendidikan Dasar Kota Denpasar	80 Orang	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) dan Pendidikan Non Formal	25 %	52,097,800						25 %	57,307,580			
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	52,097,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pendidik PAUD dan Pendidik Sekolah Non Formal Kota Denpasar	2 Dokumen	57,307,580	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan	84 %	82,021,000						84 %	90,223,100			
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal	84 %	82,021,000						84 %	90,223,100			
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	82,021,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Lembaga PAUD dan Non Formal Kota Denpasar	0 Dokumen	90,223,100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	96 Dokumen							96 Dokumen				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional	81 %	25,244,400						81 %	47,892,240			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keikutsertaan Pemuda Dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	83 %	25,244,400						83 %	27,768,840		
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	25,244,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Organisasi Pemuda Kota Denpasar	1 Dokumen	27,768,840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase partisipasi atlet di tingkat nasional	92 %	24,596,196,000						92 %	28,903,904,750		
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota	93 %	840,333,300						93 %	924,366,630		
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2292 Unit	840,333,300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Satuan Pendidikan, dan Siswa Kota Denpasar	2292 Unit	924,366,630	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perolehan Juara Dalam Event Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	2 Peringkat	8,008,059,700						2 Peringkat	12,231,735,120		
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	8,008,059,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Atlet Pelajar Kota Denpasar	0 Dokumen	12,231,735,120	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen							5 Dokumen			
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	93 %	15,747,803,000						93 %	15,747,803,000		
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	0 Organisasi	15,747,803,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	KONI dan Organisasi Olahraga Kota Denpasar	0 Organisasi	15,747,803,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi							1 Organisasi			
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan	80 %	1,062,173,500						80 %	1,446,467,000		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang aktif	100 %	1,062,173,500						100 %	1,446,467,000		
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1,062,173,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Organisasi Kepramukaan di Kota Denpasar	1 Organisasi	1,446,467,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												231,465,986,271

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	88,340,608,963							109,173,350,356	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			68,434,560,800							82,793,787,210	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	486 Orang/bulan	68,434,560,800		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin		486 Orang/bulan	82,793,787,210	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,978,357,752							2,176,193,526	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	761,941,926		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		7 Paket	838,136,118	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	246,998,076		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		8 Paket	271,697,883	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	899,740,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		11 Paket	989,714,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	63,197,750		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		7 Paket	69,517,525	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200 Dokumen	6,480,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		1200 Dokumen	7,128,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16,497,705,411							22,630,386,120	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2,328,900,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		3 Laporan	2,561,790,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	14,168,805,411		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		2 Laporan	20,068,596,120	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,429,985,000							1,572,983,500	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	100 %	1,229,985,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		100 %	1,352,983,500	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155 Unit							155 Unit		
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	100 %	200,000,000		SILPA,		Rutin		100 %	220,000,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit							1 Unit		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4 Orang	93,964,391,749						1,4 Orang	115,305,979,801	
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56 Orang							56 Orang		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5 %							84,5 %		
						Persentase Balita stunting	10 %							10 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %							100 %		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan	indeks kepuasan masyarakat	0 %	18,721,335,787						0 %	20,593,469,365	
						Persentase ketersediaan obat di Puskesmas	95 %							95 %		
						Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	100 %							100 %		
						Sertifikat akreditasi	0 lulus akreditasi							0 lulus akreditasi		
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	61 Unit	1,306,400,000		Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	61 Unit	1,437,040,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	14,166,435,298		Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	1 Paket	15,583,078,828	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	2,786,279,489		Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	1 Paket	3,064,907,437	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	606 Unit	368,555,000		Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	606 Unit	405,410,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	93,666,000		DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	1 Paket	103,032,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk	180 per 100.000 pdd	75,029,150,962						180 per 100.000 pdd	94,477,214,936	
						elayanan kesehatan balita	100 %							100 %		
						elayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							100 %		
						elayanan Kesehatan ibu bersalin	100 %							100 %		
						elayanan kesehatan ibu hamil	100 %							100 %		
						elayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen							100 persen		
						elayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	100 persen							100 persen		
						elayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 persen							100 persen		
						elayanan kesehatan penderita Diabetes melitus	100 persen							100 persen		
						elayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen							100 persen		
						elayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %							100 %		
						elayanan Kesehatan usia produktif	100 persen							100 persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
						persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %							100 %		
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap	100 persen							100 persen		
						Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam	100 persen							100 persen		
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	99 persen							99 persen		
						Persentase TTU memenuhi syarat	100 persen							100 persen		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	17051 Orang	281,706,566		DAK Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	17051 Orang	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16332 Orang	570,904,450		DAK Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	16332 Orang	6,000,000,000	DINAS KESEHATAN
						Orientasi AMPSR	50							50		
						Orientasi MPDN	25							25		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16513 Orang	92,701,500		Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	16513 Orang	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54424 Orang	183,112,500		Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	54424 Orang	185,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	171121 Orang	765,090,500		DAK Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	171121 Orang	841,599,550	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	732987 orang	242,541,220		Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	732987 orang	436,102,942	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62884 Orang	306,505,000		DAK Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	62884 Orang	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	195194 Orang	153,916,000		Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	195194 Orang	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14444 Orang	127,126,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	14444 Orang	139,838,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3053 Orang	113,860,000		Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	3053 Orang	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16340 Orang	820,501,056		Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	16340 Orang	902,551,161	DINAS KESEHATAN
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	100 %							100 %		
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24165 Orang	1,225,074,608		Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	24165 Orang	1,347,582,000	DINAS KESEHATAN
						Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar	100 %							100 %		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	11 Dokumen	1,881,669,000		DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	11 Dokumen	2,069,835,900	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 Dokumen	847,460,090		DAK Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	11 Dokumen	850,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	123,952,500		Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	2 Dokumen	130,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	631,112,000		Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	6 Dokumen	650,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40 Dokumen	679,686,300		DAK Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	40 Dokumen	747,654,930	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	227,455,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	5 Dokumen	250,200,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1,708,710,000		Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	12 Dokumen	1,879,581,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	41 orang	441,268,000		DAK Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	41 orang	610,640,800	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	7 Dokumen	2,674,776,496		Pendapatan Bagi Hasil, SILPA,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	7 Dokumen	4,164,185,660	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	16,131,676,184		Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	11 Dokumen	17,744,843,802	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	42,850,686,200		Dana Insentif Daerah, Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Khusus,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	6 Dokumen	47,135,754,820	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	120,515,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	1 Dokumen	230,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0 Unit	408,600,000		DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	0 Unit	449,460,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11 Unit						puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	11 Unit		
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2915 Keluarga	85,160,000		DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	2915 Keluarga	145,660,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16526 Orang	139,081,500		Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	16526 Orang	152,989,650	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2415 Orang	1,193,253,292		Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	2415 Orang	1,312,578,621	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1,050,000		Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	1 Orang	1,155,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes memenuhi standar mutu	100 persen	213,905,000						100 persen	235,295,500	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	11 unit	213,905,000		Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas kota Denpasar	11 unit	235,295,500	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit							0 Unit		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100 %	5,056,660,172						100 %	5,562,326,189	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100 %	7,700,000						100 %	8,470,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 Dokumen	7,700,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Pendidikan dan Kesehatan	tenaga kesehatan	100 Dokumen	8,470,000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pdayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	terlaksananya perencanaan kebutuhan sumber daya manusia	100 persen	5,048,960,172						100 persen	5,553,856,189	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	44 Orang	4,929,360,172	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Pendidikan dan Kesehatan	tenaga kesehatan	44 Orang	5,422,296,189	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6 Dokumen	119,600,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Pendidikan dan Kesehatan	tenaga kesehatan	6 Dokumen	131,560,000	DINAS KESEHATAN
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM memenuhi syarat	55 %	284,462,841						55 %	344,329,925	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) memiliki ijin	100 persen	13,310,000						100 persen	14,641,000	
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	36 Sarana	13,310,000		DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	apotek, toko obat, umot	36 Sarana	14,641,000	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	industri pangan bersertifikat produksi	40 persen	47,110,841						40 persen	51,821,925	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 Dokumen	47,110,841	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	industri rumah tangga pangan	70 Dokumen	51,821,925	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat	55 persen	3,540,000						55 persen	10,000,000	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 Dokumen	3,540,000		Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	pengelola TPM	3 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada tempat pengelolaan makanan jajanan	500 lokasi	113,350,000						500 lokasi	150,000,000	
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	113,350,000		Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	pengelola makjan	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan dan minuman	12 sampel	107,152,000						12 sampel	117,867,000	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	40 sampel	107,152,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	produk makanan dan minuman IRT dan IRTP	40 sampel	117,867,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0 Unit							0 Unit		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80,00 %	1,054,142,682						80,00 %	1,080,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan,	persentase posyandu aktif	80 persen	921.881,682						80 persen	950,000,000	
						persentase RT ber PHBS	80 persen							80 persen		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen	921.881,682		DAK Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat kota denpasar	24 Dokumen	950,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan remaja	100 persen	132,261,000						100 persen	130,000,000	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11 Dokumen	132,261,000		DAK Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	petugas puskesmas, guru, siswa (SD, SMP, SMA), kader dan masyarakat	11 Dokumen	130,000,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											830,678,400
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4 Orang	764,612,000						1,4 Orang	830,678,400	
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56 Orang							56 Orang		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	84.5 %							84.5 %		
						Persentase Balita stunting	10 %							10 %		
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %							100 %		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk	180 per 100.000 pdd	764,612,000						180 per 100.000 pdd	830,678,400	
						pelayanan kesehatan balita	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100 %							100 %		
						pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan usia produktif	100 persen							100 persen		
						persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %							100 %		
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap	100 persen							100 persen		
						Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam	100 persen							100 persen		
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	99 persen							99 persen		
						Persentase TTU memenuhi syarat	100 persen							100 persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	764,612,000		Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	24 Dokumen	830,678,400	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4 Orang	496,422,000						1,4 Orang	546,064,200	
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56 Orang							56 Orang		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	84.5 %							84.5 %		
						Persentase Balita stunting	10 %							10 %		
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %							100 %		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk	180 per 100.000 pdd	496,422,000						180 per 100.000 pdd	546,064,200	
						pelayanan kesehatan balita	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100 %							100 %		
						pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan usia produktif	100 persen							100 persen		
						persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %							100 %		
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap	100 persen							100 persen		
						Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam	100 persen							100 persen		
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	99 persen							99 persen		
						Persentase TTU memenuhi syarat	100 persen							100 persen		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	496,422,000		Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	546,064,200	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
								627,692,640							690,461,904	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4 Orang	627,692,640						1,4 Orang	690,461,904	
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56 Orang							56 Orang		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	84.5 %							84.5 %		
						Persentase Balita stunting	10 %							10 %		
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %							100 %		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk	180 per 100.000 pdd	627,692,640						180 per 100.000 pdd	690,461,904	
						pelayanan kesehatan balita	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100 %							100 %		
						pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan usia produktif	100 persen							100 persen		
						persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %							100 %		
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap	100 persen							100 persen		
						Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam	100 persen							100 persen		
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	99 persen							99 persen		
						Persentase TTU memenuhi syarat	100 persen							100 persen		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	627,692,640		Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saino	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	24 Dokumen	690,461,904	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											721,487,316
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4 Orang	655,897,560						1,4 Orang	721,487,316	
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56 Orang							56 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Indeks Kepuasan Masyarakat	84.5 %							84.5 %		
						Persentase Balita stunting	10 %							10 %		
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %							100 %		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk	180 per 100.000 pdd	655,897,560						180 per 100.000 pdd	721,487,316	
						pelayanan kesehatan balita	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100 %							100 %		
						pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan usia produktif	100 persen							100 persen		
						persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %							100 %		
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap	100 persen							100 persen		
						Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam	100 persen							100 persen		
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	99 persen							99 persen		
						Persentase TTU memenuhi syarat	100 persen							100 persen		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	655,897,560	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	721,487,316	DINAS KESEHATAN
									Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod							
									Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod							
									Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh							
									Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod							
									Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			447,953,280							447,953,280	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4 Orang	447,953,280						1,4 Orang	447,953,280	
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56 Orang							56 Orang		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	84.5 %							84.5 %		
						Persentase Balita stunting	10 %							10 %		
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %							100 %		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk	180 per 100.000 pdd	447,953,280						180 per 100.000 pdd	447,953,280	
						pelayanan kesehatan balita	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100 %							100 %		
						pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan usia produktif	100 persen							100 persen		
						persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %							100 %		
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap	100 persen							100 persen		
						Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam	100 persen							100 persen		
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	99 persen							99 persen		
						Persentase TTU memenuhi syarat	100 persen							100 persen		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	447,953,280		Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saino	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarganya	24 Dokumen	447,953,280	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			363,508,320							399,859,152	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4 Orang	363,508,320						1,4 Orang	399,859,152	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56 Orang							56 Orang			
						Indeks Kepuasan Masyarakat	84.5 %							84.5 %			
						Persentase Balita stunting	10 %							10 %			
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %							100 %			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk	180 per 100.000 pdd	363,508,320						180 per 100.000 pdd	399,859,152		
						pelayanan kesehatan balita	100 %							100 %			
						Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							100 %			
						Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100 %							100 %			
						pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %							100 %			
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen							100 persen			
						pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	100 persen							100 persen			
						Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 persen							100 persen			
						Pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus	100 persen							100 persen			
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen							100 persen			
						pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %							100 %			
						Pelayanan Kesehatan usia produktif	100 persen							100 persen			
						persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %							100 %			
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap	100 persen							100 persen			
						Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam	100 persen							100 persen			
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	99 persen							99 persen			
						Persentase TTU memenuhi syarat	100 persen							100 persen			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	363,508,320	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainq	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	399,859,152	DINAS KESEHATAN	
									Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur								
									Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja								
									Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											307,720,248	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4 Orang	279,745,680						1,4 Orang	307,720,248	
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56 Orang							56 Orang		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	84.5 %							84.5 %		
						Persentase Balita stunting	10 %							10 %		
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %							100 %		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk	180 per 100.000 pdd	279,745,680						180 per 100.000 pdd	307,720,248	
						pelayanan kesehatan balita	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100 %							100 %		
						pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan usia produktif	100 persen							100 persen		
						persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %							100 %		
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap	100 persen							100 persen		
						Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam	100 persen							100 persen		
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	99 persen							99 persen		
						Persentase TTU memenuhi syarat	100 persen							100 persen		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	279,745,680	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saino	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	24 Dokumen	307,720,248	DINAS KESEHATAN
									Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										452,926,320	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4 Orang	452,926,320						1,4 Orang	452,926,320	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56 Orang							56 Orang		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5 %							84,5 %		
						Persentase Balita stunting	10 %							10 %		
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %							100 %		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk	180 per 100.000 pdd	452,926,320						180 per 100.000 pdd	452,926,320	
						pelayanan kesehatan balita	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100 %							100 %		
						pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan usia produktif	100 persen							100 persen		
						persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %							100 %		
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap	100 persen							100 persen		
						Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam	100 persen							100 persen		
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	99 persen							99 persen		
						Persentase TTU memenuhi syarat	100 persen							100 persen		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	452,926,320	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saino	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	452,926,320	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4 Orang	521,938,080						1,4 Orang	574,131,888	
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56 Orang							56 Orang		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5 %							84,5 %		
						Persentase Balita stunting	10 %							10 %		
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %							100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk	180 per 100.000 pdd	521,938,080						180 per 100.000 pdd	574,131,888	
						pelayanan kesehatan balita	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100 %							100 %		
						pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan usia produktif	100 persen							100 persen		
						persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %							100 %		
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap	100 persen							100 persen		
						Persentase KLB dilangani kurang dr 24 jam	100 persen							100 persen		
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	99 persen							99 persen		
						Persentase TTU memenuhi syarat	100 persen							100 persen		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	521,938,080		Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	24 Dokumen	574,131,888	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											539,570,624
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4 Orang	491,237,840						1,4 Orang	539,570,624	
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56 Orang							56 Orang		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	84.5 %							84.5 %		
						Persentase Balita stunting	10 %							10 %		
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %							100 %		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk	180 per 100.000 pdd	491,237,840						180 per 100.000 pdd	539,570,624	
						pelayanan kesehatan balita	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100 %							100 %		
						pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus	100 persen							100 persen		
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan usia produktif	100 persen							100 persen		
						persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %							100 %		
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap	100 persen							100 persen		
						Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam	100 persen							100 persen		
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	99 persen							99 persen		
						Persentase TTU memenuhi syarat	100 persen							100 persen		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	491.237,840		Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	539.570,624	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,4 Orang	771,360,480						1,4 Orang	848,496,528	
						Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56 Orang							56 Orang		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5 %							84,5 %		
						Persentase Balita stunting	10 %							10 %		
						Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %							100 %		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk	180 per 100.000 pdd	771,360,480						180 per 100.000 pdd	848,496,528	
						pelayanan kesehatan balita	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							100 %		
						Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100 %							100 %		
						pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %							100 %		
						Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen							100 persen		
						pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	100 persen							100 persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17	
						Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 persen							100 persen			
						Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus	100 persen							100 persen			
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen							100 persen			
						pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %							100 %			
						Pelayanan Kesehatan usia produktif	100 persen							100 persen			
						persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %							100 %			
						Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap	100 persen							100 persen			
						Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam	100 persen							100 persen			
						Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	99 persen							99 persen			
						Persentase TTU memenuhi syarat	100 persen							100 persen			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	771,360,480	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah, DAK Non Fisik,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	848,496,528	DINAS KESEHATAN	
									Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja								
									Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja								
									Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	158,352,913,303						100 %	173,929,702,219		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	55,852,913,303						100 %	68,867,202,219		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 orang/bulan	55,852,913,303		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	Seluruh Pegawai RSUD Wangaya	500 orang/bulan	68,867,202,219	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			102,500,000,000							105,062,500,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	102,500,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	105,062,500,000	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	39,323,512,244						100 %	48,625,792,000		
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	17,571,112,000						100 %	19,554,860,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan	17,571,112,000		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	ASN DPUPR Kota Denpasar	129 Orang/bulan	19,554,860,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5,799,541,354						100 %	6,501,300,000	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	453,768,830		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	4 Paket	964,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	55,278,524		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	1 Paket	57,450,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	106,514,000		SILPA,		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	1 Paket	110,150,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	56,700,000		SILPA,		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	8 Dokumen	56,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	5,115,280,000		Dana Insentif Daerah,		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	2 Paket	5,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12,000,000		SILPA,		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	12 Laporan	12,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	14,336,628,890						100 %	15,215,000,000	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	612,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	12 Laporan	615,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13,724,628,890		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	12 Laporan	14,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100 %	1,616,230,000						100 %	1,920,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 Unit	924,670,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	74 Unit	950,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	285,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	56 Unit	320,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	160,000,000		SILPA,		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	7 Unit	375,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86 Unit	246,560,000		SILPA,		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	86 Unit	275,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal	25,50% (14.013) %	846,838,835						25,50% (14.013) %	2,766,959,899	
						Persentase panjang sungai berfungsi normal	3,5% (2.500 M) %							3,5% (2.500 M) %		
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	1500 M	846,838,835						1500 M	2,766,959,899	
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 unit	846,838,835		SILPA,		Rutin		01 unit	2,766,959,899	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	57,68 % (83.672 SR) %	4,182,500,000						57,68 % (83.672 SR) %	4,182,500,000	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah	94559 SR	4,182,500,000						94559 SR	4,182,500,000	
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	300 SR	4,182,500,000		SILPA,	Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	masyarakat Kota Denpasar	300 SR	4,182,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,65% (11.103 SR) %	2,179,500,000						7,65% (11.103 SR) %	2,179,500,000	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah	10873 SR	2,179,500,000						10873 SR	2,179,500,000	
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	200 Rumah Tangga	2,179,500,000		SILPA,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	masyarakat Kota Denpasar	200 Rumah Tangga	2,179,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,22% (1.145.350)	6,083,664,210						70,22% (1.145.350)	6,083,664,210	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			6,083,664,210							6,083,664,210	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	510 M	1,460,000,000		Dana Alokasi Umum,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	510 M	1,460,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	737 M	4,623,664,210		Dana Alokasi Umum,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	737 M	4,623,664,210	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	0,36% (1080 IMB) %	12,113,454,054						0,36% (1080 IMB) %	13,324,799,458	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			12,113,454,054							13,324,799,458	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	0.36 %	734,600,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	0.36 %	808,060,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	7 Dokumen							7 Dokumen		
						Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1080 Dokumen							1080 Dokumen		
						Meningkatnya Bangunan Gedung yg memenuhi Standar Teknis	1.8 %							1.8 %		
						Persentase Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	0.72 %							0.72 %		
						Persentase Pelayanan Penerbitan IMB/PBG	0.36 %							0.36 %		
						Persentase Pelayanan Penerbitan SLF	0.002 %							0.002 %		
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	11,172,117,799		Dana Alokasi Umum,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	2 Unit	12,289,329,578	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen							7 Dokumen		
						Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	2 unit							2 unit		
						Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	25 unit							25 unit		
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bangunan Gedung Sesuai NSPM	40 %	206,736,255		SILPA,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	40 %	227,409,880	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	20 %							20 %		
						Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	100 %							100 %		
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis	16,67 %	15,724,250,000						16,67 %	1,729,665,700,015	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	5 unit	15,724,250,000						5 unit	1,729,665,700,015	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	1 Kawasan	15,724,250,000		SILPA,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Kawasan	1,729,665,700,015	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0 Kawasan							0 Kawasan		
						Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan							1 Kawasan		
						Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	25 Kawasan							25 Kawasan		
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	79,99 %	89,101,369,125						79,99 %	25,320,700,000	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	338.84 km	89,101,369,125						338.84 km	25,320,700,000	
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen	301,700,000		SILPA,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	1 Dokumen	301,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	1 Dokumen							1 Dokumen		
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	3 Dokumen	781,800,000		SILPA,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	3 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	3 Dokumen							3 Dokumen		
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1.2 KM	3,791,750,000		SILPA,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	1.2 KM	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Terbangunnya Jalan	1.2 KM							1.2 KM		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	3.84 Km	24,921,052,000		Dana Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	3.84 Km	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Tertindakannya Rekonstruksi Jalan	3.84 Km							3.84 Km		
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3.02 KM	18,735,880,000		Dana Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	3.02 KM	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Tertindakannya Rehabilitasi Jalan	3.02 Km							3.02 Km		
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	3.11 KM	10,185,632,000		Dana Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	3.11 KM	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Tertindakannya Jalan Secara Berkala	3.11 Km							3.11 Km		
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	22 KM	5,262,855,125		Pendapatan Asli Daerah,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	22 KM	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Tertindakannya Jalan Secara Rutin	22 Km							22 Km		
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100 M	101,700,000		Dana Alokasi Umum,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	100 M	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Tertindakannya Jembatan Secara Rutin	100 M							100 M		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	10	2.01	25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	10.76 KM	25,019,000,000		Dana Alokasi Umum,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	10.76 KM	25,019,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	15 %	74,522,500						15 %	74,522,500	
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	85 %	74,522,500						85 %	74,522,500	
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	74,522,500		SILPA,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	74,522,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	95,2 %	839,674,900						95,2 %	923,642,390	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			230,174,900							253,192,390	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Perselebaran Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		5 Dokumen Perwali RDTF	230,174,900		SILPA,		Rutin	Kota Denpasar	5 Dokumen Perwali RDTR	253,192,390	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen							0 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen Perda RTRW							1 Dokumen Perda RTRW		
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatkan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	4 Laporan	179,050,000						4 Laporan	196,955,000	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	179,050,000		SILPA,		Rutin	Kota Denpasar	1 Dokumen	196,955,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0 Dokumen							0 Dokumen		
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	4.8 %	430,450,000						4.8 %	473,495,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen Perwali	207,800,000		SILPA,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	2 Dokumen Perwali	228,580,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	0 Dokumen							0 Dokumen			
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerimaan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerimaan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	93,350,000		SILPA,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	102,685,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerimaan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0 Dokumen							0 Dokumen			
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	129,300,000		SILPA,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	142,230,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											73,486,160,063	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	14,721,201,748						100 %	18,320,824,881		
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100 %	11,460,805,017						100 %	12,606,885,518		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	11,460,805,017		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	ASN	89 Orang/bulan	12,606,885,518	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100 %	335,512,477						100 %	37,750,075		
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,325,773		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Aparatur Dinas	1 Paket	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	68,915,804		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Aparatur Dinas	3 Paket	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	184,359,850		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Aparatur Dinas	5 Paket	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	37,592,800		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Aparatur Dinas	2 Paket	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34,318,250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Aparatur Dinas	1 Paket	37,750,075	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %	2,441,101,540						100 %	2,685,211,694	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	252,420,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Aparatur Dinas	3 Laporan	277,662,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2,188,681,540		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Aparatur Dinas	3 Laporan	2,407,549,694	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %	483,782,714						100 %	2,990,977,594	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	19,045,400		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Aparatur Dinas	26 Unit	20,949,940	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	38 Unit	3,872,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Aparatur Dinas	38 Unit	4,259,200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	248,365,314	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Aparatur Dinas	26 Unit	2,732,018,454	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	04	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	112,500,000		Dana Alokasi Umum,		Rutin	Aparatur Dinas	74 Unit	123,750,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000		SILPA,		Rutin	Aparatur Dinas	1 Unit	110,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase pemenuhan SPM perumahan	100 %	160,000,000						100 %	176,000,000	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	160,000,000						1 Laporan	176,000,000	
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	160,000,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	2 Dokumen	176,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh	0,159 %	474,369,000						0,159 %	662,663,100	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1 Dokumen	206,775,200						1 Dokumen	247,714,720	
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	206,775,200		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	227,452,720	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan perumahan dan kawasan permukiman	1 dokumen	267,593,800						1 dokumen	414,948,380	
						Persentase kawasan kumuh yang tertata	0,159 %							0,159 %		
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	159,719,800		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	175,691,780	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	107,874,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	118,661,400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	94,50 %	853,866,000						94,50 %	939,252,600	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Unit	20 Unit	853,866,000						20 Unit	939,252,600	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	0 Unit Rumah	853,866,000		Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kota Denpasar	0 Unit Rumah	939,252,600	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah							10 Unit Rumah		
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	100 %	48,734,017,711						100 %	53,387,419,482	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase	100 %	48,734,017,711						100 %	53,387,419,482	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	43 Lokasi	48,734,017,711		Bantuan Keuangan Khusus, SILPA,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	43 Lokasi	53,387,419,482	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										136,675,088	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	100 %	6,419,880						100 %	7,061,868	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100 %	6,419,880						100 %	7,061,868	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	6,419,880		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	5 Dokumen	7,061,868	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	12 sertifikat	117,830,200						12 sertifikat	129,613,220	
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Sertifikat	12 Sertifikat	117,830,200						12 Sertifikat	129,613,220	
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	117,830,200		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	129,613,220	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			14,405,759,873							16,066,335,861	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase taman yang terpelihara	100 %	14,405,759,873						100 %	16,066,335,861	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase	100 %	14,405,759,873						100 %	16,066,335,861	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	245224 Ha	5,816,637,910		Pendapatan Bagi Hasil,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kelahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	245224 Ha	6,618,301,701	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	39 Unit	8,589,121,963		Pendapatan Bagi Hasil,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kelahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	39 Unit	9,448,034,160	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			25,143,231,225							27,700,232,997	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	21,752,229,443						100 %	22,435,504,784	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	10,293,276,592						100 %	10,293,276,592	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	10,293,276,592	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin		0 78 Orang/bulan	10,293,276,592	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian ASN	100 %	245,880,000						100 %	531,570,375	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	245,880,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	100 Paket	531,570,375	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	896,213,160						100 %	1,357,405,475	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,148,417	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	1 Paket	6,148,417	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	190,374,086	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	7 Paket	224,975,401	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	528,991,477	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	7 Paket	721,001,729	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	52,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	4 Paket	273,735,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	63,551,180	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	4 Paket	76,896,928	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	54,648,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	36 Dokumen	54,648,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8,587,179,368						100 %	7,982,733,922	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,410,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	1 Laporan	6,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	358,240,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	3 Laporan	358,240,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24,610,503	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	1 Laporan	24,610,502	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	8,199,918,865	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	6 Laporan	7,593,883,420	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100 %	1,729,680,323						100 %	2,210,518,420	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	337,250,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	30 Unit	390,114,113	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	1,247,045,141	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	134 Unit	1,574,730,744	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	91,045,182	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	0	5 Unit	191,333,563	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	42,790,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	0	11 Unit	42,790,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	11,550,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	0	30 Unit	11,550,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	37,21 %	1,984,810,432						37,21 %	3,549,528,713	
						Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100 %							100 %		
						Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100 %							100 %		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana	100 %	39,669,944						100 %	200,000,000	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	5000 Orang	39,669,944	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		5000 Orang	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 %	1,755,440,488						100 %	2,699,528,713	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,003,000,446	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		1 Dokumen	1,457,628,713	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	390,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		10 Unit	471,900,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		0	34,493,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		0	220,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Tersedianya laporan hasil Verifikasi, Rencana rehabilitasi dan Rekonstruksi.	2 Dokumen							2 Dokumen		
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	60 Orang	73,180,092	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		60 Orang	300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3 Dokumen	254,766,550	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		3 Dokumen	250,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	100 %	189,700,000						100 %	650,000,000	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	139,700,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		1 Dokumen	500,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang	50,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		0 Orang	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang							100 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	1,406,191,350						100 %	1,715,199,500	
						Tingkat waktu tanggap (response time rate)	15 menit							15 menit		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya	100 %	1,247,100,000						100 %	1,297,010,000	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	1,247,100,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		5 Unit	1,297,010,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100 %	159,091,350						100 %	260,000,000	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	70,346,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		100 Orang	110,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Keluhan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	88,745,150	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		2 Desa/Kelurahan	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN											
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	22,062,733,454						100 %	-	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	16,294,967,344						100 %	-	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	16,294,967,344		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	119 Orang/bulan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	100 %	256,680,000						100 %	-	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	242 Paket	256,680,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	242 Paket	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	261,515,918						100 %	-	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,063,800		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Paket	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	173,741,118		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Paket	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,651,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Paket	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	30,660,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	4 Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,400,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	31,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah	100 %	340,000,000						100 %	-	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	340,000,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,966,625,192						100 %	-	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	229,800,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,736,825,192		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	12 Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100 %	942,945,000						100 %	-	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	766,695,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	54 Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	3,500,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	0 Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit							10 Unit		
1	05	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	136 Unit	122,750,000		Dana Alokasi Umum,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	136 Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000		SILPA,		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	88,11 %	198,187,318						88,11 %	-	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Keamanan Keindahan)	85,78 %	83,385,118						85,78 %	-	
1	05	02	2.01	02	Penindakan Alas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Kasus	78,003,600		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	0 Kasus	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	250 Kasus							250 Kasus		
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	5,381,518		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02		Pengakuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	89.34 %	114,802,200						89.34 %	-	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	114,802,200		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											15,258,567,709
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	11,064,046,840						100 %	12,276,051,524	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	6,201,901,330						100 %	6,822,091,463	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	6,198,901,330	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin		0 36 Orang/bulan	6,818,791,463	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 1 Dokumen	3,300,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	472,595,928						100 %	519,855,521	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,295,568	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 1 Paket	15,725,125	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	339,269,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 1 Paket	373,196,670	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39,478,660	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 1 Paket	43,426,526	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	48,952,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		0 1 Paket	53,847,200	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	30,600,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		0 4 Dokumen	33,660,000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3,774,419,582						100 %	4,151,861,540	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	268,800,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 3 Laporan	295,680,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,505,619,582	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 1 Laporan	3,856,181,540	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	615,130,000						100 %	676,643,000	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	301,880,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 26 Unit	332,068,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	133,250,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 90 Unit	146,575,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	180,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin		0 3 Unit	198,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100 %	880,557,350						100 %	1,106,498,085	
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 %	7,393,000						100 %	8,132,300	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	24 Dokumen	7,393,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdava Sainn	Sosial dan Ketenagakerjaan		0 24 Dokumen	8,132,300	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %	873,164,350						100 %	1,098,365,785	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	133,083,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdava Sainn	Sosial dan Ketenagakerjaan		0 43 Orang	184,451,300	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	31,688,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdava Sainn	Sosial dan Ketenagakerjaan		0 4 Orang	34,856,800	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	690,916,350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdava Sainn	Sosial dan Ketenagakerjaan		0 6 Lembaga	859,832,985	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Sertifikat	17,477,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Sosial dan Ketenagakerjaan	0	0 Sertifikat		19,224,700		DINAS SOSIAL
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	1,087,340,400								100 %	1,196,074,440	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	184,888,000								100 %	203,376,800	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	24,300,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Sosial dan Ketenagakerjaan	0	150 Orang		26,730,000		DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Sosial dan Ketenagakerjaan	0	10 Orang		5,500,000		DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	155,588,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	0	150 Orang		171,146,800		DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 %	902,452,400								100 %	992,697,640	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	107,250,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Sosial dan Ketenagakerjaan	0	500 Orang		117,975,000		DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	57,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Sosial dan Ketenagakerjaan	0	150 Orang		63,250,000		DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	49,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Sosial dan Ketenagakerjaan	0	15 Orang		54,450,000		DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	377,980,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Sosial dan Ketenagakerjaan	0	500 Orang	415,778,880	DINAS SOSIAL	
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3900 Orang	310,221,600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Sosial dan Ketenagakerjaan	0	3900 Orang	341,243,760	DINAS SOSIAL	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100 %	367,572,800						100 %	476,820,080		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	367,572,800						100 %	476,820,080		
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9741 Orang	61,150,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Sosial dan Ketenagakerjaan	0	9741 Orang	103,510,000	DINAS SOSIAL	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1742 Keluarga	206,422,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Sosial dan Ketenagakerjaan	0	1742 Keluarga	263,310,080	DINAS SOSIAL	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Sosial dan Ketenagakerjaan	0	100 Orang	110,000,000	DINAS SOSIAL	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemenuhan penanganan bencana	100 %	151,707,800						100 %	203,123,580		
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	151,707,800						100 %	203,123,580		
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	151,707,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kelahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	0	40 Orang	203,123,580	DINAS SOSIAL	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											12,573,730,682	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	7,434,323,334						100 %	9,987,387,473		
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Sesuai Dengan Peraturan san Perundangan yang Berlaku	26 Orang	4,919,969,632						26 Orang	7,226,463,440		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4,919,969,632		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	26 Orang/bulan	7,226,463,440	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,514,353,702						100 %	2,760,924,033	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	2,514,353,702		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 Laporan	2,760,924,033	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
						Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							100 %		
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	88 %	1,536,030,000						88 %	1,719,641,880	
						Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	91 %							91 %		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Terkompetensi	>10.100 orang							>10.100 orang		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan di Sektor Jasa (Kepariwisataaan,Service dan Teknologi Informasi)	230 orang	1,504,200,000						230 orang	1,671,061,480	
						Jumlah Tenaga Kerja yang Terkompetensi	464 orang							464 orang		
						Tersertifikasi Pencari Kerja/Tenaga Kerja	160 orang							160 orang		
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	390 Orang	1,504,200,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainq	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari Kerja di Kota Denpasar	390 Orang	1,671,061,480	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang memenuhi Syarat sebagai Lembaga Pelatihan	56 LPKS	31,830,000						56 LPKS	48,580,400	
						Jumlah LPKS yang memiliki pengetahuan dan Pemahaman Tentang Kelembagaan dan Keterlaksanaan Program LPKS	56 LPKS							56 LPKS		
						Jumlah LPKS yang mengikuti Kegiatan Kampung Kompeten Kota Denpasar	56 LPKS							56 LPKS		
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	56 Lembaga	31,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainq	Sosial dan Ketenagakerjaan	LPKS di Kota Denpasar	56 Lembaga	48,580,400	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	20 %	721,566,960						20 %	413,453,104	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku berita pasar kerja	300 buku	230,557,140						300 buku	253,612,854	
						Jumlah buku petunjuk penggunaan BKOL	30 buku							30 buku		
						Jumlah bursa kerja khusus yang termonitoring	30 BKK							30 BKK		
						Jumlah Perusahaan yang termonitoring	50 perusahaan							50 perusahaan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Terlaksananya ISO 9001:2015 dan ISO 270001	1 Sertifikat ISO							1 Sertifikat ISO		
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah buku berita pasar kerja	300 buku	182,555,670	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pencari kerja, Angkatan Kerja, Pengangguran dan Pengguna Tenaga Kerja	300 buku	200,811,237	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
						Jumlah buku petunjuk penggunaan BKOL	30 buku							30 buku		
						Jumlah bursa kerja khusus yang termonitoring	30 BKK							30 BKK		
						Jumlah perusahaan yang termonitoring	50 perusahaan							50 perusahaan		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang							0 Orang		
						Terlaksananya ISO 9001:2015 dan ISO 270001	1 Sertifikat ISO							1 Sertifikat ISO		
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah siswa-siswi SMA/SMK yang tersuluh dan pemahaman dunia kerja serta mengetahui informasi pasar kerja melalui BKOL	500 Orang	48,001,470	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pencari kerja, Angkatan Kerja, Pengangguran dan Pengguna Tenaga Kerja	500 Orang	52,801,617	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Buku data dan analisis angkatan kerja kota Denpasar	25 buku	427,235,320						25 buku	126,117,550	
						Buku saku informasi ketenagakerjaan	25 buku							25 buku		
						Jumlah pendataan data tenagakerjaan	30 %							30 %		
						Leaflet informasi ketenagakerjaan	750 buah							750 buah		
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			230,764,820		Dana Insentif Daerah,		Rutin	Pencari kerja, Angkatan Kerja, Pengangguran, Penyandang disabilitas dan Pengguna tenaga kerja			DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Perusahaan yang terfasilitasi dalam kegiatan bursa kesempatan kerja (job fair)	40 Perusahaan	196,470,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,		Rutin	Pencari kerja, Angkatan Kerja, Pengangguran, Penyandang disabilitas dan Pengguna tenaga kerja	40 Perusahaan	126,117,550	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon PMI mempergunakan aplikasi rekom paspor PMI	20 %	30,657,000						20 %	33,722,700	
						Jumlah calon PMI terfasilitasi dalam kegiatan aplikasi rekom paspor PMI	300 orang							300 orang		
						Jumlah calon PMI yang tersosialisasi dalam kegiatan aplikasi rekom paspor PMI	300 orang							300 orang		
						Jumlah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia termonitoring	15 P3MI							15 P3MI		
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah calon PMI mempergunakan aplikasi rekom paspor PMI	20 %	30,657,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat kota Denpasar	20 %	33,722,700	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
						Jumlah calon PMI terfasilitasi dalam kegiatan aplikasi rekam paspor PMI	300 orang							300 orang		
						Jumlah calon PMI yang tersosialisasi dalam kegiatan aplikasi rekam paspor PMI	300 orang							300 orang		
						Jumlah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia termonitoring	15 P3MI							15 P3MI		
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA) termonitoring	50 perusahaan	33,117,500						50 perusahaan	-	
						Meningkatnya terlib administrasi bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA)	50 perusahaan							50 perusahaan		
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	33,117,500		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)	0	-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	61 %	432,261,110						61 %	453,248,225	
						Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	59 %							59 %		
						Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Dapat Diselesaikan	74 %							74 %		
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sarana HI dan Kesejahteraan Pekerja	160 Perusahaan	247,186,500						160 Perusahaan	249,423,650	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	247,186,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pencari Kerja di Kota Denpasar	5 Laporan	249,423,650	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Kerja yang diselesaikan	25 Perusahaan	185,074,610						25 Perusahaan	203,824,575	
						Jumlah Perselisihan Kerja yang diselesaikann	55 Perusahaan							55 Perusahaan		
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	35 Perkara	60,895,360	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pencari Kerja Di Kota Denpasar	35 Perkara	67,227,400	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	55 Perusahaan	124,179,250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pencari Kerja Di Kota Denpasar	55 Perusahaan	136,597,175	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
					Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan											
					100 %											
					6,898,111,363											
2	08	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	6,898,111,363		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin		38 Orang/bulan	8,073,048,573	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Administrasi Umum Perangkat Daerah											
					Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan											
					100 %											
					466,535,700											
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	333,407,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN dan Non ASN	12 Paket	474,755,037	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	18,623,700		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN dan Non ASN	4 Paket	20,520,905	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	30,340,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN dan Non ASN	0 Paket	42,404,725	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	84,165,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN dan Non ASN	12 Laporan	84,165,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			248,000,000							299,838,000	
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	248,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		18 Unit	299,838,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan	100 %	2,068,518,088						100 %	2,082,808,088	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	140,400,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Jasa Listrik, Jasa Layanan Umum kantor	0 Laporan	154,440,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1,750,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Jasa Listrik, Jasa Layanan Umum kantor	2 Laporan	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,926,368,088		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Jasa Listrik, Jasa Layanan Umum kantor	12 Laporan	1,926,368,088	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	791,540,000						100 %	905,010,000	
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	73 Unit	34,100,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Barang Milik Daerah	73 Unit	37,510,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	432,440,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Barang Milik Daerah	43 Unit	510,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	6,000,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Barang Milik Daerah	1 Unit	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	92,500,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Barang Milik Daerah	78 Unit	97,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200,000,000		SILPA,		Rutin	Barang Milik Daerah	3 Unit	220,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	26,500,000		SILPA,		Rutin	Barang Milik Daerah	3 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10 %	683,290,000						10 %	898,491,000	
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point. Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak	4 Kecamatan	166,195,000						4 Kecamatan	598,653,000	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Perangkat Daerah	88,700,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	217,343,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Perangkat Daerah	77,495,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	381,309,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	517,095,000						4 Kecamatan	299,838,000	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	517,095,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Anggola Partai Politik Perempuan	7 Dokumen	299,838,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	40 %	312,021,064						40 %	611,244,234	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	160 orang	94,250,000						160 orang	153,925,000	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	94,250,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	153,925,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	176,605,064						35 orang	370,870,634	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	176,605,064		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat	100 Layanan	370,870,634	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 kecamatan	41,166,000						4 kecamatan	86,448,600	
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	41,166,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	SDM Penyedia Layanan	40 Orang	86,448,600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/ Lurah	6,9 %	174,562,500						6,9 %	113,675,375	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	47,543,750						4 Kecamatan	43,164,000	
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	10,062,500		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		0 1 Dokumen	4,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37,481,250		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		0 1 Dokumen	38,764,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota	4 Kecamatan	127,018,750						4 Kecamatan	70,511,375	
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	70,893,750		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	250 Orang	31,516,375	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	56,125,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	2 Dokumen	38,995,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data terpilah Gender dan Anak pada OPD	30 %	64,155,000						30 %	92,845,500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Profil Statistik Gender	1 Profil	64,155,000						1 Profil	92,845,500	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	22,355,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Data Gender	1 Dokumen	46,865,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	41,800,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Data Gender	1 Dokumen	45,980,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Indikator KLA	Utama .	919,800,000						Utama .	1,263,542,500	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	518,125,000						4 Kecamatan	583,220,000	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	13 Organisasi	108,700,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Organisasi Pemerintah, non pemerintah, Media Usaha dan Non media usaha	13 Organisasi	127,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	409,425,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Organisasi Pemerintah, non pemerintah, Media Usaha dan Non media usaha	7 Dokumen	455,620,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	401,675,000								4 Kecamatan	680,322,500	
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	116,450,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan Jejaring	200 Orang	128,095,000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	67,100,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan Jejaring	1 Dokumen	73,810,000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47,175,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan Jejaring	1 Dokumen	290,372,500		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	170,950,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan Jejaring	1 Dokumen	188,045,000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100 %	289,778,936								100 %	608,535,766	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	56,200,000								4 Kecamatan	118,020,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	56,200,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Jejaring	3 Dokumen	118,020,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	200 orang	172,438,936						200 orang	362,121,766	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	172,438,936		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Layanan	362,121,766	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4 Kecamatan	61,140,000						4 Kecamatan	128,394,000	
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	61,140,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Lembaga Penyedia Layanan	2 Dokumen	128,394,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			6,835,627,000							8,405,368,000	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kelompok kerja Bangsa Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif	9,3 %	306,315,000						9,3 %	436,630,000	
						Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	2,3 %							2,3 %		
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	306,315,000						4 Kecamatan	436,630,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	241,515,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Penyediaan data	1 Dokumen	371,830,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	64,800,000		DAK Non Fisik,		Rutin	Penyediaan data	2 Dokumen	64,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)	7,60 %	2,710,572,000						7,60 %	4,147,498,000	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Kecamatan	419,350,000						4 Kecamatan	436,993,500	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4,375,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4,375,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	201,435,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	1 Dokumen	219,078,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	70,640,000		DAK Non Fisik,		Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	1 Dokumen	70,640,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3 Laporan	62,400,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	3 Laporan	62,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Laporan	40,500,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	5 Laporan	40,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	40,000,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	2 Laporan	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			384,850,000							402,695,000	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	8 Organisasi	178,450,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Organisasi dan Kader Bangga Kencana	8 Organisasi	196,295,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	516 Orang	206,400,000		DAK Non Fisik,		Rutin	Organisasi dan Kader Bangga Kencana	516 Orang	206,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1,837,372,000							3,238,809,500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	496 Orang	1,781,272,000		DAK Non Fisik,		Rutin	Akseptor KB, Tenaga Pelayanan KB	496 Orang	1,727,130,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30 Laporan	24,000,000		DAK Non Fisik,		Rutin	Akseptor KB, Tenaga Pelayanan KB	30 Laporan	45,862,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	40 Orang	32,100,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Akseptor KB, Tenaga Pelayanan KB	40 Orang	33,550,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	4 Kecamatan	69,000,000						4 Kecamatan	69,000,000	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	4 Kampung	69,000,000		DAK Non Fisik,		Rutin	Kampung KB	4 Kampung	69,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	15 %	3,818,740,000						15 %	3,821,240,000	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4 Kecamatan	3,809,740,000						4 Kecamatan	3,811,340,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 Orang	16,000,000			Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Orang	17,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	296 Orang	3,793,740,000			DAK Non Fisik,		Rutin	Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	296 Orang	3,793,740,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupanj Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4 Kecamatan	9,000,000						4 Kecamatan	9,900,000		
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Organisasi	9,000,000			Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Organisasi	4 Organisasi	9,900,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			136,812,617,968							150,493,852,465		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	59,382,446,614							100 %	65,320,691,275	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	22,744,997,498							100 %	25,019,497,248	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	201 Orang/bulan	22,744,997,498			Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	ASN	201 Orang/bulan	25,019,497,248	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah	100 %	914,326,600							100 %	1,005,759,260	
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	914,326,600			Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Tenaga kebersihan	1 Paket	1,005,759,260	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	972,089,340						100 %	1,069,298,274	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	879,811,740		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN	1 Paket	967,792,914	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	18,403,300		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN	1 Paket	20,243,630	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53,674,300		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN	1 Paket	59,041,730	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,200,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN	1 Laporan	22,220,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	34,027,033,176						100 %	37,429,736,494	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	334,933,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN dan Non ASN	1 Laporan	368,426,300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33,692,100,176		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN dan Non ASN	1 Laporan	37,061,310,194	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	724,000,000						100 %	796,400,000	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	24,900,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kendaraan dinas dan gedung kantor	51 Unit	27,390,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97 Unit	599,100,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kendaraan dinas dan gedung kantor	97 Unit	659,010,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100,000,000		SILPA,		Rutin	Kendaraan dinas dan gedung kantor	2 Unit	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	40 %	72,450,663						40 %	79,695,729	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	40 %	72,450,663						40 %	79,695,729	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	72,450,663			Pendapatan Asli Daerah,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat	3 Dokumen	79,695,729	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas air	2 %	376,094,681							2 %	413,704,149	
						Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	1 %								1 %		
						Persentase peningkatan kualitas udara	2 %								2 %		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	86.36 %	376,094,681							86.36 %	413,704,149	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	53,682,400			Pendapatan Asli Daerah,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	59,050,640	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	322,412,281			Pendapatan Asli Daerah,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	2 Dokumen	354,653,509	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	35 %	2,385,969,750							35 %	2,624,539,425	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pohon penghijauan yang ditata	41 %	2,385,969,750							41 %	2,624,539,425	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2555 Ha	2,385,969,750			Pendapatan Asli Daerah,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat	2555 Ha	2,624,539,425	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	80 %	294,839,260							80 %	324,323,186	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Pesetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	148	294,839,260								148	324,323,186	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketenluan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	200 Dokumen	139,917,560		Pendapatan Asli Daerah,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat	200 Dokumen	153,909,316	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	154,921,700		Pendapatan Asli Daerah,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat	1 Laporan	170,413,870	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	95 %	74,300,817,000								95 %	81,730,898,700	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	jumlah volume sampah yang dikelola	1365718.008 m3	74,300,817,000								1365718.008 m3	81,730,898,700	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1020 Ton	40,022,816,000		Pendapatan Asli Daerah,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat	1020 Ton	44,025,097,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	413 Unit	34,278,001,000		Pendapatan Asli Daerah,	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat	413 Unit	37,705,801,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	13,826,751,215								100 %	15,209,426,337	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9,728,190,130								100 %	10,701,009,143	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	9,728,190,130	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,			Rutin	ASN	55 Orang/bulan	10,701,009,143	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	1,432,162,277						100 %	1,575,378,505	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	1,349,787,277	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	13 Paket	1,484,766,005	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	77,215,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	3 Paket	84,936,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,160,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	1 Dokumen	5,676,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan jasa penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	2,359,853,808						100 %	2,595,839,189	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,359,853,808	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	1 Laporan	2,595,839,189	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	306,545,000						100 %	337,199,500	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	276,545,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	24 Unit	304,199,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	104 Unit	30,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	104 Unit	33,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %	198,415,200						100 %	218,256,720	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	198,415,200						100 %	218,256,720	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2000 Dokumen	132,075,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat	2000 Dokumen	145,282,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	66,340,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 Laporan	72,974,220	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RKPD Semester Berencana Kota Denpasar Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	92 %	5,718,041,080						92 %	6,289,845,188	
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Kegiatan Pencatatan Sipil	100 %	5,718,041,080						100 %	6,289,845,188	
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	0 Laporan	5,687,533,980		Pendapatan Asli Daerah,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat	0 Laporan	6,256,287,378	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Tercapainya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %							100 %		
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	30,507,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 Laporan	33,557,810	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	100 %	123,424,800						100 %	135,767,280	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya buku data dokumen kependudukan	100 %	59,124,800						100 %	65,037,280	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	6 Dokumen	49,050,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 6 Dokumen	53,955,110	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	10,074,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 3 Dokumen	11,082,170	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Kota Denpasar	100 %	64,300,000						100 %	70,730,000	
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	64,300,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 0 Laporan	70,730,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Monitoring dan evaluasi SIAK di desa/kelurahan	43 desa/kelurahan							43 desa/kelurahan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
								9,612,007,175							10,573,207,893	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	7,350,850,925						100 %	8,085,936,018	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terebutnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4,444,803,464						100 %	4,889,283,811	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4,441,803,464	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	0	30 Orang/bulan	4,885,983,811	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	1 Dokumen	3,300,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	333,710,069						100 %	367,081,076	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,069,160	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	1 Paket	5,576,076	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	232,700,409	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	9 Paket	255,970,450	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40,520,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	1 Paket	44,572,550	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	35,220,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	4 Dokumen	38,742,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	1 Laporan	22,220,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	147,200,000						100 %	161,920,000	
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit	147,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	64 Unit	161,920,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,067,817,392						100 %	2,274,599,131	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	113,400,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	12 Laporan	124,740,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,954,417,392	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	12 Laporan	2,149,859,131	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	357,320,000						100 %	393,052,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	248,870,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	24 Unit	273,757,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	20 Unit	5,720,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	76,750,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	85 Unit	84,425,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	SILPA,		Rutin	0	1 Unit	29,150,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Presentase Fasilitas Kerjasama Desa	100 %	8,930,000						100 %	9,823,000	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama yang terbentuk	1 Kerjasama	8,930,000						1 Kerjasama	9,823,000	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8,930,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	1 Dokumen	9,823,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 %	390,411,650						100 %	429,452,815	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdes yang aktif	27 Bumdes	390,411,650						27 Bumdes	429,452,815	
						Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	27 Desa							27 Desa		
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	40,460,150	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	27 Dokumen	44,506,165	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	50,067,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	1 Dokumen	55,073,700	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	43 Dokumen	46,373,250	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	43 Dokumen	51,010,575	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	27 Dokumen	83,496,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	27 Dokumen	91,845,600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	13	04	2.01	18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	170,015,250	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	10 Dokumen	187,016,775	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif	100 %	1,861,814,600						100 %	2,047,996,060	
						Presentase Pasar Desa dengan fasilitas yang baik	100 %							100 %		
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	27 LKD	1,861,814,600						27 LKD	2,047,996,060	
						Jumlah Pasar Desa dengan fasilitas yang baik	15 Pasar							15 Pasar		
2	13	05	2.01	02	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	237,545,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	1 Dokumen	261,299,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Lembaga	25,918,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	27 Lembaga	28,510,460	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	102,660,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	2 Dokumen	112,926,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	6,925,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	1 Laporan	7,617,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	7,805,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	0	1 Laporan	8,585,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1,480,961,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Bantuan Keuangan Khusus, SILPA,		Rutin	0	1 Dokumen	1,629,057,100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
2	15							60,005,739,835							64,613,621,540	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	40,605,124,047						100 %	43,272,940,674	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	18,569,277,065						100 %	19,033,508,992	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/Bulan	18,569,277,065		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	-	132 Orang/Bulan	19,033,508,992	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,052,055,079						100 %	2,257,260,588	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21,122,970		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	-	2 Paket	23,235,267	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1,780,990,156		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	-	7 Paket	1,959,089,172	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	56,188,788		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	-	2 Paket	61,807,667	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	112,816,165		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	-	2 Paket	124,097,782	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	45,000,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	-	2 Dokumen	49,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	35,937,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	-	66 Laporan	39,530,700	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	19,235,600,000						100 %	21,159,160,000	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	52 Laporan	19,235,600,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	-	52 Laporan	21,159,160,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85 %	748,191,903						85 %	823,011,094	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	553,429,703		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	-	106 Unit	608,772,674	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	144,982,200		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	-	116 Unit	159,480,420	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49,780,000		SILPA,		Rutin	-	1 Unit	54,758,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	19,005,995,088						33 %	20,906,594,596	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhiya Perlengkapan Jalan Kabupaten / Kota	60 %	7,018,582,169						60 %	7,720,440,386	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	77 Unit	3,986,836,027		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	77 Unit	4,385,519,630	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	142 Unit	3,031,746,142		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	142 Unit	3,334,920,756	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas Terminal Penumpang Tipe C	62 %	904,573,138						62 %	995,030,451	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	292,222,099		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	1 Unit	321,444,309	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	612,351,039		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	4 Unit	673,586,142	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji	57 %	2,507,816,190						57 %	2,758,597,809	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	464,216,500		Pendapatan Asli Daerah,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	3 Unit	510,638,150	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30000 Dokumen	687,500,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	30000 Dokumen	756,250,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	39 Unit	1,356,099,690		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	39 Unit	1,491,709,659	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Manajemen Rekayasa yang Efektif dan Efesien untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota (Tingkat Kinerja Pelayanan Jalan)	50 %	3,011,172,205						50 %	3,312,289,426	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8 Laporan	79,118,050		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	8 Laporan	87,029,855	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	2,932,054,155		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	6 Laporan	3,225,259,571	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemenuhan Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100 %	1,793,774,108						100 %	1,973,151,519	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,753,812,758		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	1 Laporan	1,929,194,034	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	39,961,350		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	1 Laporan	43,957,485	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penumpang yang Menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten /Kota	33 %	3,770,077,278						33 %	4,147,085,006		
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 Unit	3,585,673,068		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	14 Unit	3,944,240,375	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	184,404,210		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	4 Laporan	202,844,631	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	70 %	394,620,700						70 %	434,086,270		
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan Pemenuhan Sarpras Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal	34 %	394,620,700						34 %	434,086,270		
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	293,475,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	-	1 Unit	322,826,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	101,145,700		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	-	2 Unit	111,260,270	DINAS PERHUBUNGAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											18,691,745,500	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100 %	6,204,607,462						100 %	10,018,907,338		
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PersentaseTerpenuhinya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100 %	4,504,904,502						100 %	7,853,969,539		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4,504,904,502	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	26 Orang/bulan	7,853,969,539	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	

RKPD Semester Berencana Kota Denpasar Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	1 Tahun							1 Tahun		
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Terpenuhiya Administrasi Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	1,021,349,140						12 Bulan	1,310,626,992	
	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	791,879,648	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	0 Paket	1,046,221,367	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
						Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan							12 Bulan		
	2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya Peralatan Rumah Tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	102,931,692	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	113,228,527	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	79,287,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	96,727,098	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhiya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12 Bulan	47,250,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	54,450,000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	678,353,820						12 Bulan	854,310,807	
	2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	12 Bulan	409,823,820	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	556,466,282	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12 Bulan	268,530,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	297,844,525	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	85 %	2,236,238,698						85 %	3,445,202,025	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Pengguna Kota Denpasar kepada masyarakat	100 %	2,236,238,698						100 %	3,445,202,025	
	2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	589,632,890	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Rutin	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	1 Dokumen	912,596,412	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	100 %	974,495,409	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Rutin	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	100 %	1,504,911,042	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	0 Layanan	346,648,724	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	0 Layanan	381,430,909	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
						Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media	100 %							100 %		
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (Delik Festival)	1 Kali	288,061,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	1 Kali	582,858,936	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
						Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (HUT Kota Denpasar)	1 Kali							1 Kali		
						Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (HUT Provinsi Bali)	1 Kali							1 Kali		
						Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang							0 Orang		
						Jumlah Terwujudnya Promosi Denpasar Festival dan publikasi pelayanan promosi pemasar produk TIK di Kota Denpasar	15 Tayang							15 Tayang		
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	0 Dokumen	37,400,475	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	0 Dokumen	63,404,726	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
						Jumlah Publikasi Media Sosial	20 kali							20 kali		
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	100 %	4,017,733,540						100 %	5,227,636,137	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	85 %	2,716,237,708						85 %	3,215,025,457	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK	100 %	2,716,237,708	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus, SILPA,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	100 %	3,215,025,457	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	100 %	1,301,495,832						100 %	2,012,610,680	
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	0 Dokumen	169,162,232	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Pemerintah Kota Denpasar	0 Dokumen	222,404,819	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Managemen Resiko, Penyesuaian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	3 Dokumen							3 Dokumen		
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 Aplikasi	386,454,108		PendapatN1136-U1136an Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Pemerintah Kota Denpasar	6 Aplikasi	463,647,546	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi	100 %	353,406,308		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Pemerintah Kota Denpasar	100 %	410,756,268	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	0 Dokumen	59,585,600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Pemerintah Kota Denpasar	0 Dokumen	350,512,994	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
						Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Damamaya	100 %							100 %		
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen	332,887,584	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Pemerintah Kota Denpasar	0 Dokumen	565,289,053	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
						Layanan Government Cloud Computing Teknologi Informasi Layanan Videotron	12 Bulan							12 Bulan		
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			43,993,300							145,178,539	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kota denpasar	80 %	43,993,300						80 %	145,178,539	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	80 %	43,993,300						80 %	145,178,539	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0 Dokumen	43,993,300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	0 Dokumen	48,392,801	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Ketersediaan data dan informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun	1 Laporan							1 Laporan		
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			465,209,032							682,232,441	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di lingkup pemerintah kota denpasar	60 %	465,209,032						60 %	682,232,441	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	60 %	465,209,032						60 %	682,232,441	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Audit Sistem Informasi	2 kali	465,209,032	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	2 kali	682,232,441	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
						Jumlah buku Bluprint	38 Buku							38 Buku		
						Jumlah Pelatihan dasar Keamanan Informasi	1 Kali							1 Kali		
						Jumlah Pengembangan Aplikasi	1 Aplikasi							1 Aplikasi		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	0 Perangkat Daerah							0 Perangkat Daerah		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			8,417,872,638							9,131,968,597	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	6,987,186,622						100 %	7,558,213,980	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	5,190,194,862						100 %	5,709,214,348	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	5,187,194,862	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	ASN	31 Orang/bulan	5,705,914,348	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN	1 Dokumen	3,300,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	268,089,112						100 %	167,207,118	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6,330,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN	2 Paket	6,963,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	130,340,712	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN	5 Paket	15,683,878	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	46,058,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN	2 Paket	50,664,240	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	42,360,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN	6 Dokumen	46,596,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN	1 Laporan	3,300,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30,300,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN	1 Laporan	33,330,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	9,700,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN	1 Dokumen	10,670,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100 %	86,000,000						100 %	94,600,000	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	12,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN	2 Unit	13,200,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	74,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN	3 Unit	81,400,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	924,627,648						100 %	1,017,090,014	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	46,290,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN	1 Laporan	50,919,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	108,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN	1 Laporan	118,800,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	770,337,648	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN	1 Laporan	847,371,014	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100 %	518,275,000						100 %	570,102,500	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	229,825,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN	19 Unit	252,807,500	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	73,450,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN	5 Unit	80,795,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	ASN	1 Unit	217,800,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	17,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	ASN	4 Unit	18,700,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	21,94 %	323,483,200						21,94 %	355,831,520	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 koperasi	323,483,200						150 koperasi	355,831,520	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	100,078,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Koperasi	150 Unit Usaha	110,086,240	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	16 Unit Usaha	223,404,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Koperasi	16 Unit Usaha	245,745,280	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	49,02 %	741,981,232						49,02 %	816,179,355	
						Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	26,74% %							26,74% %		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	180 KUMKM	741,981,232						180 KUMKM	816,179,355	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	260 Orang	741,981,232	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Koperasi dan UMKM	260 Orang	816,179,355	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	7 %	91,801,048						7 %	100,981,153	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 koperasi	91,801,048						10 koperasi	100,981,153	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	91,801,048	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Kelahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	koperasi	100 Unit Usaha	100,981,153	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	10 %	273,420,536						10 %	300,762,589	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omsert dan aset nya	100 UMKM	273,420,536						100 UMKM	300,762,589	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	273,420,536	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Memperkuat Kelahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	UMKM	100 Unit Usaha	300,762,589	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											24,155,141,253
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	20,669,541,682						100 %	22,736,495,849	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	11,825,999,706						12 Bulan	13,008,599,676	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	11,825,999,706		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73 Orang/bulan	13,008,599,676	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Pakaian dan atribut pegawai	1 paket	35,200,000						1 paket	38,720,000	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	35,200,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	38,720,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1,272,964,220						12 Bulan	1,400,260,642	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	129,502,800		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	142,453,080	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	612,123,500		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	673,335,850	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	383,252,920		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	421,578,212	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	57,305,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	63,035,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Dokumen	90,780,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7 Dokumen	99,858,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	6,116,102,756						12 Bulan	6,727,713,031	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,802,600,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	1 Laporan	1,982,860,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	556,500,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	1 Laporan	612,150,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,757,002,756		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	1 Laporan	4,132,703,031	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	12 Bulan	1,419,275,000						12 Bulan	1,561,202,500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	358,875,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33 Unit	394,762,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,060,400,000		SILPA,		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Unit	1,166,440,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kesepakatan kemitrausahaan dibandingkan dengan pengusaha yang ikut machmaking / temu usaha	20 %	110,775,000						20 %	254,375,000	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan laporan peta potensi investasi dan peluang usaha di Kota Denpasar tepat waktu	1 Laporan	110,775,000						1 Laporan	254,375,000	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110,775,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Kota Denpasar	1 Dokumen	121,852,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	2,00 %	326,278,000						2,00 %	358,905,800	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan setiap tahun	1 kali	326,278,000						1 kali	358,905,800	
						Persentase kesepakatan kemitrausahaan dibandingkan dengan pengusaha yang ikut machmaking / temu usaha	20 %							20 %		
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	326,278,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Investor	3 Dokumen	358,905,800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai survey kepuasan masyarakat	87,89 Nilai	45,195,000						87,89 Nilai	49,714,500	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan sistem manajemen mutu dan surveillance audit sertifikasi ISO	1 Laporan	45,195,000						1 Laporan	49,714,500	
						Penyusunan laporan penanaman modal, perijinan dan non perijinan tepat waktu	1 Laporan							1 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang	45,195,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar	12 Orang	49,714,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	20 %	413,129,640						20 %	454,442,604		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan, pembinaan dan pengawasan	100 %	413,129,640						100 %	454,442,604		
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha	278,497,640		DAK Non Fisik,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Investor	300 Pelaku Usaha	306,347,404	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	3 Kegiatan Usaha	134,632,000		DAK Non Fisik,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Investor	3 Kegiatan Usaha	148,095,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	100 %	273,825,000						100 %	301,207,500		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem informasi pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	100 %	273,825,000						100 %	301,207,500		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	273,825,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	2 Dokumen	301,207,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											50,010,870,621	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	8,985,700,733						100 %	10,198,302,247		
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5,343,116,925						100 %	6,142,422,141		
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	5,343,116,925		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin		0 33 Orang/bulan	6,142,422,141	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	400,904,400						100 %	436,594,840		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	319,346,900		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Paket	346,881,590	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,400,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Paket	29,040,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34,957,500		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Paket	38,453,250	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,200,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Laporan	22,220,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	184,250,000						100 %	246,125,000	
2	22	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	184,250,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	10 Unit	246,125,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,543,324,838						100 %	2,807,612,322	
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	129,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pegawai non ASN di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Laporan	151,855,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,414,324,838		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pegawai non ASN di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Laporan	2,655,757,322	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	514,104,570						100 %	565,547,944	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33,083,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	pemenuhan kebutuhan transportasi untuk Kepala Dinas dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Unit	36,391,300	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	221,121,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	pemenuhan kebutuhan transportasi untuk Kepala Dinas dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	23 Unit	243,233,100	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	215 Unit	224,700,570		SILPA,		Rutin	pemenuhan kebutuhan transportasi untuk Kepala Dinas dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	215 Unit	247,203,544	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35,200,000		SILPA,		Rutin	pemenuhan kebutuhan transportasi untuk Kepala Dinas dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Unit	38,720,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100 %	33,418,314,066						100 %	37,756,460,573	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100 %	561,154,166						100 %	617,269,583	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	154,003,790		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar	2 Objek	169,404,169	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	655 Orang	407,150,376		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar	655 Orang	447,865,414	DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100 %	8,446,296,500								100 %	9,290,917,350	
				01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	7,932,788,400		Bantuan Keuangan Khusus, SILPA,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Seni di Kota Denpasar	7 Objek			8,726,058,440	DINAS KEBUDAYAAN
				02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	264,823,100		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Seni di Kota Denpasar	3 Laporan			291,305,410	DINAS KEBUDAYAAN
				03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	248,685,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Seni di Kota Denpasar	12 Sertifikat			273,553,500	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100 %	24,410,863,400								100 %	27,848,273,640	
				01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	20,659,166,000		SILPA,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Lembaga Adat di Kota Denpasar	3 Objek			22,725,082,600	DINAS KEBUDAYAAN
				03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	334 unit	3,751,697,400		Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Khusus,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Lembaga Adat di Kota Denpasar	334 unit			4,126,867,140	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100 %	618,604,000								100 %	1,139,237,880	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	100 %	618,604,000								100 %	1,139,237,880	
				01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	24 Orang	100,000,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat di Kota Denpasar	24 Orang			519,783,000	DINAS KEBUDAYAAN
				03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen	518,604,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat di Kota Denpasar	24 Dokumen			570,464,400	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100,00 %	66,592,600								100,00 %	297,923,296	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	100 %	66,592,600								100 %	297,923,296	
				01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	66,592,600		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya Kota Denpasar	3 Objek			297,923,296	DINAS KEBUDAYAAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			11,018,201,242							12,120,021,367	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	10,205,964,762						100 %	11,226,561,238	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100 %	7,745,034,180						100 %	8,519,537,598	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	7,739,034,180		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin		48 Orang/bulan	8,512,937,598	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	6,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		1 Dokumen	6,600,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			257,545,079							283,299,587	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,279,630		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		1 Paket	8,007,593	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51,107,800		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		1 Paket	56,218,580	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	117,197,561		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		1 Paket	128,917,317	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23,585,088		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		1 Paket	25,943,597	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	30,600,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		3 Dokumen	33,660,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,400,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		1 Laporan	5,940,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	22,375,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		3 Laporan	24,612,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			93,483,935							102,832,328	
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	25,483,935		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		15 Unit	28,032,328	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	68,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		5 Unit	74,800,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,470,193,568							1,617,212,925	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	181,200,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		1 Laporan	199,320,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	750,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		1 Laporan	825	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,288,243,568		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		1 Laporan	1,417,067,925	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			639,708,000						703,678,800		
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	258,758,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		22 Unit	284,633,800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	308,700,000		SILPA,		Rutin		1 Unit	339,570,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	72,250,000		SILPA,		Rutin		50 Unit	79,475,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemustaka Per tahun	3 %	812,236,480						3 %	893,460,129	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemustaka Per tahun	3.05 %	162,769,552						3.05 %	179,046,508	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	162,769,552		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Perangkat Daerah	500 Eksemplar	179,046,508	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemustaka Per tahun	3.05 %	649,466,928						3.05 %	714,413,621	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	0 Lokus	64,349,200		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat	0 Lokus	70,784,120	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	140 Lokus							140 Lokus		
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	152,500,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat	1 Perpustakaan	167,750,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0 Orang	125,445,528		Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat	0 Orang	137,990,081	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	15 Orang							15 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	307,172,200			Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat	1 Perpustakaan	337,889,420	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			156,718,406							172,390,247		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	73.11 %	64,626,696							73.11 %	71,089,366	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang arsip dinamisnya dikelola dengan baik	3 PD	55,841,096							3 PD	61,425,206	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	40 Berkas	33,381,000			Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah	40 Berkas	36,719,100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	22,460,096			Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah	0 Laporan	24,706,106	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan								6 Laporan		
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang terselamatkan	3 PD	8,785,600							3 PD	9,664,160	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5 Arsip	8,785,600			Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah	5 Arsip	9,664,160	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	3712 box	92,091,710							3712 box	101,300,881	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah perangkat daerah yang arsipnya disusutkan	2 PD	83,344,000							2 PD	91,678,400	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	49325 Arsip	83,344,000			Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah	49325 Arsip	91,678,400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kegiatan penelusuran arsip statis yang dinyatakan hilang melalui media massa	3 PD	8,747,710							3 PD	9,622,481	
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	0 Arsip	8,747,710			Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah	0 Arsip	9,622,481	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip								5 Arsip		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1,164,286,400								2,746,950,351	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	3.958 Kkal/kapita/hari	738,111,650							3.958 Kkal/kapita/hari	866,639,929	
						Ketersediaan Protein	173.3 gram/kapita/hari								173.3 gram/kapita/hari		
						Konsumsi energi	2392 Kkal/kapita/hari								2392 Kkal/kapita/hari		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Konsumsi Protein	75 gram/kapita/hari							75 gram/kapita/hari		
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	a	2 s	141,003,850						2 s	202,404,429	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5 Laporan	20,001,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	5 Laporan	23,001,265	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	14 Dokumen	61,000,250		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	14 Dokumen	93,150,288	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	2 Unit	45,000,850		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	2 Unit	51,750,978	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	9 Unit	15,001,650		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	9 Unit	34,501,898	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA)(Desa/Kelurahan)	30 Desa/Kelurahan	597,107,800						30 Desa/Kelurahan	664,235,500	
						Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam (B2SA) (desa/kelurahan)	25 desa/kelurahan							25 desa/kelurahan		
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	43,190,500		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1 Dokumen	64,235,500	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	553,917,300		DAK Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1 Laporan	600,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase cadangan pangan (%)	35 %	357,042,250						35 %	1,787,501,208	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Daerah Ketahanan dan Kerentanan Pangan (kecamatan)	4 kecamatan	25,001,050						4 kecamatan	28,751,208	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Kelahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	6 Dokumen	25,001,050		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	6 Dokumen	28,751,208	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan Daerah Rawan Pangan (Kecamatan)	4 kecamatan	332,041,200						4 kecamatan	1,758,750,000	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	7,158,800		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	12 Laporan	8,750,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15000 Dokumen	324,882,400		DAK Non Fisik,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	15000 Dokumen	1,750,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan yang aman dikonsumsi (%)	87 %	69,132,500						87 %	92,809,214	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Waduk dan Rawa (kali)	12 kali.	69,132,500						12 kali.	92,809,214	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	69,132,500		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1 Dokumen	92,809,214	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			9,479,631,851							12,019,550,568	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	8,894,298,901						100 %	10,278,767,178	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pemenuhan Gaji dan tunjangan	14 bulan	6,799,684,168						14 bulan	7,954,078,698	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	6,799,684,168		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	44 Orang/bulan	7,951,078,698	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan Kota Denpasar	1 Dokumen	3,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	222,846,748						100 %	230,000,000	
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	170,840,348		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	3 Paket	175,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52,006,400		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	1 Paket	55,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	12 unit	48,500,000						12 unit	100,000,000	
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	48,500,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	6 Unit	100,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	100 %	1,514,527,985						100 %	1,599,688,480	
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	46,311,200		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	1 Laporan	50,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	147,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	1 Laporan	150,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	26,300,300		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	1 Laporan	30,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,294,916,485		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	1 Laporan	1,369,688,480	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik negara yang terawat	22 unit	308,740,000						22 unit	365,000,000	
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	194,740,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	22 Unit	200,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	49,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	56 Unit	55,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	65,000,000		SILPA,		Rutin	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	2 Unit	110,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil (ton)	1460 ton	103,747,200						1460 ton	185,784,560	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan tangkap	1.42 ton	103,747,200						1.42 ton	185,784,560	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	25,108,900		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	50 Orang	100,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	23 Kelompok	78,638,300		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	23 Kelompok	60,636,960	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi perikanan budidaya (ton)	620 ton	350,902,750						620 ton	805,376,000	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan (%)	83 %	77,215,000						83 %	160,000,000	
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 Kelompok	77,215,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	25 Kelompok	100,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Luasan lahan budidaya perikanan	35.5 Ha	273,687,750						35.5 Ha	645,376,000	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	93,267,200		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	20 Unit	200,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	880000 Unit/Ekor	151,070,550		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	880000 Unit/Ekor	300,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	29,350,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Dinas Perikanan dan Kelahanan Pangan	1 Dokumen	60,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	37,5 Kg/Kapita/Tahun	130,683,000								37,5 Kg/Kapita/Tahun	749,622,830	
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produk Perikanan yang Aman Dikonsumsi (%)	73 %	45,825,000								73 %	122,370,400	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	45,825,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan		15 Unit Usaha	122,370,400	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan ikan	35.525 ton	84,858,000								35.525 ton	627,252,430	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.525 Ton	69,700,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan		35.525 Ton	175,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	6 Pelaku Usaha	15,158,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan		6 Pelaku Usaha	452,252,430	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			20,315,534,081									22,346,177,940	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	14,197,547,181									15,616,402,350	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,715,180,275									7,385,798,303	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	6,706,180,275	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin			37 Orang/bulan	7,376,798,303	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	9,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin			12 Dokumen	9,000,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			329,607,570									362,568,327	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,665,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin			1 Paket	1,831,500	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	126,072,370	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin			5 Paket	138,679,607	DINAS PARIWISATA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	152,817,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		2 Paket	168,099,580	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39,212,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		2 Paket	43,133,640	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72 Dokumen	9,840,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		72 Dokumen	10,824,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,986,519,336							6,585,171,720	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	612,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		12 Laporan	673,200,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,374,519,336	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		12 Laporan	5,911,971,720	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,166,240,000							1,282,864,000	
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	228,240,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		18 Unit	251,064,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	938,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin		2 Unit	1,031,800,000	DINAS PARIWISATA
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	4 destinasi	1,286,081,660						4 destinasi	1,414,689,826	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100 Persen	681,525,000						100 Persen	749,677,500	
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	681,525,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah,	Memperkuat Keluhan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat	3 Lokasi	749,677,500	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100 Persen	311,596,660						100 Persen	342,756,326	
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	311,596,660		DAK Non Fisik,	Memperkuat Keluhan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat	2 Laporan	342,756,326	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	292,960,000						100 Persen	322,256,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2 Laporan	292,960,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat	2 Laporan	322,256,000	DINAS PARIWISATA		
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	5 %	760,350,000						5 %	836,385,000			
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 Persen	760,350,000						100 Persen	836,385,000			
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	252,400,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat	3 Dokumen	277,640,000	DINAS PARIWISATA		
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	384,400,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat	4 Laporan	422,840,000	DINAS PARIWISATA		
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	40,600,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat	2 Dokumen	44,660,000	DINAS PARIWISATA		
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 Dokumen	82,950,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat	2 Dokumen	91,245,000	DINAS PARIWISATA		
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	100 Orang	4,071,555,240						100 Orang	4,478,700,764			
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksanannya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 Persen	4,071,555,240						100 Persen	4,478,700,764			
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100 Orang	883,980,840	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja Pariwisata	100 Orang	972,378,924	DINAS PARIWISATA		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	388 Orang	352,625,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Sosial dan Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja Pariwisata	388 Orang	387,877,500	DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 Orang	2,834,949,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah, Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainng	Sosial dan Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja Pariwisata	200 Orang	3,118,444,340	DINAS PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27							16,719,213,445							18,709,490,160	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	13,637,481,538						100 Persen	15,430,414,562	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	10,078,481,616						100 Persen	11,645,908,537	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	10,075,481,616	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	69 Orang/bulan	11,642,908,537	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Dokumen	3,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	100 Persen	433,157,254						100 Persen	493,479,090	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,050,906	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Paket	6,655,997	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Paket	15,400,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	340,744,448	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Paket	374,818,893	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	34,566,900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Paket	35,999,700	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	108 Dokumen	12,420,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	108 Dokumen	13,662,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	25,375,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	11 Laporan	46,942,500	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	100 Persen	61,500,000						100 Persen	112,750,000	
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	61,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	6 Unit	112,750,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 Persen	2,370,742,668						100 Persen	2,607,816,935	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	70,196,076	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Laporan	77,215,684	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	286,200,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Laporan	314,820,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,014,346,592	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Laporan	2,215,781,251	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			693,600,000							570,460,000	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	369,550,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		55 Unit	406,505,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	250,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin		3 Unit	82,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86 Unit	74,050,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin		86 Unit	81,455,000	DINAS PERTANIAN
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas produksi ternak	1600 ekor	818,843,400						1600 ekor	900,727,740	
						Produktivitas Tanaman Hortikultura (Bayam)	55,62 Kw/Ha							55,62 Kw/Ha		
						Produktivitas Tanaman Hortikultura (Kangkung)	157,06 Kw/Ha							157,06 Kw/Ha		
						Produktivitas Tanaman Hortikultura (Sayur Hijau)	175,20 Kw/Ha							175,20 Kw/Ha		
						Produktivitas Tanaman Hortikultura (Semangka)	282,8 Kw/Ha							282,8 Kw/Ha		
						Produktivitas Tanaman Padi	69,20 Kw/Ha							69,20 Kw/Ha		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 Persen	799,134,000						100 Persen	879,047,400	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	308,804,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Subak/ Kelompok Tani	12 Laporan	339,684,400	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	490,330,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Subak/ Kelompok Tani	2 Laporan	539,363,000	DINAS PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan populasi ternak	10 Persen	19,709,400						10 Persen	21,680,340	
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	19,709,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Kelahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Subak / Kelompok Tani	12 Laporan	21,680,340	DINAS PERTANIAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang kondisioni baik	39,26 %	1,730,270,250						39,26 %	1,792,467,775	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang kondisioni baik	8 Unit	1,730,270,250						8 Unit	1,792,467,775	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	1,108,295,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Kelahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Subak / Kelompok Tani	2 Unit	1,108,295,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	621,975,250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Kelahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkeadilan dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Subak / Kelompok Tani	2 Unit	684,172,775	DINAS PERTANIAN
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	0 kasus	279,471,033						0 kasus	307,418,137	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHMS	0 kasus	242,887,817						0 kasus	267,176,599	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4 Laporan	242,887,817	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat Veteriner	4 Laporan	267,176,599	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk ASUH	100 Persen	36,583,216						100 Persen	40,241,538	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	36,583,216	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat Veteriner	12 Laporan	40,241,538	DINAS PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	"- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%" %	141,712,424						"- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%" %	155,883,666	
						Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	2.5 Persen							2.5 Persen		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan OPT	2.5 Persen	141,712,424						2.5 Persen	155,883,666	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	203.15 Ha	141,712,424	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Subak	203.15 Ha	155,883,666	DINAS PERTANIAN
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan / Penguahan Kelas Kelompok Tani	10 %	111,434,800						10 %	122,578,280	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian	28 Kelompok	111,434,800						28 Kelompok	122,578,280	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	54,767,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Subak/Kelompok Tani	4 Unit	60,244,140	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	56,667,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Subak/Kelompok Tani	10 Unit	62,334,140	DINAS PERTANIAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2,487,950,280							1,433,080,035	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	40 %	4,422,000						40 %	16,621,250	
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan tanda daftar gudang	1 %	4,422,000						1 %	4,961,250	
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	4,422,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perusahaan / Pemilik Gudang di Kota Denpasar	1 Dokumen	4,961,250	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	75.61 %	1,289,658,904						75.61 %	362,535,551	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	20 %	1,206,077,920						20 %	271,628,211	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	1,206,077,920		Dana Insentif Daerah,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Pasar Rakyat / Sarana Distribusi Perdagangan di Kota Denpasar	4 Unit	254,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	10 %	83,580,984						10 %	90,907,340		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	10,317,420		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Kelahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Pengelola Pasar Rakyat/Sarana Distribusi Perdagangan di Kota Denpasar	1 Dokumen	10,317,420	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	73,263,564		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Kelahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Pengelola Pasar Rakyat/Sarana Distribusi Perdagangan di Kota Denpasar	1 Dokumen	80,589,920	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/ Kota, agen, distributor dan pasar rakyat	77.33 %	133,870,640						77.33 %	212,025,000		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar dan Kabupaten/Kota	1.5 %	133,870,640						1.5 %	183,073,000		
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	133,870,640		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		0	96 Laporan	174,163,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	2337086671324 Rupiah	844,727,344						2337086671324 Rupiah	470,520,275		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	8 %	844,727,344						8 %	470,520,275		
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	9 Pelaku Usaha	791,436,380		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Kelahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	UKM/IKM kota Denpasar	9 Pelaku Usaha	171,364,574	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	30 Pelaku Usaha	53,290,964		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Kelahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	UKM/IKM kota Denpasar	30 Pelaku Usaha	55,379,704	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100 %	160,841,512						100 %	311,377,959	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100 %	160,841,512						100 %	311,377,959	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8000 Unit	160,841,512		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	para pemilik UTTP	8000 Unit	220,297,959	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan rata-rata omset IKM/UKM yang difasilitasi	0.94 %	54,429,880						0.94 %	60,000,000	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi	0.94 %	54,429,880						0.94 %	60,000,000	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	54,429,880		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	IKM/UKM Kota Denpasar	40 UMKM	60,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			12,796,503,818							18,980,830,798	
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	11,762,265,466						100 %	16,748,866,643	
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/semesteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	8,436,094,089						100 %	13,194,319,725	
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	8,436,094,089		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	ASN	50 Orang/bulan	13,194,319,725	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	198,967,355						100 %	205,424,158	
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,462,295		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	128 Pegawai	3 Paket	7,653,377	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	132,831,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	128 Pegawai	30 paket	124,282,149	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	33,069,060		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	128 Pegawai	18 Paket	37,166,082	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	23,605,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	128 Pegawai	5 Paket	27,412,550	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	3,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	128 Pegawai	18 Laporan	8,910,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	100 %	63,100,000					100 %	82,643,000		
3	31	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	63,100,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	128 pegawai	7 Unit	82,643,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,362,420,032					100 %	2,481,802,032		
3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5,000,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	128 Pegawai	4 Laporan	5,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	59,400,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	128 Pegawai	12 laporan	69,454,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90,100,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	128 Pegawai	12 Laporan	98,978,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	2,207,920,032		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	128 Pegawai	21 Laporan	2,307,870,032	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah siap pakai	100 %	701,683,990					100 %	784,677,728		
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	367,308,990		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	163 Unit	32 Unit	433,626,478	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	134,375,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	163 Unit	130 Unit	111,471,250	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	200,000,000		SILPA,		Rutin	163 Unit	1 unit	239,580,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	36 %	985,094,557					36 %	2,101,784,955		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang telah mendapatkan penerapan dan evaluasi RPIK terhadap jumlah IKM yang berada di Kota Denpasar	36 %	985,094,557								36 %	2,101,784,955	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	38,641,680		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		IKM Kota Denpasar	1 Dokumen		42,505,848	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	932,152,477		Dana Insentif Daerah,		Rutin		IKM Kota Denpasar	1 Dokumen		1,279,759,307	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	14,300,400		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		IKM Kota Denpasar	1 Dokumen		15,730,774	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	90 %	21,706,000								90 %	95,882,000	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait terhadap jumlah IKM Kota Denpasar yang berada didalam SIINAS	90 %	21,706,000								90 %	95,882,000	
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	21,706,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		Para Perajin / Pengusaha kecil dan masyarakat di bidang industri di kota Denpasar	1 Dokumen		27,132,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data informasi industri yang lengkap dan terkini	90 %	27,437,795								90 %	34,297,200	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	65 %	27,437,795								65 %	34,297,200	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIIINas	2 Dokumen	27,437,795		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Para perajin / pengusaha kecil dan masyarakat di bidang industri di kota Denpasar	2 Dokumen	34,297,200	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4 01					SEKRETARIAT DAERAH			1,640,725,000							1,804,797,500	
4 01 02					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	1,640,725,000						Sangat Tinggi	1,804,797,500	
					Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100 %								100 %		
					Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %								100 %		
					Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	100 %								100 %		
4 01 02 2.03					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Harmoni Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi dan HAM	100 %	1,640,725,000						100 %	1,804,797,500	
4 01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	622,600,000			Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah	5 Dokumen	684,860,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	852,925,000			Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah	3 Kasus	938,217,500	SEKRETARIAT DAERAH
4 01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 Dokumen	165,200,000			Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah	100 Dokumen	181,720,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4 01					SEKRETARIAT DAERAH			522,064,000							574,270,400	
4 01 03					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100 %	522,064,000						100 %	574,270,400	
					Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100 %								100 %		
					Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100 %								100 %		
4 01 03 2.01					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindaklanjuti	100 %	353,914,000						100 %	389,305,400	
4 01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	243,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	BUMD dan BLUD di Kota Denpasar, Pemantauan dan Pelaporan Kondisi Perekonomian di Kota Denpasar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Denpasar	2 Dokumen	267,410,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	52,850,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	BUMD dan BLUD di Kota Denpasar, Pemantauan dan Pelaporan Kondisi Perekonomian di Kota Denpasar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Denpasar	4 Laporan	58,135,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	57,964,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	BUMD dan BLUD di Kota Denpasar, Pemantauan dan Pelaporan Kondisi Perekonomian di Kota Denpasar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Denpasar	1 Dokumen	63,760,400	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	100 %	168,150,000						100 %	184,965,000	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	168,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelompok Tani Nelayan Andalan di Kota Denpasar	1 Dokumen	184,965,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			77,149,000							187,136,785	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Nilai SKM Diatas 80 persen	100 %	77,149,000						100 %	187,136,785	
						Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolalan dan Komunikasi Pimpinan	100 %							100 %		
						Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %							100 %		
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi			77,149,000							187,136,785	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	13,385,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah Kota Denpasar	2 Dokumen	44,996,875	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	2,414,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah Kota Denpasar	1 Laporan	16,451,160	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	61,350,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah Kota Denpasar	2 Dokumen	125,688,750	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			55,415,975,393							60,957,572,932	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	55,415,975,393						100 %	60,957,572,932	
						Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SKM diatas 80%	100 %							100 %		
						Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprolokolan dan Komunikasi Pimpinan	100 %							100 %		
						Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %							100 %		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang / Bulan	28,595,436,330						170 Orang / Bulan	31,454,979,963	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/bulan	28,595,436,330	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	Aparatur	170 Orang/bulan	31,454,979,963	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12,864,418,432						12 Dokumen	14,150,860,275	
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12,864,418,432	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Aparatur	12 Dokumen	14,150,860,275	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Laporan	5,155,222,650						34 Laporan	5,670,744,915	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Laporan	5,155,222,650	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Aparatur	34 Laporan	5,670,744,915	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	1,516,640,981						2 Orang / Bulan	1,668,305,079	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1,516,640,981	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Aparatur	2 Orang/Bulan	1,668,305,079	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	7,284,257,000						17 Paket	8,012,682,700	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	7,284,257,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Aparatur	17 Paket	8,012,682,700	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			72,085,000							745,410,820	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100 %	72,085,000						100 %	745,410,820	
						Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100 %							100 %		
						Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100 %							100 %		
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu, Mutu Dan Sasaran	100 %	72,085,000						100 %	745,410,820	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	14,385,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	2 Dokumen	228,892,070	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	36,550,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	103,757,500	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	21,150,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	3 Laporan	412,761,250	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			9,102,014,000							10,138,055,400	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SKM diatas 80%	100 %	9,102,014,000						100 %	10,138,055,400	
						Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100 %							100 %		
						Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %							100 %		
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100 %	9,102,014,000						100 %	10,138,055,400	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	2,901,550,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		0 12 Laporan	3,317,545,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	5,769,684,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		0 12 Laporan	6,346,652,400	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	430,780,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		0 4 Laporan	473,858,000	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			940,225,000							1,286,248,500	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	940,225,000						Sangat Tinggi	1,286,248,500	
						Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100 %							100 %		
						Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %							100 %		
						Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	100 %							100 %		
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan			940,225,000							1,286,248,500	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	276,050,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah	3 Dokumen	555,656,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	198,200,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah	1 Dokumen	218,020,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	465,975,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Perangkat Daerah	2 Dokumen	512,572,500	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			15,476,528,696							17,794,558,000	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	15,476,528,696						Sangat Tinggi	17,794,558,000	
					Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100 %								100 %		
					Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %								100 %		
					Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	100 %								100 %		
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	15,476,528,696						100 %	17,794,558,000	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	10,646,516,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar dan Seluruh Masyarakat	4 Dokumen	12,243,493,400	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	827,012,696	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar dan Seluruh Masyarakat	5 Dokumen	951,064,600	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranlibum Linmas	5 Dokumen	4,003,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar dan Seluruh Masyarakat	5 Dokumen	4,600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			297,000,000							326,700,000	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100 %	297,000,000						100 %	326,700,000	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100 %	297,000,000						100 %	326,700,000	
					Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100 %								100 %		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	52,927,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat Dan OPD Kota Denpasar	20 Dokumen	58,220,250	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	229,390,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat Dan OPD Kota Denpasar	5 Dokumen	252,329,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	14,682,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat Dan OPD Kota Denpasar	1 Laporan	16,150,750	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			870,350,000							870,350,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											Nasional	Daerah					
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100 %	870,350,000							100 %	870,350,000	
						Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100 %								100 %		
						Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100 %								100 %		
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindaklanjuti	100 %	870,350,000							100 %	870,350,000	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	352,850,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pihak penyedia barang/jasa di Kota Denpasar maupun di luar kota Denpasar, para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendapatkan pembinaan/sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa	80 Dokumen	352,850,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	21 Dokumen	452,000,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pihak penyedia barang/jasa di Kota Denpasar maupun di luar kota Denpasar, para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendapatkan pembinaan/sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa	21 Dokumen	452,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	65,500,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Pihak penyedia barang/jasa di Kota Denpasar maupun di luar kota Denpasar, para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendapatkan pembinaan/sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa	100 Orang	65,500,000	SEKRETARIAT DAERAH	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	02				SEKRETARIAT DPRD			81,060,881,930							89,166,970,123	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	59,201,325,930						100 %	65,121,458,523	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100 %	7,327,980,000						100 %	8,060,778,000	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	7,327,980,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	0	50 Orang/bulan	8,060,778,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100 %	1,929,352,600						100 %	2,122,287,860	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	567,368,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	10 Paket	624,104,800	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	71,589,600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	3 Paket	78,748,560	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	193,830,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin	0	3 Paket	213,213,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90,175,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin	0	1 Paket	99,192,500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	688,428,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin	0	14 Dokumen	757,270,800	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin	0	12 Laporan	44,550,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	277,462,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	10 Laporan	305,208,200	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100 %	2,481,585,920						100 %	2,729,744,512	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	12 Laporan	660,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,881,585,920	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	12 Laporan	2,069,744,512	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1,664,560,000						100 %	1,831,016,000	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	368,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	0	5 Unit	404,800,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	268,810,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		30 Unit	295,691,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	147,250,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		181 Unit	161,975,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	880,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		19 Unit	968,550,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	45,531,877,410						100 %	50,085,065,151	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	44,520,767,410	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		45 Orang/Bulan	48,972,844,151	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	906,110,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		7 Paket	996,721,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	105,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		45 Orang	115,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100 %	265,970,000						100 %	292,567,000	
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	6,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		5 Laporan	6,600,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	259,970,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		22 Laporan	285,967,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	86 %	21,859,556,000						86 %	24,045,511,600	
						Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100 %							100 %		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4,214,622,000						100 %	4,636,084,200	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	383,728,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		2 Dokumen	422,100,800	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	3,679,394,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		18 Dokumen	4,047,333,400	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	151,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		3 Dokumen	166,650,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	671,196,000						100 %	738,315,600	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	9,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		1 Dokumen	9,900,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	9,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	1 Dokumen	9,900,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	635,196,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	5 Dokumen	698,715,600	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	9,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	1 Dokumen	9,900,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	9,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	1 Dokumen	9,900,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100 %	8,092,430,000						100 %	8,901,673,000		
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	1,988,594,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	24 Laporan	2,187,453,400	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	2,121,068,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	24 Laporan	2,333,174,800	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	2,120,318,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	24 Laporan	2,332,349,800	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	1,844,450,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	24 Laporan	2,028,895,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	4,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	2 Dokumen	4,950,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	4,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	2 Dokumen	4,950,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	9,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	1 Dokumen	9,900,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4,155,020,000						100 %	4,570,522,000		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2,478,480,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	6 Dokumen	2,726,328,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	464,900,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	12 Dokumen	511,390,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	360,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	6 Orang	396,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	300,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	5 Orang	330,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	9,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	12 Dokumen	9,900,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	16 Dokumen	542,640,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	16 Dokumen	596,904,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	3,492,500,000						100 %	3,841,750,000		
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3,492,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin		0	3 Dokumen	3,841,750,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	197,866,000						100 %	217,652,600		
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6 Laporan	197,866,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	6 Laporan	217,652,600	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	100 %	1,035,922,000						100 %	1,139,514,200		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	1,035,922,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA,		Rutin		0	12 Dokumen	1,139,514,200	SEKRETARIAT DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	01				PERENCANAAN			11,062,050,767								7,341,500,000	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	8,275,413,923						100 %	7,341,500,000		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	6,158,105,377						100 %	7,341,500,000		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	6,158,105,377		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	Gaji dan tunjangan pegawai Bappeda Kota Denpasar		34 Orang/bulan	7,341,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100 %	375,714,050						100 %	-		
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	375,714,050		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Peralatan dan perlengkapan kantor		12 Paket	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100 %	835,371,424						100 %	-		
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	197,500,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Air dan listrik		3 Laporan	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	637,871,424		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Air dan listrik		1 Laporan	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	906,223,072						100 %	-	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	487,789,696		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kendaraan, Mesin, dan Gedung	34 Unit	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	148,068,528		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kendaraan, Mesin, dan Gedung	0 Unit	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit							79 Unit		
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	270,364,848		SILPA,		Rutin	Kendaraan, Mesin, dan Gedung	1 Unit	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100 %	1,891,774,300						100 %	-	
						Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100 %							100 %		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar	100 %	1,785,459,100						100 %	-	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1,154,159,200		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	-	2 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	20,651,200		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	-	1 Berita Acara	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJM/RKPD)	3 Dokumen	610,648,700		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	-	3 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100 %	64,376,000						100 %	-	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	64,376,000		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	kelompok	1 Buku	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan -Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	41,939,200						100 %	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	41,939,200		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Data	1 Laporan	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100 %	894,862,544						100 %	-			
						Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Peranokot Daerah	100 %							100 %				
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	116,093,776						100 %	-			
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	116,093,776		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Laporan	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)	100 %	107,040,412						100 %	-			
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	70,023,188		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi		16 Laporan	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	37,017,224		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi		6 Laporan	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	671,728,356						100 %	-			
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2 Dokumen	518,190,800		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	74,662,228		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi		6 Laporan	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	78,875,328		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi		18 Laporan	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN			48,687,562,339							51,121,790,457			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	47,585,687,339						100 %	49,964,821,707			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	40,673,570,318						100 %	42,707,098,834	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	40,670,570,318	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	77 Orang/bulan	42,704,098,834	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Dokumen	3,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	439,490,445						100 %	461,464,968	
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,811,935	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Paket	16,602,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	164,740,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Paket	172,977,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	45,183,510	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Paket	47,442,686	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	114,535,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Paket	120,261,750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	79,020,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Dokumen	82,971,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,200,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Laporan	21,210,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	98,000,000						100 %	102,900,000	
				07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	89,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	10 Unit	93,450,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	9,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	3 Unit	9,450,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5,300,306,576						100 %	5,565,321,905	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	328,084,900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Laporan	344,489,145	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	665,200,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Laporan	698,460,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,307,021,676	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Laporan	4,522,372,760	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Siap Pakai	100 %	1,074,320,000						100 %	1,128,036,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91 Unit	684,870,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	91 Unit	719,113,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117 Unit	130,950,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	117 Unit	137,497,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	130,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	2 Unit	136,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	93,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	4 Unit	98,175,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	30,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	4 Unit	31,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Unit	5,250,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	40,12 %	1,101,875,000						40,12 %	1,156,968,750	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	1,101,875,000						100 %	1,156,968,750	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	52,100,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Bapenda Kota Denpasar	1 Dokumen	54,705,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	275,750,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Bapenda Kota Denpasar	1 Dokumen	289,537,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	182,275,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Bapenda Kota Denpasar	3 Dokumen	191,388,750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	3,150,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Bapenda Kota Denpasar	1 Dokumen	3,307,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	488,600,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Bapenda Kota Denpasar	2 Dokumen	513,030,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Bapenda Kota Denpasar	1 Laporan	105,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	02				KEUANGAN			192,253,140,317							214,731,755,435	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	12,604,710,293						100 %	16,249,724,036	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	8,635,185,113						100 %	10,017,865,691	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	8,467,928,613	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	53 Orang/bulan	9,824,022,151	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14000 Dokumen	167,256,500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	14000 Dokumen	193,843,540	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	284,220,700						100 %	312,642,770	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,619,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	1 Paket	12,780,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	116,919,100	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	8 Paket	128,611,010	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15,971,600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	2 Paket	17,568,760	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97,445,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	1 Paket	107,189,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12,642,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	2 Paket	13,906,200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2,400,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	24 Dokumen	2,640,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	27,224,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	2 Laporan	29,946,400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	291,000,000						100 %	1,374,998,339	
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	145,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	2 Unit	159,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	109 Unit	146,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	109 Unit	1,078,550,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,639,094,480						100 %	2,947,281,236	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	184,800,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	36 Laporan	190,080,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,454,294,480	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	12 Laporan	2,757,201,236	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	755,210,000						100 %	1,214,686,000	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	43,340,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	1 Unit	47,674,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	242,620,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	25 Unit	410,762,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit	297,250,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	167 Unit	396,550,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	172,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil,		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	2 Unit	359,700,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks kinerja pengelolaan keuangan daerah (kategori baik)	88.47 %	178,277,277,694						88.47 %	197,085,958,633	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya dokumen rencana anggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	540,219,532						100 %	1,324,310,835	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	67,782,629	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi		0 2 Dokumen	164,999,860	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	69,455,607	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi		0 2 Dokumen	164,999,860	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	208,235,420	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi		0 2 Dokumen	459,728,799	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	194,745,876	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	534,582,315	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	185,120,850						100 %	197,809,975	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	57,215,250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	4 Dokumen	15,761,295	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	36 Dokumen	355,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	36 Dokumen	39,061	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Orang	127,550,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	36 Orang	148,237,925	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	359,435,200						100 %	432,085,500	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	24,753,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	2 Laporan	41,937,775	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	213,429,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	239,330,740	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	121,252,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	142,786,875	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	177,192,502,112						100 %	195,131,752,323	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	101,986,669,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	126,730,603,340	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12,482,862,712	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	13,951,148,983	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	62,722,970,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	54,450,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks pengelolaan barang milik daerah (kategori baik)	96.15 %	1,371,152,330						96.15 %	1,396,072,766	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	1,371,152,330						100 %	1,396,072,766	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	335,383,040	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	377,993,594	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5,407,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	14,525,775	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	266,493,920	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	100 Laporan	237,235,812	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	70,599,710	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	87,162,306	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	72,232,920	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	80,006,212	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	283,308,650	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	119,599,480	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	9,271,220	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	14,387,967	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	319,667,980	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	343,806,991	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	8,787,390	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	121,354,629	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.03					KEPEGAWAIAN			12,771,064,790							14,880,315,433	
5.03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	11,477,810,790						100 %	12,585,708,107	
5.03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran kegiatan/subkegiatan	95 %	9,550,744,489						95 %	10,505,818,938	
5.03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	9,550,744,489		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	ASN pada BKPSDM Kota Denpasar	64 Orang/bulan	10,505,818,938	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	762,483,111						100 %	786,750,834	
5.03	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,377,400		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Paket	6,467,423	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	405,245,711		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Paket	405,245,711	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	86,901,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Paket	95,591,100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	28,800,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Dokumen	41,580,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,676,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Laporan	8,883,600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	230,483,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Laporan	228,983,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan BMD	100 %	137,300,000						100 %	137,300,000	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	137,300,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	3 Unit	137,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks	669,011,310						90 Indeks	769,396,267	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Laporan	12,100,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	111,410,158		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Laporan	124,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	546,601,152		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Laporan	632,996,267	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			358,271,880							386,442,068	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	231,701,880		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		24 Unit	254,872,068	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	76,570,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		70 Unit	76,570,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000		SILPA,		Rutin		1 Unit	55,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	79 %	1,293,254,000						79 %	2,294,607,326	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Pengadaan ASN	36 Indeks	1,053,094,000						36 Indeks	1,477,310,626	
						Nilai Aspek Perencanaan	40 Indeks							40 Indeks		
						Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan ASN	14 Indeks							14 Indeks		
						Nilai Aspek Sistem Informasi	20 Indeks							20 Indeks		
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	887,011,000		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar, Masyarakat Umum yang melamar seleksi CASN	2 Dokumen	1,258,414,476	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	46,083,000		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar, Masyarakat Umum yang melamar seleksi CASN	1 Lembaga	51,068,050	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	120,000,000		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar, Masyarakat Umum yang melamar seleksi CASN	1 Dokumen	167,828,100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Mutasi dan promosi	20 Indeks	240,160,000						20 Indeks	672,294,700	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	60,660,000		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	1 Dokumen	159,436,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	15,400,000		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	2 Dokumen	91,960,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	164,100,000		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	1 Dokumen	420,898,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			3,719,583,248							3,969,625,500	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	57 %	3,719,583,248						57 %	3,969,625,500	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			2,256,358,248							2,505,220,500	

RKPD Semester Berencana Kota Denpasar Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional 12	Daerah 13	14	15	16	17
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	134 Orang	1,643,858,248		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	134 Orang	1,892,720,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguasaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	612,500,000		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	3 Dokumen	612,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Nilai Dimensi Kompetensi ASN	20 Indeks	1,463,225,000						20 Indeks	1,464,405,000	
						Nilai Dimensi Kualifikasi ASN	18 Indeks							18 Indeks		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	1,463,225,000		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	4 Laporan	1,464,405,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			8,116,635,387							13,513,162,573	
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	7,585,635,387						100 %	10,209,320,846	
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	6,005,773,344						1 laporan	7,848,083,007	
5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	6,002,773,344	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	40 Orang/bulan	7,845,083,007	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Dokumen	3,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88 %	394,585,942						88 %	494,249,528	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,000,090	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Paket	16,412,825	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	119,572,616	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	3 Paket	73,224,598	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	146,322,736	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	5 Paket	179,998,155	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40,255,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Paket	44,281,050	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	25,680,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	4 Dokumen	41,448,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	54,755,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Laporan	119,084,900	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	38,000,000						100 %	322,608,000	
5	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	38,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	18 Unit	243,408,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	940,576,101						100 %	1,138,033,711	
5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	134,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Laporan	187,550,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	49,250,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Laporan	117,975,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	756,826,101	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Laporan	832,508,711	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	206,700,000								100 %	253,055,000	
5	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,150,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Unit		43,065,000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	133,050,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	18 Unit		152,790,000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	29,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	6 Unit		51,700,000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Unit		5,500,000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	70 %	531,000,000								70 %	3,303,841,727	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2 dokumen	165,000,000								2 dokumen	1,936,000,000	
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2 Dokumen	165,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	2 Dokumen		484,000,000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditetapkan	4 dokumen	166,000,000								4 dokumen	-	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	83,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat di Kota Denpasar	1 Dokumen		-		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	83,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sainn	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat di Kota Denpasar	1 Dokumen		-		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penetapan Inovasi Daerah	100 %	200,000,000								100 %	883,841,727	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	150,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saino	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	377,757,160	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	50,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saino	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	411,419,491	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			21,398,589,672							26,575,988,975	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	20,790,506,772						100 %	25,810,988,975	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan, dan administrasi tugas ASN	51 Orang	16,424,772,618						51 Orang	20,003,000,000	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	16,421,772,618	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	74 Orang/bulan	20,000,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	1 Dokumen	3,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74 Orang	970,340,400						74 Orang	2,000,000,000	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	970,340,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	0 Orang	2,000,000,000	INSPEKTORAT
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49 Orang							49 Orang		
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	833,009,862						1 Paket	934,839,600	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,629,240	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	1 Paket	20,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	149,019,600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	1 Paket	169,839,600	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22,746,272	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	1 Paket	25,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	106,235,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	2 Paket	150,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	86,661,750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	1 Paket	100,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	37,735,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	4 Dokumen	40,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	156,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	4 Laporan	160,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	264,983,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	4 Laporan	270,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40 Unit	618,250,000						40 Unit	820,000,000	
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39 Unit	618,250,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	39 Unit	820,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,289,818,868						1 Laporan	1,373,149,375	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	102,300,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	110,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	47,750,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	63,149,375	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,139,768,868	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	12 Laporan	1,200,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	654,315,024						1 Unit	680,000,000	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25,700,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 1 Unit	30,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	348,615,024	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 32 Unit	350,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	280,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin		0 5 Unit	300,000,000	INSPEKTORAT
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit							0 Unit		
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah	100 %	301,060,700						100 %	355,000,000	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Kegiatan	228,688,850						1 Kegiatan	270,000,000	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	16,333,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	20,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	21,427,200		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	30,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	22,004,550		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	30,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	19,122,850		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	25,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	18,591,850	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	25,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	92,711,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Kesepakatan	100,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	38,498,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	4 Dokumen	40,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	72,371,850						1 Laporan	85,000,000	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	15,989,850		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	25,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	56,382,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	60,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Terlaksananya Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	1 Kegiatan	307,022,200						1 Kegiatan	410,000,000	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	1 Kegiatan	28,596,000						1 Kegiatan	30,000,000	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	9,188,900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi		02 Rekomendasi	10,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	19,407,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi		02 Rekomendasi	20,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	36 Perangkat Daerah	278,426,200						36 Perangkat Daerah	380,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 perangkat daerah	29,760,550		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	36 perangkat daerah	30,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 perangkat daerah	24,780,550		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	36 perangkat daerah	100,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	195,056,550		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	1 Kegiatan	200,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 perangkat daerah	28,828,550		Pendapatan Asli Daerah,	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	36 perangkat daerah	50,000,000	INSPEKTORAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			10,395,759,917							12,284,272,645	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	10,095,696,417						100 %	11,485,457,788	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8,278,150,717						100 %	9,105,965,789	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	8,278,150,717		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	54 Orang/bulan	9,105,965,789	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %							100 %		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	331,242,937						100 %	364,296,460	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,607,920		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Paket	7,197,941	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	225,634,387		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Paket	248,197,826	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,149,060		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Paket	21,063,966	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,217,710		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Paket	27,739,481	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29,659,460		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Paket	32,625,406	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	24,974,400		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	4 Dokumen	27,471,840	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Tersedianya Surat Kabar/Majalah	100 %							100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	90,000,000						100 %	402,050,000	
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	90,000,000		Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	100 %	352,550,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
							Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %						100 %		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	993,511,263						100 %	1,092,862,389	
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	169,206,400		Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Laporan	186,127,040	KECAMATAN DENPASAR BARAT
							Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %						100 %		
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	824,304,863		Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Laporan	906,735,349	KECAMATAN DENPASAR BARAT
							Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %						100 %		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	402,791,500						100 %	437,783,150	
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Mobil	41,091,600		Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Mobil	45,200,760	KECAMATAN DENPASAR BARAT
							Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %						100 %		
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Kendaraan	175,074,900		Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	13 Kendaraan	192,582,390	KECAMATAN DENPASAR BARAT
							Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %						100 %		
	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	186,625,000		SILPA,	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	100 %	200,000,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
							Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %						100 %		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	83 %	203,061,000						83 %	694,494,872	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan	100 %	104,485,000					100 %	586,061,272	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	29,790,000		Pendapatan Asli Daerah,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Barat	1 Dokumen	32,769,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan							1 Laporan		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	74,695,000		Pendapatan Asli Daerah,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Barat	100 %	553,292,272	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu	100 %							100 %		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			98,576,000							108,433,600	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	98,576,000		Pendapatan Asli Daerah,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	108,433,600	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %							100 %		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	28,650,000						100 %	31,515,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	28,650,000						100 %	31,515,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	28,650,000		Pendapatan Asli Daerah,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Barat	5 Laporan	31,515,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan	100 %							100 %		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100 %	48,085,000						100 %	50,510,735	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	100 %	48,085,000						100 %	50,510,735	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 %	38,085,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	100 %	39,510,735	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar	100 %							100 %		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	10,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	100 %	11,000,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan	100 %							100 %		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100 %	20,267,500						100 %	22,294,250	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 %	20,267,500						100 %	22,294,250	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	20,267,500		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	100 %	22,294,250	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terlaksananya Evaluasi RABDes	100 %							100 %		
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			3,312,214,023							3,697,885,426	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	2,003,119,397						100 %	2,257,881,337	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	202,455,798						100 %	222,701,378	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Memadai	100 %	1,349,220		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %	1,484,142	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK, Dekorasi, Material dan Aci-Aci yang tersedia	100 %	126,647,114		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %	139,311,825	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	14,425,919		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %	15,868,511	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga (Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih)	100 %							100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	39,187,500		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pemecutan	12 Bulan	43,106,250	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	12 Bulan	8,306,045		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pemecutan	12 Bulan	9,136,650	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	12,540,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pemecutan	12 Bulan	13,794,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan (Surat Kabar/Majalah)	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	75,900,000						100 %	137,940,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	75,900,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %	83,490,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %							100 %		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,470,297,108						100 %	1,617,326,819	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	40,920,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %	45,012,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Pemenuhan Layanan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	100 %							100 %		
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Non ASN Yang Tersedia	12 Bulan	430,596,708		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pemecutan	12 Bulan	473,656,379	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Non ASN Yang Tersedia (Kepala Lingkungan)	12 Bulan	998,780,400		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pemecutan	12 Bulan	1,098,658,440	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	254,466,491						100 %	279,913,140	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	92,686,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %	101,954,600	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Layak Jalan (Terpelihara)	100 %							100 %		
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	161,780,491	SILPA,			Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %	177,958,540	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Sarana Prasarana dan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	100 %							100 %		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	1,137,962,126						100 %	1,251,758,339	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	1,137,962,126						100 %	1,251,758,339		
	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	482,328,000		Dana Insentif Daerah,	Rutin	Kelurahan Pemecutan	1 Paket	530,560,800	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
						Panjang Jalan Lingkungan Yang Ditingkalkan	1 Paket							1 Paket			
	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	655,634,126		Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %	721,197,539	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
						Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Masyarakat	100 %							100 %			
	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	171,132,500					100 %	188,245,750		
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	171,132,500					100 %	188,245,750		
	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48 Kali	171,132,500		Pendapatan Asli Daerah,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Pemecutan	48 Kali	188,245,750	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan Yang Dilaksanakan, Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Pemenuhan Iuran BPJS Ketenaakeriaan Satoas Linmas	48 kali							48 kali			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											
	7	01				KECAMATAN		2,557,932,108							3,239,605,625		
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	1,681,524,268					100 %	2,385,100,416		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113,673,210					100 %	551,564,877		
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Memadai	12 Bulan	3,116,850		Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan	3,428,535	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan							12 Bulan			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	66,500,000		Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Kelurahan Padangsambian	100 %	412,512,944	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
						Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100 %							100 %			
	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	8,695,360		Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan	96,600,786	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
						Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga (Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Bahan Lainnya)	12 Bulan							12 Bulan			
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	20,097,000		Pendapatan Asli Daerah,	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan	22,106,700	KECAMATAN DENPASAR BARAT	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	12 bulan	11,502,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 bulan	12,777,712	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket							0 Paket		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	3,762,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan	4,138,200	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan (Surat Kabar/Majalah)	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	87,694,202						100 %	175,886,297	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 bulan	87,694,202		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 bulan	175,886,297	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terpenuhinya Belanja Modal Pengadaan Taman, Sepiker Toa, Mesin Potong Rumpul, Personal Komputer, Laptop, dan Printer	12 bulan							12 bulan		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,359,586,856						100 %	1,495,545,542	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	40,700,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan	44,770,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terpenuhinya Tagihan Listrik, Telp dan Air	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	457,540,776		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan	503,294,854	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga ASN yang Tersedia	12 bulan	861,346,080		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 bulan	947,480,688	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan							0 Laporan		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	120,570,000						100 %	162,103,700	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	72,920,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Padangsambian	100 %	79,521,200	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Tersedianya bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 %							100 %		
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	47,650,000		SILPA,		Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan	52,332,500	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan							12 Bulan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	747,900,340						100 %	713,146,959	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	747,900,340						100 %	713,146,959	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 %	385,000,000		Dana Insentif Daerah,		Rutin	Kelurahan Padangsambian	100 %	313,956,585	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Peningkatan Jalan dan Pengembangan Jaringan Air Minum	100 %							100 %		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 bulan	362,900,340		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 bulan	399,190,374	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terlaksananya kegiatan kesehatan di masyarakat	12 bulan							12 bulan		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	128,507,500						100 %	141,358,250	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	128,507,500						100 %	141,358,250	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	31 kali	128,507,500		Pendapatan Asli Daerah,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Padangsambian	31 kali	141,358,250	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan yang dilaksanakan	31 kali							31 kali		
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			2,096,329,410							2,439,172,351	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	1,237,039,858						100 %	1,493,953,844	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	83,345,810						100 %	91,680,391	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Memadai	12 Bulan	2,381,425		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 Bulan	2,619,567	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	54,641,400		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	100 %	60,105,540	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	7,702,185		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	100 %	8,472,404	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga(Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih)	100 %							100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi	12 Bulan	11,220,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 Bulan	12,342,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	12 Bulan	4,496,800		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 Bulan	4,946,480	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Bulan	2,904,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 Bulan	3,194,400	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan(Surat Kabar/ Majalah)	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	33,000,000						100 %	115,060,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	33,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	2 Unit	36,300,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Tersedianya Komputer	2 unit							2 unit		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,012,146,048						100 %	1,113,360,653	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	30,600,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 Bulan	33,660,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Pemenuhan Layanan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Non ASN yang tersedia	12 bulan	489,348,288		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 bulan	538,283,117	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Non ASN yang tersedia (Kepala Lingkungan)	12 bulan	492,197,760		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 bulan	541,417,536	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan							12 bulan		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	108,548,000						100 %	173,852,800	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	80,718,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 bulan	88,789,800	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	12 bulan							12 bulan		
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	27,830,000		SILPA,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 bulan	30,613,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	12 bulan							12 bulan		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	753,205,552						100 %	828,526,107	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	753,205,552						100 %	828,526,107	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 %	491,454,119		Dana Insentif Daerah,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	100 %	540,599,531	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan, Terpeliharanya Taman Telajakan	100 %							100 %		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 bulan	261,751,433		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 bulan	287,926,576	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan							12 bulan		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	106,084,000						100 %	116,692,400	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	106,084,000						100 %	116,692,400	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	36 kali	106,084,000		Pendapatan Asli Daerah,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Dauh Puri	36 kali	116,692,400	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan Yang Dilaksanakan	36 kali							36 kali		
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			13,065,294,919							14,155,946,314	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	12,605,957,202						100 %	13,617,946,314	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %	10,346,626,730						100 %	11,438,946,314	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	10,346,626,730		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Orang/bulan	11,438,946,314	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	353,320,652						1 paket	432,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,367,213		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	1 Paket	12,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	193,577,814		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Paket	250,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	42,760,625		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Paket	45,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	107,615,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	125,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	216,586,605						100 %	217,000,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	216,586,605		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Unit	217,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,274,823,962						100 %	1,320,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	319,204,330		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	320,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	955,619,632		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	1,000,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	414,599,253						100 %	210,000,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	322,290,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Unit	190,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	92,309,253		SILPA,		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Unit	20,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	371,212,717						100 %	448,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	359,562,717						100 %	426,000,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	32,550,220		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhumkam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	26,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	327,012,497		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Dokumen	400,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	11,650,000						100 %	22,000,000	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	11,650,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	22,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	11,250,000						100 %	15,000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	11,250,000						100 %	15,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	11,250,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 %	34,500,000						100 %	35,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 %	34,500,000						100 %	35,000,000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 Orang	34,500,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Orang	35,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan	100 %	42,375,000								100 %	40,000,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan	100 %	42,375,000								100 %	40,000,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen	42,375,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		Kecamatan Denpasar Timur		0 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN			1,912,057,651									2,144,026,184	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,543,705,846								100 %	1,554,026,184	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	174,747,452								100 %	177,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4,700,904		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		Kelurahan Kesiman			5,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			129,680,200		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		Kelurahan Kesiman			130,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			19,708,848		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		Kelurahan Kesiman			20,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20,657,500		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin		Kelurahan Kesiman			22,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,281,372,184									1,283,026,184	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			39,600,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin					40,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20,746,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin					22,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1,221,026,184		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin				0 Laporan	1,221,026,184	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87,586,210									94,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			47,097,600		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin					50,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			18,250,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin					20,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22,238,610		SILPA,		Rutin					24,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	212,689,915									430,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			212,689,915							430,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	114,699,055		Dana Insentif Daerah,		Rutin		0 Unit	320,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	97,990,860		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 Pokmas / Ormas	110,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	155,661,890							160,000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			155,661,890							160,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			155,661,890		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			160,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			1,723,531,322							1,958,886,840	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,375,338,541						100 %	1,393,886,840	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	131,600,933						100 %	138,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1,842,885		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sumerta		2,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	115,966,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sumerta	0 Paket	120,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6,628,788		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sumerta		7,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			3,743,260		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Sumerta		5,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3,420,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Sumerta		4,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,180,986,840							1,189,886,840	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	32,100,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 Laporan	41,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1,148,886,840		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 Laporan	1,148,886,840	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			62,750,768							66,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			40,950,768		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin			42,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel			1,050,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin			2,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20,750,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin			22,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	236,998,031						100 %	450,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	236,998,031						100 %	450,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	67,599,055		Dana Insentif Daerah,		Rutin	Kelurahan Sumerta	0 Unit	280,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	169,398,976		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sumerta	0 Pokmas / Ormas	170,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	111,194,750						100 %	115,000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	111,194,750						100 %	115,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	111,194,750		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Sumerta	0 Laporan	115,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			1,364,919,529							1,666,297,312	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	1,097,035,024						100 %	1,111,297,312	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100 %	93,807,712						100 %	102,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	3,385,060	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Paket	5,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	67,230,200		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Paket	70,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	7,861,452	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Paket	8,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	11,911,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Paket	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3,420,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,000,000							3,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 Unit	3,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	944,347,312						100 %	946,297,312	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	37,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Laporan	38,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	63,850,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Laporan	65,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	843,297,312	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Laporan	843,297,312	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	56,880,000						100 %	60,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	43,380,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Unit	45,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	13,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Unit	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	214,434,505						100 %	500,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	214,434,505						100 %	500,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	94,599,055	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Dana Insentif Daerah,		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Unit	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	119,835,450	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Pokmas / Ormas	200,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	53,450,000						100 %	55,000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	53,450,000						100 %	55,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	53,450,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Dangin Puri	0 Laporan	55,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			1,754,356,882							1,986,086,368	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,408,891,000						100 %	1,446,086,368	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	103,968,632						100 %	138,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2,466,060		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Penatih		3,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			72,257,250		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Penatih		73,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4,985,322		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Penatih		5,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	10,000,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Penatih	0 Paket	40,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			10,000,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Penatih		12,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4,260,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Penatih		5,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,221,142,368							1,223,086,368	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			29,400,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin			30,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			103,656,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin			105,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1,088,086,368		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 Laporan	1,088,086,368	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83,780,000							85,000,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			54,530,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin			55,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			29,250,000		SILPA,		Rutin			30,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	276,349,982							470,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			276,349,982							470,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	110,071,703		Dana Insentif Daerah,		Rutin		0 Unit	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	166,278,279		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		0 Pokmas / Ormas	170,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	69,115,900							70,000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			69,115,900							70,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			69,115,900		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		70,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			13,743,947,337							13,743,947,337	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	13,198,043,537						100 %	13,198,043,537	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	11,208,704,184						100 %	11,208,704,184	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	11,205,704,184	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	80 Orang/bulan	11,205,704,184	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	12 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100 %	278,976,552						100 %	278,976,552	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6,042,603	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	1 paket	6,042,603	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	186,883,014	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	1 Paket	186,883,014	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	69,290,925	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	1 Paket	69,290,925	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1440 Dokumen	16,760,010	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	1440 Dokumen	16,760,010	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	10,000,000						100 %	10,000,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	2 Unit	10,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,149,503,990								100 %	1,149,503,990	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	182,360,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		Kecamatan Denpasar Selatan	12 Laporan	182,360,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	108,433,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		Kecamatan Denpasar Selatan	12 Laporan	108,433,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	858,710,990	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		Kecamatan Denpasar Selatan	12 Laporan	858,710,990	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	550,858,811								100 %	550,858,811	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	88,475,806	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		Kecamatan Denpasar Selatan	1 Unit	88,475,806	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	100 %	225,183,821	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin		Kecamatan Denpasar Selatan	100 %	225,183,821	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit								14 Unit			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	97,199,184	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin		Kecamatan Denpasar Selatan	2 Unit	97,199,184	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	140,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin		Kecamatan Denpasar Selatan	50 Unit	140,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
						sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %								100 %			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	83 %	296,386,800								83 %	296,386,800	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	239,186,800								100 %	239,186,800	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	45,310,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi		Kecamatan Denpasar Selatan	1 Laporan	45,310,800	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	193,876,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	1 Dokumen	193,876,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	57,200,000						100 %	57,200,000	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	57,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	1 Laporan	57,200,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	58,491,000						100 %	58,491,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	58,491,000						100 %	58,491,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	58,491,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Selatan	12 Laporan	58,491,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100 %	132,275,000						100 %	132,275,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 %	132,275,000						100 %	132,275,000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	104,775,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	50 Orang	104,775,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	27,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	12 Dokumen	27,500,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100 %	58,751,000						100 %	58,751,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan	100 %	58,751,000						100 %	58,751,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	58,751,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	4 Dokumen	58,751,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			2,546,636,307							2,546,636,307	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	1,607,060,364						100 %	1,607,060,364	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100 %	147,457,382						100 %	147,457,382	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,332,582	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pedungan	1 Paket	3,332,582	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	120,295,228	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pedungan	1 Paket	120,295,228	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,553,172	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Pedungan	1 Paket	15,553,172	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1440 Dokumen	8,276,400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Pedungan	1440 Dokumen	8,276,400	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,297,753,141						100 %	1,297,753,141	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46,827,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pedungan	12 Laporan	46,827,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30,352,312	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pedungan	12 Laporan	30,352,312	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,220,573,829	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pedungan	12 Laporan	1,220,573,829	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	161,849,841						100 %	161,849,841	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	80,155,841	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pedungan	10 Unit	80,155,841	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1,694,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Pedungan	2 Unit	1,694,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	SILPA,		Rutin	Kelurahan Pedungan	2 Unit	30,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	50,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	SILPA,		Rutin	Kelurahan Pedungan	30 Unit	50,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	819,014,283						100 %	819,014,283	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	819,014,283						100 %	819,014,283	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,789,050	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Pedungan	5 lembaga	2,789,050	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	430,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Dana Insentif Daerah,		Rutin	Kelurahan Pedungan	2 Unit	430,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	386,225,233	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Pedungan	5 Pokmas / Ormas	386,225,233	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	120,561,660						100 %	120,561,660	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	120,561,660						100 %	120,561,660	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	120,561,660	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Pedungan	1 Laporan	120,561,660	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			2,553,674,107							2,553,674,107	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	1,663,004,192						100 %	1,663,004,192	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100 %	139,204,150						100 %	139,204,150	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,601,500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sesetan	1 Paket	2,601,500	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99,885,850	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sesetan	1 Paket	99,885,850	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,926,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Sesetan	1 Paket	24,926,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1440 Dokumen	11,790,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Sesetan	1440 Dokumen	11,790,800	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,369,423,542						100 %	1,369,423,542	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36,300,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sesetan	12 Laporan	36,300,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28,768,614	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sesetan	12 Laporan	28,768,614	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,304,354,928	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sesetan	12 Laporan	1,304,354,928	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	154,376,500						100 %	154,376,500	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	74,376,500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sesetan	10 Unit	74,376,500	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	SILPA,		Rutin	Kelurahan Sesetan	2 Unit	30,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	50,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	SILPA,		Rutin	Kelurahan Sesetan	40 Unit	50,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	784,035,355						100 %	784,035,355	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	784,035,355						100 %	784,035,355	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,549,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Sesetan	5 lembaga	2,549,800	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
						Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %							100 %		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	430,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Dana Insentif Daerah,		Rutin	Kelurahan Sesetan	2 Unit	430,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	351,485,555	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sesetan	5 Pokmas / Ormas	351,485,555	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	106,634,560						100 %	106,634,560	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	106,634,560						100 %	106,634,560	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	106,634,560	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Sesetan	1 Laporan	106,634,560	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			1,947,660,299							1,947,660,299	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	1,051,482,019						100 %	1,051,482,019	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100 %	112,540,082						100 %	112,540,082	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,452,150	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Serangan	1 Paket	3,452,150	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	78,491,202	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Serangan	10 Paket	78,491,202	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	17,221,930	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Serangan	10 Paket	17,221,930	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1440 Dokumen	13,374,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Serangan	1440 Dokumen	13,374,800	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	787,123,084						100 %	787,123,084	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46,464,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Serangan	12 Laporan	46,464,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32,627,554	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Serangan	12 Laporan	32,627,554	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	708,031,530	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Serangan	12 Laporan	708,031,530	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	151,818,853						100 %	151,818,853	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	70,124,853	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Serangan	10 Unit	70,124,853	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1,694,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Serangan	2 Unit	1,694,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	SILPA,		Rutin	Kelurahan Serangan	2 Unit	30,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	50,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	SILPA,		Rutin	Kelurahan Serangan	30 Unit	50,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	785,024,320						100 %	785,024,320	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	785,024,320						100 %	785,024,320	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	1,996,500		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Serangan	5 lembaga	1,996,500	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	412,174,337	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Dana Insentif Daerah,		Rutin	Kelurahan Serangan	2 Unit	412,174,337	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	370,853,483	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Serangan	5 Pokmas / Ormas	370,853,483	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	111,153,960						100 %	111,153,960	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	111,153,960						100 %	111,153,960	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	111,153,960	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Serangan	1 Laporan	111,153,960	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			1,984,158,203							1,984,158,203	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	1,095,561,823						100 %	1,095,561,823	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100 %	104,865,159						100 %	104,865,159	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,492,993	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Panjer	1 Paket	4,492,993	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67,097,716	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Panjer	1 Paket	67,097,716	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,866,450	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Panjer	1 Paket	20,866,450	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1440 Dokumen	12,408,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Panjer	1440 Dokumen	12,408,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	860,646,664						100 %	860,646,664	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57,750,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Panjer	12 Laporan	57,750,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28,216,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Panjer	12 Laporan	28,216,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	774,680,664	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Panjer	12 Laporan	774,680,664	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	130,050,000						100 %	130,050,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	50,050,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Panjer	10 Unit	50,050,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	SILPA,		Rutin	Kelurahan Panjer	1 Unit	30,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	50,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	SILPA,		Rutin	Kelurahan Panjer	30 Unit	50,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	779,354,220						100 %	779,354,220	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	779,354,220						100 %	779,354,220	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,255,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Panjer	5 lembaga	2,255,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	416,373,874	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Dana Insentif Daerah,		Rutin	Kelurahan Panjer	2 Unit	416,373,874	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	360,725,346	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Panjer	5 Pokmas / Ormas	360,725,346	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	109,242,160						100 %	109,242,160	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	109,242,160						100 %	109,242,160	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	109,242,160	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Panjer	1 Laporan	109,242,160	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			2,025,173,046							2,025,173,046	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	1,029,635,108						100 %	1,029,635,108	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100 %	109,346,236						100 %	109,346,236	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,606,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Renon	1 Paket	1,606,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	76,370,848	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Renon	1 Paket	76,370,848	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17,994,588	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Renon	1 Paket	17,994,588	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1440 Dokumen	13,374,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Renon	1440 Dokumen	13,374,800	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	780,607,429						100 %	780,607,429	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	67,755,600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Renon	12 Laporan	67,755,600	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43,542,400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Renon	12 Laporan	43,542,400	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	669,309,429	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Renon	1 Laporan	669,309,429	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	139,681,443						100 %	139,681,443	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	59,681,443	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Renon	10 Unit	59,681,443	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	SILPA,		Rutin	Kelurahan Renon	2 Unit	30,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	50,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	SILPA,		Rutin	Kelurahan Renon	30 Unit	50,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	860,445,778						100 %	860,445,778	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	860,445,778						100 %	860,445,778	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,904,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Renon	5 lembaga	2,904,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	410,767,503	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Dana Insentif Daerah,		Rutin	Kelurahan Renon	3 Unit	410,767,503	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	446,774,275	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Renon	5 Pokmas / Ormas	446,774,275	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	135,092,160						100 %	135,092,160	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	135,092,160						100 %	135,092,160	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	135,092,160	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Renon	1 Laporan	135,092,160	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			2,031,598,444							2,031,598,444	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	1,139,241,909						100 %	1,139,241,909	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100 %	85,249,445						100 %	85,249,445	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,430,327	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sanur	1 Paket	3,430,327	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54,175,328	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sanur	1 Paket	54,175,328	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,268,990	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Sanur	1 Paket	15,268,990	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1440 Dokumen	12,374,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Sanur	1440 Dokumen	12,374,800	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	918,247,850						100 %	918,247,850	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59,653,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sanur	12 Laporan	59,653,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28,060,120	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sanur	12 Laporan	28,060,120	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	830,534,730	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sanur	12 Laporan	830,534,730	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	135,744,614						100 %	135,744,614	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	49,507,614	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sanur	10 Unit	49,507,614	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	6,237,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Sanur	3 Unit	6,237,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	SILPA,		Rutin	Kelurahan Sanur	2 Unit	30,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	50,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	SILPA,		Rutin	Kelurahan Sanur	30 Unit	50,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	778,967,375						100 %	778,967,375	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	778,967,375						100 %	778,967,375	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	1,311,640		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kelurahan Sanur	5 lembaga	1,311,640	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
						Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %							100 %		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	427,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Dana Insentif Daerah,		Rutin	Kelurahan Sanur	3 Unit	427,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	350,655,735	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kelurahan Sanur	5 Pokmas / Ormas	350,655,735	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	113,389,160						100 %	113,389,160	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	113,389,160						100 %	113,389,160	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	113,389,160	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Sanur	1 Laporan	113,389,160	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
					UNSUR KEWILAYAHAN											
					KECAMATAN			11,115,731,172							14,617,655,281	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	10,541,163,172						100 %	13,557,905,081	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8,648,763,074						100 %	10,746,905,081	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	8,648,763,074	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	64 Orang/bulan	10,746,905,081	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun							1 tahun		
						Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %							100 %		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	416,684,636						100 %	431,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,422,340	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	354,348,600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	28,560,696	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	70,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,753,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	35,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6,600,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	11,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100 %							100 %		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,210,982,222						100 %	1,830,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	186,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	200,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
						Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %							100 %		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,024,982,222	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	1,500,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	264,733,240						100 %	550,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	228,483,240	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %							100 %		
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	36,250,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	SILPA,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %							100 %		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	83 %	371,286,000						83 %	864,308,200	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	324,361,000						100 %	765,308,200	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	223,211,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	15,358,200	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %							100 %		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	101,150,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	749,950,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %							100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diilmpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diilmpahkan kepada Camat	100 %	46,925,000						100 %	99,000,000	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	46,925,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	99,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100 %							100 %		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	12,840,000						100 %	100,000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	12,840,000						100 %	100,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	12,840,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	100,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %							100 %		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100 %	186,792,000						100 %	82,957,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	186,792,000						100 %	82,957,000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	37,302,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	20 Orang	60,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 %							100 %		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	149,490,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	3 Dokumen	22,957,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %							100 %		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100 %	3,650,000						100 %	12,485,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	3,650,000						100 %	12,485,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3,650,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	12,485,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %							100 %		
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			2,031,049,678							2,218,000,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	1,406,799,234						100 %	1,416,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	301,144,478						100 %	201,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,058,138	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	266,848,800	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	130,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14,167,540	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	35,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,330,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4,740,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %							100 %		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	988,464,756						100 %	915,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	95,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %							100 %		
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	91,900,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	70,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	806,564,756	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	750,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	117,190,000						100 %	300,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85,740,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	5 Unit	150,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %							100 %		
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31,450,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	SILPA,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %							100 %		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	443,823,244						100 %	602,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	443,823,244						100 %	602,000,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	2,224,600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	2,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	208,974,200	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Dana Insentif Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %							100 %		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	232,624,444	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %							100 %		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	180,427,200						100 %	200,000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	180,427,200						100 %	200,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	180,427,200	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	200,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %							100 %		
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			1,834,857,596							2,218,000,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	1,092,905,274						100 %	1,416,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	19,087,344						100 %	201,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,995,944	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,851,400	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6,240,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %							100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	922,994,594						100 %	915,000,000		
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	95,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %							100 %			
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	281,021,202	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	70,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %							100 %			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	610,773,392	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	750,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %							100 %			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	150,823,336						100 %	300,000,000		
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	131,023,336	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	2 Unit	150,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %							100 %			
	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19,800,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	SILPA,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %							100 %			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	551,352,572						100 %	602,000,000		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	551,352,572					100 %	602,000,000		
	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	446,596,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Dana Insentif Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %							100 %			
	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	104,756,572	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %							100 %			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	190,599,750						100 %	200,000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	190,599,750						100 %	200,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	190,599,750	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	200,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %							100 %		
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			2,931,903,831							2,218,000,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	2,373,508,547						100 %	1,416,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1,041,900,373						100 %	201,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,987,588	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	875,283,849	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	130,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	119,146,936	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	35,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,882,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6,600,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %							100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,194,911,742						100 %	915,000,000		
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	49,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	95,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
							Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %							100 %		
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20,413,360	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	70,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
							Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %							100 %		
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,125,298,382	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	750,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
							Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %							100 %		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	136,696,432						100 %	300,000,000		
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	99,946,432	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	5 Unit	150,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
							Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %							100 %		
	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	36,750,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
							Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %							100 %		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	438,197,564						100 %	602,000,000		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	438,197,564					100 %	602,000,000		
	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	2,163,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	2,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	210,848,400	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Dana Insentif Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
							Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %							100 %		
	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	225,186,164	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
						Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %							100 %		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	120,197,720						100 %	200,000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	120,197,720						100 %	200,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	120,197,720	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	200,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Persentase Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %							100 %		
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			12,627,748,666							18,168,000,878	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	7,013,667,928						100 %	8,153,297,967	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5,200,909,170						100 %	5,752,163,545	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	5,191,909,170		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,		Rutin	ASN pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	31 Orang/bulan	5,742,263,545	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 %							100 %		
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	9,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	ASN pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Dokumen	9,900,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Terbayarnya honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	100 %							100 %		
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 %	156,844,998						100 %	197,859,498	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4,723,560		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Sekretariat pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Paket	5,195,916	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Tersedianya instalansi listrik/penerangan kantor yang memadai	100 %							100 %		
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	83,473,750		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Sekretariat pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Paket	91,821,125	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Terperuhnya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %							100 %		
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	12,924,688		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Sekretariat pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Paket	14,217,157	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Tersedianya peralatan rumah tangga	100 %							100 %		
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	13,713,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Sekretariat pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Paket	15,084,300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100 %							100 %		
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	11,520,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Sekretariat pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Dokumen	12,672,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %							100 %		
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	3,600,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Sekretariat pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Laporan	6,960,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Tersedianya makanan dan minuman untuk kunjungan tamu	100 %							100 %		
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	22,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Sekretariat pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	1 Laporan	46,530,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %							100 %		
8	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	4,890,000		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Sekretariat pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Dokumen	5,379,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Tertatanya arsip pada SKPD	100 %							100 %		
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 %	105,300,000						100 %	117,455,848	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	105,300,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Barang Modal	0 Unit	107,830,848	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100 %							100 %		
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,286,343,760						100 %	1,753,128,476	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	19,663,400		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Sekretariat pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Laporan	21,629,740	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Terperuhnya alat/bahan kegiatan kantor	100 %							100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	146,000,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Sekretariat pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Laporan	160,600,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %							100 %		
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1,120,680,360		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Sekretariat pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Laporan	1,570,898,736	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %							100 %		
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	264,270,000						100 %	236,280,000	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	194,770,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Unit	115,830,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 %							100 %		
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	49,500,000		Pendapatan Asli Daerah,		Rutin	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Unit	54,450,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %							100 %		
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,000,000		SILPA,		Rutin	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	1 Unit	55,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %							100 %		
8	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	10,000,000		SILPA,		Rutin	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Unit	11,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana gedung kantor	100 %							100 %		
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	2,136,862,440						100 %	5,161,489,124	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 %	2,136,862,440						100 %	5,161,489,124	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1060 Orang	394,880,250		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1060 Orang	434,368,275	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah siswa SMA/SMK dan SMP dalam pengembangan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	1060 orang							1060 orang		
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1060 Orang	1,741,982,190		SILPA,		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1060 Orang	4,653,854,909	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah pelaksanaan HUT Kota Denpasar dan HUT Kemerdekaan RI	2 kali							2 kali		
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	75 %	1,614,669,333						75 %	1,874,097,280	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 %	1,614,669,333						100 %	1,874,097,280	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	70 Orang	1,614,669,333		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Partai Politik dan Masyarakat Kota Denpasar	70 Orang	1,776,382,080	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah partai penerima bantuan keuangan Parpol di Kota Denpasar	7 parpol							7 parpol		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	68,00 %	400,413,750						68,00 %	570,805,125	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	400,413,750						100 %	570,805,125	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	400,413,750		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kota Denpasar	1 Laporan	570,805,125	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah laporan pelaksanaan edukasi kepada masyarakat dan laporan pelaksanaan tugas FKUB Kota Denpasar (sesuai PBM Agama dan Mendaori No.9 dan 8 Tahun 2006)	1 laporan							1 laporan		
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100 %	40,819,415						100 %	120,223,857	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	100 %	40,819,415						100 %	120,223,857	
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	40,819,415		Pendapatan Bagi Hasil,		Rutin	Stakeholder terkait Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Laporan	120,223,857	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah laporan tercapainya fasilitasi penerapan Perda pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	1 laporan							1 laporan		
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial	70 %	1,421,315,800						70 %	2,288,087,525	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	1,421,315,800						100 %	2,288,087,525	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	58,002,500		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar dan WNA yang menetap di Kota Denpasar	35 Orang	288,807,750	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA guna mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial	24 kali							24 kali		
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Forum dan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Denpasar guna mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial	4 laporan	205,363,300		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar dan WNA yang menetap di Kota Denpasar	4 laporan	466,293,630	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang							30 Orang		
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,157,950,000		Pendapatan Bagi Hasil,	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar dan WNA yang menetap di Kota Denpasar	1 Dokumen	1,157,950,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL								2,307,271,740,290							4,247,313,475,284	

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka ditetapkan target pada Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Meta Data	Satuan	2023
1	2	3	4	5
1	Indeks Pendidikan	BPS Kota Denpasar	-	0,776
2	Angka Harapan Hidup	BPS Kota Denpasar	tahun	75,46
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan	BPS Kota Denpasar	rupiah	2.422.121
4	Angka Kemiskinan	BPS Kota Denpasar	%	2,01%
5	Persentase penegakan PERDA	Dihitung dengan formula sebagaimana tercantum pada PMDN 86/2017, yaitu : (Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA / Jumlah Pelanggaran PERDA) x 100%	%	89,34%
6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	BPS Provinsi Bali	-	105,63
7	Indeks Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	-	93,7
8	Indeks Resiko Bencana	BPBD Provinsi Bali	-	98,72
9	Rata-Rata SKM	Kementerian PAN dan RB	-	88,16
10	Predikat SAKIP	Kementerian PAN dan RB	-	BB (76,45)
11	Opini BPK	BPK	-	WTP
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS Kota Denpasar	%	4,18%
13	Indeks SPBE	Kementerian PAN dan RB	-	3,6
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Kementerian Dalam Negeri	-	Sangat Inovatif
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Dihitung dengan formula : (50% x ((50% x ((50% x Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap) + (50% x Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik))) + (30% x	%	60,47%

No.	Indikator Kinerja Utama	Meta Data	Satuan	2023
1	2	3	4	5
		Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan) + (20% x Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal))) + (20% x ((10% x Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah) + (10% x Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum))) + (10% x Persentase Panjang jaringan irigasi berfungsi normal)		
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	61,95
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Dihitung dengan menentukan skor 23 indikator dari 7 dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan, kemudian menghitung Capaian Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar dengan formula (Total Skor Target Kota Denpasar Tahun n / Total Skor Kota Denpasar Tahun 2018) x IPK Bali Tahun 2018	-	68,54

6.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah seperti disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
1	2	3	4
	INDIKATOR MAKRO		
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,16%
2	Laju Inflasi	%	2,25%
3	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	97,99%
4	Persentase Penduduk Miskin	%	2,01%
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		84,35
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,18%
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
7	PDRB Per Kapita	Juta/kapita	74.123,05
8	Indeks Gini		0.29
9	Angka Melek Huruf		100
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,60
11	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,46
12	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0
13	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	4%
14	Prevalensi stunting (pendek/ sangat pendek) anak ≤2 tahun	%	10%
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,0%
16	Rasio penduduk yang bekerja	%	93,8%
17	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	96,98
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	40,12%
19	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	97
20	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	6,54%
21	Produksi sektor pertanian	Ton	Padi 21.936 Sayur Hijau 3.415 Bayam 543 Kangkung 7.064 Semangka 5.224
22	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB)	%	24%
23	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9,89%
24	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	6,32%
25	Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	%	3,90
	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
26	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan	Rupiah/ kapita	21.101.776
27	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	60,54%
28	Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB	%	0,0003%
29	Rasio ketergantungan	%	37,46%
	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR		
	PENDIDIKAN		
30	Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)	%	73,18%
	Angka partisipasi kasar		
31	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	100%
32	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	100%
	Angka pendidikan yang ditamatkan		
33	SD/MI/ Paket A	%	100%
34	SMP/MTs/ Paket B	%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
1	2	3	4
	Angka Partisipasi Murni		
35	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	95,64%
36	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88,02%
	Angka Partisipasi Sekolah		
37	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100%
38	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B	%	101,60%
	Angka Putus Sekolah		
39	Angka putus sekolah SD/MI/sekota	%	6%
40	Angka putus sekolah SMP/MTs sekota	%	3%
41	Angka putus sekolah SMA/SMK/MA/Paket C sekota	%	14%
	Angka Kelulusan		
42	Angka kelulusan SD/ MI/ Paket A	%	100%
43	Angka kelulusan SMP/ MTs/ Paket B	%	100%
	Angka Melanjutkan (AM)		
44	Angka Melanjutkan dari SD/ sederajat ke SMP/ sederajat	%	100%
45	Angka melanjutkan dari SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat	%	100%
	Fasilitas Pendidikan		
46	Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	97,76%
47	Sekolah pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	97,78%
48	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SD/MI	%	0,30%
49	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SMP/MTs	%	0,42%
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		
50	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SD/MI		1:15
51	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SMP/MTs		1:15
52	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar SD/MI		1:15
53	Rasio guru/murid per kelas rata-rata dasar SMP/MTs		1:15
54	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100%
55	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	100%
56	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100%
	KESEHATAN		
57	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	1,4
58	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1000	999,6
59	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	1,4
60	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	1,4
61	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100,000 kelahiran hidup	56
62	Rasio Posyandu per satuan Balita	Per 100 Balita	21,76
63	Rasio Puskesmas	per 100,000 penduduk	1,14
64	Rasio Puskesmas Pembantu	per 100,000 penduduk	2,6

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
1	2	3	4
65	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 100,000 penduduk	2,18
66	Rasio dokter umum	per 100,000 penduduk	42,04
67	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	per 100,000 penduduk	561
68	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	90%
69	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan	%	100%
70	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100%
71	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100%
72	Persentase bayi yang mendapat imunisasi campak	%	100%
73	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	%	96%
74	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk < 15 tahun	>= 2
75	Cakupan balita pneumonia ditangani	%	100%
76	Cakupan pengobatan semua kasus TBC (Case Detection Rate/CDR)	%	55%
77	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (Success rate)	%	90%
78	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100%
79	Incidence rate (IR) DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	≤ 175
80	Penderita diare yang ditangani	%	100%
81	Angka kejadian Malaria	per 1.000 penduduk	1
82	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,18%
83	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi	%	77,50%
84	Cakupan puskesmas	%	275%
85	Cakupan puskesmas pembantu	%	58,14%
86	Cakupan kunjungan ibu hamil k4	%	100%
87	Cakupan pelayanan ibu nifas	%	100%
88	Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani	%	85%
89	Pelayanan kesehatan anak balita	%	100%
90	Pelayanan Kesehatan Usia pendidikan dasar	%	100%
91	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100%
92	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100%
93	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	100%
94	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	%	100%
95	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100%
96	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	%	100%
97	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	%	100%
98	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100%
99	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100%
100	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100%
101	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100%
102	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%	100%
103	Persentase Kepersertaan BPJS	%	100%
104	Persentase balita stunting	%	10%
105	Case Fatality Rate penderita DBD	%	<1%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
1	2	3	4
106	Persentase Rumah tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	%	80%
107	Persentase TPM memenuhi syarat	%	54%
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
108	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	63,76%
109	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Jiwa/km	1762.2
110	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	62,36%
111	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	17,48%
112	Persentase rumah tinggal bersanitasi IPAL DSDP dan Komunal	%	7,65%
113	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	99,84%
114	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	99,63%
115	Rasio jaringan irigasi	%	15,20%
116	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	%	57,68%
117	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	100%
118	Persentase kejadian genangan (Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun)	%	91,98%
	PENATAAN RUANG		
119	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	95,20%
120	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	14,50%
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
123	Rasio rumah layak huni	%	26%
124	Rasio permukiman layak huni	%	99,66%
125	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	94,50%
126	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	83,50%
127	Persentase pemukiman yang tertata	%	99,66%
128	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0.159%
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
129	Rasio Satlinmas	%	3,20%
130	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	85,78%
131	tingkat waktu tanggap (response time rate)	menit	15
132	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%
133	Persentase Penegakan PERDA dan Perwali	%	89,34%
134	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	%	37,21%
135	Persentase pelayanan penanggulangan bencana	%	100%
136	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	100%
137	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	menit	15

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
1	2	3	4
138	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%
139	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%
140	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	%	75%
141	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	%	68%
142	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	%	100%
143	Persentase penurunan konflik sosial	%	70%
	SOSIAL		
144	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100%
145	Persentase PMKS yang tertangani	%	100%
146	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100%
147	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100%
148	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100%
149	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100%
150	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100%
151	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100%
152	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100%
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR		
	TENAGA KERJA		
153	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	74%
154	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	20%
155	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	25%
156	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	25%
157	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	40%
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
158	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	53%
159	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	8,9%
160	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		47%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
1	2	3	4
161	Rasio KDRT	%	0,05%
162	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	%	0,002%
163	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	70%
164	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100%
165	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100%
166	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100%
167	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	98%
168	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100%
169	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	52,94%
170	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	28,05%
171	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)		Utama
172	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		97%
173	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		62%
	PANGAN		
174	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa	135,82
175	Ketersediaan Energi	Kkal/kapita/ hari	3958
176	Ketersediaan Protein	Gr/kapita/ hari	173,3
177	Persentase sampel pangan yang aman dikonsumsi	%	100%
178	Skor Pola Pangan Harapan		97
	PERTANAHAN		
179	Fasilitasi permasalahan pertanahan	%	100%
180	Jumlah sertifikat fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah	12
	LINGKUNGAN HIDUP		
181	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	%	40%
182	Dokumen KLHS untuk K/R/P tingkat kota	Dokumen	1
183	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	-	50,72
184	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	-	85,8
185	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	-	37,11
186	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lingkungan Hidup	-	61,95
187	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Pesetujuan Lingkungan dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	82%
188	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan	Buah	5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
1	2	3	4
189	Tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait Persetujuan Lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota, lokasi usaha, dan dampaknya di kota.	%	100%
190	Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangi	%	28%
191	Persentase cakupan area pelayanan (hasil penyapuan di ruas jalan, sampah pelanggaran dan sampah dari TPS ke TPA)	%	100%
192	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	67%
193	Persentase Volume Sampah yang dikelola	%	95%
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
194	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	%	100%
195	Persentase Penerbitan KTP-EI	%	100%
196	Persentase penduduk yang meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	%	70%
197	Persentase penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	%	90%
198	Persentase penerbitan akta perkawinan	%	67%
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN		
199	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	100%
200	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	1
201	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	1
202	Presentase PKK aktif	%	100%
203	Presentase Posyandu Aktif	%	100%
204	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	6%
205	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,94
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
206	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,95%
207	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,1%
208	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100%
209	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	72%
210	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Peraturan	Ada
211	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Unit	Semua
212	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	72
213	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	2
214	Rasio Akseptor KB	%	51%
215	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	51%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
1	2	3	4
216	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun	18/1000
217	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0
218	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,73%
219	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	50,70%
220	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	32%
221	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	73%
222	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	79%
223	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	68,50%
224	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25%
225	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	650
226	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100
227	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	56
228	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Kampung (PPKBD) setiap kampung/kelurahan	%	100
229	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	43,7
230	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100
231	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kampung	%	90%
232	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100%
233	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	100%
234	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	23
235	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	16%
	PERHUBUNGAN		
236	Peningkatan Load Faktor Angkutan	Persentase (%)	33%
237	Pemenuhan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dan Angkutan Laut	Persentase (%)	62%
238	Persentase sarana angkutan yang berkeselamatan	Persentase (%)	57%
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
1	2	3	4
239	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah	12 KIM
240	Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%
241	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	%	85%
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
242	Persentase Koperasi Aktif	%	87%
243	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	99,10%
	PENANAMAN MODAL		
244	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	Investor	6572
245	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	5.999.486
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
246	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	92,05%
247	Persentase wirausaha muda	%	95%
248	Cakupan pembinaan olahraga	%	95,35%
249	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	95%
250	Cakupan pembinaan atlet muda	%	20%
251	Jumlah atlet berprestasi	Jiwa	500
252	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	35
	STATISTIK		
253	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%
	PERSANDIAN		
254	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	%	30%
	KEBUDAYAAN		
255	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Acara	15
256	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	269
257	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	Unit	330
258	Jumlah Desa Adat Yang Aktif	Desa	35
259	Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar	Kegiatan	15
260	Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif	Lembaga	42
	PERPUSTAKAAN		
274	Persentase Pemustaka Pertahun	%	3,05%
275	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	51,97%
276	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,0070%
277	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	Jiwa	17.766
278	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	19.100
	KEARSIPAN		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
1	2	3	4
279	Nilai rata-rata evaluasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal yang mengelola arsip secara baku	%	73,11%
280	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kali	2
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN PARIWISATA			
281	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	246.750 (Asing 26.250, Domestik 220.500)
282	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	Asing (2,5 hari), Domestik (2,3 hari)
283	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	9%
PERTANIAN			
284	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	6,54%
285	Produktivitas Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Kwintal/Hektar	71,5
286	Persentase Peningkatan/Penguakuan Kelas Kelompok Tani	%	10%
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
287	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	130,1
288	Rasio ketersediaan daya listrik	%	107,1
PERDAGANGAN			
289	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Juta rupiah	2.337.086,67
KELAUTAN DAN PERIKANAN			
290	Produksi perikanan (Tangkap)	Ton	1.460
291	Produksi perikanan (Budidaya)	Ton	335
292	Angka Konsumsi ikan	Kg/Kap/Th	37,5
293	Cakupan bina kelompok bina kelompok nelayan	Kelompok	26
294	Cakupan bantuan kelompok nelayan	Kelompok	5
295	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Perikanan	Kelompok	55
296	Cakupan bantuan kelompok Pembudidaya Perikanan	Kelompok	5
297	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	1.420
298	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	1.420
PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
299	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	(Ada/Tidak Ada)	Ada
300	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	(Ada/Tidak Ada)	Ada
301	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	(Ada/Tidak Ada)	Ada
302	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	100%
303	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
1	2	3	4
	KEUANGAN		
304	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		88,47
305	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah		96,15
306	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP
307	Nilai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)	Rupiah	108.854.471.166
308	Persentase SILPA terhadap APBD	%	5,11%
309	Jumlah Penerimaan PAD	Rupiah	855.153.180.000
	Target Pendapatan Daerah		2.131.356.228.371
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
310	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	JP	20
311	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	30%
312	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	100%
313	Persentase keterisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	%	100%
314	Persentase keterisian jabatan administrasi pada instansi pemerintah	%	100%
315	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jiwa	2986
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
316	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	75%
317	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kelitbangan	%	70%
318	Persentase fasilitasi dalam penetapan inovasi daerah	%	100%
319	Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan	%	100%
	PENGAWASAN		
320	Persentase tindak lanjut temuan	%	100%
321	Jumlah pelanggaran pegawai	jiwa	0
322	Jumlah temuan BPK	Kasus	25
	SEKRETARIAT DEWAN		
323	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	%	86%
324	Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	%	100%

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 serta KUA dan PPAS Kota Denpasar Tahun 2023.

RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 mengangkat tema pembangunan "Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Denpasar Maju", dengan 5 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Sosial dan Ketenagakerjaan
3. Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan
4. Infrastruktur dan Keamanan
5. Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2023 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita-cita Pembangunan Denpasar dapat tercapai

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

